

Dr. M. Rahmawan Afifin, S.E.,M.Si.



SISTEM FISKAL DAN MONETAR

Menurut Konvensional dan Islam



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E.,M.Si.



SISTEM FISKAL DAN MONETAR

Menurut Konvensional dan Islam



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta**

SISTEM FISKAL DAN MONETAR Menurut Konvensional dan Islam

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E.,M.Si.© Penulis 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh buku ini Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

SISTEM FISKAL DAN MONETAR Menurut Konvensional dan Islam/
M. Rahmawan Arifin—cet.1.—Yogyakarta: Gerbang Media, 2021
viii + 370 hal. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6666-62-3

Cetakan 1 Agustus 2021

Penerbit:

CV Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI)

Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

KATA PENGANTAR

Manusia hidup didunia tidak akan pernah lepas dan kebutuhan hidup Mereka selalu menjadikan cara tukar menukar selain mencari pemenuhan kebutuhan. Mereka mencari barang yang mereka butuhkan dengan menukar barang yang tidak di butuh-kan tetapi barang tersebut di butuhkan oleh orang lain (Barter) memang cara ini sangat sulit karena tidak semua orang mau me-nunaikan barang yang mereka miliki dengan barang yang kita butuhkan.

Orang selalu mencari cara untuk mempermudah selain kegiatan tukar menukar dari zaman ke zaman yang semakin maju. Akhirnya Manusia mencari cara untuk mempermudah selain perdagangan atau perekonomian. Karena pertukaran secara Barter menemui banyak masalah-masalah manusia menciptakan suatu alat tukar yang dapat dipercayai oleh umum yang tujuan dan semua ini adalah untuk mempermudah tukar menukar.

Sehingga munculah Uang yang mempunyai nilai sangat berarti selain kehidupan manusia. Uang memiliki nilai kepercayaan yang tinggi dan manusia selain memenuhi kebutuhan. Dengan Uang manusia dapat rmemenuhi kebutuhan bahkan Manusia bisa mendapatkan suatu yang mereka inginkan dengan uang Begitu pentingnya uang bagi manusia sehingga banyak cara yang digunakan oleh manusia selain mendapatkan Uang.

Manusia bekerja dengan slasan untuk mendapatkan Uang Nilai dan uang iu sendiri sangatlah penting karena Uang memiliki fungsi yang sangat tinggi bagi manusia Dengan Uang

Manusia mudah melakukan sesuatu Orang selalu menghitung kekayaan yang dimiliki dengan Uang. Jika kita lihat bentuk Uang itu sendiri hanyalah sebuah kertas ataupun logam tapi disini bukan bentuk yang dilihat oleh orang tetapi nilai yang dikandung dan kertas ataupun logam itu dan manfaatnya

Peranan Uang sendiri sangat penting selain perokonomian dapat dikatakan uang adalah motor penggerak perekonomian. Uang bukanlah barang seperti emas atau kertas jadi devinisi uang tidaklah dapat secara rasional diberikan dengan istilah barang suatu devinisi tentang uang haruslah digambarkan degan fungsi dari uang itu.

Dunia sebagaimana yang kita kenal tidak dapat berlangsung tanpa uang betul-betul akan macet walaupun uang itu bukan faktor produksi seperti tanah tenaga kerja dan modal namun itu merupakan syarat rmutlak bagi metode-metode produksi modem. Adam sinith mencatat uang sebagai salah satu dan empat macam modal yang beredar yang disebut sebagai “roda besar peredaran” Pokoknya tidak tidak ada pengganti yang sepadan bagi uang dan kita pun tidak dapat berbuat tanpa itu.

Penulis 2021

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
DAFTAR ISI.....	v
1 TEORI UANG KONVENSIONAL.....	1
A. Sejarah Uang.....	1
B. Konsep Uang	9
C. Fungsi Uang	14
D. Nilai Waktu Uang.....	16
E. Penawaran dan Perinintan	26
F. Kesimpulan.....	32
G. Daftar Pustaka.....	33
H. Lampiran.....	34
2. TEORI MONETER KONVENSIONAL	35
A. Pendahuluan	35
B. Permintaan Akan Uang Selain Konvensional	36
C. Pengertian Dasar Teori Moneter	55
D. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Moneter	57
E. Instrumen Kebijakan Moneter	63
F. Inimplementasi Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter Selain Perekonomian Indonesia	75
G. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	86
H. Daftar Pustaka	91
3. TEORI KEBIJAKAN FISKAL.....	95

A.	Pengertian Dasar Teori Fiskal.....	93
B.	Pengertian Fungal dan Tujuan Kebijakan Fiskal.....	96
C.	Instrumen Kebuakan Fiskal	96
D.	Keseimbangan Pasar Barang dan Jasa.....	106
E.	Implementasi Kebuakan Fiskal di Indonesia	122
F.	Kebuakan Fiskal.....	137
G.	Daftar Pustaka.....	150
4.	TEORI UANG SELAIN ISLAM.....	151
A.	Pendahuluan	151
B.	Konsep Uang.....	152
C.	Fungsi dan Tujuan Uang	155
D.	Nilai Waktu Uang dalam Islam.....	160
E.	Nilai Tukar Uang dalam Islam	164
F.	Inflasi dalam Perspektif Islam	168
G.	Uang Selain Perspektif Pemikiran Islam.....	180
H.	Teori Permintaan dan Penawaran Uang dalam Islam	192
I.	Fungsi dan Kegunaan Uang di Zaman Rasul Saw ...	198
J.	Daftar Pustaka.....	202
5.	KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM.....	203
A.	Pendahuluan.....	203
B.	Teori Kebijakan Moneter dalam Islam	205
C.	Teori Permintaan Uang dalam Islam.....	236
D.	Kebijakan Moneter di Zaman Rasulullah	243
E.	Penutup	274
F.	Daftar Pustaka.....	275
6.	KEBIJAKAN FISKAL ISLAM.....	277
A.	Pendahuluan	277
B.	Kebijakan Fiskal Islam	280
C.	Fungsi dan Kebuakan Fiskal dalam Islam	286
D.	Pasar Barang dan Jasa dalam Islam	301

E. Peran Pemerintah dalam Mendorong Keseimbangan Pasar	308
F. Instrument Kebijakan Fiskal Islam	317
G. Struktur APBN	321
H. Anggaran Pendapatan	324
I. Daftar Pustaka.....	332
7. KESEIMBANGAN UMUM PASAR UANG DAN PASAR BARANG.....	333
A. Pendahuluan	333
B. Keseimbangan Pasar	334
C. Keseimbangan Pasar Barang.....	340
D. Keseimbangan di Pasar Uang.....	344
E. Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang	350
F. Kesimpulan.....	361
G. Daftar Pustaka.....	361

1

TEORI UANG KONVENSIONAL

A. SEJARAH UANG

1. Uang Selain Sejarah Yunani

Ketika manusia mulai menyadari bahwa kebutuhan hidup yang mereka memperoleh semakin banyak dan semuanya tidak akan mampu diproduksi, maka mulailah era perdagangan selain kegiatan Ekonomi. Mula-mula perdagangan dilakukan dengan sistem barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Kisah komik populer Asterix dan Obelix memberikan contoh jelas mengenai perekonomian barter.

Di desa Gbalia. Obelix adalah seniman penghasil batu Menhir yang merupakan perhiasan rumah. Sementara Asterix pemburu babi hutan yang menjadi makanan kegemaran utama Obelix. Ketika Obelix ingin mengkonsumsi daging babi, maka ia menukarkan Menhirnya pada Asterix namun ada satu saat di mana Menhir Obelix sudah sedemikian banyak menghias rumah Asterix sehingga dia tidak mau lagi menukarkan babi yang dimilikinya dengan batu tersebut. Asterix menghendaki obat, Panotainix. tabib yang memproduksi obat pada saat yang sama tidak membutuhkan babi melainkan menginginkan ikan sebagai pengganti obat sementara si nelayan justru menghendaki sayuran dan seterusnya.

Demikian perekonomian barter berjalan. Seiring dengan berkembangnya waktu barter menjadi tidak efisien lagi dengan munculnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. *Double Concidence of Wants*. Dua atau lebih keinginan yang saling berkesesuaian Sebagai contoh di atas Obelix, Asterix dan tokoh yang lain harus mampu mencari kesesuaian ke-

butuhan antara orang yang satu dengan yang lain Karena keinginan setiap manusia berbeda-beda dan sangat tidak terbatas maka akan semakin sulit untuk melakukan kegiatan perekonomian barter.

2. Kesulitan selain penentuan harga. Karena tidak ada ukuran yang tepat mengenai nilai suatu orang maka akan sangat sulit untuk menentukan berapa buah batu menhir yang harus ditukarkan untuk mendapatkan seekor babi di sisi lain sangat tidak layak manakala seekor babi hanya ditukarkan dengan seekor ikan.
3. Membatasi pilihan pembeli. Seorang pembeli akan terikat pada syarat yang ditentukan oleh pihak lain Misalnya seseorang ingin menukar sekarung beras yang dimilikinya orang yang membutuhkan beras hanyalah mempunyai seekor kambing yang akan ditukarkan dengan 2 kurung beras. Pada kondisi seperti ini maka orang tersebut dihadapkan pada pilihan apakah dia terpaksa menukarkan 2 kantung beras dengan seekor kambing atau tidak menukarkan berasnya sama sekaili karena tidak ada orang lain yang menginginkannya.
4. Sukar menyimpan kekayaannya. Karena tidak adanya uang maka kekayaan yang disinipkan juga berupa barang yang mungkin memakan tempat yang cukup besar tidak lain dan tingkat keamanannya juga tidak terjamin.

Karena masalah-masalah tersebut di atas maka sistem perdagangan dengan cara barter mulai ditinggalkan orang menciptakan suatu alat tukar yang dipercayai secara umum untuk tujuan melancarkan kegiatan tukar-menukar Berdasarkan uraian dan maksud di atas, maka uang bisa didefinisikan sebagai berikut: Benda-benda yang *disetujui/ diterima* oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk *menukar / perdagangan*. Untuk dapat ditentma secara umum oleh masyarakat maka uang haruslah merupakan benda-benda yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa.
3. Mudah disinipkan tanpa mengurangi nilainya.
4. Tahan lama.
5. Jumlahnya tidak terbatas (tidak berlebih-lebihan).
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Perekonomian pada jaman ini menggunakan Uang komoditi jenis benda yang mewakili keenam syarat tersebut adalah emas dan perak sehingga emas dan perak sudah sejak lama digunakan sebagai alat perantara dalam kegiatan perdagangan. Beberapa alasan mengapa emas dan perak yang digunakan sebagai uang adalah:

1. Banyak orang yang menyukai benda tersebut sebagai perhiasan
2. Emas dan perak selalu mempunyai mutu yang sama
3. Tidak mudah rusak. tetapi bisa dengan mudah dibagi selain satuan-satuan kecil manakala diperlukan
4. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan biaya dan usaha
5. Nilai emas dan perak sangat stabil karena mutu yang tidak berubah selain jangka panjang

Pada Zaman yang semakin berkembang ini emas dan perak tidak mudah dibawa dan penyimpanannya sangat tidak praktis, selanjutnya munculah era uang kertas dan bahkan era sekarang muncul uang plastik (kartu debit dan kartu kredit).

2. Definisi Uang

Definisi uang bisa dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Definisi menurut fungsinya (*Money is What Money Does*), yang dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu:

a. *Medium of Change*

Sebagai alat pertukaran atau bertransaksi atau bisa disebut dengan M1 yaitu keseluruhan mata uang baik kertas maupun logam yang beredar (*currency*) atau disebut sebagai Uang Cartal ditambah deposito Penerimaan *traveler's check, deposito* dan cek yang dapat diuangkan.

Fungsi uang sebagai alat tukar ini sebenarnya memisahkan fungsi yang berkalan dengan keputusan membeli dengan keputusan menjual Uang sebagai alat tukar menukar dapat menghilangkan kcsamaan keinginan antara pembeli dan penjual sebelum terjadinya pertukaran Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar menukar barang dengan barang (barter). Dengan adanya uang maka tidak akan terjadi kesamaan keinginan untuk melakukan pertukaran Dengan demikian proses pertukaran berubah Barang diukur dengan uang atau dengan uang dapat membeli barang lain Fungsi uang sebagai alat penukar sangat memegang peranan penting selain setiap perekonomian Dimanapun juga tanpa adanya sesuatu benda yang berfungsi sebagai alat penukar tidak mungkin kiranya tercapainya tingkat perekonomian seperti sekarang ini tanpa adanya uang sebagai alat penukar maka konsumen pada umumnya akan dipersulit selain kehidupan sehari-hari untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Demikian juga halnya dengan produsen seperti pegawai-pegawai, tukang-tukang, dokter, advokat dan lainnya akan mengalami kesulitan selain melakukan kegiatan-kegiatan bilainana tidak ada sesuatu benda yang diterima umum sebagai alat penukar. Adanya uang yang mempunyai fungsi demikian menyebabkan para produsen tersebut dapat menerinia inibalan dari kontra prestasi tenaga atau pikiran yang diberikan. Adanya uang sebagai alat penukar mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat Dimanapun berada. Uang

sebagai alat penukar atau alat pembayaran mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul atau yang terjadi selain pertukaran barang dengan barang.

b. *Standar of value*

Sebagai alat untuk menghitung kekayaan dan pendapatan disebut M3 terdiri atas M2 ditambah dengan deposito berjangka panjang dan neraca reksadana pasar uang Institusi.

Adanya satuan uang nilai barang dapat dinilai Dengan adanya uang nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan Masyarakat akan memperoleh manfaat dengan menggunakannya sebagai satuan moneter yaitu pengukur nilai atau harga barang dan sumber-sumber secara relative, Dengan demikian kita tidak perlu menetapkan harga setiap barang secara relatif terhadap barang lainnya, dan cukup hanya menetapkan harga masing-masing barang selain.

Satuan uang, Selain itu juga berkaitan dengan pengambilan keputusan selain bidang Ekonomi Bertambahnya permintaan konsumen terhadap sesuatu barang akan mempengaruhi harga barang tersebut la akan cenderung naik. Jika harga naik si produsen cenderung menambah produksinya Sebaliknya jika permintaan barang tersebut cenderung turun dan si pengusaha akan cenderung mengurangi luas produksinya. Mungkin pula ia mencari metode-metode baru dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang lebih murah untuk menurunkan ongkos distribusinya sehingga akan tetap mendapatkan keuntungan dari usananya itu Semuanya Ini tidak tidak akan mudah dilaksanakan bilainana tidak ada sesuatu alat untuk mengukur nilai faktor-faktor produksi yang dipergunakan mengukur perubahan-perubahan harga barang-barang diproduksi tetapi dengan adanya uang sebagai alat pengukur nilai. maka lebih mudah diketahuinya kecenderungan-kecenderungan permintaan

konsumen metode produksi yang termurah atau metode distribusi yang paling efisien. Dan pengukuran-pengukuran nilai untuk kebutuhan tersebut tidak akan mungkin teliti, bila tidak ada alat pengukur nilai yang umum, yang memenuhi syarat tersebut.

c. *Store of Value*

Sebagai alat penyimpanan kekayaan disebut sebagai M2, terdiri dari M1 ditambah dengan neraca reksadana pasar uang ritel, deposito tabungan, termasuk rekening deposito pasar uang dan deposito berjangka pendek

Karena uang merupakan nilai kekayaan yang paling likuid. Meskipun ia tidak menghasilkan suatu pendapatan tetapi ia segera dan secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi segala macam kewajiban finansial. Dengan demikian orang dapat menyimpan kekayaannya selain bentuk uang kas atau surat-surat berharga. Usaha ini ditujukan untuk maksud tertentu untuk kebutuhan waktu yang akan datang. Penyendirian atau penyimpanan serupa itu disebut juga sebagai reserve. Reserve ini akan bertambah dengan penerimaan dan pihak lain, sebaliknya akan berkurang dengan pembayaran yang dilakukan pada pihak lain.

Cukup banyak fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas. Selain ekonomi pasar sistem finansial minimal dapat disimpulkan mencakup dua fungsi fundamental uang, yaitu :

- 1) Memungkinkan terjadinya likuiditas secara mencukupi sehingga produksi dan tukar menukar dapat terjadi secara wajar
- 2) Termobilisasinya pendapatan sumber daya dan pengalokasian kepada para investor secara sesuai

1. **Definisi menurut nilai mata uang tersebut, dibagi menjadi 2 kriteria yaitu :**¹

a. *Full Bodied Money*, yaitu uang yang nilai bendanya sama dengan nilai yang tertera Nilai nominal sama dengan nilai instrinsiknya. Setelah era masa uang emas dan perak berakhir. mata uang kertas yang diciptakan oleh otoritas moneter harus dijamin oleh sejumlah emas yang besarnya sama dengan nilai uang yang dikeluarkan. Ciri-ciri uang penuh adalah ;

- i. Nilai uang = nilai bahan pembuatnya
- ii. Money's value is what value money has artinya nilai mata uang adalah nilai yang dipunyai oleh benda yang menjadi mata uang tersebut.

Misalnya apabila harga 1 gr emas murni adalah Rp 100.000 maka manakala otoritas moneter akan mencetak uang sebanyak Rp. 1 triliyun, di bank sentral harus sudah tersedia emas seberat 10 000 kg emas. sebagai jaminan Dengan adanya jaminan maka masyarakat pemegang uang yakin bahwa apabila ada satu kondisi tertentu. dia akan bisa menukarkan uang kertas yang dimilikinya dengan emas yang disinipkan pada lembaga perbankan Karena pertumbuhan produksi emas tidak cepat, maka *metode full bodied money* ini dianggap akan mengurangi gerak layu pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu pada perkembangan selanjutnya muncul uang yang didasarkan kepercayaan.

b. *Fiat Money*, yaitu uang yang dinilai bendanya tidak sebesar nilai yang tertera atau uang yang dibuat berdasarkan kepercayaan masyarakat bahwa nilai mata uang tersebut akan diterima umum dengan nilai yang sama di manapun, di wilayah uang tersebut dicetak Ciri-ciri uang fiat adalah

¹Manullang, Ekonomi Moneter Balai Aksara, 1985, P, 25

- i. Nilai uang = nilai kepercayaan
- ii. Nilai uang \neq nilai bahan pembuatnya
- iii. *Money value is what money can buy* yaitu nilai uang adalah seberapa besar uang itu bisa digunakan untuk membeli.

Mula-mula uang fiat dicetak tetap dengan jaminan sejumlah uang tertentu di bank sentral meskipun jumlahnya tidak 100%. Misalnya jaminan 50% artinya manakala pemerintah akan mencetak uang sebanyak Rp 1 trilyun dengan nilai emas per 1 gram Rp 100.000, maka pemerintah/bank sentral harus menyediakan emas sebanyak 5.000 kg untuk mencetak uang tersebut. Untuk mempercepat laju pertumbuhan Ekonomi maka nilai jaminan semakin berkurang dan kemudian digantikan dengan pertimbangan perekonomian selain negeri.

Uang kertas atau bisa disebut uang kartal yang digunakan di berbagai negara saat ini dibuat dan dikeluarkan oleh Bank Sentral yaitu Bank yang bertindak sebagai bank bagi bank-bank umum (Bankers Bank) di Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Uang kartal menjadi sangat umum, karena bentuknya yang ringan, praktis sehingga mudah dibawa ke mana-mana dan berlaku umum pada suatu negara. Bahkan untuk negara-negara di kawasan Eropa, mata uang Euro berlaku sampai melintasi batas negara, sebagai mata uang bersama.

Perekonomian terbuka menyebabkan orang dengan mudah melakukan perjalanan ke wilayah lain selain satu negara atau bahkan ke luar negeri demikian juga perdagangan yang sudah melewati batas propinsi, pulau dan internasional seperti yang diilustrasikan di atas. Pada kondisi seperti pengiriman uang secara langsung menjadi sangat sulit. Demikian juga dengan jenis mata uang yang akan digunakan selain kesepakatan jual beli antara negara. Oleh sebab itu maka kemudian muncul jenis mata uang yang lain yaitu uang Giral) Uang giral adalah mata uang yang diciptakan oleh bank umum sebagai ganti deposit atau simpananyang diniasukkan di Bank tersebut Uang giral bisa

berupa cek, sertifikat deposito. kartu kredit dan kartu debit Pembayaran dengan menggunakan cek dan kartu kredit atau kartu debit sudah sangat umum, sehingga sering memunculkan Jargon “Kalau mau barang, Gesek Aja!” Bahkan di Amerika Serikat. pembayaran dengan jenis uang ini berbanding sembilan banding sepuluh pada keseluruhan transaksi

Dari berbagai uraian di atas, maka sebenarnya hakikat uang adalah fungsinya sebagai alat tukar dan dengan alat tersebut kita bisa menambah dan menjual segalanya Berbagai barang pernah berfungsi sebagai uang selain berabad-abad. Namun sekarang ini jamannya uang keras dan uang bank yaitu jenis yang tidak mempunyai nilai intrinsik sama sekali selain kepercayaan yang dimiliki masyarakat.

B. KONSEP UANG

Uang berkembang seiring dengan perkembangan peradapan manusia Mulannya Uang berbentuk barang komoditas atau barang barter kemudian berevolusi ke selain bentuk uang baik selain bentuk logam maupun kertas. Meskipun demikian keduanya disatukan dan diakui sebagai alat pembayaran. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, maka kegiatan Ekonomi (jual beli tukar-menukar) menjadi lebih mudah dilaksanakan. Dengan kata lain. yang muncul sebagai terobosan untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran yang diakibatkan proses transaksi dengan sisem barter Untuk itulah orang menciptakan uang. Menurut teori Ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum dan dari sisi fungsi Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang Jadi segala sesuatu dapat diterinia sebagai uang. jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi telah dijelaskan pada bab sebelumnya Perkembangan uang mengalami perkembangan istilah. bentuk dan fungsi menurut likuiditasnya. sehingga dikenal tiga macam uang yaitu M1 adalah uang kertas

dan logam ditambah simpanan selain rekening koran (demand deposit). Jenis uang yang paling likuid. M2 adalah M1 tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum Likuiditasnya lebih rendah; M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank.

Hadirnya uang selain sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. yang biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter Pada umumnya analisis Ekonomi suatu negara ditentukan oleh analisis atas ukuran uang yang beredar Samuelson mengetakan bahwa banyak ekonom percaya bahwa perubahan jumlah uang yang beredar selain jangka panjang akan menghasilkan tingkat harga. sedangkan dampaknya terhadap out put real, adalah sedikit atau bahkan tidak ada. Dengan kata lain ekspansi moneter akan menurunkan tingkat bunga pasar Hal ini akan meningkatkan pengeluaran untuk investasi usaha riil yang sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga Melalui mekanisme pengganda (multiplier) permintaan agregad akan meningkat yang akan menyebabkan naiknya out put dan harga di atas Iangkat yang tidak dicapai selain situasi normal Ada beberapa teori diantara teori tersebut adalah :²

1. Teori Moneter (Permintaan Uang) Klasik

Teori permintaan uang klasik tercerinin selain icon kuantitas uang, Pada awalnya teori ini digunakan untuk menerangkan peranan uang selain perekonomian Dengan sederhana *Irving Fisher* merumuskan teori kuantitas uang Teori ini mendasarkan diri pada falsafah hukum Say. bahwa Ekonomi akan selalu berada selain keadaan full employment. Secara sederhana *Irving Fisher* merumuskan teorinya dengan persamaan sbb :

$$MV=PT$$

Dimana M adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang (velocity), yakni berapa kali suatu mata uang pindah tangan

² Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter selain Ekonomi Islam, Jakarta, salemba Empat, 2002 hal. 33

dan satu orang kepada orang lain selain suatu periode tertentu. P adalah harga barang, dan T adalah volume barang yang menjadi obyek transaksi. Persamaan di atas merupakan suatu identitas sebab selalu benar artinya jumlah unit barang yang ditransaksikan (T) dikalikan dengan harganya (nilai barang tersebut) harus atau selalu sama dengan jumlah uang (M) dikalikan dengan perputarannya. Dengan kata lain total pengeluaran (MV) sama dengan nilai barang yang dibeli (PT) Selain versi lain, volume barang yang diperdagangkan (T) diganti dengan output riil (G) sehingga persamaan tersebut berubah menjadi:

$$MV = PO = Y$$

Selain Teori kuantitas ini, *Irving Fisher* mengasumsikan bahwa keberadaan ruang pada hakikatnya adalah *Flow Concept* Keberadaan uang ataupun perinintan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut Menurut *Marshall*, dengan Teori sebagai berikut:

$$M = K PO$$

$$M = K.Y$$

Dimana $k = 1/V$, dengan demikian permintaan uang akan menjadi.

$$Md = K.PO = K . Y$$

Secara sistematis, formula *Marshall* ini sama dengan Formula *Irving Fisher*, namun mempunyai filosofi yang berbeda *Marshall* menyatakan, bahwa keberadaan K sebagai turunan dan $1/V$ merupakan tingkat keinginan seseorang untuk menyimpan sebagian kekayaannya, dan penyimpanan uang adalah satu kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh karena itu-lah ia menganggap bahwa uang adalah salah satu cara untuk melakukan penyimpanan kekayaan. Maka keberadaan uang atau teori ini disebut juga sebagai *stock concept*

Oleh karena uang juga difungsikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan maka seorang individu akan menentukan

pilihan individunya selain memelihara komposisi kekayaan yang dimilikinya apakah akan disimpan selain wujud *bon. stock atau money*

Perekonomian selalu mencapai Full Employment menurut klasik ini disebabkan

- 1) Pengangguran hanya bersifat sementara hal ini karena keyakinan sbb :
 - a. Fleksibilitas tingkat bunga akan mewujudkan kesamaan/keseimbangan diantara penawaran dan permintaan agregat pada tingkat pengerjaan penuh.
 - b. Fleksibilitas tingkat upah akan mewujudkan keadaan Dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja akan mencapai keseimbangan pada full employment
- 2) Supply Created Demand
- 3) Tingkat tabungan rumah tangga akan sama dengan tingkat investasi yang diJakukan oleh pengusaha dan tinggi rendahnya sangat tergantung pada tingkat bunga
- 4) Fleksibilitas tingka upah, Dimana apabiia terjadi pengangguran maka harga faktor produksi (terutama tenaga kega) akan melakukan penyesuaian sebagaimana akhirnya pengangguran akan bisa dihapuskan (faktor produksi bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku)
- 5) Sistem pasar bebas akan mendorong terjadinya Full Employment

Oleh karena itu maka perekonomian akan selalu mencapai Full Employment dengan faktor penentu yang terdiri dan atas jumlah modal yang tersedia (tabungan 8 investasi), jumlah dan kualitas tenaga kerja, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan dan tingkat teknologi

2. Teori Keynes

Pada akhir tahun 1920-an, terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius sebagai akibat perang dunia pertama) sehingga pandangan Ekonomi klasik mulai mendapat kritikan. Dimana pengangguran bisa terjadi karena kurangnya permintaan agregat atas barang dan jasa (pendapat bahwa supply created own demand tidak lagi relevant).

Keynes berpendapat bahwa Full Employment sangat jarang terjadi Perbedaan pendapat ini bersumber dan 2 persoalan yaitu

- 1) Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan dan investasi selain perekonomian.
 - a. Tingkat tabungan rumah tangga terutama tergantung pada besarnya pendapatan. Dengan fungsi : $S = -a + MPS Y$.
 - b. Tingkat investasl perusahaan bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga tetapi juga oleh kondisi perekonomian, eskpektasi masa depan dan perkembangan teknologi.

Sehingga disini Keynes sependapat dengan klasik Dimana fleksibilitas tingkat bunga tidak menjainin investasi akan sama dengan tabungan Menurut Keynes pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha lebih kecil dan jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu Full Employment, oleh karenanya maka permintaan agregat selain perekonomian lebih rendah dan produksi barang dan jasa di sini akan timbul pengangguran ahli ekonomi pada periode berikutnya berpendapat terdapat toleransi selain pengangguran sebesar 5%.

- 2) Sifat-sifat perkaitan antara upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha.
 - a. Pada kondisi masyarakat modern muncul serikat pekerja yang bertujuan berjuang untuk perbaikan nasib pekerja sehingga akan terjadi pertentangan manakala tingkat upah mengalami penurunan Menurut Keynes selain

mengatasi masalah pengangguran dan tenaga kerja kia tidak boleh mengabaikan efek sosiologis dan psikologis sehingga asumsi *ceterisparibus* tidak boleh dipakai

- b. Apabila upah turun maka tingkat pendapatan akan menjadi rendah daya beli masyarakat berkurang pengeluaran masyarakat turun, harga turun Maka disini kurva demand akan berpindah kebawah sehingga penggunaan tenaga kerja tidak akan tercapai
- 3) Kebijakan pemerintah sebagai invisible hal penting untuk menekan inflasi dan pengangguran.

Perbedaan besar menyebabkan teori Keynes memadi penting adalah karena Keynes memandang perekonomian sebagai suatu yang agregat atau menyuruh dan integritas. Menurut Keynes pada hakikatnya tingkat kesiapan Ekonomi suatu Negara ditentukan oleh permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang dimintai permintaan agreget terdiri atas pengeluaran Koosumsi rumah tangga dan penanaman modal oleh pengusaha Penanaman modal yang akan diperoleh pada tingkat kegiatan investasi yang diiakukan), Bila tingkat bunga tebih tinggi maka pengusaha akan membatalkan berinvestasi.

C. FUNGSI UANG

1. Fungsi Uang Menurut Keynes

Sumbangan Keynes selain bidang Ekonomi terdapat selain karya buku yang berjudul *The General Theory of Employment Interest and Money*. Di selain bukunya Ia menyatakan bahwa Mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjainin adanya full employment selain perekonomian. Selanjutnya dia menyarankan adanya peran atau campur tangan pemerintah selain perekonomian³

³ ibid hal 35

Menurut Keynes, seseorang mengatur uang atau assetnya selain fungsi sebagai berikut: ⁴

1. Money demand for precautionary (permintaan uang untuk berjaga-jaga)

Money demand for precautionary ini juga ditentukan oleh tingkat pendapatan dengan formulasi $M^p = f(Y)$. permintaan uang untuk berjaga-jaga ditujukan untuk memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Orang akan mendapat manfaat dari memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tak terduga tersebut karena sifat uang yang likuid, yaitu mudah untuk ditukarkan dengan barang-barang lain.

2. Money demand for speculation (permintaan uang untuk spekulasi)

Permintaan uang untuk spekulasi diakibatkan karena ketidaktahuan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga, motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan. Permintaan uang untuk motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan. Permintaan ini diformulasikan $M^s = f(i)$. Permintaan uang untuk motif ini didasarkan pada dua alasan :

- a. Tingkat suku bunga tinggi
- b. Tingkat suku bunga normal

Permintaan uang merupakan permintaan akan saldo riil, dimana permintaan seseorang untuk saldo ini tidak berubah apabila harga berubah.

Permintaan uang untuk saldo riil (M_d/P) ditentukan dan besarnya berdasarkan pendapatan riil (Y) serta biaya opportunity, yaitu suku bunga (r) sebab permintaan uang untuk spekulasi merupakan bagaikan dan kekayaan total atau sering disebut sebagai asset demand for money

⁴Bodeono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, BPFE 1985, hal 28

Sebenarnya ada beberapa kesalahan Keynes, yang salah satu diantaranya diluruskan oleh muridnya. Tobin-Boumal. masing-masing pada 1953 dan 1956. Dari model yang dikembangkannya. secara implisit Keynes mengatakan adanya Perfect Substitution antara uang (money), obligasi (bonds) dan modal (capital)⁵. Ini sejalan dengan teori konvensional yang mengenal lima pasar, yaitu

1. Consumer goods
2. Labor services
3. Production (capital) goods
4. Bonds
5. Money

Lima pasar ini akan berhadapan dengan

1. Prices
2. Wages
3. Interest

Variabel di atas menimbulkan persoalan karena 5 pasar yang akan dipecahkan oleh 3 harga. Untuk memecahkan persoalan ini. Keynes menggabungkan capital dan bonds menjadi non monetary asset sehingga komposisi menjadi 4 pasar dengan 3 harga. Kekeliruan Keynes adalah menggabungkan capital goods dan bonds menjadi satu dengan nama baru, non monetary asset.

D. NILAI WAKTU UANG

1. Nilai Waktu Uang (*Time Value of Money*)

Selain teori Ekonomi konvensional uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang selain suatu waktu tertentu. anggapan demikian melahirkan konsep time value of money. Time value of money adalah nilai waktu dan uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Dengan memegang uang orang dihadapkan

⁵ Azwar Karim Adiwarmanto, Kajian Ekonomi Makro, Jakarta, III T Indonesia, hal. 29

pada resiko menurunnya daya beli dan kekayaannya sebagai akibat dan inflasi. Sedangkan dengan memilih menyimpan uang selain bentuk surat berharga, pemilik akan memperoleh bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Dengan demikian, nilai uang saat sekarang, nilai substitusinya terhadap barang akan lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang. Definisi time value money tersebut tampak tidak akurat, sebab setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat hasil positif, negatif atau bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya selain konsep keuangan, selalu dikenal risk-return relation. Ini berarti, bisnis selalu terkait dengan resiko dan perolehan. Bagi Ekonomi konvensional ada dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep time value of money, yaitu

- a. Presence of inflation
- b. Preference present consumption to future consumption

Argumen pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Selain setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keadaan inflasi yang dijadikan dasar munculnya konsep time value of money, seharusnya keberadaan deflasi harus dijadikan alasan munculnya konsep negatif time value of money, kenyataannya, kondisi inflasi sajalah yang dijadikan acuan selain menentukan konsep time value of money, sementara keadaan deflasi selalu diabaikan.

Argumen kedua, preferensi konsumsi saat ini ke masa yang akan datang konsumsi atau investasi: masa depan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :⁶

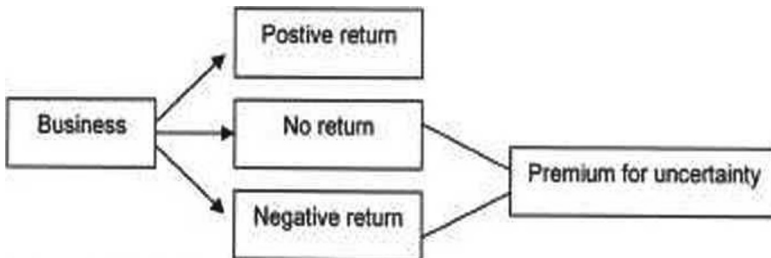
- a. Ketidakpastian return (laba)

Ekonomi konvensional tidak mengabaikan ketidakpastian laba (return) yang akan diterima. Kompensasi terhadap ketidakpastian return menurut Ekonomi konvensional adalah discount rate. Dibandingkan dengan istilah interest rate, istilah discount rate lebih bersifat umum.

⁶ Ibid, hal 37

Disebut interest rate	Disebut discount rate
Certainty in return	Un certainty In return
Real interest rate ditentukan oleh preferensi current consumption seseorang	
Nominal interest rae = real interest rate + expected inflation	
	Discount rate = real interest rate + expected inflation + preinium for uncertainty

Selain Ekonomi konvensional, ketidakpastian return di-konversi menjadi kepastian melalui preinium for uncertainty Selain set tap investasi selalu ada probabilitas atau kemungkinan mendapatkan positive return, negative return and no return Kemungkinan ini menimbulkan uncertainty (ketidakpastian) Selanjutnya, kemungkinan mendapatkan negative return dan no return dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti (preinium for uncertainty)



b. Current goods and future goods

Perilaku konsumsi orang saat ini dipengaruhi oleh harapannya pada masa depan Meminjam uang memungkinkan seseorang meningkatkan konsumsi pada saat ini dengan harga yang dibayarkan kemudian Perilaku konsumsi yang melibatkan lebih dari satu periode waktu ini. disebut intertemporal consumption pattern Satu periode waktu dapat berarti suatu saat satu jam satu hal, satu bulan dan seterusnya

c. Intemporal budget line

Perilaku konsumsi seseorang dengan melibatkan tebrh satu periode waktu disebut dengan intemporal consumption pattern

d. Derriving demand for current consumption

Permintaan seseorang atas suatu barang konsumsi yang akan dikonsumsi pada saat sekarang Selain penelitian tingkat bunga kita tidak menggunakan (atau membandingkan dengan) tingkat bunga simpanandi bank Tingkat bunga yang relevan seharusnya memperhatikan unsur risiko Semakin tinggi risiko suatu investasi. semakin tinggi perdagangan internasional turisme Investasi internasional atau aliran uang jangka pendek antar negara yang metewati batas-batas geografis atau batas-batas hukum.

Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah (otoritas moneter) seperti di negara-negara yang memakai sistem fixed exchanges rats atau ditentukan oleh kombinasi kekuatan pasar yang salingbeonteraksi (misalnya bank komersial, perusahaan muttinasionai perusahaan manajemen asset, perusahaan asuransi. bank devisa, dan bank sentral) serta kebijakan pemerintah seperti di negara-negara yang menggunakan sistem textile exchange rates

Nilai tukar uang dapat dicatat sebagai spot atau inmediate delivery (penyerahan \pm 2 hari) atau dapat juga dicatat sebagai transaksi di muka (forward transaction) selain berbagai periode penyerahan Perbedaan antara catatan spot dan forward umumnya merefleksikan perbedaan antara biaya meminjam (cost of borrowing) artas dua mata uang selain periode waktu yang terkait

Karena setiap negara memiliki hubunngan selain investasi dan perdagangan dengan negara lain tidak ada satu pun nilai tukar yang dapat mengukur secara memadai daya beli (purchasing power) mata uang domestik alias mata uang asing secara umum

Sejumlah konsep nilai tukar uang yang efektif telah dikembangkan untuk mengukur rata-rata tertimbang (weighted average) harga mata uang asing selain mata uang domestik. Demikian pula berbagai skema peninibangan (weighting) telah diajukan, termasuk di antaranya Timbangan (weight) untuk merefleksikan daya beli terhadap barang-barang impor dan beberapa timbangan berikut: Timbangan perdagangan bilateral untuk merefleksikan pentingnya hubungan perdagangan dengan negara asing tertentu; Timbangan perdagangan global untuk merefleksikan pentingnya berbagai mata uang selain perdagangan global untuk merefleksikan pentingnya berbagai mata uang selain perdagangan global; Timbangan elastisitas porsi perdagangan untuk merefleksikan tingkatan daya saing (competitiveness) yang berbeda di satu negara dengan negara lainnya.

b. Paritas Daya Beli

Definisi purchasing power parity (paritas daya beli) atau PPP adalah suatu kondisi ketika suatu barang yang diperdagangkan (tradable goods) seharusnya dibeli. Misalnya, suatu jenis barang dapat dibeli di dua negara dengan harga yang sama tanpa terbebani biaya transaksi (transaction cost), biaya transportasi (transportation cost) serta tidak ada hambatan perdagangan (trade barrier). Jika kondisi arbitrase adalah kondisi tidak terdapatnya kesempatan membeli suatu barang dengan harga rendah dan menjualnya lagi dengan harga lebih tinggi = terjal untuk setiap barang secara individual, maka kondisi arbitrase ini akan terjadi juga untuk sekelompok barang (basket of goods) selain jumlah yang representatif. Selain hal ini dinotasikan sebagai berikut:

$$P = eP'$$

Keterangan:

- P : tingkat harga domestik (domestic price)
- P' : tingkat harga luar negeri (foreign price)
- G : nilai tukar uang (exchange rate)

Persamaan di atas dinamakan persamaan paritas daya beli atau *purchasing power parity equation* yang menyatakan bahwa rupiah sejumlah x di Indonesia memiliki daya beli yang sama dengan di Singapura. Ini sejalan dengan asumsi bahwa semua barang dapat diperdagangkan dan ada kondisi arbitrase yang menjamin setiap individual dapat menjual barang dengan harga yang sama di manapun juga.

Law of one price (LOP) atau hukum satu harga menyebutkan bahwa di suatu pasar persaingan (*competitive market*) yang tidak terbebani biaya transportasi serta terbebas dari hambatan perdagangan, suatu jenis barang memiliki harga jual yang sama selain mata uang tertentu. Perbedaan antara PPP dengan LOP spot dideskripsikan sebagai berikut. LOP diaplikasikan untuk komoditas individual sedangkan PPP diaplikasikan untuk tingkat harga secara umum (komposit harga dan keseluruhan komoditas yang masuk selain kumpulan yang menjadi referensi).

Nilai tukar riil uang suatu negara adalah jumlah barang domestik yang dibutuhkan untuk membeli satu unit barang yang sama (identik) di luar negeri.

Jika nilai tukar riil > 1 , maka lebih dari 1 unit barang domestik dibutuhkan untuk membeli barang luar negeri yang identik. Jika nilai tukar riil < 1 , maka kurang dari 1 unit barang domestik dibutuhkan untuk membeli barang luar negeri yang identik.

Paritas daya beli juga berlaku untuk obligasi seperti pada nilai tukar uang, tentunya dengan terlebih dahulu memodifikasi persamaan matematikanya. Seperti halnya pasar barang, ketika harga menjadi sama dengan adanya kondisi arbitrase, *rate of return* obligasi-obligasi yang sejenis juga akan sama. Jika tidak ada biaya transaksi dan biaya-biaya lain, suatu jenis obligasi dengan nilai tertentu akan mempunyai return yang sama dengan di negara mana pun.

c. Kebijakan Nilai Tukar Uang

Mata uang asing dapat digunakan membeli barang dan luar negeri ataupun aset finansial seperti saham *obligasi, treasury lulls, options futures dan warrants*. Jika seseorang dan Indonesia berlibur ke Singapura lazimnya dia membeli dolar Singapura (SGD) dengan nilai uang rupiah (IDR) sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Jika setiap SGD 1 berharga IDR 5.000, dapat diekspreskan bahwa setiap IDR 5000 berharga SGD 1. Semakin tinggi harga SGD (in IDR term), semakin rendah harga IDR (in SGD term), demikian pula sebaliknya.

Selain buku ini, untuk kemudahan, diasumsikan hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. yaitu negara domestik dan asing. Institusi resmi satu-satunya di suatu negara yang dapat mengubah penawaran mata uangnya adalah memiliki salah satu di antara dua rezim kebijakan nilai tukar, yaitu

1. Rezim nilai tukar dipagu (*fixed exchange rate regime*), yaitu menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya dan
2. Rezim nilai tukar fleksibel (*flexible exchange rate regime*), yaitu nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh keseimbangan di pasar pertukaran uang

2. Rezim Nilai Tukar Dipagu

Selain sistem kebijakan rezim nilai tukar dipagu (*fixed exchange rate regime*), bank sentral mengumumkan suatu nilai tukar tertentu untuk mata uangnya terhadap mata uang asing. Selain hal ini; bank sentral bersedia membeli dan menjual mata uang asing dengan kuantitas berapa pun. Sebagai contoh, sebelum pertengahan tahun 1980-an Indonesia memakai rezim nilai tukar dipagu setiap periode waktu tertentu, rupiah mengalami penyesuaian nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya.

Selain rezim nilai tukar dipagu bank sentral sering dipaksa mencetak uang secara berlebih selain rezim nilai tukar ini, Bank Sentral dapat mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang tetapi tidak sekaligus. Jika Bank Sentral menetapkan nilai tukar, mereka harus menyiapkan berapapun jumlah uang yang dibutuhkan para pedagang. Dengan kata lain Bank Sentral harus membeli berapapun kuantitas mata uang asing yang ditawarkan oleh pedagang. Jika hal tersebut terjadi terus menerus akan muncul Internasional reserve ensis, suatu keadaan ketika sebuah Bank Sentral tidak lagi mampu menjaga nilai tukar tertentu untuk mata uang negaranya. Ketika cadangan devisa Bank Sentral berkurang banyak, mereka terpaksa menaikkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik dengan harapan agar permintaan terhadap cadangan devisa menurun. Hal tersebut dikenal dengan devaluasi. Jika yang terjadi kondisi sebaliknya yaitu Bank Sentral harus membeli devisa, mereka dapat menurunkan nilai tukar mata uang negaranya terhadap mata uang asing yang disebut dengan evaluasi. Pada saat Bank Sentral kehilangan kendali atas penawaran mata uang asing, mereka juga kehilangan kendali atas tingkat harga. Jika ingin mengendalikan tingkat harga domestik mereka harus membiarkan nilai tukar mengambang bebas.

Selain rezim nilai tukar yang dipagu Bank Sentral dapat menetapkan nilai tukar yang berbeda-beda pada kalangan tertentu. Misalnya Bank Indonesia menetapkan nilai tukar mata uang IDR a = SGD x untuk kelompok orang yang membeli barang-barang konsumsi dan Singapura dan IDR b = SGD y untuk orang yang membeli barang-barang kapital dari negara yang sama. Kedua harga ini mungkin lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Bank Sentral Singapura. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesempatan arbitrase pada orang yang membeli SGD dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mencegah harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga resmi pemerintah, Bank Sentral atau otoritas moneter harus melarang perdagangan seperti itu. Namun karena itu begitu besarnya kesempatan meraih keuntungan.

hukumpun dilanggar Munculah pasar pertukaran uang gelap atau black market in currencies, tempat suatu warga negara melakukan pertukaran uang secara tidak resmi (tidak diakui oleh pemerintah).

3. Rezim Sistem Nilai Tukar Mengambang

Rezim nilai tukar ini digunakan oleh hampir sebagian besar negara di dunia Jika Bank Sentral ingin menambah penawaran atas uang, mereka mencetak uang kemudian membeli suatu aset (biasanya berbentuk obligasi pemerintah). Sebaliknya, jika ingin mengurangi penawaran akan uang Bank Sentral dapat menjual suatu aset (biasanya selain bentuk obligasi pemerintah) dan memusnahkan uang yang diperolehnya dari penjualan tersebut.

Pada umumnya, Bank-bank Sentral luar negeri mengendalikan penawaran atas uang dengan cara-cara yang secara esensial sama dengan cara yang ditempuh Bank Sentral Domestik Jika Bank sentral membeli atau menjual mata uang negara sendiri. ha! ini akan mempengaruhi penawaran akan uang Selain Bank Sentral dapat memperjual belian mata uang negara lain.

Jika Bank Sentral Singapura (BSS) melakukan pembelian IDR, BSS. tidak dapat mempengaruhi penawaran nilai IDR karena IDR yang dibelinya akan tetapi eksis (tidak dapat dihilangkan dan pasaran). Dengan kata lain Bank Sentral Asing dapat saja mempengaruhi permintaan terhadap IDR. tetapi tidak dapat mempengaruhi penawaran terhadapnya di lain pihak, jika BI membeli IDR mereka dapat mempengaruhi penawaran IDR karena mereka dapat memusnahkan IDR yang diperolehnya dan penjualan aset tersebut Kegiatan Bank Sentral memperjualbelikan mata uang tersebut dinamakan intervensi. Melalui intervensi, Bank Sentral melakukan perubahan pemerintah akan mata uang asing. Secara garis besar, intervensi Bank Sentral dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Unsteriliset Intervention, yaitu Intervensi tanpa disertai tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah

- perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik
2. Sterilised Intervention, yaitu intervensi yang disertai tindakan – tindakan offset dan dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik.

Paksaan atau tekanan terhadap Bank Sentral untuk melakukan intervensi dilakukan oleh berbagai sumber dengan berbagai ragam kepentingan Misalnya, kelompok orang yang sedang berpergian ke luar negeri tidak ingin mata uang negaranya melemah, begitu juga kelompok orang yang menandatangani kontrak pembayaran uang dalam mata uang asing Orang-orang yang berhutang selain mata uang asing tidak terpengaruh jika nilai mata uang domestik mengalami depresiasi seperti yang telah diduga (expected). Namun jika depresiasi terjadi melebihi tingkat yang telah diduga (Unexpected), efeknya akan buruk bagi mereka

Nilai tukar uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri Penawaran terhadap IOR ditentukan oleh Bank Indonesia sedangkan permintaan akan IDR tergantung pada pendapatan warga Indonesia Kelompok orang dengan pendapatan tinggi membutuhkan lebih banyak uang. Mata uang asing pun ditentukan dengan cara yang sama

Tingkat harga P dan P_1 ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran uang di tiap negara Tawar menawar dan kesempatan arbitrase akan memaksa nilai tukar ke tingkat persamaan pantas daya beli $P = e P'$ Menurut Teori neoklasikal. tingkat harga di suatu negara dapat berubah karena terjadinya perubahan penawaran atas uang atau karena faktor kebijakan fiskal, teknologi, peperangan dan cuaca Kenaikan penawaran IDR mengakibatkan rupiah mengalami depresiasi Sebaliknya kenaikan penawaran mata uang asing mengakibatkan rupiah mengalami prestasi Jika terjadi kenaikan penawaran uang secara signifikan secara otomatis terjadi kenaikan harga (inflasi) Harga melonjak karena terjadi penurunan permintaan akan uang Selain itu juga karena adanya lonjakan nilai tukar (depresiasi) uang lonjakan ini dinamakan exchange rate overshooting.

E. PENAWARAN DAN PERININTAN

1. Penawaran Uang (Money Suplay)

a. Devinisi Penawaran Uang

Selain tahun-tahun yang lampau, yang dianggap sebagai basis Penawaran Uang adalah jumlah uang kedal (uang kertas dan uang logam) ditambah dengan rekening giro (checking accounts) yang tidak menghasilkan bunga yang diniiliki oleh sektor swasta non bank selain perekonomian. Tepat sistem perbankan telah menunjukkan kemampuan yang tak terbatas untuk menghasilkan inovasi-inovasi financial sehingga tidak mungkin menerapkan satu konsep tunggal penawaran uang yang bisa berlaku sepanjang masa

Selain tahun ketahun saat ini, dengan persetujuan pemerintah beberapa bank mulai memberikan bunga atas beberapa rekening giro (yang disebut NOW kependekan dan 'negotiable order of withdrawal'), dan kini kita dapat memindahkan dana secara otomatis dan rekening tabungan (aving accounts) ke rekening giro

Selain mendevinsikan Uang-Bank yang tepat. kita ingin pula memasukkan apa yang disebut sebagai rekening transaksi (transactions accounts) Suatu rekening transaksi yang mengizinkan pemiliknya kepada pihak ketiga tanpa keharusan mentransfer dana dan suatu rekening tabungan atau suatu saham perhinipunan kredit (credit union share) yang sering meninggalkan kerugian berupa kehilangan bunga

Definisi terbaru dari Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) tentang basis penawaran uang, M-1, kelihatannya sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita cari Menurut devinisi ini penawaran uang terdiri atas uang kartal. Rekening giro travelers chek. dan rekening lain yang menggunakan cek. Federal Reserve juga mendevinisikan konsep uang yang lebih luas . Disebut M-2. yang metiputi m-1 ditambah hal-hal seperti dana umum pasar uang (money market mutual funds) Rekening deposito pasar

uang < money market deposits) Tabungan dan Rekening-rekening kecil (small time deposits)

Teori penawaran adalah teori kuantitas uang yaitu

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Dimana M : Money yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat

V : Velocity/ kecepatan peredaran uang

P : Price level/tingkat harga umum

T : Transaction output yang dihasilkan dan ditransaksikan

Perbedaan pandangan Klasik dan Keynes adalah selain pengertian variable-variabel M, P dan T, sedangkan untuk Velocity baik Keynes maupun Klasik beranggapan riilnya tetap.

a. Pembahasan M, P dan T menurut Klasik

Klasik beranggapan bahwa perekonomian selalu pada kondisi full employment oleh karena itu menurut Klasik

- $M_s = M_d$, Dimana M_s adalah exogen dan given ditentukan oleh otoritas moneter Sementara M_d bisa diturunkan sebagai berikut

$$MV = PT = Y$$

$$M = 1/V Y$$

$$M = k Y$$

- P atau tingkat harga adalah tidak fleksibel selain perekonomian yang FE, maka biaya produksi atau selain hal ini upah bersifat fleksibel.
- T atau jumlah output oleh klasik dianggap tetap yaitu sebesar tingkat output full employment

Sehingga penentuan kuantitas uang menurut Teori klasik adalah $MV = PT$

b. Pembahasan M, P dan T menurut Keynesian

Keynes beranggapan bahwa perekonomian belum mencapai pelangan Dimana terdapat pengangguran Sehingga menurut Keynes :

- M adalah Ms. Dimana Ms eksogen dan given, dilentukan oleh penguasa moneter. M juga merupakan permintaan Uang untuk transaksi atau disebut M1 dengan derivasi seperti klasik yaitu $M1 = k Y$
- P atau tingkat harga adalah rigid atau tegar dengan kecenderungan menurun, hal ini dikarenakan selain perekonomian terdapat pengangguran Biaya produksi (upah) tetap dengan kecenderungan menurun
- T atau jumlah output tidak tetap tetapi bergerak meningkat menuju tercapainya full employment

Sehingga persamaan teori kuantitas uang menurut Keynes adalah $MV = PT$

c. Proses pelipatan jumlah uang beredar

Jika selain perekonomian terdapat perubahan Ms sebesar Monetary Base (AB), maka jumlah uang di masyarakat akan berubah sebesar AM Dengan adanya kebijakan RR-Reserve Requirement yang ditetapkan oleh Bank Sentral maka rumusnya:

$$RR \Delta M = \Delta B \rightarrow \Delta M / \Delta B = 1/RR$$

Artinya setiap ada kebijakan moneter sebesar ΔB maka akan merubah JUB sebesar $(1/RR) \times \Delta B$

RR = Simpanan masyarakat yang harus ditahan pada lembaga keuangan sebagai cadangan

b. Dampak Penawaran Uang dari Kebijakan Fiskal

Kita membagi dampak perekonomian dan kebijakan fiskal menjadi dampak langsung pengeluaran, dampak financial, dan dampak sisi penawaran. Kita belum cukup siap untuk menganalisis dampak financial atas pengeluaran agregat, tetapi kita dapat mengambil langkah penting selain mengganti pengaruh kebijakan fiskal atas penawaran uang atau saldo riil umumnya

Kita devinisikan kebijakan fiskal menjadi sebagai pengeluaran atau perubahan pajak yang mempengaruhi besarrnya arus

penghasilan saat ini. tetapi tidak mempengaruhi penawaran uang Kebijakan moneter “murni” kita devinisikan sebagai kebijakan yang mempengaruhi penawaran uang tanpa secara langsung mempengaruhi arus saat ini. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan kenaikan pajak selain jumlah yang sama tidak mempunyai pengaruh atas penawaran uang atau kekayaan sektor swasta Kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan penjualan obligasi kepada sektor swasta non bank tidak berpengaruh atas penawaran uang selanjutnya dengan memahami bahwa jika kita menaikkan pengeluaran pemerintah kita menganggap bahwa kenaikan pengeluaran itu dibiayai dengan penjualan obligasi kepada sektor swasta non bank, dan jika kita menaikkan pajak. kita menganggap bahwa hasilnya digunakan untuk membayar utang pemerintah kepada sektor swasta nonbank Perubahan kebijakan fiskal semacam ini tidak akan mempengaruhi penawaran uang, tetapi hal ini akan mempengaruhi saldo riil selain bentuk pemilikan obligasi.

2. Permintaan Uang

a. Pengertian Permintaan Uang

Kenyataan bahwa pengeluaran agregat terkait erat dengan tingkat kekayaan dan suku bunga membawa kita, secara logis dan dengan sendirinya kepada masalah yang permintaan akan uang adalah jumlah uang karta (uang kertas dan uang logam) ditambah dengan rekening Bank yang diinginkan oleh para pemilik kekayaan selain sector swasta non-bank dari perekonomian tersebut, pada suatu saat penawaran uang adalah jumlah harta yang tersedia pada suatu saat. Bersama aspek-aspek lain suku bunga merupakan biaya peminjam (coast of borrowing) uang sekaligus biaya iniplisit memegangnya (iniplisit coast of hoiding). Suku bunga keseimbangan adalah suku bunga yang menyebabkan jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang, dan sehubungan dengan itu, menciptakan kondisi keseimbangan moneter (moneter equilibrium) melalui

pengendalian atas penawaran uanglah Bank sentral menjalankan pengaruhnya atas suku bunga bank arena itu atas pengeluaran agregat selanjutnya, melalui pengaruh bank sentral atas permintaan dan penawaran uang dampak financial dan anggaran terasa.

b. Permintaan akan uang untuk Transaksi bersiaga

Selain membahas mengapa orang memegang uang, J M Keynes membagi sumber permintaan menjadi tentang motif. Kendati motif-motif ini sudah berubah banyak sejak masa Keynes, ketiganya masih berguna untuk mengorganisasikan pembahasan dan analisis permintaan akan uang untuk transaksi adalah timbul karena orang membutuhkan uang untuk menjalankan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Motif bersiaga timbul karena orang biasanya memegang saldo diatas perkiraan kebutuhan mereka sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, mereka bisa menghindari ketidak enak dan kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kekurangan uang. Permintaan uang yang bersifat 'spekulatif atau 'ekuiditas' karena selain pertopel tertentu orang memegang uang sebagai suatu harta selain pertopel mereka sumber permintaan akan uang seperti ini senng disebut juga sebagai permintaan akan uang untuk 'pertaper.

Teori tradisional tentang permintaan akan uang transaksi mengansumsi bahwa permintaan proporsional terhadap suku bunga. Tetapi kerana kenaikan suku bunga menakkan frekuensi para pemilik modal menyadari bahwa memasuki pasar obligasi menguntungkan dan kerana itu berpengaruh mengurangi kepemilikan uang rata-rata, ini berarti bahwa permintaan akan uang untuk transaksi adalah fungsi menurun dan suku bunga. Makm tinggi suku bunga makin tinggi biaya memegang uang, relative terhadap harta lain dan kenaikan suku bunga. karena itu menghas-fkan rongsangan untuk mengurangi saldo uang dan menggantinya sengan harta yang lain.

Secara nominal permintaan akan uang untuk bersiaga, sebagaimana permintaan untuk bertransaksi, mungkin sangat erat berkaitan dengan pendapatan nominal. Tetapi sebagaimana

pada permintaan untuk transaksi permintaan untuk bersiaga bisa responsive terhadap perubahan suku bunga Kenaikan suku bunga bisa membuat pembelian harta-menghasilkan (earning assets) begitu menggiurkan sehingga bersedia mengambil resiko yang lebih besar dengan menyimpan saldo untuk bersiaga yang lebih kecil sebagai inibalan untuk hasil bunga tambahan.

c. Tinjauan atan Permintaan akan Uang

Teori tradisional atau klasik tentang permintaan akan uang mengabaikan kemungkinan bahwa uang bisa dipegang sebagai harta perteoel Selain pandangan ini uang dipegang untuk membuat transaksi Lebih dari itu pandangan klasik gagal memasukkan suku bunga sebagai argumen selain fungsi permintaan akan uang mereka bahkan mengansumsi adanya hubungan proporsional antara permintaan akan uang dengan tingkat pendapatan, karena itu teori klasik dapat dinyatakan sebagai

$$M_1 = kp Y$$

Dimana M_1 adalah jumlah nominal uang yang diniinta untuk transaksi adalah rata-rata uang yang dipegang untuk beberapa transaksi. p dengan demikian ditunjukkan dengan pY . Jika kedua sisi itu dibagi dengan p , persamaan diatas menjadi

$$m_1 = kY$$

Dimana m_1 adalah M_1/p adalah permintaan akan saldo riil untuk transaksi (demand tor real transactions balance) Selain bentuk ini persamaan Ini sering disebut versi cambrigge dan teori kuantitas (quantity teory)

Jika k adalah laina rata-rata uang dipegang antara beberapa transaksi. kebalikannya $(1/k)$ adalah kecepatan rata-rata perputaran uang selain satu periode pendapatan-pengeluaran

Theori Keynes tentang preferensi lukuiditas menentukan bahwa permintaan akan uang untuk pertepel adalah fungsi penurunan dan suku bunga dengan demikian teorinya menunjukkan bahwa

$$m_2 = L_2(i)$$

$$L_2i < 0$$

Dimana subkrip 2 menunjukkan permintaan akan uang ke 2 atau preferensi likuiditas.

Menurut Klasik ada dua jenis yang mempengaruhi harapan masyarakat yaitu

- a. Elastic Expectation, yaitu bahwa kenaikan harga akan menimbulkan antisipasi bahwa harga akan terus meningkatkan pembelian akan didorong naik dan karena adanya asumsi masyarakat bahwa harga akan terus naik. maka kenaikan mereka tidak terkendali di mana perekonomian menjadi tidak stabil Pada kondisi seperti ini maka inflasi akan menjadi-jadi Hal yang sama juga terjadi pada tingkat bunga Perekonomian pada kondisi seperti ini membuktikan tesis ala Keynes bahwa perekonomian masih underemploymon Perekonomian seperti ini membutuhkan kebijakan pemerintah Fungsi pemerintah mulai muncul selain mengatur kondisi perekonomian suatu negara .
- b. Inelastic Expectation, idenya bahwa tingkat bunga di masa mendatang selalu akan kembali normal, diasumsikan bahwa pelaku pasar bersikap optimis apabila terdapat kenaikan harga maka hanya bersifat sementara dimana harga akan kembali normal kepanikan massa selain menghadapi inflasi Hal yang sama juga berlaku selain tingkat bunga.

F. KESIMPULAN

Dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas kalau kita hidup sangat membutuhkan uang dan uang mempunyai peranan dan fungsi yang sangat berarti bagi manusia. Dari Zaman ke zaman manusia mencari berbagai alat untuk digunakan sebagai perantara selain hubungannya dengan manusia lain, selain hal ini adalah Uang, peran uang di selain kehidupan manusia tidak dapat dinilai dengan benda lainnya karena uang telah mempunyai kepercayaan yang tebih dari masyarakat

Dengan Uang manusia hidup terasa lebih mudah kalau kita lihat dari sisi fungsi dan peran uang selain kehidupan Manusia Uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan berkembang selain suatu waktu tertentu atau disebut dengan time of money

Uang sangat berperan penting selain kehidupan karena kekayaan manusia dapat dihitung dengan uang manusia dapat mempergunakan Uangnya dengan menginvestasikan kepada perusahaan perusahaan dengan membeli surat berharga berupa saham ataupun obligasi. begitu praktisnya uang karena Uang mudah dipindah pindah tempat sesuai dengan keinginan manusia. Uang dapat di tabung atau digunakan sebagai usaha Uang dapat diputar dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Perlu diingat bahwa uang mempunyai peranan penting selain memotivasi manusia untuk berbuat sesuatu di dunia ini, tentunya tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap harta benda yang kita miliki.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Azwar Kanm Adi Warman Ekonomi Islami. Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta . III T Indonesia. 2002
2. Boediono. Seri Sinopsis Pengantar linu Ekonomi, Ekonomi Moneter Yogyakarta BPFE 1985
3. Faried Wijaya. Seri Penganlar Ekonomika Makro, Yogyakarta BPFE. 1990
4. Husnan Suad. Pudjiastuty Emy, Dasar-dasar Manajemon Keuangan Yogyakarta . AMP-YKPN 2002
5. Iswardono, Uang dan Bank, Yogyakarta BPFE. 1999
6. Manullang, Ekonomi Moneter Jakarta Ghaka Indonesia. 1985
7. Muhammad, Kebyakan Fiskal dan Moneter Selain Islami. Jakarta Salemba Empat, 2002
8. Thomas F Dernburg. Konsep Teori dan Kebijakan Makro Ekonomi, Erlangga, 1994

H. LAMPIRAN

NAMA - NAMA MATA UANG

Afganistan	Afgai	Irak	Dinar
Albania	Lek	Iran	Real
Aljazair	Dinar	Israel	Pound
USA	Dollar	Italia	Lire
Argentina	Peso	Islands	Krona
Australia	Dollar	Jepang	Yen
Austria	Shaffing	Korea Selatan	Won
Brunei	Dollar	Kamboja	R<l
Bolgaria	Lev	Kamerun	Franc
Bangladesh	Taha	Kenya	ShiPing
Belanda	Gulden	Kuba	Dinar
Belgia	Franc	Laos	New Klip
Brazils	Cruzero	Libia	Dinar
Myanmar	Kyat	Libena	Dollar
Canada	Dollar	Libanon	Pound
Ceylon	Rupee	Mexoco	Peso
Chilli	Peso	Mongolia	Tugrik
Cina	Yuan	Muangthai	Bath
Cekoslowakia	Koruna	Mataysia	Rmggit
Doininika	Koruna	Mesif	Pound
Denmark	Krone	Nepal	Rupee
Ettopia	Birr	Nigeria	Naira
Hongana	Fonnt	Norwega	Kroon
Hongkong	Dollar	Turki	Nira
India	Rupee	Vietnam	Dong
Indonesia	Rupiah	Yaman	Imani
Inggris	Pound Sterling		

TEORI MONETER KONVENSIONAL

A. PENDAHULUAN

Teori Moneter bukannya merupakan sesuatu yang dapat dipisahkan dan Teori Ekonomi Ini mempunyai hubungan yang erat dengan semua area / jurusan / bagian dan liniu Ekonomi, termasuk Teori Perilaku konsumen Teori perilaku produsen dan teori keseimbangan umum.

Teori Moneter ini menggunakan dasar asumsi yang digunakan selain Teori Ekonomi Ortodoks. menanyakan hal yang sama. menggunakan konsep dan metode analisi yang sama Adanya perkembangan selain cabang Teori Ekonomi yang lain mempunyai dampak pada Ekonomi Moneter dan sebaliknya Teori Moneter mempunyai kekhususan yang dimilikinya selain arban bariwa selain sejarah perkembangan, Ekonomi moneter mengkhususkan pada pertanyaan tertentu dan beberapa konsep yang telah mempunyai pengaruh besar pada teori Moneter dibandingkan cabang Ekonomi yang lainnya.

Sebagaimana diketahui pada umumnya dikenal ada beberapa kebijaksanaan Ekonomi Makro, secara garis besar disebut ada **PERMINTAAN UANG SELAIN KONVENSIONAL.**

3 (tiga) kebijaksanaan Ekonomi Makro yang terdiri atas :

- a. Kebijakan Moneter
- b. Kebijakan Fiskal
- c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijaksanaan Moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar (JUB) dan kredit stabilisasi harga dan pertumbuhan Ekonomi Banyak yang mempertimbangkan stabilisasi harga sebagai tujuan yang paling utama di negara yang sedang berkembang disebabkan karena di negara yang sedang berkembang banyak yang mengalami inflasi (berat) jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah berkembang dan jika dirasakan bahwa kebijaksanaan moneter di negara yang sedang berkembang lebih efektif dan pada kebijaksanaan fiskal selain mengatasi inflasi seperti halnya di Indonesia Sebenarnya tingkat pertumbuhan JUB di negara yang sedang berkembang harus dapat mengimbangi pertumbuhan Ekonomi ekonominya, untuk menghindari deflesi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi selain mencapai tingkat yang lebih tinggi.

B. PERMINTAAN AKAN UANG SELAIN KONVENSIONAL

Teori permintaan akan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber Ekonomi yang bersifat terbatas Seorang yang memegang uang tunai (*cash*) dihadapkan pada kemungkinan untung dan rugi. Keuntungannya ia mendapatkan tingkat likuiditas dan dapat membelanjakan uangnya namun ia kehilangan peluang mendapatkan nilai-nilai uang (*value added of money*) karena uang tersebut tidak diinvestasikan untuk kegiatan produktif Memegang uang tunai juga akan terkena resiko menurunnya nilai riil uang karena inflasi.

Tingkat permintaan atas saldo ini bergantung pada besarnya tingkat pendapatan riil dan biaya atau resiko memegang uang tunai Pendapatan ini merupakan sumber utama individu untuk membiayai pengeluaran dan ekspektasi terhadap besarnya pengeluaran akan dipenuhi sejumlah uang tunai yang siap bayar perbedaan selain penggunaan variabel pengganti biaya untuk memegang uang tunai riil nya yang akan membedakan teori permintaan akan uang

Dalam teori permintaan akan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu selain menyetor uang tunai riilnya.

1. Teori Permintaan Akan Uang Versi Klasik

Teori permintaan akan uang versi klasik tercermin selain Teori kuantitas uang. Pada awalnya teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang selain perekonomian. Dengan sederhana *Irving Fisher* merumuskan Teori kuantitas sebagai berikut :

$$MV = PT$$

Selain versi lain, volume barang yang diperdagangkan (T) diganti dengan output riil (O). sehingga persamaan tersebut menjadi :

$$MV = PO = Y$$

Selain Teori Ini *Irving Fisher* mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya flow concept, artinya keberadaan ataupun permintaan terhadap uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Besar kecilnya uang ditentukan oleh kecepatan perputaran uang (velocity of money)

Pada saat hampir bersamaan Marshall dan Pigou dari Universitas Cambridge mengembangkan formulasi yang hampir sama namun pada hakikatnya berbeda. Formulasi Teori kuantitas versi Cambridge adalah sebagai berikut :

$$MV = k \cdot PO$$
$$M = k \cdot Y$$

Dengan $k=1/v$

$$M_s = k \cdot PO = k \cdot Y$$

Secara sistematis formula Marshal ini sama dengan formula Fisher namun filosofinya berbeda Marshal-Pigou menyatakan bahwa keberadaan k sebagai turunan $1/v$ merupakan tingkat keinginan seseorang untuk menyimpan sebagian kekayaannya Oleh karena uang dianggap sebagai salah satu cara untuk menyimpan kekayaan, maka uang selain Teori Cambridge adalah stock concept.

Karena uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of Wealth*) Seseorang berhak menentukan pilihan Pribadi (*individual choice*) selain memelihara komposisi kekayaannya apakah akan disimpan selain wujud obligasi (*bonds*), di stock, atau di money, dan lain-lain. Selain perkembangannya Teori Cambridge dijabarkan oleh Keynes yang kemudian melahirkan mazhab Keyneisen. Pada dasarnya, penjabaran Ini merupakan penjabaran individual choce versi Marshal -Pigou.

2. Motif Permintaan Akan Uang

Money demand

Transactions	Precautionary	Speculative	
	Accidents and Misfortunes	Economic and Price floeations	
	Commodity Markets	Stock Markets	Foreign exchange & financial instruments
C I X M			
	Nedd Related	Luxuries and status stumbles	
	Productive	Unproductive & speculative	
Need related goods and services		Luxuries and status symbols	Wasteful spending

Keterangan :

$Y = C+I+X+M$

C = Total konsumsi pemerintah dan swasta

I = Total Investasi pemerintah dan swasta

X = Ekspor

M = Impor

Dari skema diatas terlihat bahwa permintaan akan uang (*money demand*) mampu merealisasikan kesejahteraan sosial jika efisien dan equitable. Sebaliknya permintaann akan uang untuk konsumsi yang berlebihan dan investasi tidak produktif menimbulkan inflasi dan mis alokasi yang menghambat pencapaian kesejahteraan sosial

3. Nilai Uang

Nilai uang dapat diukur atas dasar harga barang di selain negara tersebut maupun dengan mata uang dan negara lain sehingga nilai uang dapat dibedakan menjadi

a. Internal Value of Money

Yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, diaman ini menunjukkan tenaga beli uang terhadap sejumlah barang tertentu (*purchasing power*).

b. Eksternal Value Money

Yaitu nilai sesuatu mata uang diukur dengan mata uang negara lain atau sering disebut sebagai kurs devtsa (exchange rate) Inisal US\$1 = Rp 1 670.00

c. Internal Value of Money

Purchasing power atau oaya belt uang ditentukan oleh harga baranag-barang dan jasa. Artinya bahwa dengan sejumlah uang tertentu akan didapat sejumlah barang lebih banyak jika harga barang-barang tersebut turun. dan sebaliknya jika harga barang-barang tersebut naik, maka dengan uang tersebut. jumlah barang yang dapat dibeli turun

Dengan perkataan lain :

- i. Semakin rendah harga barang-barang semakin tinggi purchasing power uang dan,
- ii. Semakin tinggi harga barang-barang semakin rendah purchasing power uang, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$N = \frac{1}{P}$$

Dimana :

N = Purchasing power (Nilai uang)

P = Harga barang-barang

1. Teori yang Menjelaskan Nilai uang di Atas Disebut Teori Kuantitas (quantity theory of money).

Teori kuantitas uang terdiri atas

- 1) Teori kuantitas sederhana
- 2) Transaction equation dan cash balance
- 3) Teori kuantitas modern

a) **Teori Kuantitas Sederhana**

Teori ini termasuk selain Teori moneter klasik yang dikemukakan oleh David Hume pada tahun 1752. Inti Teori ini adalah bahwa 'harga barang berbanding lurus (proporsional) dengan jumlah uang' Salah satu faktor yang menentukan harga barang tersebut adalah jumlah uang yang beredar, dimana perbandingannya adalah proporsional.

$$P = f(M)$$

Dimana

P = Harga barang-barang

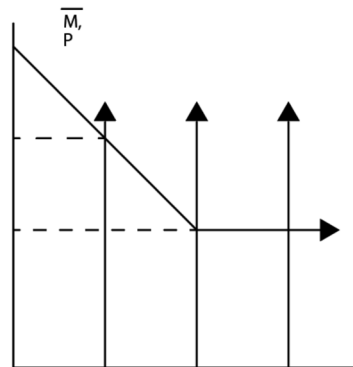
M = Jumlah uang yang beredar (JUB)

Maka apabila JUB naik 2 x maka harga-harga akan naik 2 x pula.

Selain hal ini, naik turunnya nilai uang (*purchasing power*) ditentukan oleh turun naiknya harga barang dimana naik turunnya harga dipengaruhi oleh besar kecilnya JUB dichotomy” poinisahan antara sektor moneter dan sektor riil, atau masing-masing sektor tidak saling mempengaruhi

Implikasi teori moneter Keynes mengatakan bahwa sektor (moneter dan riil) saling mempengaruhi. Hubungan kedua sektor tersebut dapat dilihat dengan menggunakan analisis IS-INYI (yang dikembangkan oleh Hicks). Selain Teori Keynes dikatakan bahwa perubahan JUB bersama-sama dengan permintaan uang akan mempengaruhi tingkat bunga, dan selanjutnya perubahan tingkat bunga mempengaruhi tingkat investasi (riil), yang selanjutnya melalui prases multiplier akan mempengaruhi tingkat output masyarakat (keadaan sebelum full employment) Jadi dapat disimpulkan bahwa selain Teori Keynes tidak ada pemisahan antara sektor riil dengan sektor moneter (dichotomy tidak ada) (Nopirm. Ekonomi Moneter, BPFE Yogyakarta. 2000 berubah searah dengan perubahan pendapatan selain model ini, masyarakat memegang uang jika mereka mengharapkan harga obligasi turun (dengan perkataan lain jika tingkat bunga naik). karena kalau memegang obligasi akan rugi

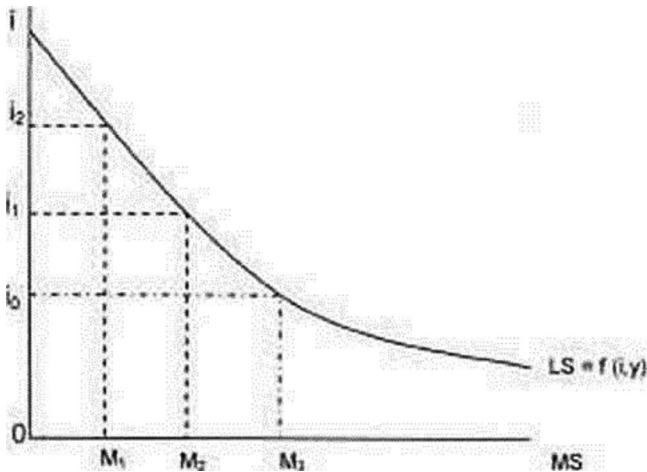
Keseimbangan tingkat bunga d selain model Keynes ditentukan oleh perpotongan antara permintaan akan uang dengan penawaran uang (JUB) seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tingkat bunga keseimbangan mula-mula adalah ditentukan oleh $M_0 = M_j$ Dan jika karena sesuatu naik. V . maka jumlah uang kas yang diminta adalah:



Pada tingkat bunga ini (i), permintaan uang kas melebihi jumlah yang sebenarnya tersedia. Jika penguasa moneter tetap menyediakan uangnya pada tingkat M_0 , maka pemakai uang (RT atau perusahaan) hanya dapat menggunakan jumlah uang tersebut pada kalangan mereka dan selain keadaan seperti ini dicoba untuk menjual obligasi yang mana berarti kenaikan tingkat harga. Tingkat bunga didorong kembali pada V . Pada tingkat bunga ini jumlah uang yang diminta sama dengan JUB. Pada saat tingkat bunga naik, proporsi dan pada kekayaan yang masyarakat ingin memegangnya selain bentuk uang kas menurun dan ada kecenderungan bahwa uang kas yang diinginkan sama dengan uang kas yang tersedia. Pada keadaan ini, tidak ada tendensi untuk merubah pemilik antara uang dengan kekayaan yang lain oleh masyarakat. Teori moneternya Keynes selanjutnya dapat dikatakan sebagai: Teori penentuan tingkat bunga (tidak seperti Teori Klasik, yang mengatakan bahwa M , dan M_a menentukan tingkat harga). Implikasi daripada teori Keynes dan perubahan JUB akan mempengaruhi secara langsung pada tingkat bunga. Ini berbeda dengan Teori moneter klasik. Teori moneter klasik mengatakan bahwa perubahan JUB tidak akan mempengaruhi komposisi output masyarakat. JUB hanya akan mempengaruhi tingkat harga umum (P), sedangkan tingkat dan komposisi output yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh harga relative dan faktor-faktor nonmoneter lainnya. Ini sering disebut sebagai "classical".

Permintaan uang untuk tujuan spekulasi dari Keynes berstandar pada dalil bahwa pada suatu saat akan ada tingkat bunga yang dipandang sebagai tingkat bunga 'normal'. Tetapi jumlah uang yang diminta untuk tujuan spekulasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku relatif terhadap tingkat bunga normal dan jika terjadi perubahan tingkat bunga normal. Dan jika perubahan pada tingkat bunga normal, maka jumlah uang yang diminta pada setiap nilai

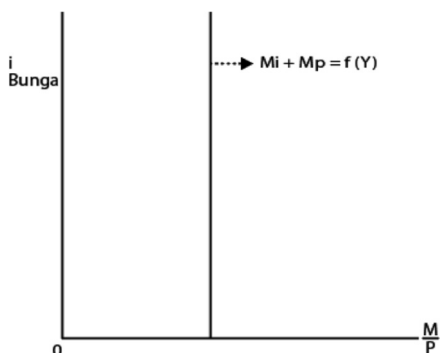
daripada tingkat bunga berubah juga Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini, menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat bunga dengan seluruh permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi merupakan hubungan yang halus, bersinambungan dan berarah negatif.



Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa :

- i. Pada tingkat bunga “tinggi” Jumlah yang digunakan untuk tujuan spekulasi adalah kecil, tetapi jumlah obligasi yang dinilai besar (ingat bahwa $P = \frac{K}{r}$; artinya kalau r tinggi K tetap. maka harga obligasi rendah, sehingga orang suka menyimpan. Obligasi tersebut
- ii. Pada tingkat bunga yang dianggap “normal individu-individu dianggap melakukan penyesuaian jumlah yang diminta untuk tujuan spekulasi tergantung pada preferensinya terhadap obligasi atau uang
- iii. Pada tingkat bunga yang “rendah” masyarakat mulai mengharapkan agar tingkat bunga kembali pada tingkat bunga “normal Pada keadaan ini masyarakat lebih suka memegang uang kas nya karena pada tingkat bunga yang rendah ini penghasilan dari kekayaan juga rendah sekali (“V dianggap tingkat bunga yang rendah)

Ringkasannya kita telah membagi permintaan uang kas ke selain komponen untuk tujuan spekulasi yang berubah secara berlawanan arah dengan perubahan tingkat bunga dan komponen untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga yang Jika permintaan uang untuk tujuan kedua hal ini dikaitkan dengan "tingkat bunga", maka dianggap bahwa kedua permintaan ini adalah "inelastic" terhadap tingkat bunga



Anggapan di atas dimaksudkan untuk menyederhanakan analisis lebih lanjut karena sebenarnya (berdasarkan bukti-bukti) permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi juga oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga semakin membuat orang tertarik pada hasil (yield) keakhsan dan individu-individu mungkin akan menginginkan memegang uang kas untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga lebih kecil agar tidak menanggung risiko Selain gambar di atas terlihat bahwa kedua permintaan uang tersebut adalah inelastic terhadap tingkat bunga

d. Permintaan Uang untuk Spekulasi

Ini merupakan tujuan pemegang uang kas ketiga dan Keynes Uang kas diinginkan untuk dipegang karena pemegang uang ini dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang; spekulasi ini dikaitkan dengan ketidak-tentuan pengharapan-pengharapan (uncertain expectation; dari tingkat bunga yang akan datang, karena nilai kapital daripada klaim terhadap (fluktuasi) pendapatan berubah

secara berlawanan dengan tingkat bunga pasar. hal ini disebabkan karena ketidak sempumaan pasar kredit.

Keynes menjelaskan bahwa setiap masyarakat akan mempunyai pengharapan tertentu akan perubahan tingkat bunga Tetapi secara keseluruhan, hubungan antara permintaan akan uang dengan tingkat bunga adalah menurun dan halus (smooth downward sloping) Di mana tujuan spekulasi dari Keynes ditandai dengan suatu kepastian tetapi inelastic terhadap harapan akan tingkat bunga sebagai ganti daripada ketidakpastian uang kas selain madal ini dikaitkan dengan permintaan akan uang "beku" = idie, untuk tujuan mencari untung (atau menghindari kerugian) dan perubahan nilai - nilai kekayaan capital.

Di Mana :

Mt = Permintaan uang untuk transaksi

Y = Pendapatan

$$\frac{dMt > 0}{dY}$$

Artinya, semakin tinggi pendapatan; semakin banyak uang diperlukan oleh perusahaan dan perseorangan untuk tujuan transaksi Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga merupakan refleksi dan ketidaktentuan yang menyangkut (berkaitan dengan) pendapatan dan pengeluaran Mengikuti pendapat Keynes, dianggap bahwa permintaan uang kas untuk tujuan berjaga-jaga adalah fungsi dan tingkat pendapatan Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dikaitkan dengan pendapatan adalah sejalan bahwa adanya cadangan sesuatu hal yang tak terduga dikaitkan dengan skala operasinya

$$Mp = f(Y)$$

Di Mana

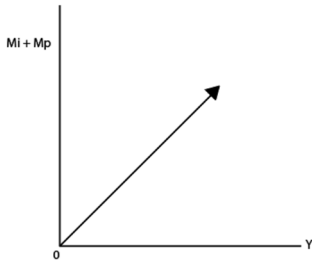
Mp = Permintaan uang untuk berjaga-jaga

Y = Pendapatan

$$\frac{dMp > 0}{dY}$$

Penggabungan permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga adalah :

$$M_1 + M_p = f(Y)$$



Nampak bahwa permintaan unruk kedun tujuan di atas merupakan fungsi yang menarik dan pendapatan

1. JUB merupakan variable kunci di selain penentuan kebijaksanaan untuk mengontrol tingkat harga dan pendapatan
2. Inflasi atau defleksi dapat dicegah dan ditanggulangi hanya jika JUB per unit output dapat dijaga kenaikannya dan penurunan
3. ‘Velocity’ masih dianggap stabil dan di sini terlepas dan JUB.
4. “Velocity”-nya Friedman lebih stabil dan pada fungsi konsumsinya Keynes
5. Elektivitas kebijaksanaan Fiskal tergantung pada darimana pembiayaannya selain artian Jumlah deficit APBN itu dibiayai oleh pinjaman dari masyarakat tanpa kenaikan JUB Jika defisit itu dibiayai dengan meminjam uang dan masyarakat akibat langsung dan defisit akan dapat dumbangi Tetapi jika defisit itu dibiayai dengan percetakan uang maka akibat langsungnya tidak dapat (sulit) diimbangi.

2. Teori Permintaan Uang Keynes

Perumusan Teori permintaan uang Keynes dikenal sebagai Teori ‘Liquidity Preference’ di selain Teorinya Keynes membagi permintaan uang atas 3 kategori, yaitu

- a. Permintaan untuk tujuan transaksi
- b. Permintaan untuk tujuan berjaga-jaga
- c. Permintaan untuk tujuan spekulasi

Permintaan untuk transaksi meningkat karena uang diperlukan untuk pembayaran. Permintaan untuk berjaga-jaga dan spekulasi meningkat karena kebutuhan yang tidak terduga.

Keynes menganggap bahwa permintaan uang kas untuk memenuhi permintaan motif pertama dan kedua (transaksi dan berjaga-jaga), yang berubah karena perubahan di selain pengeluarannya, tetapi permintaan untuk kedua motif ini adalah "interest inelastic" atau tidak dipengaruhi oleh berubahnya tingkat bunga.

1 & 2 Permintaan untuk Transaksi dan Berjaga-jaga

Perlu seseorang ataupun masyarakat (pemerintah) selalu menginginkan memegang uang kas untuk tujuan-tujuan ini disebabkan karena penerimaan tidak selalu selaras (sepadan) dengan pengeluaran. Hal ini disebabkan adanya kesenggangan waktu (time lag) antara penerimaan dan pengeluaran. Permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkat jika penerimaan dan pengeluaran tidak sinkron dan pada berbagai keadaan utang-utang tidak secara sempurna dapat dibagi atau ada biaya (transaksi) untuk membuat utang. Dan permintaan uang untuk transaksi dianggap tergantung pada tingkat pendapatan.

$$M_t = f(Y)$$

- vi Pajak
- vii Teknotogi (Diaya)
- viii Transportasi (sistem)
- ix Selera

Fungsi di atas berdasarkan anggapan bahwa semua rumah tangga memaksimumkan kepuasannya selain arti "real" dan diharapkan agar fungsi ini bebas (tidak dipengaruhi) oleh variabel-

variabel nominal Dengan mentransformasikan fungsi permintaan uang di atas, kita dapat menentukan besar kecilnya pendapatan

Persamaan ini mirip dengan persamaan kuantitas dan satu Teori Klasik

$$M = kY \cdot \frac{1}{V} \cdot Y$$

atau

$$Y = \frac{1}{k} M \cdot VM$$

Perbedaan pertama pada “Y” -nya, di mana pada persamaan Friedman “Y” adalah “permanent income”, sedang “Y” nya klasik adalah “current income”

Perbedaan kedua adalah Danwa M yang digunakan oleh Friedman adalah

$M_2 = M_1 + TD$. sedangkan yang digunakan klasik adalah M,

Perbedaan ketiganya pada V yang selain klasik dianggap tetap dan hanya berubah karena perubahan faktor-faktor kelembagaan Tetapi di selain teorinya Friedman, V dipengaruhi oleh faktor-faktor

- x Ratio antara “human wealth’ dengan ‘nonhuman wealth” (W)
- xi Tingkat harga umum (P)
- xii Penghasilan dari obligasi (Re)
- xiii Penghasilan dari saham (R_s)
- xiv Tingkat perubahan harga (inflesi)

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$$

“portmanteau variable” antara lain :

- xv Pajak
- xvi Teknologi
- xvii Transportasi
- xviii Selera

Implikasi dan Teori kuantitas Friedman adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adanya tambahan JUB tidak akan mempengaruhi sektor riil (classical dichotomy).
2. Bahwa tingkat harga umum akan selalu berubah mengikuti JUB.

c) **The Modern Quantity Theory of Money**

Dikemukakan oleh **Milton Friedman** selain bukunya **“The Quantity Theory of Money-A Restatement”**. Pangkal tolak pembahasan ini adalah bahwa permintaan untuk barang-barang tahan lama, ini dimaksudkan bahwa pemegang sejumlah uang kas oleh seseorang dipandang sebagai pemegang atas suatu barang. Uang dimaksudkan sebagai kekayaan atas barang kapital yang mana permintaan akan uang merupakan masalah di selain Teori kapital. Di selain analisisnya Friedman menggunakan definisi uang Sembungan

$$M_2 = \text{Kartal} + \text{DO} + \text{TD}$$

Di Mana

DD = Demand deposit

TD = Time deposit

Pemilihan M2 ini dikarenakan bahwa time deposit mempunyai substitusi yang erat dengan uang (Tentunya untuk perekonomian yang modern sudah maju) Selain kaitan dengan Teorinya Friedman mendefinisikan “pendapatan” sebagai total pendapatan tetapnya selain benluk uang “Permanent income” adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan oleh rumah tangga selaina periode tertentu Fungsi permintaan uang dari Friedman dapat dituliskan sebagai berikut:

$$M = f(Y_p, W, P, R, R \frac{1}{p} \frac{dP}{dt} u)$$

di mana

M = "Stock" uang kas yang diminta (nominal)

Y_p = "Permanent income" (nominal)

W = Ratio antara "human wealth" dengan "nonhuman wealth"

R = Penghasilan dan obligasi

R = Penghasilan dan saham

$$\frac{1}{p} \frac{dP}{dt} u)$$

"the expected rate of place inflation", tingkat harapan akan kenaikan harga setiap waktu

u = Suatu "portmanteau variable" antara lain :

k = Bagian dan kekayaan

A = Kekayaan (assets)

Hakikat dan persamaan di atas adalah jika sesuatu bangsa menjadi semakin makmur dan pasar terbuka bertambah luas. maka jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat selain kaitannya dengan pendapatannya akan terus bertambah besar.

Kelemahan-kelemahan Teori Kuantitas

1. Bahwa selain kenyataan "perubahan jumlah uang (M) tidak secara langsung menaikkan 'money spending' * penggunaan uangnya

Misalnya :

Bank Sentral menambah JUB melalui pembelian surat-surat berharga di mana selain pembelian Ini akan menaikkan Likuiditas Bank-bank Umum tetapi naiknya likuiditas ini belum tentu menaikkan 'money spending' mungkin yang naik hanya "Idle balances" saja.

2. "Velocity circulation of money V", tidak bersifat stabil pada masyarakat yang modern Karena di dalam masyarakat modern uang merupakan alat pembayaran penimbun kekayaan sehingga jika ada kelebihan uang akan digunakan untuk berbagai alternatif.

- a. Menambah kas
- b. Menambah bank deposit
- c. Menambah pembelian surat-surat berharga
- d. Menambah pembelian barang-barang dan jasa

Di mana dalam memilih alternatif atas kelebihan uangnya tersebut diperhatikan

3. Likuiditas
- 4.. Hasil
5. Risiko

Karena ketiga hal tersebut tidak stabil akan mempengaruhi prkirannya, sehingga mempengaruhi penggunaan uang dan yang akhirnya mempengaruhi V kecepatan peredaran uang Sehingga tidak dapat dianggap selalu stabil dan hanya berubah pada jangka waktu yang panjang (faktor-faktot kelembagaan).

Kesimpulan dan Teori secara umum adalah

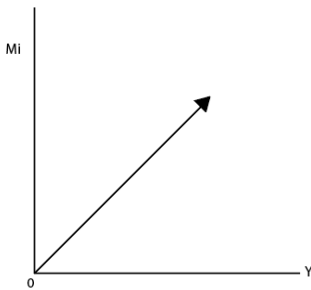
1. Bahwa adanya tambahan JUB akan dibelantakan semuanya tanpa dipikirkan kemungkinannya untuk ditabung
2. Bahwa “V = Velocity of money” dan T* dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor nonmoneter

“Aggregate demand for money” untuk tujuan transaksi ini berubah secara proporsional dengan tingkat pendapatan nasional :

$$M_1 = k Y \quad (6.3)$$

Di mana :

k = adalah kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatannya selain bentuk uang kas.



k = Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bag fan dan pendapatannya selain bentuk uang kas

Persamaan (6.3) ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan nasional menentukan besar kecilnya permintaan uang untuk tujuan transaksi. Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar pula permintaan uang untuk tujuan transaksi dan sebaliknya :

$$M = kY \quad (6.3.1)$$

Persamaan (6.3.1) ini dikemukakan oleh Alfred Marshall (cash balance equation) yang berarti bahwa di selain tiap keadaan masyarakat akan selalu ada sebagian dari pendapatnya yang dianggap layak untuk dimilikinya selain bentuk uang kas untuk memenuhi tujuan transaksinya.

Misalnya $k = 1/5, 1/10, 1/20$ dan sebagainya.

Modifikasi dan persamaan (6.3.1) adalah

$$M = kY + k^1 A \quad (6.4)$$

di mana:

persamaan (6.1) ini berarti bahwa pembayaran oleh pembeli adalah identik dengan penerimaan oleh penjual.

Persamaan (6.1) dapat diubah menjadi

$$P = \frac{MV}{T} \quad (6.2)$$

Di mana persamaan (6.2) menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi seluruh pengeluaran untuk transaksi harga umum.

Persamaan (6.1) dikenal dengan "Transactions Variant" karena ini mengukur seluruh pengeluaran untuk transaksi di

mana ini sesuai dengan anggapan klasik bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga serta uang tidak secara langsung dapat memenuhi kepuasan.

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh pengeluaran untuk transaksi barang antara (intermediate goods) masuk di selain T, maka nilai output yang sebelumnya dihitung lebih dari satu kali (double counting), sehingga

$$MV = PT > GNP$$

Persamaan (6,1) menyatakan bahwa permintaan akan uang akan naik akibat kebutuhan masyarakat untuk melakukan pertukaran (transaksi) meningkat. Atau boleh dikatakan bahwa permintaan akan uang ini dikaitkan dengan volume perdagangan yang sedang berlangsung selain perekonomian.

Perlunya masyarakat memegang uang untuk tujuan transaksi ini disebabkan pemegangan uang kas itu merupakan keputusan yang terbaik selain kaitannya dengan waktu pembayaran dan penerimaan yang berbeda (time lag).

Pada umumnya masyarakat memegang rata-rata sejumlah tertentu atas kekayaannya selain bentuk uang kas. Motif pemegangan uang kas untuk tujuan transaksi ini merupakan bagian 'integral' dan Teori moneter klasik dan disebut sebagai "the transactions demand for money".

Permintaan uang untuk tujuan transaksi ini meningkat karena

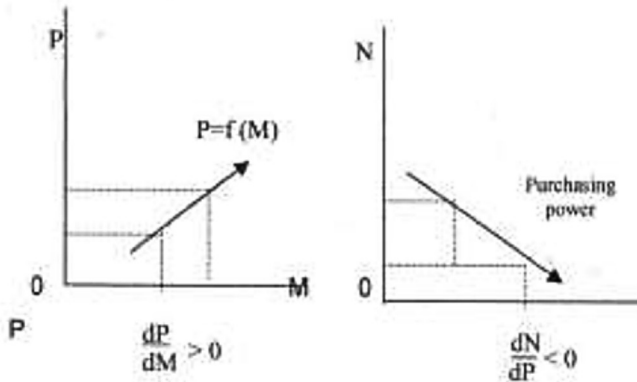
1. Perbedaan waktu (time lag) antara penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar.
2. Ketidaksempurnaan di selain pasar kredit (credit markets)

Jika pasar kredit sempurna maka orang tidak perlu mempunyai uang kas untuk menjembatani 'gap' antara penerimaan dan pengeluarannya.

Uang digunakan untuk transaksi ini dikarenakan untuk mengurangi waktu penggunaannya selama transaksi tersebut berlangsung.

Anggapan yang dipakai selain teori ini adalah bahwa

- Uang hanya untuk tujuan transaksi dan oerjaga jaga
- Velocity yang adalah tetap
- Barang-barang dan jasa tetap, karena asumsi FE (Full Employment)



b) Transaction Equation

Ini merupakan penyempurnaan teori yang sebelumnya yang dilakukan oleh Irving Fisher. Fisher dikatakan bahwa setiap pembayaran oleh Rumah Tangga Pengusaha ataupun Pemerintah pada pihak lain dikatakan sebagai perkalian antara Harga dan Kuantitasnya.

$$PT = \sum_{i=1}^n P_i \cdot T_i = P_1 \cdot t_1 + P_2 \cdot t_2 + \dots + P_n \cdot t_n$$

Sedangkan total transaksinya = MV,

Dimana :

M = Jumlah uang diminta

V = Rata-rata perputaran setiap unit uang yang digunakan selain transaksi jual beli (velocity of money)

Menurut Fisher antara lain kedua hal tersebut di atas harus selalu sama :

$$MV = PT \quad (6.1)$$

C. PENGERTIAN DASAR TEORI MONETER

Teori moneter bukannya merupakan sesuatu yang dapat dipisahkan dan Teori Ekonomi. ini mempunyai hubungan yang erat dengan semua area jurusan/bagian dan liniu Ekonomi, termasuk Teori Pelaku Konsumen, Teori Perilaku Produsen dan Teori Keseimbangan Umum

Teori moneter ini menggunakan dasar asumsi yang digunakan selain Teori Ekonomi Ortodoks menanyakan hal yang sama. menggunakan konsep dan metode analisis sama Adanya perkembangan dalam cabang Teori Ekonomi yang lain mempunyai dampak pada Ekonomi Moneter dan sebaliknya Teori Moneter mempunyai kekhususan yang dimilikinya selain artian bahwa selain sejarah perkembangan, Ekonomi moneter mengkhususkan pada pertanyaan tertentu dan beberapa konsep yang telah mempunyai pengaruh besar pada teori moneter dibandingkan cabang Ekonomi yang lainnya

Pada bab ini hanya akan disajikan garis besar beberapa pertanyaan pokok secara konseptual serta mencoba menjawab beberapa pertanyaan dasar

1. Model

Teori Ekonomi menggunakan model untuk menyederhanakan realitas dunia nyata Model di sini dtartikan sebagai hubungan Ekonomi dan perilaku dan para individual di selain masyarakat serta dampaknya pada perekonomian Pada bab ini dicoba dilihat dan dimelihat bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap variabel Ekonomi yang lainnya

Model yang paling sederhana adalah sebagai berikut :

$$M^0 = f(r^A.W)$$

$$M^S = f(r^A.R)$$

$$M^0 = M^S$$

Dimana M^0 dan M^S adalah permintaan agregat uang sorta penawaran uang atau JUB^1)

W = Kekayaan total (Wealth)

R = Cadangan selain sistem perbankan (Reserve)

r_a = Penghasilan/penghasilan dari kekayaan (Return)

2. Stock dan Flows

Selain model ada perbedaan pokok antara 2 (dua) kategori variabel yaitu yang termasuk selain kateogon "STOCK" dan yang termasuk oalain "FLOWS" perbedaan Ini bertaku secara keseluruhan pada Teori Ekonomi. Teori Konsumsi dan Teori Pasar Tenaga Kerja. serta pada Teori Moneter, tetapi hal ini sangat borarti khususnya pada teori moneter Ekonomi moneter berisi beberapa contoh pendekatan di mana pengertian yang kurang tepat tentang kedua kategori atas sering menimbulkan perdebatan.

Perbedaan antara 'STOCKS' dan 'FLOWS' berkaitan ukuran variabel selain bentuk waktu.

Variabel "STOCKS" adalah variabel yang dapat diukur hanya pada suatu saat/waktu tertentu dimana kualifikasinya tidak mempunyai dimensi waktu.

Variabel "FLOWS" adalah variabel yang dapat diukur hanya sebagai sebagai derajat/ laju / tingkat pada suatu periode waktu tertentu meskipun mungkin periode waktu tersebut sangat kecil yang mana kualifikasinya mempunyai dimensi waktu.

Sebagai contoh Misalnya pemilikan obligas oleh seseorang merupakan variabel "STOCKS", sedangkan tingkat bunga yang ditenmanya selaina meimiliki / memegang obligasi tersebut merupakan variabel "FLOWS".

3. Harga, Variabel Nominal dan Variabol Rill

Karakteristik perekonomian pertukaran adalah dimana barang barang dan jasa ditukarkan pada suatu perbandingan tertentu Hal ini merupakan karakter khususnya pada perekonomian moneter kapitalis Perbandigan/rasio pertukaran merupakan

harga relatif dan barang-parang. jika ada sejumlah "N" barang harga relatif. $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ / P dan seterusnya

Lebih lanjut selain perekonomian moneter setiap barang mempunyai harga selain bentuk -uang". Jika ada "N" barang. maka akan ada "N" harga barang selain uang, P_1, P_2, \dots, P_n Dan biasanya uang dipakai sebagai "NUMERAIRE" atau unit pengukuran harga

Teori Moneter tidak membicarakan harga relatif dari barang-barang atau bahkan harga selain uang untuk setiap barang secara Individu. Tetapi lebih pada pembicaraan harga selain uang untuk seluruh barang.

Selain teori moneter ada 2 (dua) variabel khusus yang sering muncul yaitu variabel riil dan variabel nominal

D. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Tujuan dan kebijakan moneter adalah menstabilkan harga, mengusahakan full employment dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi kebijakan moneter umumnya berurusan dengan jumlah uang yang beredar atau tingkat bunga di selain perekonomian yang bertanggung jawab mengenai hal ini di beberapa negara diserahkan pada Bank Sentral. yang bersifat otonom. Di beberapa negara yang lain ada juga Bank Sentra yang bersama-sama dengan Departemen Keuangan mengatur kebijakan moneter jadi tidak otonom

Peranan kebijaksanaan moneter selain suatu perekonomian biasanya nampak jelas pada waktu perekonomian tersebut berusaha untuk menepatkan dan memelihara suatu tingkat kestabilan Ekonomi Selain masa pembangunan umumnya disadari betapa pentingnya kebijaksanaan Ekonomi yang lain seperti kebijaksanaan perdagangan, kurs devisa, perpajakan. kebijaksanaan industri dan produksi, kebijaksanaan pertanian, tapi sering dilupakan orang betapa pentingnya kebijaksanaan moneter. Umumnya kebijaksanaan moneter dianggap kurang mempunyai

peranan yang menentukan bagi laju pertumbuhan Ekonomi apalagi selain masalah pemerataan pendapatan dan persediaan kesempatan kerja. Sebenarnya, peranan kebijaksanaan moneter itu sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, kemajuan industri, kemajuan keuangan, kesempatan kerja, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Sering dikaitkan orang kebijaksanaan moneter selain suatu pola kebijaksanaan Ekonomi pada umumnya. Selain pada itu perlu disadarkan bahwa kebijaksanaan moneter tidak saja mendorong pertumbuhan Ekonomi tapi juga bisa mempertahankan kestabilan Ekonomi serta mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sistem moneter termasuk lembaga keuangan, merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat di samping sarana lain seperti kebijaksanaan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan. Selain hal ini dipertukan kebijaksanaan moneter oleh sebab pembentukan tabungan yang sangat diperlukan bagi sumber pembiayaan pembangunan akan bisa menunjukkan proses pembangunan itu sendiri. Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti) Bank Central, Bank Umum, Bank Pembangunan dan lembaga keuangan yang non bank bisa digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat untuk membiayai kegiatan Ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan. Kebijakan moneter dimaksudkan untuk mendorong pembentukan tabungan masyarakat, kemudian menyalurkan kembali tabungan tersebut melalui lembaga keuangan selain bentuk penyediaan uang dan kredit atau sering disebabkan alokasi tabungan ke selain investasi. Kebijakan moneter yang baik dan dilakukan dengan waktu yang tepat dapat merupakan bantuan yang sangat berharga untuk merendahkan suatu kelesuan Ekonomi yaitu melalui isi pengaturan persyaratan kredit yang dapat mempengaruhi iklim finansial sehingga melalui kredit yang bisa diperoleh dengan mudah akan mendorong hasil konsumsi

para konsumen sehingga bisa menambah kegairahan pasar dan kegiatan Ekonomi masyarakat.

Kebijaksanaan moneter yang praktis dan fleksibel sangat diperlukan selain suatu keadaan Ekonomi yang tertentu. Kebijakan moneter yang luwes berarti suatu kemampuan yang tinggi untuk bergerak dengan cepat menjawab perubahan-perubahan suasana Ekonomi Keuntungan utama dan kebijaksanaan moneter atas kebijaksanaan lainya untuk mempongaruhi situasi Ekonomi ialah bahwa ia dapat bertindak dengan cepat dan pengaruhnya dapat dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat Dengan demikian seandainya kegiatan perusahaan mulai berkurang maka tindakan untuk memudahkan kredit pada suatu badan tertentu dapat membentuk menaikkan kembali hasrat untuk mendapatkan kredit dan bisa menambah kegairahan aktivitas Ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga kebijaksanaan moneter yang seperti demikian akan bisa membantu merendahkan resesi melalui perubahan tingkat bunga modal terutama tingkat bunga kredit jangka pendek yang tercerinin sebagai biaya-biaya walaupun pengaruhnya sukar diduga. Kebijakan moneter seperti itu dapat meringankan inflasi dan dapat menolong untuk menahan kenaikan harga sebelum dapat memasuki struktur biaya sehingga tidak akan bisa terjadi spiral Inflasi yang hebat

Beberapa kebijaksanaan moneter yang telah banyak dipraktikkan terutama di negara kita sejak orde baru Beberapa kebijaksanaan moneter yang telah banyak dipraktikkan terutama di negara kita sejak orde baru adalah

- a. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan
- b. Memberikan kredit selain jumlah yang cukup besar baik kepada sektor-sektor yang proritas maupun sektor-sektor yang non proritas untuk meningkatkan kesempatan kerja pada pemerataan pendapatan masyarakat
- c. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan Ekonomi

- d. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan Ekonomi lemah melalui pemberian kredit-kredrt KIK dan KMKP.

Misalnya meningkatkan eflsiensi kerja dan peranan lembaga keuangan untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat selain rangka memperlancar kegiatan perdagangan masyarakat dan lalu lintas pembayaran uang.

Kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan kebijaksanaan keuangan negara dan neraca pembayaran merupakan tentang aspek kebijaksanaan Ekonomi makro yang erat kaitannya satu dengan yang lain Secara bersama-sama ketiganya harus diusahakan agar serasi dan seimbang. yang satu menunjang yang tain dan secara bersama-sama mengusahakan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan, terutama sasaran-sasaran yang berkaitan pada pertumbuhan Ekonomi. pemerataan kesempatan kerja kesempatan berusaha dari menciptakan suatu keadilan Ekonomi bagi seluruh komponen-komponen ataupun lapisan-lapisan masyarakat, yang kesemuanya akan bisa menciptakan kestabilan Ekonomi

Kebijaksanaan moneter yang cocok untuk kegiatan-kegiatan perekonomian pada masa sekarang merupakan sarana untuk meningkatkan pembentukan tabungan masyarakat dan pengarahan penggunaan tabungan tersebut atau lokasi tabungan ke selain investasi yang sangat berguna bagi sasaran-sasaran pembangunan Ke semuanya itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dengan kebijaksanaan moneter dan perbankan dapat pula menunjang suasana dan meningkatkan kegiatan serta kegairahan perekonomian masyarakat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. maka pengumpulan tabungan masyarakat maupun penyalurannya harus bisa dilakukan oleh sektor perbankan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan ini bisa dilakukan dengan menerapkan pola kebijaksanaan

moneter perbankan maupun perkreditan yang bisa menjawab tantangan-tantangan Ekonomi melalui perbaikan-perbaikan sistem dan pelayanan. perbaikan-perbaikan manajemen. perbaikan cara kerja perantara keuangan untuk segala kegiatan masyarakat sehingga kegairahan Ekonomi bisa diciptakan. Ke semuanya ini bisa disatupadukan untuk mengisi semua tahap pembangunan serta isi-isi kerja pembangunan yang bisa meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kebijaksanaan moneter yang dijalankan bersama-sama oleh Bank Sentral, Bank-bank Umum, Bank-bank Koperasi, Bank-bank Pembangunan dan Bank-bank sekunder yang ada di seluruh Indonesia baik di Bank-bank milik pemerintah maupun Bank-bank swasta nasional maupun bank asing semuanya disatupadukan bersama dengan semua lembaga-lembaga keuangan non bank baik lembaga-lembaga asuransi, lembaga-lembaga penertiban dan perdagangan surat berharga ataupun lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan bisa digunakan untuk mengerahkan masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut selain alokasi-alokasi yang sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan. Pada dasarnya kebijaksanaan moneter bisa kita ringkas dengan melihat bagaimana kebijaksanaan moneter dan pembangunan itu digabungkan sebagai sasaran untuk bisa meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan perbankan kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter digunakan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan Ekonomi lemah yaitu melalui pemberian KIK / KMKP dan fasilitas-fasilitas lainnya serta mendorong perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor non formal, serta pemerataan pendapatan masyarakat dan menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat sehingga bisa tercapai usaha-usaha swasembada ataupun usaha-usaha lain.
- b. Kebijakan Moneter digunakan Juga untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat yaitu menghimpun semua

simpanan masyarakat baik selain bentuk giro, tabungan, deposito ataupun selain bentuk surat berharga Kemudian olen lembaga-lembaga keuangan (baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank) disalurkan kembali kepada masyarakat untuk digunakan bagi pembiayaan- pembiayaan investasi.

- c. Kebijakan moneter digunakan juga untuk bisa memelihara dan meningkatkan kestabilan Ekonomi khususnya untuk menjaga kestabilan harga-harga dengan menekan tingkat inflasi serendah mungkin dan kalau dapat selalu berada selain posisi single digit.
- d. Kebijakan moneter juga digunakan untuk menyempurkan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan selain rangka pengembangan sistem lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap sehingga pengaturan dan arah pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Salah satu pegangan yang penting dan kebijakan moneter adalah bagaimana mengatur kebijakan suku bunga dan kebijakan kredit Selain Ikatan ini perlu diperhatikan bahwa kebijakan suku bunga akan bisa menunjang tercapainya sasaran kebijakan moneter yang bisa mendorong tabungan masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi, sedangkan di lain pihak kebijakan suku bunga akan ikut juga mendorong kegiatan produksi, terutama kegiatan produksi, dan industri yang bisa banyak menyerap tenaga kerja serta menggairahkan kegiatan usaha gotongan Ekonomi lemah Misalnya melalui penetapan tingkat bunga yang rendah, yaitu kredit KIK/KMKP, kredit mini, kredit candak-kulak, kredit pedesaan dan sebagainya.

Selain era pembangunan perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan Sebagai lembaga keuangan, Bank amat dibutuhkan masyarakat Karena Itu, pengaturan gerak langkah perbankan

sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter Pemerintah sebagaimana eratnya kaitan antara Bank dan uang Pengaturan arus uang dari dan ke masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengetolaan moneter di Indonesia dipimpin Dewan Moneter yang diketahui oleh Menteri Keuangan dan anggotanya, Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Sentral. Sebagai anggota Dewan Moneter, Bank sentral disertai tugas untuk membina Bank-bank, mengatur peredaran uang dan menjalankan operasi moneter. Karena itu, Bank sentral adalah pelaksana dan kebijaksanaan moneter Pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Moneter.

Dewan Moneter, sebagaimana diatur selain bab VI Undang-undang no 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, memberikan pengarah dan pedoman kerja kepada Bank Sentral demi menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang diatur menurut Undang-undang No 13 Tahun 1968 dan disertai tugas untuk mengatur jumlah peredaran uang di Indonesia, sehingga selain tugas di Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sirkulasi yang memegang hak oktroi, yaitu hak untuk mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagai bukti, bisa kita perhatikan bahwa semua uang yang beredar adalah uang Bank (Sinungan Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara Jakarta, 1990)

E. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Jenis kebijakan moneter yang umum digunakan di negara yang sedang berkembang sama dengan yang digunakan di negara-negara yang sudah maju Untuk ini akan dibicarakan terlebih dahulu macam / jenis alat kebijakan moneter yang bisa digunakan di negara maju dan juga teori yang mendasari kebijakan ter-

sebut serta akan dibicarakan hambatan-hambatan penggunaan alat kebijakan moneter tersebut di negara yang sedang berkembang

1. Bank Rate Policy.

Kebijakan Ini sering pula disebut sebagai Politik Diskonto. di mana Bank Sentral menentukan tingkat diskonto atau *first class bills*. Bentuk kebijakan ini berasal dari Inggris di mana digunakan untuk mengukur berapa diskonto yang dikenakan terhadap bank-bank umum di Inggris juga Untuk menstabilkan neraca pembayaran Tidakkan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah merubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum untuk sejumlah peminjamannya pada Bank Sentral Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga yang dikenakan kepada nasabah bank-bank umum tersebut. Tinggi rendahnya tingkat bunga bank umum akan mempengaruhi besarnya kredit yang diminta oleh masyarakat yang akibat akhirnya akan terlihat pada fluktuasi JUB.

Kebijakan ini di Inggris dikenal sebagai tingkat minimum pinjaman (*minimum lending rate*. INIR) Biasanya besarnya INIR di Inggris lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan sering disebut sebagai *a penal rate* Selain hal ini Bank Sentral di Inggris bertindak sebagai sumber terakhir pinjaman (*the lender of the last resort*) Sedangkan di USA, bank rate atau bisa disebut sebagai *Federal Rate* berada di bawah tingkat bunga pasar yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa *Federal Reserve Bank* bertindak sebagai sumber pertama pinjaman (*the lender of the first resort*).

Kebanyakan Bank Sentral di negara yang sedang berkembang bertindak sebagai sumber terakhir pinjaman karena menggunakan politik diskonto sebagai *a penal rate* Cara tekerja bank rate adalah sebagai berikut : Bank Sentral menentukan besarnya bank rate ini. kalau terjadi kenaikan pada tingkat bank rate akan mendorong kenaikan ongkos pinjaman Bank arena Bank-bank umum di Inggris masih *loaned up to the hilt* (meminjamkan sampai batas minimum), maka kenaikan bank rate akan

secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman kepada masyarakat. Jika tujuan penguasa moneter adalah menurunkan permintaan agregat maka kenaikan tingkat bunga pinjaman akan bermanfaat untuk mengawasi pengeluaran karena paman akan menjadi mahal. Dengan cara yang sama dapat dilihat jika bank rate turun maka diharapkan akan merangsang perekonomian karena penurunan bank rate dapat ditentukan menurunnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank terhadap nasabah, turunya tingkat bunga pinjaman diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi.

Efektifitas bank rate di negara-negara yang sedang berkembang (NSB) banyak menghadapi hambatan karena karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Politik Diskonto tidak merupakan kebijakan yang teasa digunakan oleh bank-bank sentral di negara yang sedang berkembang
2. Kelebihan likuidasi yang biasanya dialini oleh bank-bank umum di negara yang sedang berkembang menghalangi tumbuhnya kebijakan tersebut
3. Selain keadaan tertentu bank-bank umum mungkin tidak diwajibkan untuk menaikkan tingkat bunganya dan ini tidak berpengaruh pada braya maupun tersedianya kredit
4. Dan masih banyaknya sektor yang *nonmonetised* di negara yang sedang berkembang mempunyai pengaruh pada efektivitas bank rate, artinya akan menghambat efektivitas bank rate tersebut.

2. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Kebijakan ini biasanya diartikan sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral. dengan tujuan untuk

- i. Menjaga Kestabilan harga obligasi / Surat-surat berharga dengan jalan menstabilkan tingkat bunga. Hal ini disebabkan karena hubungan antara tingkat bunga dan harga

surat-surat berharga yang berkebalikan selain artian bahwa tinggi rendahnya tingkat bunga mencerminkan rendah tingginya harga surat-surat berharga Dengan penjualan atau pembelian surat-surat berharga diharapkan oleh penguasa harga dapat mempengaruhi harga surat-surat berharga

- ii. Memperkuat pengaruh dan perubahan tingkat diskonto. selain artian ikut mendorong naik-turunnya tingkat bunga pinjaman
- iii. Pengembangan dan penyelainatan utang pemerintah. Misalnya penjualan obligasi pemerintah melalui OPT (Operasi Pasar Terbuka) oleh Bank Sentral sangat dipertukan pada saat penebusan utang pemerintah tersebut.

Yang perlu diingat adalah bahwa kekuatan riil dari OPT oleh Bank Sentral tertetak pada kapasitas untuk menambah struktur tingkat bunga dan likuiditas

Keberhasilan OPT oleh Bank Sentral di negara yang sedang berkembang tergantung pada berbagai keadaan yang antara lain

1. Pasar surat-surat berharga pemerintah harus cukup luas, aktif dan menyebar; kalau tidak demikian matah akan membuat ketidakstabilan pasar uang.
2. Beberapa Bank Sentral di negara yang sedang berkembang mungkn tidak mempunyai surat-surat berharga yang cukup menarik Selain keadaan seperti ini akan mempengaruhi efektivitas bekerjanya OPT

a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (open market operation OMO) bempa pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah (*government securities*) oleh bank sentral. Sekuritas pemerintah tersebut batasanya berbentuk obligasi Di Amerika Serikat Misalnya, bentuk-bentuk sekuritas yang dikeluarkan oleh pemerintah (departemen keuangan) berupa measury bill alau T-hill (jangka pendek, < 5 tahun). treasury notes (jangka menengah. 5- 10 tahun), dan treasury bonds (jangka panjang, > 10 tahun) Biasanya yang

digunakan oleh bank sentral sebagai objek OMO adalah sekuritas pemerintah jangka pendek

Pada saat bank sentral melakukan kegiatan jual dan beli sekuritas pemerintah tersebut, perekonomian akan dipengaruhi oleh perubahan jumlah giro cadangan(reserve) institusi financial, perubahan harga dan hasil (yield) sekuritas dan perubahan perkiraan (expectation) keseluruhan perekonomian.

1) Perubahan Jumlah giro cadangan institusi financial.

Jika Bank Indonesia (BI) membeli Rp 10 triliun obligasi pemerintah dari institusi penyiangan finansial, BI dianggap telah membayar dengan meningkatkan jumlah cadangan giro institusi tersebut. Artinya, institusi penyiangan finansial tersebut telah mengubah struktur aset selain portofolionya. Kini institusi tersebut telah mempunyai kurang Rp 10 triliun selain bentuk obligasi pemerintah dan Rp 10 triliun lebih selain bentuk giro cadangan pada BI. BI sekarang mempunyai kenaikan Rp 10 triliun selain bentuk obligasi pemerintah pada asetnya dan kewajibannya meningkat Rp 10 triliun selain bentuk cadangan giro dan Institusi penyiangan finansial. Giro cadangan Institusi finansial juga meningkat apabila BI membeli obligasi pemerintah dan sektor swasta. Jadi, apabila BI membeli obligasi pemerintah giro cadangan institusi penyiangan finansial akan meningkat sebesar jumlah obligasi pemerintah yang dibeli oleh BI tersebut. Lebih jauh, jika hal-hal lainnya tetap, maka jumlah penawaran akan uang meningkat (M^t) sehingga kegiatan perekonomian akan meningkat pula. Sebaliknya, jika BI menjual obligasi pemerintah maka akan terjadi hal-hal sebaliknya, terjadi kontraksi pada penawaran akan uang (M_0) yang mengakibatkan turunnya kegiatan perekonomian.

2) Perubahan harga dan hasil (yield) sekurita.

Apabila terjadi perubahan harga obligasi, akan terjadi juga perubahan hasil (yield) obligasi tersebut. Peningkatan pembelian obligasi mengakibatkan peningkatan harga obligasi yang

mengakibatkan penurunan yield obligasi. Sebaliknya, penurunan pembelian obligasi menyebabkan turunnya harga obligasi dan meningkatnya yield obligasi. Karena bank sentral adalah pembeli / penjual besar sekuritas pemerintah dibandingkan dengan pembeli / penjual lainnya, mereka dapat secara langsung mempengaruhi tingkat harga obligasi pemerintah tersebut, juga secara langsung mempengaruhi tingkat bunga yang kemudian akan mempengaruhi tingkat suku bunga pendek lainnya. Pada prinsipnya, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat bunga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan membeli atau menjual secara agresif di pasar-pasar tersebut. Untuk memelihara suatu tingkat harga tertentu (sekaligus tingkat suku bunga tertentu) suatu obligasi, bank sentral hanya perlu membeli atau pun menjual sekuritas pemerintah selain jumlah sebesar yang para pedagang (trader) lainnya bersedia untuk menjual atau membelinya pada harga tersebut. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa bank sentral tidak dapat memagukan tingkat suku bunga serta sekaligus memagukan pertumbuhan penawaran uang pada tingkat yang tidak konsisten dengan tingkat suku bunga yang tertentu tersebut.

3) Perubahan perkiraan (expectation) keseluruhan perekonomian.

Dari kegiatan OMO yang dilakukan oleh bank sentral, terdapat efek yang dinamakan announcement effect. Para ekonomi dan analis moneter di bank sentral akan mengamati, menelaah dan membuat suatu prediksi tentang bagaimana efek OMO terhadap variabel-variabel keseharian. Namun demikian, tidak ada suatu kesepakatan umum di antara para ekonomi tentang bagaimana perkiraan perubahan, khususnya jika terjadi perubahan akibat OMO tertentu. Jika bank sentral membeli sekuritas pemerintah, hal ini menimbulkan dilemma. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kebijakan moneter ekspansioner yang mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga, meningkatnya produksi dan investasi bisnis, serta meningkatnya tingkat pembelajaran kon-

sumen di sisi lain, kebijakan moneter yang ekspansioner akan menimbulkan harapan tentang tetap tingginya penawaran akan uang pada masa cepat dan berkurangnya inflasi. Perkiraan akan tingginya tingkat inflasi akan mendorong kreditor menambahkan premi inflasi pada suku bunga riil yang mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga nominal. Lebih lanjut, perkiraan akan tingginya tingkat inflasi akan menghambat investasi bisnis dan pembelajaran konsumen.

Biasanya, kebijakan OMO dikeluarkan dan ditentukan melalui suatu komite operasi pasar terbuka. Di Amerika Serikat, Federal Reserve System (Bank sentral Amerika Serikat) mempunyai komite bernama FOMC (Federal Open Market Committee) yang bertugas memberikan arahan (directive) kepada account manager badan pelaksanaan (New York Fed). Arahan FOMC pada account manager terdiri atas tiga bagian. deskripsinya sebagai berikut

Bagian A

Pernyataan kuantitatif tujuan stabilisasi. Contohnya adalah tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, pertumbuhan output riil yang stabil, serta perbaikan neraca pembayaran.

Bagian B

Rentang sasaran yang spesifik untuk tahun depan. Sasaran-sasaran ini berbeda-beda setiap tahunnya biasanya dinyatakan sebagai kondisi kredit tingkat suku bunga, dan agregat moneter seperti M1 dan M2.

Bagian C

Daftar tujuan jangka pendek (2 bulanan) yang berkaitan dengan hari-hari besar / khusus tertentu, ketika kebocoran uang (currency leakages) besar terjadi.

FOMC tidak menentukan tujuan tertentu untuk cadangan selain sistem Account Manager yang menentukan nilai nominal uang dari sekuritas yang akan diperjual belikan di pasar.

terbuka Kekuasaan account manager tersebut tidak tak terbatas Apabila FOMC merasa arannya tidak dilaksanakan, mereka dapat mengeluarkan instruksi verbal tambahan kepada account managers sebelum pertemuan berkata FOMC (13 kali selain setahunnya) yang berikutnya.

Arahan FOMC biasanya baru dipublikasikan 30 han kemudian Alasannya sebagian orang dapat bertindak lebih cepat dan pada sebagian yang lain sehingga dapat mengambil keuntungan dan hal tersebut dan merugikan pihak lain. Untuk itu FOMC perlu melakukan tindakan pencegahan.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tingkat kerahasiaan sangat tinggi melalui kegiatan jual dan beli dengan para pedagang sekuritas sehingga net position The Fed tidak diketahui, Namun. ada pihak yang menghendaki agar informasi tersebut dipublikasikan secepatnya karena perahasiaan kebijakan hanya akan menguntungkan orang-orgng yang mendapatkan informasi dan selain (inside information)

Selain operasionalnya, setelah menerima arahan FOMC account manager meneruskannya kepada trading staff dan selanjutnya terjadi aksi-aksi transaksi OMO

Selain pelaksanaannya, ada dua jenis transaksi OMO deskripsinya sebagai berikut :

1. Pembelian dan penjualan lengkap, transaksi semisal bank sentral menjual suatu sekuritas. selain hai ini tidak ada kewajiban bagi bank untuk membelinya kembali Demikian sebaliknya, tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk menjualnya kembali kepada bank sentral
2. Pembelian di bawah perjanjian pembelian kembali (REPO) dan penjualan yang sesuai di bawah perjanjian penjualan kembali (reserve REPO atau matched transaction) Selain transaksi ini dapat dicontohkan bank sentral membeli sekuritas dari dealer yang sepakat untuk membeli kembali sekuritas tersebut dengan harga dan waktu tertentu Transaksi tersebut berupa pinjaman kepada dealer dengan

tingkat suku bunga ditentukan melalui pelelangan kepada dealer. Sebaliknya selain reserve REPO, The Fed menjual sekuritas kepada dealer dan dealer menjual kembali sekuritas tersebut kepada The Fed.

Pada awalnya REPO dan reverse REPO yang berupa kontrak jangka sangat pendek (7 sd 15 hari) digunakan terutama oleh bank bank komersial besar dan dealer sekuritas pemerintah untuk pembiayaan alternatif dan simpanan sekuritas pemerintahnya. Namun, akhir-akhir ini, REPO dan reverse REPO digunakan secara rutin oleh berbagai institusi financial baik bank maupun non bank selain berbagai ukuran sehingga New York Fed cenderung menggunakannya untuk mengimplementasikan arahan kebijakan moneter juga menjadikannya alat investasi untuk institusi keuangan asing, serta bagi otoritas moneter asing,

Melihat rentang waktunya, dapat dedikasikan bahwa penggunaan REPO dan Reverse REPO selain OMO ini hanya pada saat The Fed ingin mengubah cadangan institusi penyimpanan financial secara temporer

Dynainic OMO dirancang untuk mengubah tingkat cadangan dan institusi penyimpanan financial melalui penjualan dan pembelian sekuritas secara menyeluruh sebaliknya. defensive OMO adalah penyesuaian penyeimbangan yang ditujukan untuk memelihara tingkat keseluruhan cadangan institusi penyimpanan. Dari waktu ke waktu perekonomian menghadapi berbagai kejadian, baik yang sudah diperkirakan maupun yang tidak yang secara otomatis mengubah cadangan total dan penawaran akan uang.

Untuk menjaga kondisi perekonomian pada tingkat tertentu serta memelihara cadangan keseluruhan, sangat dibutuhkan tindakan defensif jangka pendek REPO dan reserve REPO, karena sifat afarmah jangka pendeknya. dirancang untuk menjadi media defensif. Selain hal ini. REPO menyediakan cadangan temporer sedangkan Reserve REPO mengurangi kelebihan cadangan temporer (temporary reserve excess).

b. Fasilitas Diskonto

Instrument kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Biasanya pinjaman tersebut berbentuk *direct advance* atau *over-draft* yang disekuritisasi dengan aset-aset tertentu (biasanya sekuritas pemerintah). Biaya peminjaman (Bunga) pinjaman itulah yang disebut fasilitas diskonto (*disconto rate*)

Pada saat ini, hanya sebagian kecil cadangan yang dimiliki oleh bank-bank yang dipinjam dari bank sentral. Dana yang dipinjam oleh bank pada umumnya digunakan untuk membayar dan simpanan kepada nasabah atau deposan serta menjaga arus cadangan keluar (*reserve outflow*). Biasanya, peminjaman tersebut dilakukan untuk penyesuaian dengan jangka waktu hanya beberapa hari. Ketersediaan dana kredit ini mengizinkan bank sentral menarik cadangan dari sistem perbankan melalui OMO tanpa perlu mengkhawatirkan bank-bank yang kesulitan memenuhi ketentuan *reserve requirement*.

Fasilitas diskonto memungkinkan bank-bank menutupi kekurangan cadangan musiman (*seasonal reserve deficiency*) tanpa mengurangi portofolio peminjaman atau melakukan tindakan penyesuaian lain. Ketersediaan kredit ini juga membebaskan bank-bank (terutama bank-bank kecil dan bank-bank rural) dari keharusan memegang portofolio aset likuid yang mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan peminjaman musiman. Dengan demikian, bank-bank dapat menggunakan bagian terbesar dana yang diserapnya dari masyarakat (*giro-tabungan-deposito*) untuk memenuhi kebutuhan akan dana kredit oleh masyarakat selain basis tahunan. Karena sifat alainiah peminjaman musiman, kredit tersebut sering sangat besar di bank-bank tertentu serta berlangsung beberapa bulan lainnya.

Akses bank-bank terhadap sistem peminjaman tersebut tidak otomatis karena besar dana pinjaman ditentukan. Selain itu, ada peraturan bank sentral mengenai evaluasi kelayakan alasan peminjaman dan penyesuaian tingkat diskonto. Kadang kala,

tingkat diskonto diubah untuk menoptakan srnyal yang nyala ter. tang arah tingkat suku bunga yang di inginkan oleh bank sentral Pergerakan tingkat diskonto sedang merefleksikan penyesuaian yang mencegannya bisa dari tingkat suku bunga pasar.

Biasanya. kredit yang diberikan oleh bank sentral terdiri atas tiga kategori. yaitu :

1. Kredit penyesuaian (adjustment credit) kredit jenis ini mengizinkan institute penyimpanan menghadapi aktivitas pemimjaman dan kredit yang tidak terantisipasi.
2. Kredit musiman (seasonal credit) kredit jenis ini mengizinkan institusi tertentu (seperti bank pertaman) mempunyai akses khusus pada jendela diskonto (discount window) untuk membiayai aktivitas musiman seperti liburan. musim tanam, dan musim panen Kredit musiman ini biasanya disediakan untuk institusi-institusi pemimjaman yang tidak mempunyai akses atau informasi ke pasar uang nasional dan.
3. Kredit perpanjangan (extended credit) program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kredit jangka panjang bagi instansi pemimjaman yang sedang menghadapi permasalahan arus kas yang berlarut-larut.

Jika bank sentral mampu dan bersedia menyediakan kredit dengan tingkat suku bunga tertentu dan selain jumlah berapa pun. maka dengan instrument tingkat diskonto ini bank sentral dapat mengendalikan tingkat bunga jangka pendek secara langsung

c. Cadangan minimum

Instrument perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang (heavily regulated industry). Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum (reserve requirement) atau RR yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan RR dirancang untuk memberikan jaminan kepada pemilik uang atau nasabah penyimpanan (deposan) bahwa jika mereka menarik simpanannya (deposit) mereka pasti) akan mendapatkannya Walaupun demikian, tidak semua dana simpanan tersebut dicadangkan karena sebenarnya RR merugikan bank dengan adanya ide cash yang tidak mendatangkan pendapatan bagi bank Untuk mengakomodasi dan memfasilitasi peraturan moneter yang tertaku juga untuk mencapai sasaran bank sentral persentase RR berubah-ubah.

Selain prakteknya. RR menentukan besar persentase minimum dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank, baik di kas maupun di rekeningnya di Bank sentral. Pada waktu lain jumlah dana cadangan demand deposit (rekening giro) lebih besar daripada cadangan time deposit (deposito berjangka) Namun pada saat ini persentase RR dihitung berdasarkan simpanan baik terhadap deposan giro, tabungan, ataupun deposito. Di banyak negara. bank sentral mengharuskan bank-bank menghitung ketentuan RR ini selain jangka waktu mingguan.

d. Imbauan moral

Bank sentral dapat menggunakan imbauan moral (moral suasion) untuk mendorong institusi financial agar membelia kepentingan publik. Biasanya, mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi financial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang dan pada kepentingan jangka pendek institusinya. Contohnya, pada saat terjadi inflasi, bank sentral menyarankan kepada institusi-institusi financial agar mengurangi pemberian pinjaman (kredit) untuk mendinginkan perekonomian yang sedang panas (overheated)

Selain prakteknya, imbauan moral dapat ditransformasikan menjadi suatu instrument moneter dengan cara mencatat institusi-institusi yang bekerja sama dan yang tidak bekerja sama pada saat meminjamkan dengan discount window Selain itu, karena bank sentral berwenang melarang penggabungan (merger) bank,

mereka dapat menggunakan imbauan moral untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan moneter.

e. Aplikasi Instrumen Moneter Konvensional di Indonesia

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentra) meniltilki beberapa instrument moneter, antara lain sebagai berikut :

1. OMO melalui jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar uang (saat ini tingkat suku bunga SBI sebesar 17,58%),
2. RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (sebesar 5% pada saat ini);
3. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (sebesai 8% pada saat ini).
4. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti sector usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan
5. Sistem pengawasan perbankan dengan memakai sistem forward looking risk-based supervision yang mengacu pada standar internasional,
6. Fit and proper test yang ditujukan kepada orang-orang yang akan menduduki posisi penting di bank-bank umum
7. BPMK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang ditujukan untuk membatasi pemberian kredit oleh bank-bank kepada kelompok usaha sendiri

F. INIPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN MONETER SELAIN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Periode 1965-1983

Selain pemerintahan Orde Baru Pemerintah berusaha untuk menjalankan kebijaksanaan stabilisasi dan pembangunan Ekonomi yang sehal. Penanggulangan terhadap inflasi yang merupakan musuh nomor satu perekonomian menjadi program

utama Program stabilisasi telah dilaksanakan dengan berhasil menurunkan tingkat 85% tanun 1968 menjadi 8.8% tahun 1970 Hal ini disebabkan dengan dikeluarkannya kebijakan moneter dan Fiskal serta kebijaksanaan ini di bidang Ekonomi yang konsisten dan terarah Salah satu hal yang dilakukan adalah menggantikan seribu rupiah uang laina

Program pertama yang dilakukan pemerintah adalah menertibkan administrasi keuangan pemerintah dengan disiplin yang ketat Untuk pertama kalinya disusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara Ini merupakan salah satu kebijaksanaan fiskal yang penting selain kebijaksanaan fiskal. karena selain ini penyusunan anggaran ini tidak pernah dilakukan Intensifikasi penerimaan dan penggalian pajak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua proyek yang bersifat politis dibatalkan atau ditangguhkan

Kebijaksanaan moneter dikeluarkan dengan pengendalian dan pengarahan kredit yang ketat Pengawasan kredit secara kualitatif dilakukan secara ketat dan tidak dibebankan kredit untuk jangka panjang Tingkat suku bunga kredit resimi bank-bank pemerintan dinaikkan dengan tinggi antara 6%-9% per bulan. Penetapan dan pengawasan atas cadangan minimum wajib yang harus dimiliki dan dipelihara bank dilaksanakan secara ketat Seiring dengan itu, kebijaksanaan moneter yang diambil adalah menaikkan tingkat suku bunga deposito berjangka guna memobilisasi atau mengarahkan dana masyarakat yang diperlukan untuk pembangunan selanjutnya Kenaikan tingkat suku bunga deposito berjangka juga dimaksudkan untuk menarik dan mengurangi jumlah uang beredar selain masyarakat sebagai kebijaksanaan anti inflasi Ketiga hal ini. yaitu penentuan tingkat suku bunga kredit dan deposito berjangka ketentuan cadangan minimum serta ketentuan kredit likuiditas oleh Bank Indonesia kepada bank-bank pemerintah Ini merupakan kebijaksanaan moneter utama yang dijalankan

Semenjak tahun 1967. pemerintah telah berusaha untuk menciptakan tata adinistrasi perbankan yang mengarah pada

obligasi pasar namun masih terlihat ada pengaturan secara langsung oleh pemerintah, seperti pengaturan pemberian kredit oleh bank umum pemerintah. Untuk mengatur tata kehidupan perbankan pemerintah membuang Undang-undang pokok Perbankan (UU No 14 Tahun 1967) dan Undang-undang Bank Sentral (UU No. 13 Tahun 1966) sebagai tonggak pembaharuan kehidupan perbankan dan perkreditan di Indonesia Bank Indonesia, sebagai bank sentral juga memberikan berbagai jenis kredit diantaranya kredit likuiditas, kredit langsung dan kredit untuk Pertamina Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan kepada bank-bank umum untuk membantu likuiditas mereka Kredit langsung adalah subsidi pangan, subsidi pupuk atau pembiayaan pengembangan industri kecil Kredit untuk Pertamina diberikan terutama untuk membantu kesulitan keuangan pada tahun 1975 sampai 1976

Di samping bank-bank umum (pemerintah dan swasta) terdapat pula lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi dan lembaga keuangan tabungan perkreditan Pada tahun 1968 pemerintah mulai mendirikan pasar modal yang ditujukan guna meningkatkan peran sektor moneter untuk menunjang pembangunan sektor perekonomian Namun demikian lembaga tersebut belum dapat bertungas sebagaimana yang diharapkan.

Bank Indonesia mengatur langsung Jumlah uang beredar melalui pengaturan penyaluran kredit Perbankan Pengaturan secara tidak langsung belum bisa dilakukan karena pasar modal belum berkembang, bahkan surat-surat berharga jumlahnya masih sangat terbatas. Sebelum tahun 1973 pemerintah menetapkan cadangan minimum sebesar 30%, tetapi dengan adanya boom minyak pada tahun 1973 dan 1974 bank-bank umum menjadi terlalu likuid sehingga cadangan minimum 30% menjadi terlalu besar untuk mengadakan ekspansi kredit. Oleh karena itu, tahun 1974 Bank Indonesia meninggalkan pengaturan kredit secara langsung tersebut dan beralih kepada penetapan batas tertinggi (ceiling credit) Batas ini ditentukan Bank Indonesia setiap awal tahun dan setiap periode bisa dilakukan revisi Dengan

kebijaksanaan ini diharapkan jumlah uang beredar dapat ditekan sehingga dapat dicapai kestabilan harga atau inflasi dapat ditekan.

Di samping kestabilan harga, tujuan kebijaksanaan moneter Bank Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini akumulasi modal perlu ditingkatkan. Mengingat pasar modal belum berkembang maka masyarakat umumnya menyimpan kekayaan selain bentuk kas atau deposito bank. Oleh karena itu kebijaksanaan tingkat bunga dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah deposito sehingga dapat dipakai untuk investasi caranya tingkat bunga ditentukan berbeda-beda tergantung jangka waktunya. Tingkat bunga ini telah beberapa kali mengalami beberapa perubahan. Di samping akumulasi tabungan kebijaksanaan tingkat bunga ditunjukkan untuk pengadaan dana investasi. Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga yang berbeda-beda tergantung dari penggunaan kredit tersebut. Kredit yang dipergunakan untuk kegiatan yang mendapat prioritas pemerintah dikenakan bunga yang lebih rendah dibanding dengan kegiatan yang tidak mendapat prioritas.

Selain kaitannya dengan neraca pembayaran, pemerintah telah beberapa kali melakukan kebijaksanaan perubahan nilai tukar. Diniulai tahun 1968 di mana kurs

BE (bonus ekspor) dinaikkan dan satu dollar = Rp 280,00 menjadi Rp 414,00. Hal ini dijalankan mengingat inflasi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi dunia. Pada tahun 1970, sistem devisa diganti menjadi sistem devisa umum (dan hasil ekspor) dan devisa kredit (dari BE kredit) dan dengan kurs masing-masing sebesar satu dollar = Rp 378,00 untuk devisa umum dan Rp 326,00 untuk devisa kredit. Pada bulan April 1970, nilai rupiah diturunkan lagi dan satu dollar = Rp 326,00 menjadi Rp 378,00.

Ongkos produksi di selain negeri mengalami kenaikan akibat adanya tekanan inflasi sehingga cadangan devisa mengalami penurunan. Pemerintah melakukan devaluasi tahun 1971

dengan menetapkan kurs dollar menjadi Rp 415.00 Dengan adanya kenaikan harga minyak bumi yang terjadi pada tahun 1973-1974 cadangan devisa menjadi besar. Namun untuk barang-barang non-migas pada pasar internasional mengalami kenaikan yang sangat lainban, sedangkan inflasi selain negeri relatif besar sehingga akibatnya pendapatan riil produsen dari hasil pertanian juga menurun

Kebijaksanaan devaluasi bulan November 1978 menerapkan nilai satu dollar = Rp 625,00 ini didasarkan pandangan bahwa sektor nona-migas menjadi tidak kompetitif dan pendapatan riil mereka menurun sedangkan ekspor minyak untuk masa yang datang tidak bisa dipastikan. Sehingga November 1978 dikeluarkan devaluasi untuk mempertahankan devisa yang ada juga untuk memperbaiki pendapatan produsen barang-barang non-migas sekaligus menunjang tercapainya tujuan pemerataan pendapatan

Resesi Ekonomi dunia mulai kelihatan sejak tahun 1973 dengan adanya krisis energi, sebagai dampak tindakan negara pengeksport minyak (OPEC) yang melakukan embargo, sehingga terjadi kenaikan harga minyak sampai 4 kali lipat. Resesi ini terutama dialaini oleh negara-negara industri Ini akan mengakibatkan naiknya ongkos produksi. Inflasi ini timbul dan akhirnya merambat pada masalah unemployment Kegiatan industri negara-negara maju mengalami penurunan, sehingga permintaan pasar dunia mulai lesu Kelesuan ini ditandai dengan menurunnya harga-harga barang ekspor di pasar dunia pada tahun 1980. ini merupakan awal resesi dunia

Keadaan resesi ini sangat mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Cadangan devtsta menurun akibat turunnya nilai ekspor juga terjadi petanan modal ke luar negeri sebagai akibat tinggi laju inflasi selain negeri yang relatif tinggi Untuk menyelamatkan devisa yang ada. maka pada bulan Maret 1983 pemerintah terpaksa melakukan tindakan devaluasi rupiah dari Rp 625.00 menjadi Rp 975.00

2. Periode 1983-1984

Deregulasi sektor perbankan dilakukan sejak 1 Juni 1983, isi deregulasi tersebut adalah menghapus pagu kredit dan sistem kredit selektif disertai dengan subsidi bunga serta menciptakan persaingan bank untuk menentukan tingkat suku bunga serta menciptakan persamaan Dank untuk menentukan tingkat suku bunga kredit dan menghimpun dana dan masyarakat Kredit likuiditas tidak lagi dibebankan bank sentral namun demikian deregulasi ini tidak lengkap dan menyeluruh Masih ada perlakuan dan fasilitas khusus untuk bank dilirik pemerintah, Misalnya selain penyaluran kredit dengan suku bunga yang rendah untuk golongan Ekonomi lemah guna menunjang dan melaksanakan pemerataan pendapatan dan kesempatan pembangunan. Juga masih diwajibkan perusahaan negara untuk menyimpan uang pada bank milik pemerintah Jelas deregulasi ini memberikan peranan mekanisme pasar bekerja lebih luas di sektor perbankan dan mengurangi campur tangan berupa pengarahan langsung proses penyaluran kredit dan penghimpunan dana

Tujuan deregulasi perbankan adalah meningkatkan mobilisasi atau penghimpunan dana tabungan masyarakat. meningkatkan efisiensi a'okasi dana perkreditan di sektor perbankan dan seluruh lembaga keuangan. Persaingan sehat akan meningkatkan efisiensi. Persaingan sehat akan mengakibatkan terjadinya kenaikan suku bunga pada bank-bank pemerintah dengan menyamai tingkat suku bunga bank-bank swasta Sebelumnya terdapat kredit prioritas berupa pembenan kredit selektif disertai dengan pemberian subsidi bunga terhentinya pemberian kredit likuiditas pelunasan yang telah jatuh tempo menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Menghadapi hal ini Bank Indonesia mengambil 2 tindakan jangka pendek pertama, mendorong perbankan menggunakan fasilitas gadai ulang. Kedua, menurunkan tingkat suku bunga di pasar uang dengan membatasi jumlah pinjaman menjadi maksimum hanya 75 % dari jumlah dana deposito yang dihimpun

Tindakan selanjutnya adalah berupa introduksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada awal 1984 adalah untuk mempengaruhi jumlah likuiditas perbankan dan mengembangkan kegiatan pasar uang SBI merupakan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dapat dijual kepada bank-bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) serta dapat diperjualbelikan di antara mereka atau didiskontokan kepada lembaga sekuritas Lembaga tersebut selanjutnya dapat mendiskontokan kembali ke Bank Indonesia Di samping itu bank juga mengeluarkan piranti sama dengan SBI yang dikeluarkan oleh BI dan disebut sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) SBI merupakan piranti operasi pasar terbuka oleh BI untuk menyedot likuiditas rupiah perbankan dan mengurangi jumlah uang beredar serta memaksa sektor perbankan menukarkan aktiva luar negeri (valuta asing) ke selain rupiah Hal ini sebaiknya juga dapat dilakukan oleh BI selain operasi pasar terbuka.

Sementara itu piranti SBPU (dikeluarkan Februari 1985) dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman antara bank yang mempunyai hubungan. yang erat dengan ekspansi maupun kontraksi jumlah uang beredar Pertama suku bunga SBI ditentukan oleh BI. kemudian ditentukan oleh mekanisme pasar dengan penjualan lelang di pasar.

Pasar uang antar bank (call money) merupakan pesaing SBI dan SBPU yang mempunyai daya saing berupa jangka waktu relatif lebih singkat administrasinya sederhana, dan denominasi kecil Ternyata SBI masih belum cukup menarik bagi bank sebagai alat untuk memegang kelebihan cadangan Bank-bank menempatkan kelebihan cadangan selain valuta asing dengan persentase yang cukup besar Ini menunjukkan bahwa SBI masih belum dapat digunakan oleh Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka guna mempengaruhi jumlah uang beredar Namun demikian pengembangan penyediaan alat likuiditas ini akan menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi secara optimal sementara stabilitas Ekonomi masih akan terjaga.

Sejak pertengahan 1964 terjadi spekulasi US dollar dengan terjadinya 2 peristiwa. Peristiwa tersebut adalah adanya depresi mata uang US dollar di pasar dunia peristiwa kedua adalah akan adanya konferensi OPEC untuk menurunkan harga dan kuota produksi minyak bumi. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia menurunkan kurs rupiah sebesar 4% selama dua bulan berturut-turut selain bulan Agustus dan September 1984. Tindakan ini memperkuat spekulasi akan terjadi devaluasi yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan penukaran kekayaan selain bentuk US dollar. Penukaran kekayaan seperti ini menyebabkan perbankan kekurangan likuiditas rupiah.

Selain sistem kurs mengambang, yang efektif mulai berlaku sejak devaluasi 30 Maret 1983 Bank Indonesia tidak lagi menjadi keseimbangan kurs pada batas spread yang kecil diantara suatu kurs tengah tertentu. Ketidakpastian kurs seperti ini menimbulkan ketidakpastian pula akan nilai aktiva luar negeri selain rupiah. Terhentinya kredit likuiditas setengah deregulasi dan pelunasan kembali kredit likuiditas yang telah jatuh tempo mengakibatkan adanya kebutuhan likuiditas dunia perbankan di Indonesia.

Hingga terjadinya krisis selain bulan September, perbankan tidak perbankan untuk menggunakan fasilitas gadai ulang yang tersedia sejak 1 Februari 1984. Keengganan bank-bank untuk menggunakan fasilitas gadai ulang karena adanya peringatan dari BI sendiri yang mengatakan bahwa bank yang menggunakan fasilitas tersebut adalah bank yang berada pada kondisi yang tidak sehat. BI kemudian mencabut pernyataan yang kurang baik ini setelah terjadinya krisis, dan mulai mendorong perbankan untuk lebih banyak menggunakan fasilitas gadai ulang. Perubahan kebijaksanaan mengenai penggunaan fasilitas gadai ulang tersebut merupakan tindakan pertama dan BI mengatasi krisis September 1984.

Tindakan BI yang kedua untuk menurunkan tingkat suku bunga di pasar uang Jakarta adalah dengan cara membatasi jumlah pinjaman bank di pasar uang tersebut menjadi maksimum sebesar 7.5% dan jumlah deposito masyarakat yang dikumpulkannya

Walaupun tindakan ini langsung menurunkan volume transaksi dan tingkat suku bunga di pasar uang namun pembatasan seperti ini justru menimbulkan distorsi dan inefisien baru di pasar uang yang justru menyebabkan peningkatan biaya dana perbankan

3. Periode 1987-1992

Kalangan perbankan masih merasakan suasana deregulasi yang masih terkesan masih bersifat parsial Hal ini kelihatan dengan masih adanya keharusan bagi Badan Usaha milik Negara (BUMN) untuk menggunakan jasa-jasa bank pemerintah dan pembatasan pembukaan kantor cabang baru bagi bank-bank umum swasta nasional dan bank asing. Kendala tersebut menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga perbankan masih relatif tinggi dan pelayanan jasa perbankan belum dapat dilaksanakan secara optimal Berkaitan dengan ini, pada tanggal 27 Oktober 1988. otoritas moneter mengeluarkan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan Pakto 1988. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memadakan hambatan yang dirasakan ada sebelumnya dan akan meningkatkan pengeralahan dana masyarakat. etensi lembaga keuangan dan perbankan, mendorong berkembangnya pasar uang dan modal dan memberi kemampuan yang lebih besai pada ontoritas moneter selain melakukan kebijaksanaan moneter Paket kebijaksanaan ini mencakup pemberian kekuasaan bagi bank-bank swasta nasional, BPR dan bank asing untuk mencirikan atau membuka kantor cabang barn penurunan cadangan wajib dan 15% menjadi 2%. pembebasan bagi BUMN untuk menempatkan 50% depositonya di luar bank milik pemerintah dan pengenaan pajak atas pendapatan bunga deposito berjangka. Keleluasaan ini telah mendorong bank-bank swasta nasional untuk semakin giat selain menggali. menghimpun dana masyarakat melalui terbitnya berbagai bentuk tabungan dan deposito dengan iming-iming berbagai hadiah Selain kaitannya dengan pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing, pemerintah mengarahkan agar pemberian kredit dari bank-bank tersebut lebih ditekankan lagi ke selain pembiayaan ekspor

non-migas Seiam itu Bank Indonesia juga menetapkan batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit = LLL) dan bank-bank debitur atau grup debitur, pemegang saham dan pengurusan bank.

Selanjutnya untuk melengkapi Pakto 1988 muncul pula kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 1988). Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), khususnya pada asuransi dan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan Tujuan utamanya adalah pengembangan pasar modal, memperluas sumber-sumber alternatif pembiayaan untuk kegiatan produksi dan juga usaha pengerahan dana masyarakat Adanya Pakto 1988 dan kebijaksanaan pendukung lainnya telah memberikan kemudahan, namun telah mendorong adanya persaingan-persaingan yang tidak selalu menguntungkan bank-bank tertentu seperti BPR Hal ini disebabkan dengan adanya Paket Oktober 1988 tersebut ruang gerak BPR dipersempit hanya sebatas kecamatan dan jika tidak demikian maka BPR harus berubah menjadi bank umum atau bank pembangunan dengan menaikkan modalnya menjadi Rp 10 milyar. Pemerintah menyadari dan memperhatikan hal tersebut, sehingga pada tanggal 25 Maret 1989 dikeluarkan kebijaksanaan baru yang berusaha menghilangkan batasan tersebut Satu hal yang penting selain paket ini adalah memperbaiki bidang usaha, lokasi, dan wilayah kerja BPR yang sudah ada di kota-kota besar.

Usaha meningkatkan efisiensi industri perbankan terus ditingkatkan dengan dikeluarkan Paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 (Pakjan 1990) Paket ini tetap konsisten dengan kebijaksanaan sebelumnya yaitu adanya pembatasan kredit likuiditas Bank Indonesia dengan cara mengalihkan secara bertahap kredit tersebut menjadi kredit bisa melalui perbankan Namun demikian kredit likuiditas ini masih dimungkinkan untuk kegiatan tertentu seperti untuk pelestarian swasembaca pangan, pengembangan koperasi, dan peningkatan investasi Di samping itu untuk membantu usaha ekonomi lemah, pemerintah melalui Pakjan 1990 mewajibkan semua bank untuk menyediakan 20%

dan kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil atau KUK. Penentuan kewajiban ini juga dipakai sebagai salah satu kriteria penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia

Adanya Pakto 1988 dan dilanjutkan dengan Pakjan 1990 telah memberi pengaruh yang besar terhadap Industri perbankan. Perkembangan perbankan ini telah mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga perbankan yang profesional, perubahan tekmmk operasional perbankan dan pola serta sikap bertanggung jawab dari perbankan untuk mengamankan kepentingan masyarakat. Di samping itu sistem perbankan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya di luar negeri dan perbankan di Indonesia diharuskan untuk mengikuti peraturan yang berlaku secara internasional. Berkaitan dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan tertanggal 26 Februari 1991 atau yang lebih dikenal dengan sebuah Pakfeb 1991. Kebijaksanaan tersebut melipub 5 aspek yang terdiri dan:

1. Aspek perizinan
2. Aspek kepemilikan dan kepengurusan
3. Aspek pedoman operasional atas dasar kehati-hatian
4. Aspek sitstem pelaporan
5. Aspek tata cara penilaian kesehatan bank

Kelima aspek di atas diperlukan bagi pembangunan usaha perbankan yang sehat dan efisien guna memelihara kepentingan masyarakat. Salah satu aspek penting dan Paket Februari 1991 adalah adanya ketentuan bertahan mengenai modal minimum atau yang dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Di samping adanya kebijaksanaan penentuan modal minimum atau CAR badan otoritas moneter juga mengambil kebijaksanaan penarikan dana BUMN dan bank-bank umum tahun 1991 atau ini dikenal dengan Gebrakan Sumariin II

Puncak dan periode ini adalah diberlakukannya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. pada tanggal 25 Maret 1992 yang

menggantikan UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini sangat ditunggu masyarakat terutama sektor perbankan

Kebijaksanaan deregulasi 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia Bank-bank yang ada diwajibkan untuk memiliki standard capital adequacy ratio (CAR) sebesar 8%.

(Sinungan, Muchdarsyah "Kebijaksanaan Moneter Orde Baru". Bina Aksara Jakarta, 1987).

G. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)

1. Sertifikat Bank Indonesia Sebagai Instrumen Moneter di Indonesia

Untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka Bank Indonesia sejak 1584 mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan instrumen selain rangka pengetahuan jumlah uang beredar (kebijakan kontraksi moneter) Sebaiknya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekspansi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Kedua instrumen ini diharapkan akan dapat membantu perbankan selain pengaturan likuiditas di samping untuk mengembangkan pasar uang

Selain instrumen tersebut. Bank Indonesia menyediakan fasilitas diskonto untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bantuan dengan fasilitas diskonto ini bersifat sementara dan hanya dapat digunakan oleh bank sebagai upaya terakhir selain pengaturan dana bank sehari-hari dan semata-mata dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*

Penyediaan fasilitas diskonto dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertujuan membantu bank-bank selain mengatur

likuiditasnya di samping ketentuan cadangan minimum BI sebesar 15%. Gubernur BI selanjutnya mengatakan. alat-alat moneter seperti fasilitas diskonto lebih bersifat sementara sedangkan SBI dimaksudkan sebagai cara investasl jangka pendek dana perbankan yang belum sempat tersalurkan selain bentuk kredit

Sepintas lalu kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan ini nampak demikian sederhana. sebab kedua fasilitas yang diberikan BI tersebut lebih bersifat pengendalian secara tak langsung Di samping itu ketentuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan tersebut, secara Teori moneter memiliki kemudahan selain pelaksanaan maupun pengawasannya Waiaupun demikian, sebagai negara seang berkembang yang memang sedang mengalami kesulitan dana selain negeri. kebijaksanaan diskonto dan SBI pada gilirannya merupakan tantangan bagi bank-bank selain upayanya menarik dana masyarakat Sudah tentu pemerintah mempunyai maksud tertentu dengan kedua fasilitas yang diciptakan oleh BI sebagai Bank Sentral Apalagi kita mengamati perkembangan perekonomian selain negeri yang berfluktuasi khususnya yang berkaitan dengan sifat tukar resini negara, tampak bahwa kedudukan rupiah sangat dipengaruhi oleh situasi moneter intenasional.

2. Stabilitas Rupiah

Kita tentu masih saja ingin bagaimana pemerintah berhasil menciutkan raksasa inflasi 600% menjadi 9%. Walaupun kejadian tersebut berlangsung tahun 1967/68. tetapi “kebanggaan” alas keberhasilan tersebut membuat kita jadi lengah selain menjaga stabilitas rupiah selanjutnya

Pada tahun itu pula penanaman modal asing mulai diberi jalan untuk memasuki Perekonomian selain negeri dan sebagai sumber dana luar negeri sudah tentu akan membawa pengaruh moneter selain pengaturan dana rupiah Dengan menggantungkan pada dana cadangan yang diperoleh dan ekspor minyak bumi, tahun- tahun pelaksanaan Pelita I dan II sejumlah dana

besar-besaran diinvestasikan selain proyek padat modal Untuk membangun pabrik dan industri besar seperti pabrik petrokimia, semen, pupuk dan sarana pembangkit tenaga listrik serta benangan migasi dibutuhkan banyak fasilitas yang sebagian besar diimpor dan negara industri. Sudah barang tentu selain hal itu diperlukan banyak rupiah selain mengingat kurs rupiah kita berada di bawah rata-rata negara pengimpor.

Dengan hanya mengandalkan minyak bumi sebagai cadangan devisa terbesar, pemerintah menambah jumlah uang primer dengan jalan mencetak rupiah setiap saat dibutuhkan Uang primer tersebut disalurkan oleh BI kepada bank-bank umum dan pembangunan selain bentuk kredit likuiditas dan pengedarannya selain bentuk kredit kepada masyarakat ditetapkan selain ketentuan pagu kreit

Selain dana yang kita peroleh dan ekspor minyak bumi masih mampu kita andalkan, kebijaksanaan moneter demikian dapat dipertanggung jawabkan sebagai usaha memanfaatkan keuntungan minyak bumi bagi pembangunan selain negeri. Ternyata mengambang di atas minyak bumi tidak sebcin yang kita bayangkan Sejak awal Pehta III (1979/1980) resesi melanda perekonomian dunia, walaupun pada saat itu belum terasa di selain negeri sebagai akibatnya sektor ekspor kita terpukul dengan dikenakannya kuota dan proteksi Karena kita menganut sistem cadangan devisa selain membiayai pembangunan, akhirnya kelemahan ekspor akan mempengaruhi juga perekonomian selain negeri, khususnya kaitannya dengan penerimaan pemerintah dan minyak bumi,

Tidak ada jalan lain selain menghadapi keadaan resesi Ekonomi, kecuali melakukan devaluasi terhadap nilai rupiah Tujuannya sudah jelas selain untuk merangsang kembali ekspor di luar minyak bumi sekaligus mengamankan cadangan devisa yang mengalami defisit akan pengurangan nilai penerimaan selain bentuk rupiah Tidakan devaluasi rupiah bulan Maret 1983 yang lalu terhadap dollar AS mencapai 38% merupakan angka penyesuaian terbesar yang pernah dilakukan pemerintah

Kebijaksanaan tersebut selain sistem moneter lebih bersifat momental yang berfungsi sebagai pengaman sedangkan sebagai tindak lanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang menghapuskan pagu kredit dan melakukan sistem devisa bebas Liberalisasi: moneter Ini secara Teoritis memang sesuai dengan fungsi BI sebagai Bank Sentral yang lebih tersifat sebagai pengendali dan pengatur sistem moneter secara tidak langsung. Liberalisasi demikian sudah umum dilaksanakan oleh Bank Federal di Amerika Serikat sejak tahun 40 an.

Dengan dihapuskannya pagu kredit, maka bank-bank umum dan pembangunan bebas menetapkan jumlah dana yang akan disalurkan lewat kredit jangka pendek atau menengah Pengertian bebas demikian sudah tentu berkaitan dengan dana yang dapat dihimpun dari deposito dan tabungan masyarakat karenanya untuk mendapatkan cukup dana yang tersedia bagi kredit perbankan pada gilirannya pihak bank akan merangsang pihak ketiga (nasabah) dengan penawaran bunga deposito dan tabungan yang menarik

Dengan fasilitas diskonto. BI akan membantu memperlancar likuiditas dana pihak bank selain upaya mereka menarik dana masyarakat sebesar-besarnya, sedangkan SBI akan lebih berfungsi sebagai investasi dana sementara pihak bank yang belum tersalurkan lewat kredit kepada masyarakat. Berbeda dengan fasilitas diskonto SBI dapat diperjual bahkan di bursa efek dan setiap pihak ketiga (nasabah) dapat memilikinya. Karenanya SBI lebih bersifat surat berharga atas unjuk yang dapat dijual kembali kepada BI setelah tanggal jatuh tempo. Dengan kedua fasilitas tersebut BI sebagai Bank Sentral dapat melakukan pengontrolan moneter selain negeri sekaligus sebagai sarana pihak bank untuk memperlancar pengumpulan dan penyaluran dana dan dan untuk masyarakat

Dengan adanya kebijaksanaan liberalisasi moneter secara terkendali tersebut akhirnya pihak bank berusaha semaksimal mungkin untuk menarik dana masyarakat. di samping itu masyarakat pun akan lebih terangsang menanamkan dananya sebagai

bentuk kepercayaan mereka terhadap keamanan dan kelancaran modal usahanya terhadap pihak bank.

Dengan mekanisme demikian akhirnya diharapkan mobilisasi dana masyarakat bagi terlaksananya pembangunan nasional menjadi lebih terealisasi dan pada gilirannya pula mampu mengimbangi dana anggaran pembangunan yang berasal dari penerimaan ekspor baik migas maupun non migas Tujuan akhir dari kebijaksanaan perbankan tersebut sudah tentu kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat likuid yang dapat diandalkan

Untuk mengandalkan rupiah sebagai alat likuid pada dasarnya diperlukan beberapa persyaratan antara lain :

1. Sebagai alat likuid rupiah hendaknya memiliki nilai tukar yang stabil Stabilitas tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai tetap emas murni per 1 gram atau terhadap salah satu mata uang internasional yang berifat lebih stabil
2. Sebagai alat likuid, rupiah hendaknya memiliki tingkat penyesuaian inflasi yang stabil Selain hal ini. inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga barang dan jasa mampu diatasi dengan penarikan rupiah sebagai uang primer menjadi passive neraca Bank Sentral
3. Sebagai alat likuid, akhirnya rupiah harus mampu mengendalikan terjadinya kemungkinan devaluasi Apabila rupiah sudah dapat diandalkan sebagai alat likuid. resesi Ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pemerintah selain bentuk rupiah tidak lagi ditempuh dengan kebijaksanaan devaluasi. melainkan diatur sedemikianrupa melalui mekanisme pengendalian moneter secara tak langsung. Selain keadaan demikianlah fasilitas diskonto dan SBI diharapkan mampu mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah.

(Nasution Mulia. Ekonomi Moneter Uang dan Bank. Ojambatan Jakarta. 1998)

H. DAFTAR PUSTAKA

Karini Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. JJIT Indonesia 2002

Nasution Mulia. *Ekonomi Moneter Uang dan Bank* Djambatan Jakarta 1987.

Nopirin *Ekonomi Moneter* BPFE Yogyakarta 2000

Slainat Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. FEUI. Jakarta. 2004.

Sinungan. Muchdarsyah. *Kebijaksanaan Moneter Orde Baru* BINA AKSARA Jakarta 1987

Sinungan, Muchdarsyah *Manajemen Dana Bank* BUMI AKSARA Jakarta 1997

Swardono *Uang dan Bank*. BPFE. Yogyakarta. 1996

TEORI KEBIJAKAN FISKAL

A. PENGERTIAN DASAR TEORI FISKAL

Pengertian Dasar Fiskal

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut “politik fiskal” atau “fiskal policy”, bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah selain bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian oleh karena itu anggaran belanja Negara, seperti telah diuraikan pada 5 2 terdiri dan pada penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa hasil “government expenditure” dan “government transfer”, maka senng pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Seperti terlihat pada definisi diatas, pemerintah menjalankan kebijaksanaan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijaksanaan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke keadaan yang dinginkannya Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (= tingkat employment), dapat mempengaruhi tingkat harga. dapat memperkecil defisit neraca pembayaran internasional, dapat mempengaruhi tinggi-rendah-

nya investasi nasional, dapat mempengaruhi distribusi penghasitan nasional, sebagainya lagi.(Soediyono.1985:102-103)

Kebijakan fiskal atau politik adalah segala kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya atau proses kehidupan Ekonomi masyarakat melalui Negara belanja Negara

Anggaran belanja (budget) Negara (ada juga yang menyebutkan anggaran pendapatan belanja Negara/APBN), adalah suatu anggaran yang disusun oleh pemerintah (bersama-sama dengan DPR) mengenai pendapatan-pendapatan atau penerimaan-penerimaan Negara serta pengeluaran-pengeluaran Negara yang disusun untuk selain masa tertentu, biasanya selain satu tahun, tetapi bisa juga disusun untuk lima tahun

Selain anggaran belanja suatu Negara jelas dapat dijumpai besarnya dan macam-macam atau jenis-jenis pengeluaran Negara dan jenis-jenis atau macam-macam pendapatan Negara terutama yang sangat penting untuk menutup atau membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara tersebut.

Semenjak tahun-tahun tiga puluhan berkembanglah suatu pengakuan yang makin kuat terhadap kebijakan ftskal dan perannya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan dan stabilisasi Ekonomi.

Pengakuan demikian mungkin disebabkan oleh faktor-faktor:

- Pertama : Teori pendapatan modern (model Keynes) telah memberikan kerangka (frame of work) yang jelas mengenai pengaruh dari anggaran belanja terhadap pendapatan
- Kedua : Kegagalan total yang fatal dan kebijakan moneter tradisional pada masa depressi tahun-tahun tiga puluhan Hal demikian mendorong untuk diusahakannya alat-alat stabilisasi lain, yaitu kebijakan fiskal,

Mendasarkan diri pada kedua faktor ini, maka ada suatu pendapat bahwa kebijakan fiskal atau kebijakan stabilisasi dan pembangunan adalah penyesuaian selain pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran Negara untuk mencapai stabilisasi Ekonomi yang lebih baik, dan laju pembangunan Ekonomi yang dikehendaki (John F Due selain bukunya 'Government Finance, Economc of the Public Sector' 1968) (Sobn, 1982 158-159)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja Negara atau belanja Negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional (Suparmoko,2004:131) Kebijakan fiskal adalah merupakan tangkalah-langkah pemerintah secara keseluruhan yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah dan pembangunan (APBN di Indonesia). (Mulla Nasution, 1997:156)

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN Segala macam kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, diantaranya

- Pajak
- Mencetak uang baru
- Pinjaman masyarakat selain negeri
- Pinjaman masyarakat kiar nmegen .(Suparmo,2004:147)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oieh Negara untuk menjaga stabilitas Ekonomi serta mendorong pertumbuhan Ekonomi (Adiwarman Azwar Karim .2002:107)

B. PENGERTIAN FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

1. Tujuan Kebijakan Fiskal

Menurut John F Due selain bukunya *Government Finance*, kebijakan fiskal itu mempunyai tiga tujuan utama yaitu : untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh untuk mencapai kestabilan tingkat harga umum. dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensial.

a. Pertumbuhan Kesempatan yang penuh

Suatu perekonomian dapat mencapai laju-laju pertumbuhan yang diumumkan oleh tingkat pembentukan modal full employment. Untuk tujuan itu maka jumlah pengeluaran total ($C+I+G$) pada sesuatu waktu harus mengikuti kenaikan pendapatan nasional (Y). dan bila tidak demikian maka akan timbul pengangguran

b. Kestabilan Harga

Dapatlah dimaklumi bahwa fluktuasi harga akan bertentangan dengan usaha untuk mempertahankan luasan kesempatan kerja yang penuh. Persoalan utama disini dengan demikian adalah penyesuaian antara kesempatan kerja penuh dengan tingkat harga stabil. Sebab dengan makin mendekatnya kesempatan kerja penuh, para serikat dengan makin mendekatnya kesempatan kerja penuh, para serikat-sikat bekerja cenderung untuk menuntut kenaikan-kenaikan tingkat upah di atas kenaikan produktivitasnya, dan tingkat-tingkat harga

c. Laju Pertumbuhan Potensial

Dengan sejumlah persediaan faktor produksi dan kecepatan perubahan tehnik tertentu, maka laju pertumbuhan yang lebih tinggi memerlukan pertumbuhan modal dan tingkat MPS yang lebih tinggi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Tetapi

tingkat MPS yang tinggi memerlukan pengurangan konsumsi yang besar. Jadi selain hal ini tergantung pada pilihan-pilihan antara konsumsi sekarang dan konsumsi yang akan datang.

Jalan pendapatan nasional itu sebenarnya dikuasai oleh hubungan antara jumlah pengeluaran total ($C+I+G$) dan tingkat Y . Jadi pengaruh utama dari pemerintah atas tingkat pendapatan nasional dan jalan pertumbuhan yang sebenarnya adalah melalui kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tingkat $C+I+G$. Sebab itu hasilnya suatu program pemerintah tergantung pada perubahan-perubahan neto dan $C+I+G$, serta multiplier dan accelerator. Multiplier menentukan besarnya pertumbuhan Y sebagai akibat dan berubahnya $C+I+G$ dan accelerator adalah menentukan besarnya reaksi atas investasi (I) terhadap perubahan-perubahan Y (Sobn.1982 167-168).

Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah selain bidang pengeluaran dan pendapatan (melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara, APBN) dengan tujuan untuk mencapai tingkat kegiatan Ekonomi yang penuh, tanpa ada inflasi. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan tersebut seluruh pengeluaran itu haruslah terarah dan setuju kepada peningkatan produksi maksimal, yaitu produksi atau pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja atau kapasitas kerja penuh. Betamana tidak demikian, Misalnya keseluruhan pengeluaran Negara tersebut melebihi kemampuan produksi maksimalnya masyarakat akan timbulah gejala-gejala inflasi. Bilainana hal yang demikian itu terjadi, maka kebijakan fiskal berikutnya adalah kenaikan pajak dan atau mengurangi jumlah pengeluaran itu sendiri (Sobn, 1982 174-175).

2. Fungsi Kebijakan Fiskal

Sementara ahli Ekonomi berpendapat bahwa paling sedikit dapat dibedakan tiga fungsi pokok kebijakan anggaran belanja Negara. Fungsi pertama ialah fungsi nalokasi. yang maksudnya untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di selain masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan

masyarakat akan apa yang taasa disebut public goods cukup terpenuhi juga Tanpa prakarsa pemerintah selain hal ini kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi secara cukup kebutuhan-kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan. keadilan. pendidikan. jalan-jalan, jembatan-jembatan. teman-teman, tempat-tempat benbadah dan sebagainya lagi Fungsi kedua ialah fungsi distribusi yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Fungsi ketiga ialah fungsi stabilitasi. Termasuk kedalam fungsi stabilitasi ialah tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi. tingkat harga yang relative stabii dan tingkat pertumbuhan Ekonomi yang cukup memadai (Soediyono 1985 195)

C. INSTRUMEN KEBUAKAN FISKAL

Instrumen yang Digunakan selain Kebijakan Fiskal

Setiap sistem perekonomian yang ada mempunyai masalah sendiri-sendiri. Masalah yang rutin dihadapi selain sistem perekonomian maupun itu adalah fluktuasi secara terus-menerus aggregate demand dan aggregate supply. Para ahli Ekonomi telah berusaha menerangkan fluktuasi permintaan aggregate dan penawaran aggregate dengan berbagai konsep model, agar dapat menstabilkan fluktuasi yang terjadi tersebut. Keynes membenarkan tekanan kepada kebijakan fiskal bila terjadi fluktuasi pada permintaan agregat dan penawaran agregat. Bila permintaan agroгат mengalami penurunan, pengeluaran pemerintah dengan cara apapun harus ditingkatkan guna meningkatkan permintaan agregat tersebut Kebijakan fiskal yang bisaa dijalankan pemerintah adalah

1. Menerapkan Sistem Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran belanja negara (APBN). baik untuk aggaran rutin maupun untuk anggaran pembangunan. Pada penerimaan pajak yang diterapkan

di Indonesia sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah dapat ditingkatkan Pada anggaran 1984/1985 penerimaan sektor pajak 20,7% dan seluruh penerimaan selain negeri, ini telah dapat ditingkatkan menjadi 50,1% pada anggaran 1992/1993 Sedangkan peranan pajak selain pembentukan APBN anggaran 1984/1985 adalah sebesar 17%. ini juga telah meningkat menjadi 41.5% untuk anggaran 1992/1993. Untuk anggaran 1993/1994 diharapkan peranan sektor penerimaan pajak terhadap APBN akan meningkat menjadi 45.3%.

Selain pembentukan PDB tentu andil pajak juga ikut memberikan peran Pada anggaran 1984/1985 sektor pajak telah memberikan peran pembentukan PDB 6.8%. anggaran 1992/1993 andil pajak meningkat menjadi 13.6% dan diharapkan pajak akan memberikan andil 14.3% pada anggaran 1993/1994. Kalau diperhatikan peran pajak selain pembentukan PDB di Indonesia masih kecil sekali dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara

Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (selain %)

Negara	1981	1983	1987	1990
Indonesia	7.2	7.1	8.6	12.5
Malyasia	17.0	17,2	13,8	15.2
Philiphina	10.3	10.4	12,1	14.0
Thailand	13.3	14.6	14.9	17.6
Korea	15.7	16.7	15.5	16.7

Sumber : Kompas 19/1-1993

Dan sumbangan pajak terhadap PDB di atas. Indonesia merupakan negara yang memberikan persentase yang terkecil untuk kawasan Asia Tenggara. Misalnya Filipina yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih kecil dibandingkan Indonesia, memberikan persentase yang lebih besar Dengan jumlah penduduk yang begitu besar (sekitar 180 juta) potensi pajak yang bisa digarap sebenarnya akan lebih besar dibandingkan sekarang ini. Pada 1990 pajak hanya memberikan pesentase 12,5 terhadap

PDB, dibandingkan Filipina yang penerimaan pajak memberikan andil 14.0 pada PDB Dan persentase yang kecil tersebut tentu kita perlu mefchat perkembangan penerimaan jenis di Indonesia.

Selain pelaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan adanya konsep keadilan Konsep keadilan selain pemungutan pajak adalah sistem pajak progresif. yaitu beban pajak akan semakin besar bilainana pendapatan seseorang tersebut akan dapat membiayai pengeluaran pemerintah terutama untuk masyarakat banyak, seperti perbaikan sarana kaeasehatan, penyebaran atau penyediaan sarana pendidikan Dengan adanya pemungutan pajak inilah akan dapat memperbaiki tingkat kualitas kehidupan masyarakat.

*Perkembangan Penerimaan DJP Per Jenis Pajak
(Selain Milyar Rp)*

Tahun	PPH	PPN	PLL	PBB	DJP
Pelita IV					
1984/85	2121.0	878,0	115,0	180 6	3,294.6
1985/86	2 313.0	2.326.7	151.2	224.5	5015,14
1986/87	1.270.5	2900,1	190,4	190.0	5,551,0
1987/88	2 663,4	3 390,4	222,9	275.1	5551,8
1988/89	3.949,4	4.505,3	292,1	424,2	9.171.0
Pelita V					
1989/90	5487,7	5.836,7	275.5	590.4	12 190,3
1990/91	6 755.3	7 462,7	243,5	881.0	15.272,5
1991/92	9 580,4	8926,1	302.6	874.6	19 683,7
1992/93	10.930.0	11 032,2	354.5	990.6	23.307.3
(APBN)					
1993/94	14.848.5	11682,6	363.8	1 320.1	28 215
(APBN)					

Sumber : Kompas. 8/1- 1993

- PPH : Pajak penghasilan
PPN : Pajak pertambahan nilai
PLL : Pajak lain-lain
PBB : Pajak bumi dan bangunan
DJP : Daftar jumlah pajak

Pajak langsung dapat berfungsi sebagai build in stabilizer (sebagai stabilisasi perekonomian bila timbul distorsi). karena dengan dikenakanya pajak langsung (pajak penghasilan akan dapat mengurangi konsumsi masyarakat, misalkan marginal propensity to consumption masyarakat (Indonesia) adalah 0,74 (MPC). Bila pendapatan masyarakat Rp 1000,- dan tidak dikenakan pajak, berarti pendapatan yang siap untuk dikonsumsi (disposable income) adalah Rp 1000.- Dengan adanya pajak 15%. maka dispoisition *income* (Yd) akan berubah menjadi Rp 850.- Jadi akan ada perubahan konsumsi masyarakat bila dikenakan pajak terhadap pendapatan Perubahan tersebut adalah konsumsi tidak dikenakan pajak adalah Rp.740,-(MPC Rp. 1000.-) dan konsumsi yang dikenakan pajak pendapatan adalah Rp 629.- ($MPC \times Rp\ 850.-$)

Dengan adanya penarikan pajak yang merupakan kebocoran terhadap pendapatan, sehingga dengan menyetolanya pendapatan nasional ini akan berakibat terhadap pengeluaran konsumsi (permintaan agregat) masyarakat

Pada 1990 tingkat pajak yang dibayarkan masyarakat adalah Rp 15.272.5 Milyard (Misalnya anggaran 1990/1991 dianggap 1990) Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat Rp 106.312,3 Milyard bila tidak ada penarikan pajak dan masyarakat. maka tingkat konsumsi akan bertambah sebesar $0,74 \times Rp\ 15.272.5$ Milyard (MPC masyarakat Indonesia 0.74).

Pada 1993 (Misalkan anggaran 1993/1994 dianggap menjadi 1993) pajak yang ditarik dari masyarakat adalah sebesar Rp 28.215,0 milyar Pajak sebesar inilah telah mengurangi tingkat konsumsi sebesar $0.74 \times Rp\ 28\ 215,0$ milyar inilah yang menyebabkan pajak seperti saving dianggap sebagai kebocoran

terhadap pendapatan nasional. karena dengan berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat. maka ini akan memberatkan retribusi terhadap pendapatan nasional yang semakin mengecil

Jadi penarikan pajak yang dilakukan pemerintah telah menekan permintaan agregat masyarakat, sehingga penarikan pajak ini telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. dimana tingkat konsumsi yang menurun ini akan mengakibatkan penurunan akbvtas perekonomian nasional Walaupun penurunan ini sebenarnya bisa dimbangi dengan pengeluaran pemerintah (Mulia Nasution.1997:171-174)

Pajak atau "tax" selain buku-buku Teori Ekonomi makro biasanya dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah di mana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas-jasa yang langsung. Jadi penyerahan uang dan masyarakat kepada pemerintah berupa pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak warisan. pajak penjualan, semuanya dapat kita sebut sebagai 'pajak', oleh karena terhadap pembayaran pajak tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung kepada si-pembayar pajak / Jasa mengapa kita katakan "tidak ada balas jasa yang langsung diterima oleh sipembayar pajak" telah oleh karena bagaimanapun juga bentuk daripada pajak dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah masyarakat tentu akan memperoleh balas jasa juga Hanya saja. balas jasa yang drtenma oleh si- pembayar pajak sifatnya adalah tidak langsung

Seorang pembayar pajak pendapatan, Misalnya dari pembayaran pajak tersebut si pembayar pajak tidak memperoleh suatu apapun dari pemerintah Akan tetapi mengingat bahwa hasil pungutan pajak oleh pemerintah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. yang bentuknya sangatlah beraneka ragam, meliputi antara lain pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, tempat-tempat beribadah, rumah-rumah sakit. memajukan pendidikan, menggaji para pegawai negeri dan sebagainya lagi yang semuanya itu bermanfaat bagi masyarakat di

mana para pembayar pajak merupakan anggota-anggotanya, maka dapatlah kita katakan bahwa pembayar pajak akan mendapatkan balas jasa juga akhirnya, meskipun balas jasa tersebut sifatnya tidak langsung selain arti bahwa hubungan antara balas jasa yang diperoleh wajib pajak dengan pajak yang dibayarkan. baik selain jumlahnya maupun selain waktu pelaksanaannya. tidak mempunyai suatu pola tertentu. (Soediyono R. 1985 99-100)

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang di wujudkan selain permintaan barang dan jasa. anggaran pembangunan. serta anggaran rutin harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi.

Walaupun pada dasarnya pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa, pengeluaran rutin relatif stabil Akan tetapi bila menghadapi perekonomian yang sedang mengalami kesulitan harus diusahakan untuk dapat ditingkatkan sesuai aktivitas perekonomian yang terjadi Bila perekonomian mengalami kelesuan. pengeluaran pemerintah drtingkatkan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan Keynes mengatakan, bila pendapatan masyarakat meningkat. tidak akan seluruhnya diwujudkan selain konsumsi Kalau hal Ini berlangsung secara terus menerus akan menyebabkan distin pada supply side (sisi penawaran). sehingga perusahaan menurunkan aktivitas dan mengurangi tenaga kerja Bila ini berlangsung laina akan menyebabkan kelesuan perekonomian. Untuk mengatasi ini Keynes mengatakan, pengeluaran pemerintah harus lebih besar dibandingkan penurunan konsumsi yang terjadi. dengan demikian perekonomian akan bergerak secara dinamis

Fungsi konsumsi adalah penerimaan yang mempunyai kecenderungan konsumsi yang naik turun sesuai naik turunnya pendapatan nasional, dan investasi swasta akan meangikuti konjungtur naik turunnya pendapatan nasional Jadi pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai stabihstator selain perekonomian

yang sedang mengalami kelesuan ini, sehingga akan dapat menggerakkan pertumbuhan Ekonomi (Mulia Nasution, 1997 174-175)

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang bisa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase*, meliputi semua pengeluaran pemerintah Dimana pemerintah secara langsung menenma balas jasanya

Dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji para pegawai negeri, Misalnya pemerintah langsung memperoleh balas jasa berupa prestasi kerja dan pegawai-pegawai tersebut Pembelian barang-barang dan jasa-jasa selain berbagai bentuknya Dan yang nilainya bermilyard rupiah sampai kepada yang nilainya hanya beberapa rupiah yang dilakukan oleh pemerintah. termasuk kategori Ini. Dengan sendirinya masyarakat mengharapkan bahwa semua macam pengeluaran pemerintah tersebut. secara langsung atau tidak langsung. nantinya akan diperoleh manfaatnya oleh para anggota masyarakat pada umumnya. Pengeluaran-pengeluaran konsumsi pemerintah inilah yang jumlah keseluruhan per satuan waktu kita tandi dengan *G' (Soediyono R.1985: 100-101)

3. Pembayaran Subsidi (Transfer Peyment)

Pembayaran transfer ini termasuk beasiswa. subsidi pupuk, subsidi BBM (sudah dihapuskan mulai januari 1993) dan pengeluaran yang bersifat sosial lainnya diselainnya termasuk tunjangan-tunjangan yang dibebankan pemerintah pada tenaga kerja yang menganggur (ini biasanya dilaksanakan pada negara maju).

Keadaan perekonomian yang sedang mengalami kelesuan akan meninibulkan pengangguran yang tinggi Pembayaran transfer berarti penyaluran daya beli mereka yang tidak mempunyai penghasilan. sehingga permintaan agregat dan penawaran agregat dapat di pertahankan. dan perekonomian ini tidak akan melaju selain resesi yang lebih parah Kalau sedang mengalami boom, yaitu perekonomian selain situasi yang ekspansif (bertumbuh), masalah pengangguran tidak timbul selain

perekonomian, sehingga pengeluaran pemerintah untuk transfer akan mengalami penurunan (dihilangkan sama sekali. subsidi BBM telah dihapuskan selain APBN). Artinya pembayaran tranfer tidak ikut mendoroog perekonomian ke arah yang lebih ekspansif, selain keadaan ini pemerintah juga akan berusaha mengurangi pengeluarannya untuk mencegah tegadinya inflasi. (Mulia Nasut=on,1997 175-176)

Disamping pengeluaran pemerintah yang mempunyai balas jasa yang berlangsung seperti kita uraikan diatas yang mempunyai balas jasa yang berlangsung seperti kita uraikan diatas yang kita sebut dengan 'government expediture' atau pengeluaran konsumsi pemerintah ada pula pengeluaran pemerintah macam lainnya. yaitu pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa langsung nilainya yang kita sebut 'government transfer'' atau transfer pemerintah dan kita tandai dengan Tr''

Beberapa contoh bentuk transfer pemerintah dapat kita sebutkan

1. Sumbangan pemerintah yang diberikan kepada kaula negara yang menderita sebagai akibat daripada adanya bencana alain
2. Sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengaggur
3. Uang pensiun yang diterima oleh para pegawai negeri telah dipensiun
4. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan - perusahaan
5. Bea siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dan sebagainya.

Dari contoh-contoh di atas dapat kita lihat bahwa dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa langsung Dari dana bantuan yang diberikan kepada para para penderita bencana alain misalnya, pembayaran

uang pensiun kepada para pegawai negeri yang telah pensiun dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah memperoleh balas jasa berupa prestasi kerja yang diberikan oleh para pensiun tersebut pada masa mereka masih aktif bekerja. Oleh karena pembenan jasa tersebut tidak bersamaan waktunya dengan pembayaran uang pensiunnya, maka kita golongkan sebagai balas jasa yang diterima oleh pemerintah secara tidak langsung (Soedaryono R,1985:101-102)

D. KESEIMBANGAN PASAR BARANG DAN JASA

1. Interaksi Ekonomi

Untuk memahaini peran GDP, diperlukan pemahaman interaksi dan berbagai bagian Ekonomi. Gambar dibawah mencerminkan rangkaian dan berbagai pemeran Ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Gambar tersebut juga menggambarkan bagaimana uang mengalir diantara pemeran-pemeran Ekonomi tersebut melalui berbagai pasar selain Ekonomi

Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, untuk belanja barang dan jasa serta untuk ditabung melalui pasar uang. Perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya dan menggunakan pendapatan yang diperolehnya tersebut untuk membayar factor-faktor produksi yang dipakainya. Baik rumah tangga maupun persahaan meminjam dari pasar uang untuk membeli baran-barang investasi seperti rumah, pabrik dan peralatan. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk keperluan belanja pemerintah dan bila belanjanya melebihi penerimaanya, pemerintah akan pinjam dari pasar uang guna menutupi defisitnya



Gambar 1. Aliran Lingkaran Uang dan Perekonomian

Output perekonomian selain bentuk barang dan jasa (yang juga merupakan GDP) tergantung pada dua faktor, yaitu :

1. Kuantitas input (factor produksi)
2. Kemampuan mengubah input menjadi output yang ditunjukkan oleh fungsi produksi.

a. Faktor Produksi

Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Dari berbagai faktor produksi yang dikenal, capital dan labor merupakan dua factor produksi yang terpenting. Capital adalah seperangkat peralatan yang digunakan oleh pekerja seperti halnya kalkulator, komputer, mesin-mesin dan sebagainya. Labor adalah waktu yang dihabiskan selain bekerja. Selain buku ini digunakan simbol untuk menunjukkan jumlah capital dan L untuk menunjukkan jumlah labor.

Untuk menyederhanakan analisis, pada bab ini dianggap factor produksi Ekonomi sudah ditentukan besarnya (diasumsikan tetap jumlahnya pada suatu tingkat tertentu) $\bar{K} = \bar{K}$ dan $L = L$. Ketak pada ulasan selanjutnya akan dicermati apa yang terjadi jika factor produksi berubah sering dengan berubahnya waktu sebagaimana pada keadaan yang sebenarnya. Disamping itu tidak ada sumber daya yang tersia-siakan. Selain kenyataannya seba-

gian labor menganggur dan beberapa capital tidak dimanfaatkan sepenuhnya

b. Fungsi Produksi

Teknologi produksi yang ada menentukan besarnya output yang bisa dihasilkan dan capital dan tabor yang tersedia Para ekonomi menyatakan teknologi yang ada dengan fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi menentukan jumlah output Fungsi produksi tersebut ditulis sebagai berikut $Y = F(KL)$ Persamaan ini menunjukkan bahwa output adalah fungsi dan jumlah capital dan jumlah labor.

Sebagaimana telah disebutkan fungsi produksi mencerminkan teknologi yang ada karena secara imflisit menunjukkan cara mengubah capital dan labor menjadi output Jika ditemukan cara produksi yang lebih baik banyak output dari penggunaan capital dan labor yang jumlahnya sama Dengan demikian perubahan teknologi akan mengubah fungsi produksi.

Banyak fungsi produksi menunjukkan kondisi constand return to scale. Suatu fungsi produksi berada selain kondisi constand return to scale Jika peningkatan persentase yang sama pada semua factor produksi menyebabkan peningkatan output selain persentase yang sama pula. Jika fungsi produksi berada selain constand return to scale maka akan diperoleh 10% output lebih besar bila baik capital dan labor ditingkatkan sebesar 10%. Secara matematis. fungsi produksi constand return to scale ditunjukkan oleh persamaan umum $zY = F(zK.zL)$. Persamaan ini menyatakan bahwa jika capital dan labor digandakan z kali maka output yang dihasilkan juga z kalinya.

c. Supply Barang dan Jasa Yang Tetap.

Atas dasar uraian ringkas di atas diketahui bahwa secara bersama-sama faktor produksi dan fungsi produksi menentukan supply barang dan jasa yang merupakan output Ekonomi Karena pada pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa pada suatu waktu tertentu supply capital dan labor adalah tetap dan

demikian juga teknologi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output tidak mengalami perubahan, maka output yang dihasilkan selain perekonomian juga tidak berubah bilainana dengan berubahnya waktu terjadi perubahan selain supply factor produksi maupun teknologi, output yang dihasilkan juga akan berubah Bilainana dengan berubahnya waktu terjadi perubahan selain suply factor produksi maupun teknologi. output yang dihasilkan juga akan berubah. Semakin meningkat kuantitas labor dan capital akan semakin banyak output yang dihasilkan Semakin bagus teknologi yang digunakan juga akan diperoleh output yang semakin besar (tedy Herlainbang. Sugiarto. Brastoro, said kelana, 1995 : 30-33)

2. Permintaan Barang dan Jasa

Dari sudut pandang ini, GDP dibagi menjadi empat komponen utama

- Konsumsi (C)
- Investasi (I)
- Pengeluaran Pemerintah (G)
- Ekspor bersih (NX)

Jika GDP disimbolkan dengan Y maka,

$$Y = C + I + G + NX$$

Konsumsi adalah barang dan jasa yang di beli oleh rumah tangga Konsumsi terdiri atas konsumsi barang tidak tahan laina (non durable goods) misalnya makanan dan pakaian, konsumsi barang tahan laina (durable goods) seperti mobil dan televise dan konsumsi atas jasa-jasa Misalnya dokter dan salon.

Investasi adalah pemebeilian barang yang akan dipakai di masa yang akan datang Investasi dibagi menjadi tiga golongan yaitu business fixed investment, residential fixed investasi, inventory investment Business fixed investment adalah pembelian peralatan dan pabrik-pabrik baru oleh perusahaan Residential investment adalah pembelian rumah barn oleh rumah

tangga inventory investment adalah kenaikan jumlah persediaan perusahaan I (jika inventory menurun. berarti Inventory investment negatif)

Pengeluaran pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembelian ini meliputi perlengkapan dan peralatan ABRI, jalan tol, dan

pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah tidak termasuk transfer payment, karena hal ini hanya merupakan realokasi pendapatan dan tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa.

Ekspor Bersih adalah jumlah barang dan jasa yang diekspor dikurangi jumlah barang dan jasa yang dimpor

Perputaran Diagram Alir sebelumnya hanya mencakup tiga komponen pertama dari empat komponen pertama dari empat komponen di atas Berikut untuk memudahkan analisis. akan diasumsikan suatu perekonomian tertutup, selain artian suatu Negara yang tidak berdagang dengan Negara lain, sehingga nilai ekspor bersihnya selalu nol.

Dalam perekonomian tertutup, ketiga komponen GDP dinyatakan selain suatu bentuk pendapatan nasional:

$$Y = C + I + G$$

1) **Konsumsi**

Semua bentuk konsumsi secara bersama-sama memberikan kontribusi dua pertiga dari GDP. Karena kontribusi konsumsi yang begitu besar, para ahli Ekonomian makro telah mencurahkan banyak tenaga untuk mempelajari bagaimana rumah tangga memutuskan besarnya konsumsi.

Rumah tangga menerima pendapatan dari para pekerjanya dan dari kepemilikan capital dan memutuskan berapa banyak pendapatan setelah pajak yang akan dikonsumsi dan berapa banyak yang akan disimpan. Diasumsikan bahwa tingkat konsumsi tergantung langsung pada tingkat pendapatan akhir. Semakin tinggi pendapatan akhir, maka semakin besar kon-

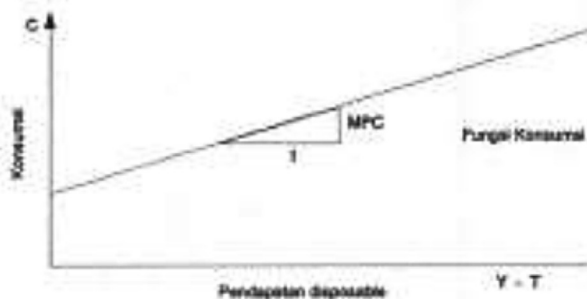
sumsi, sehingga. $C = C(Y-T)$ Hubungan antara konsumsi dan Disposable *Income* ini dikenal dengan fungsi konsumsi.

Berkaitan dengan konsumsi dan disposable *income* adalah marginal propensity to consume Marginal Propensity to Consume (MPC) menyatakan besarnya perubahan konsumsi bila disposable *income* naik satuan.

Sebagai contoh bila $MPC = 0,7$ maka rumah tangga membelanjakan 70% dari penambahan disposable *income*-nya pada barang dan jasa dan menabung 30% sisanya Pada Gambar berikut MPC ditunjukkan oleh slope dari fungsi konsumsi.

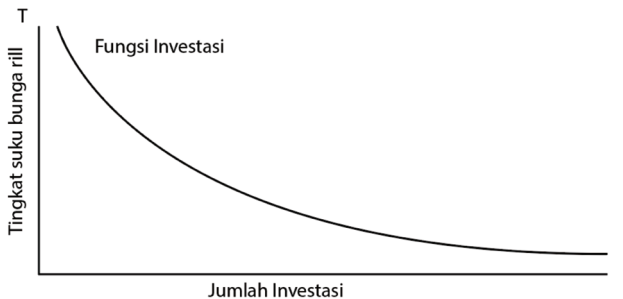
2) Investasi.

Perusahaan dan rumah tangga membeli barang investasi untuk menambah modalnya dan mengganti yang telah usang. Di banyak Negara maju investasi terhadap GDP jauh lebih besar dibandingkan di banyak Negara berkembang ataupun Negara miskin Sebagai contoh total investasi di AS adalah 15% dan GDP-nya Investasi akan semakin marak bila peluang proyek investasi untuk menghasilkan laba semakin besar Oleh karena itu pada umumnya besarnya investasi berhubungan negative dengan besarnya interest rate Prospek perolehan keuntungan investasi yang lebih tinggi dari tingkat bunga (interest rate) yang berlaku akan menggairahkan iklim investasi. tetapi sebaliknya akan melemahkan iklim investasi Para ekonomi membedakan interest rate menjadi nominal interest rate dan real interest rate



Nominal interest rate adalah tingkat bunga yang dibayar oleh investor saat mereka meminjam uang sedangkan real interest rate menunjukkan nominal interest rate yang telah dikoreksi dengan efek inflasi.

Hubungan yang lebih rinci antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil secara terperinci akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Pada bagian ini cukup dicatat bahwa real interest rate mengukur biaya pinjam yang sebenarnya. Dengan demikian diharapkan bahwa investasi tergantung pada real interest rate bukan pada nominal interest rate. Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: $I = I(r)$



Pada Gambar yang menyatakan fungsi Investasi terlihat bahwa hubungan antara kuantitas investasi dengan real interest rate adalah negative. Kemiringan dari kurvanya yang negative ditunjukkan oleh pergerakan kurva investasi dan kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan bahwa naiknya interest rate diikuti dengan menurunnya kuantitas investasi.

3) Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan komponen yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap GDP. Contoh dan pemerintah adalah pembelian barang berupa senjata / mesin perang dan jasa pelayanan para karyawan di pemerintah. Pada tingkat pemerintah lokal (daerah) belanja pemerintah dapat berupa pembelian buku perpustakaan, pembangunan sekolah dan belanja alat perlengkapan guru. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa jalan lalu lintas dan lapangan kerja.

Belanja pemerintah ini hanyalah salah satu jenis dan pengeluaran pemerintah Jenis pengeluaran pemerintah yang lain adalah transfer payment ke rumah-rumah tangga Contoh transfer payment adalah dana kesejahteraan bagi orang jompo. Berbeda dengan belanja pemerintah, transfer payment tidak secara langsung menggunakan output barang dan jasa sehingga transfer payment tidak melibatkan selain variable G Transfer payment berperan sebagai lawan pajak sehingga peningkatan besarnya transfer payment berdampak pada naiknya nilai disposable income. Dengan demikian kenaikan transfer payment yang didanai oleh peningkatan pajak menyebabkan disposable *Income* bisa jadi tidak berubah Untuk selanjutnya dengan memperhitungkan transfer payment, bilainana disebutkan T berarti yang dimaksud adalah pajak yang sudah dikurangi oleh transfer payment Dengan demikian selain disposable *income* telah termasuk dampak negative pajak dan dampak positif/ f transfer payment

Jika belanja pemerintah sama dengan pajak yang sudah dikurangi transfer payment maka $G = T$ dan pemerintah berada pada anggaran yang seimbang Jika G melebihi T . pemerintah berada pada kondisi anggaran deficit dan mereka mendanai belanjanya dengan meminjam dan pasar uang Bila G lebih kecil dan T . pemerintah berada pada kondisi anggaran surplus Surplus anggaran yang diperoleh dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang-hutang pemerintah di masa sebelumnya. Pada kesempatan ini tidak akan dibahas proses politik yang terkait dengan proses penentuan kebijakan fiskal yang menghasilkan suatu tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak tertentu. Sebagai gantinya yang ditentukan di luar model. Kondisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$G = G$$

$$T = T$$

Meskipun besarnya G dan T dinyatakan tetap dan merupakan variable yang ditentukan di luar modal, perlu diperiksa bagaimana dampak penetapan kebijakan fiskal tersebut terhadap

variable-variable endogen Variabel endogen yang dimaksud disini adalah konsumsi, investasi dan interest rate. (Tedy Herlainbang, Sugiarto, Brastoro, said ketana. 1995:41-46)

3. Keseimbangan Di Pasar Keuangan

Karena tingkat bunga merupakan biaya pinjaman dan pengembalian yang diperoreh karena meminjamkan dana kepasar keuangan, kita bisa lebih baik memahami perandan tingkat bunga perekonomian dengan mengkaji pasar keuangan Untuk kita tulis kembali identitas pos pendapatan nasional menjadi

$$Y - C - G = I$$

Y-C-G adalah output yang tersisa setelah permintaan konsumen dan pemerintah telah dipenuhi inilah yang disebut tabungan nasional (national saving) atau ringkasnya tabungan (saving S), selain bentuk ini, identitas pos pendapatan nasional menunjukkan bahwa tabungan sama dengan investasi

Untuk memahami lintas ini lebih lengkap, kita bisa memecah tabungan nasional menjadi dua-satu bagian menunjukkan tabungan dan sektor perseorangan dan yang lain menunjukkan tabungan pemerintah;

$$(Y - T - C) + (T - O) = I$$

(Y-T-C) adalah pendapatan disposable dikurangi konsumsi, yang merupakan tabungan perseorangan (private saving). Dan (T -G) adalah penerimaan pemerintah dikurangi pengeluaran pemerintah. yaitu tabungan masyarakat (public saving), (jika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, pemerintah mengataini devisit anggaran, dan tabungan masyarakat adalah negatif) Tabungan nasional adalah jumlah tabungan perseorangan dan public Diagram aliran berputar selain gambar #-1 menunjukkan interprestasi dan persamaan ini Persamaan ini menyatakan bahwa aliran kepasar keuangan (tabungan perseorangan dan public) harus menyeimbangkan arus keluar dan pasar keuangan (investasi).

Untuk melihat bagaimana tingkat bunga menyeimbangkan pasar keuangan, gantilah fungsi konsumsi dan fungsi investasi keselain identitas pos pendapatan nasional.

$$Y - C(Y - T) - G = I(r)$$

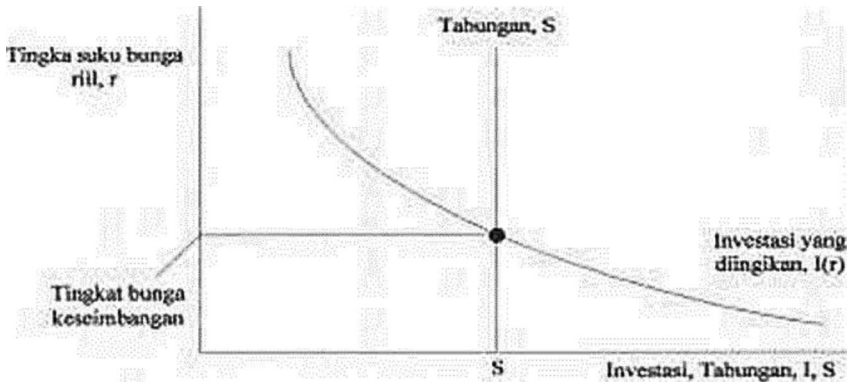
Selanjutnya nyatalah bahwa G dan T adalah tetap dengan kebijakan dan Y adalah tetap dengan factor-faktor produksi dan fungsi produksi.

$$\bar{Y} \pm C(\bar{Y} \pm \bar{T}) \pm \bar{G} = I(r)$$

$$\bar{S} = I(r)$$

Sisi kiri dan persamaan Ini menunjukkan bahwa tabungan nasional bergantung pada pendapatan Y dan variable kebijakan fiscal G dan T untuk nilai tetap Y, G dan T, tabungan nasional S juga tetap Sisi kanan persamaan menunjukkan bahwa investasi bergantung pada tingkat bunga.

Gambar menampirkan tabungan dan investasi sebagai fungsi dan tingkat bunga Fungsi tabungan adalah garis vertical karena selain model ini tabungan tidak bergantung pada tingkat bunga (meskipun kita gunakan asumsi ini kemudian). Fungsi investasi kebawah semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan Sekilas, gambar ini seperti kurva penawaran dan permintaan barang tertentu Nyatanya, tabungan dan investasi bisa diterprestasikan selain kaidah penawaran dan permintaan Selain kasus ini. "barang" itu adalah dana taktis (loanable funds), dan "harga-nya adalah tingkat bunga Tabungan adalah penawaran dari dana taktis rumah tangga meminjamkan tabungan mereka kepada investor atau menabungnya di bank yang kemudian meminjamkan dana Itu kepihak lain Investasi adalah permintaan terhadap dana taktis-investor meiminjamkan dari public secara langsung dengan menjual obkgasi atau secara tidak langsung dengan meminjam dan bank. Karena investasi bergantung pada tingkat bunga, jumlah dana taktis juga bergantung pada tingkat bunga



Tabungan, investasi dan tingkat bunga tingkat bunga menyesuaikan menuju titik keseimbangan miring kebawah menunjukkan investasipermintaan terhadap pinjaman. Perpotongan kedua kurva ini menentukan tingkat bunga keseimbangan Tingkat bunga menyesuaikan sampai jumlah perusahaan yang ingin menanamkan modal sama dengan jumlah rumah tangga yang ingin menabung. Jika tingkat bunga tedalu rendah, investor menginginkan output perekonomian lebih banyak ketimbang rumah tangga yang ingin menabung Dengan kata lain, jumlah pinjaman yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan bila ini terjadi, tingkat bunga meningkat. Sebaliknya jika tingkat bunga tertalu tinggi, rumah tangga ingin menabung lebih banyak ketimbang perusahaan yang ingin menanamkan modal, karena jumlah pinjaman yang ditawarkan lebih besar ketimbang jumlah yang diinginkan, tingkat bunga turun Tingkat bunga keseimbangan berada di perpotongan kedua kurva itu. Pada tingkat bunga keseimbangan, hasrat rumah tangga untuk menabung menyeinibangkan hasrat perusahaan untuk menanamkan modal dan jumlah pinjaman yang ditawarkan sama dengan dengan jumlah yang diinginkan.

Perubahan selain tabungan Dampak kebijakan Fiskal

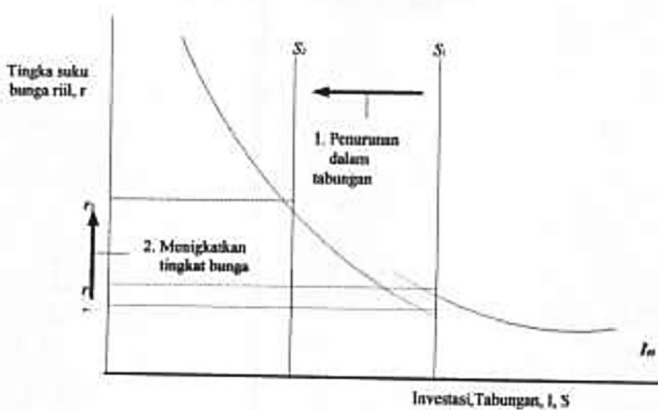
Kita bisa gunakan model kita untuk menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian Ketika pemerintah mengubah pengeluaran atas tingkat pajaknya per-

ubahan itu mempengaruhi permintaan terhadap output barang dan jasa perekonomian dan mengubah tabungan nasional, investasi dan tingkat bunga keseimbangan

Peningkatan selain pembelian pemerintah.

Pertama-tama, perhatikanlah dampak dan kenaikan selain pembelian pemerintah sebesar AG Dampak lansungnya adalah meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sebesar AG Tetapi karena output total tetap, kenaikan selain pembekaan pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan selain beberapa kategori permintaan lain Karena pendapatan disposable $Y-T$ tidak berubah, konsumsi C tidak berubah. Kenaikan selain pembelian pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan yang sama selain investasi Agar investasi turun tingkat bunga harus naik Maka kenaikan selain pembelian pemerintah menyebabkan tingkat bunga meningkat dan investasi turun Pemberian pemerintah dikatakan desakan keluar (crowding out) investasi.

Untuk memahami dampak peningkatan selain pembelian pemerintah perhatikantah pengaruhnya pada pasar untuk dana taktis Karena peningkatan selain penurunan selain tabungan kemungkinan hasil dan perubahan selain kebijakan fiscal, menggeser kurva tabungan ke kiri. Keseimbangan bar adalah titik di mana kurva tabungan baru memotong kurva investasi Penurunan



selain tabungan menurunkan jumlah investasi dan menaikkan tingkat bunga tindakan kebijakan fiskal yang mengurangi tabungan disebut mendesak keluar investasi.

Pembelian pemerintah tidak dikaitkan dengan peningkatan dan lain pajak, pemerintah mendanai pengeluaran tambahan dengan meimjam-yaitu, dengan mengurangi tabungan masyarakat Karena tabungan masyarakat tidak berubah pinjaman pemerintah ini mengurangi tabungan nasional. Sebagaimana Gambar 4 tunjukkan, penurunan selain tabungan nasional ditunjukkan oleh pergeseran ke kiri selain penawaran dana taktis yang tersedia untuk investasi. Pada tingkat bunga awal, permintaan terhadap pinjaman melebihi penawarannya. Tingkat bunga keseimbangan meningkat ke titik di mana kurva investasi memotong kurva tabungan yang baru Jadi, peningkatan selain pembelian pemerintah menyebabkan tingkat bunga turun dari r , ke r , (N. Gregory Mankiw. 2000 : 56 -59)

Penurunan Pajak

Berikut Ini akan diulas dampak perubahan pajak. Pengurangan pajak langsung berpengaruh pada Δ disposable *income* dan konsumsi Disposable *income* meningkat sebesar ΔT dan konsumsi meningkat sebesar $(\Delta T \times MPC)$ Semakin tinggi MPC, lebih besar dampak pengurangan pajak terhadap konsumsi.

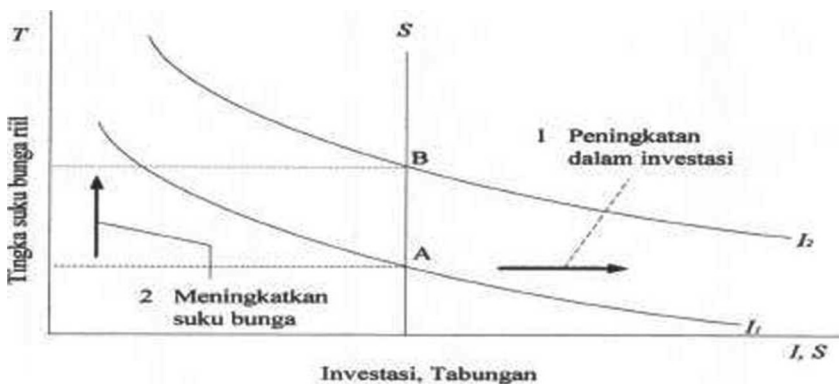
Karena output Ekonomi ditetapkan oleh factor-faktor produksi dan belanja pemerintah ditetapkan pemerintah. peningkatan konsumsi harus dimbangi oleh penurunan investasi Agar investasi berkurang tingkat bunga harus naik. Karena Itu. sebagaimana halnya dengan kenaikan pengeluaran pemerintah mendesak investasi dan menaikkan tingkat bunga.

Dampak pengurangan pajak juga dapat dianalisis dengan mencermati saving dan investasi Mengingat pengurangan pajak meningkatkan disposable *Income* sebesar ΔT , konsumsi meningkat sebesar $(MPC \times \Delta T)$. National saving S , yang nilainya sebesar $Y - C - G$. turun dengan Jumlah sama sebagaimana kenaikan konsumsi

Selain gambar 4, diperlihatkan penurunan saving menggeser supply dana yang dapat dipinjamkan ke kin yang berarti menaikkan keseimbangan tingkat bunga dan menurunkan investasi

Perubahan selain Permintaan Investasi

Salah satu alasan bagi terjadinya kenaikan permintaan investasi adalah inovasi teknologi Sebagai contoh seseorang menemukan teknologi baru. misalkan rel kereta api atau computer Sebelum perusahaan atau rumah tangga dapat menggunakan inovasi ini. terlebih dahulu mereka harus membeli barang-barang investasi yang dibutuhkan Penemuan dari rel kereta api tidak mempunyai nilai sampai rel tersebut telah diproduksi dan terpasang Ide tentang computer tidak produktif sampai computer dapat digunakan untuk kepentingan industri Dengan demikian inovasi teknologi berdampak pada peningkatan permintaan untuk investasi

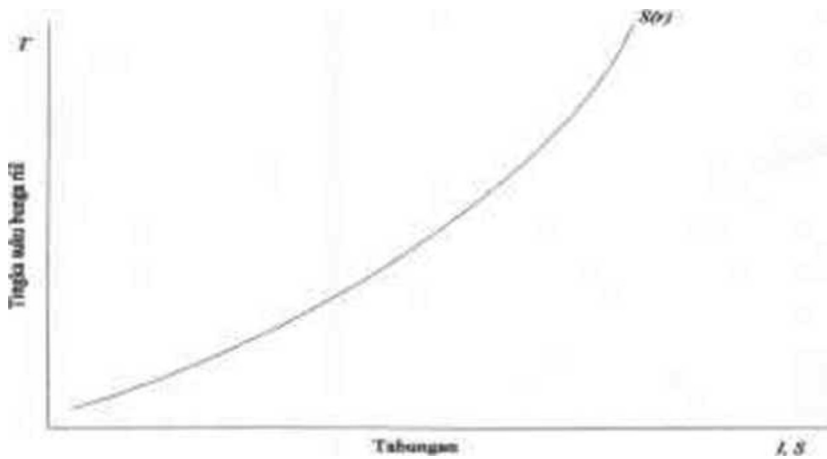


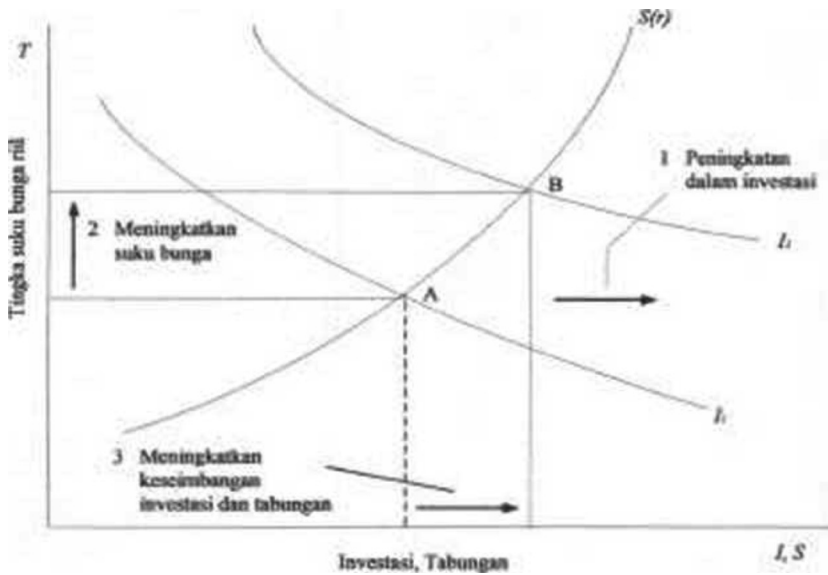
Di samping perubahan yang disebabkan oleh inovasi teknologi, permintaan teknologi juga bisa berubah bila pemerintah mendorong atau menekan investasi melalui pajak Sebagai contoh misalkan pemerintah meningkatkan Pph dan menggunakan tambahan pendapatan dan harus pengurangan pajak tersebut untuk pihak yang melakukan investasi selain modal yang baru Perubahan aturan pajak tersebut menyebabkan lebih banyak proyek Investasi yang menguntungkan sehingga akan meningkatkan permintaan barang investasi

Gambar menunjukkan tidak peningkatan permintaan investasi Pada tingkat bunga berapa pun, permintaan untuk barang-barang investasi sekarang lebih tinggi Kondisi ini ditunjukkan dengan pergeseran rencana investasi ke kanan Keseimbangan perekonomian berubah dan titik A ke titik B.

Implikasi yang mengherankan disini ternyata jumlah keseimbangan Investasi tidak berubah, dengan asumsi tingkat tabungan tetap. yang menentukan besarnya Investasi dengan kata lain, supply dananya tetap sehingga kenaikan selain permintaan semata-mata hanya meningkatkan keseimbangan tingkat bunga.

Hasil yang diperoleh bisa jadi berbeda dengan apa yang telahdibahas sebelumnya jika ditakukan modifikasi terhadap fungsi konsumsi dengan menetapkan kemungkinan konsumsi tergantung pada tingkat bunga





Karena tingkat bunga merupakan pendapatan dan tabungan, tingkat bunga tinggi mungkin menurunkan konsumsi dan menaikkan tabungan. Jika demikian, rencana tabungan tidak akan vertikal melainkan akan bergerak naik seperti selain gambar. Dengan rencana tabungan yang bergerak naik, kenaikan pada permintaan investasi akan meningkatkan keseimbangan tingkat bunga dan besar investasi. Gambar 7 menunjukkan perubahan tersebut. Peningkatan pada tingkat bunga menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun dan tabungan meningkat. Tabungan adalah fungsi dan tingkat bunga. Hubungan positif terjadi jika tingkat bunga tinggi mendorong orang untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan.

Keseimbangan Pasar barang dan jasa

$$Y = C + I + G$$

$$C = C(Y-T)$$

$$I = I(r)$$

$$G = \bar{G}$$

$$T = \bar{T}$$

Permintaan bagi output perekonomian muncul dan konsumsi. investasi dan belanja pemerintahan Konsumsi tergantung pada disposable income, investasi tergantung pada real interest rate dan belanja pemerintah serta pajak merupakan variable exogen dan suatu kebijakan fiscal Dan sisi supply diketahui bahwa jumlah output yang dapat dihasilkan ditentukan oleh factor produksi dan fungsi produksi.

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) \\ = \bar{Y}$$

Dengan mengkombinasikan persamaan dari demand dan supply diperdeh

$$Y = C(Y-T) + R + G \\ Y = C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + G$$

Perusahaan ini menyatakan bahwa supply output sama dengan demandnya Dan persamaan yang terbentuk dapat dilihat peran penting dari interest rate Pada kondisi keseimbangan, permintaan barang dan jasa akan sama dengan supply-nya Karena besarnya Y.T. dan G tetap, maka interest rate-lah yang berfungsi sebagai imbang

E. IMPLEMENTASI KEBUAKAN FISKAL Di INDONESIA

1. Peranan Pemerintah Selain Perekonomian

Menurut kenyataan masa sekarang kegiatan Ekonomi masyarakat yang sama sekali lepas dari atau tanpa campur tangan pemerintah baik langsung atau tidak langsung, sukar untuk diketemukan Lebih-lebih lagi setelah populainya program-program pembangunan Ekonomi. terutama semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-2. pentingnya peranan pemerintah itu menjadi semakin santer kedengarannya, dan semakin menonjol Hal demikian dapat dilihat antara lain dibentuknya badan-badan untuk pembangunan dan pengembangan Ekonomi dibentuknya berbagai proyek yang langsung atau tidak langsung diusahakan oleh Negara dan sebagainya

Kesemua tindakan Negara itu jadinya akan berpengaruh pada produksi dan pendapatan nasional. Betapa pentingnya peranan pemerintah selain proses kehidupan Ekonomi masyarakat, sejak semula pun telah ditegaskan oleh Keynes yaitu sejak teori Ekonomi Klasik tidak berhasil memecahkan masalah depresi besar di tahun-tahun tiga puluhan. Analisa Keynes inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dengan cara sebagaimana sesuatu Negara dengan mempengaruhi pembentukan pembagian dan penggunaan pendapatan nasional.

Disamping itu dan analisis Keynes tentang depresi tersebut yang ternyata harus dipecah dengan Teori baru, dapatlah disimpulkan bahwa negaralah yang harus menerima tanggung jawab baru, yaitu tentang menganggumya tenaga-tenaga produktif selain masyarakat sebagai akibat dan depress. Negara harus secara sadar ikut serta aktif selain perekonomian menempatkan kembali tenaga-tenaga kerja selain proses produksi masyarakat, sehingga dengan demikian akan memperbesar produksi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan keharusan itu, maka terbukalah lapangan penting bagi aktivitas Negara dan keuangan Negara. Selain Negara-negara yang lebih mengutamakan aktivitas Ekonomi swasta (*laissez faire, free fight liberalisme*), maka aktivitas Ekonomi Negara adalah merupakan hasil pemikiran dari kesadaran bahwa proses Ekonomis atas dasar mekanisme pasar tidak dapat diandalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal demikian disebabkan oleh perbedaan prinsip. Kegiatan Ekonomi swasta lebih banyak berprinsip pada laba maksimal, sedang kegiatan Ekonomi pemerintah berprinsip pada tercapainya kemakmuran masyarakat.

Menurut Otto Eckstein ... Selain bukunya *Public Finance* (1967 hal 8-11), maka keharusan campur tangan dan aktifnya pemerintah selain perekonomian itu disebabkan oleh kepincangan-kepincangan yang relevan dan Ekonomi pasar. Kelemahan-kelemahan itu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Munculnya Deflasi dan Inflasi

Artinya ekonomi klasik yang menciptakan ekonomi pasar seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah tidak dapat mengatasi dengan sendirinya tekanan-tekanan intiasi maupun deflasi tetapi pemerintah dengan instrument dan kekuasaan ada padanya dapat mencegah timbulnya intiasi maupun deflasi dengan politik moneter dan kebijakan fiskal. Misalnya untuk mencegah intiasi yang ditandai oleh naiknya harga-harga umum, maka pemerintah dapat menjalankan tight money policy (politik moneter) dan kebijakan fiskal yaitu dengan politik dan penghematan dan peningkatan penerimaan Negara (anggaran belanja Negara yang surplus) sebaiknya bila timbul gejala-gejala deflasi dalam mana harga-harga umum menurun, maka Negara memperbesar pengeluaran-pengeluaran Negara (Anggaran belanja deficit politik fiskal) dan politik moneternya adalah easy money policy seperti menurunkan tingkat harga bunga perluasan kredit dan sebagainya.

b. Timbulnya gejala ketidaksamaan (ketidak merataan) pendapatan

Ekonomi pasar yang berprinsip pada kebebasan individu, kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk bersaing, (*laissez faire, laissez passer*) mengakibatkan golongan yang lemah menjadi semakin melarat. Sebab yang terakhir ini kalah dalam bersaing golongan yang lemah menjadi semakin melarat. Sebab yang terakhir ini kalah dalam bersaing yang bebas, sehingga makin terdesak ke luar pasar. Apa yang terjadi adalah makin lebarnya perbedaan penghasilan dalam masyarakat.

c. Adanya barang - barang kolektif

Dan satu segi Barang dapat dibedakan menjadi barang kolektif (*corrective goods*) dan barang yang tersirat privat (*private goods*) barang kolektif adalah barang-barang / jasa yang penyediannya tertuju pada semua golongan selain masyarakat bukanya hanya orang-orang yang bersedia untuk membayarnya saja (tidak melalui jual beli di pasar) sebagai contoh misalnya ke-

amanan dan pertahanan nasional, yang diberikan oleh angkatan bersenjata sesuatu Negara adalah bagi semua warga Negara, tanpa membedakan siapa yang bersedia dan siapa yang tidak membayar jasa –jasa yang diberikan oleh angkatan bersenjata tersebut.

Barang privat adalah orang-orang yang penyediaannya terbatas pada mereka yang sanggup untuk membayarnya saja (melalui jual beli pasar). Bagi siapapun yang tidak membayarnya tidak akan memperoleh barang tersebut. Barang privat ini jadinya adalah barang-barang yang bersifat exclusion principle, artinya barang yang hanya dapat dinikmati bila seseorang bersedia untuk membayarnya. Kebutuhan-kebutuhan semacam ini disebut mentwentes. Sedangkan barang-barang yang bersifat collaective goods yang pemanfaatannya tidak dapat mengeluarkan orang-orang yang tidak tersedia membayarnya bagi pemuasan kebutuhan disebut dengan social wants.

d. Resiko pembiayaan yang besar.

Sehubungan dengan banyaknya barang-barang, jasa-jasa yang bersifat collective goods, seperti pertahanan dan keamanan nasional, dam-dam dan bendungan serta saluran-saluran migasi, pelabuhan-pelabuhan, proyek-proyek, sumber-sumber tenaga atom dan sebagainya, yang pembayarannya relative besar, sedangkan keuntungan hasilnya baru terjadi da;a, beberapa tahun kemudian, maka pembiayaan-pembiayaan atas barang atau proyek menjadi tidak terpaku oleh swasta, sehingga negaralah yang harus memikulnya.

e. Menghilangkan sifat – sifat monopoli pihak swasta

Campur tangan Negara selain perekonomian mungkin juga disebabkan untuk menghilangkan monopoli-monopoli pihak swasta atas barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak (masyarakat), seperti penyediaan air minum. gas. listrik dan sebagainya Karena bilamana perusahaan-perusahaan ini monopoli olen swasta. Akan terjadilah penentuan harga yang

tidak adil olen monopolis tersebut. Sebab selain penyediaan barang- barang / jasa-jasa pemerintah berprinsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan pihak swasta bertujuan untuk mencapai iapa yang maximum.

Sehubungan dengan kelemahan- kelemahan Ekonomi klasik dan keharusan untuk campur tangannya pemerintah dalam perekonomian, maka kegiatan pemerintah selain perekonomian itu dapat digolongkan dalam 4 hal yaitu.

1. Yang berhubungan dengan alokasi factor-faktor atau sumber produksi. yaitu kegiatan- kegiatan Ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk menambah atau mengurangi alokasi sumber-sumber Ekonomi untuk mengasilakan berbagai macam barang-barang Keputusan umum (public goods, social overneaa capital) dan barang-barang yang memberikan externalities yang besar usaha demikian jelas akan meruban komposisi GNP masyarakat. Kenikmatan external adalah kenikmatan yang diberikan oleh beberapa orang kepada orang lain yang memberikan kenikmatan itu tidak dapat menuntut ganti rugi atas kenikmatan yang telah diberikannya itu. Penambahan perluasan dan penyempurnaan pendidikan akan mengakibatkan perbaikan efisiensi kerja dalam management. Mempercepat proses perubahan teknologi dan dinamisasi kehidupan social. Jadi kenikmatan pendidikan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat. Demikian juga tentang peraturan-peraturan kesehatan, tidak hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penyakit itu.
2. Yang berhubungan dengan tingkat efisiensi penggunaan factor-faktor produksi tertentu sehingga menjadi lebih efisien, misalnya dengan berbagai research / studi yang teratur.
3. Yang berhubungan dengan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, misalnya bantuan pemerintah pada proyek - proyek swasta, tambahan pengeluaran Negara untuk pendidikan, subsidi - subsidi, research dan sebagainya.
4. Yang berhubungan dengan redistribusi pendapat.

Di Negara-negara yang sedang berkembang/sedang membangun maka peranan pemerintah selain perekonomian itu sangat penting sebab di Negara yang sedang membangun. Negara bertungsi sebagai perinits dan pelaksana pembangunan yang bertujuan untuk menaikkantingkat hidup dan kemakmuran masyarakat tanpa campur tangan Negara proses pembangunan Ekonomi di Negara yang sedang berkembang akan sukar berhasil dengan cepat hal itu disebabkan antara lain oleh terbiasanya dana dan daya(fund ana forces) untuk membangun. di samping banyaknya faktor-faktor penghambat dan rintangan- rintangan pembangunan.

Campur tangan Negara dalam kegiatan Ekonomi masyarakat antara lain adalah :

- Melalui anggaran belanja Negara (politik/ kebijakan fiscal)
- Melakukan proses produksi Barang barang/jasa-jasa seperti PLN / PJAK Postei dan sebagainya.
- Menjalankan pengawasan-pengawasan atas produksi swasta (pendekatan secara control)

Diantara ketiga cara ini maka kebijakan fiscal itulan yang sangat penting pengaruhnya terhadap proses dan kehidupan Ekonomi masyarakat terhadap pendapatan nasioal konsumsi. tabungan dan sebagainya

Cara lain yang ditempuh adalah dengan :

- Pendekatan secara subsidi (Sobri 1982.154-158)

2. Tugas Pemerintah Selain Perekonomian

Untuk dapat memahami tugas pemerintah dalam mengatur perekonomian. maka pandangan diarahkan pada kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dengan kebijaksanaanlah pemerintah mengendalikan dan mengatur perekonomian secara makro dengan ini kita dapat mengetahui tugas pemerintah selain perekonomian.

a. Sebagai Stabilisator

Peranan stabilisator pemerintah dalam perekonomian adalah dengan mengeluarkan suatu kebijaksanaan guna menetralkan distorsi dalam perekonomian kebijaksanaan alat bertindak sebagai penyehat sektor perekonomian yang mengalami kemacetan distorsi atau penyimpangan selain perekonomian sendiri sebenarnya juga diciptakan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Apabila suatu kebijaksanaan ingin mencapai sasaran secara maksimal, tentu akan menciptakan distorsi atau penyimpangan terhadap sasaran yang lain dalam perekonomian itu sendiri. Bilamana sebuah kebijaksanaan diarahkan mencapai satu sasaran yang lain diabaikan. Karena untuk mencapai dua sasaran sekaligus dengan sebuah kebijaksanaan tidak akan mungkin bisa dicapai. Setelah sebuah kebijaksanaan diluncurkan guna mencapai sebuah sasaran, kebijaksanaan ini akan memberikan dampak negatif pada sistem Ekonomi secara makro (keseluruhan) ini merupakan peran pemerintah sebagai stabilisator guna menghilangkan dampak negatif yang terjadi pada perekonomian secara makro.

Dalam perekonomian Indonesia secara makro, pemerintah mengeluarkan Pakto 2/ 1988 Maksud diketuarkannya kebijaksanaan ini adalah guna mengimpun dana masyarakat untuk dapat menggerakkan laju pertumbuhan serta mempertahankan momentum pertumbuhan Ekonomi di atas 6% per tahun Pakto 2/ 1988 merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendirikan lembaga keuangan bank. Dengan banyaknya berdiri nanti disana yang ada di bank-bank tersebut dapat disalurkan untuk investasi investasi inilah yang diharapkan pemerintah menggerakkan laju pertumbuhan Ekonomi secara di capai selama ini. besaran yang ingin di capai kebijaksanaan ini akhirnya dapat tercapai, yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 1989 sebesar 7.4% dan laju pertumbuhan ekonomi 1990 sebesar 7% . pertumbuhan ekonomi di dorong dan 4.56% pada 1988

Berselang 2 tahun kebijakan ini telah memberikan dampak negatif perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya keagairahan yang tinggi untuk investasi telah menimbulkan tingkat

inflasi yang tinggi pada 1990 sebesar 9.35%. pemerintah melihat tingkat inflasi ini. Akhir 1990 pemerintah telah mengeluarkan Tahun Kebijakan uang ketat, dengan mewajibkan BUMN membeli SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dengan maksud untuk menekan kegairahan investasi. Pada 1992 telah dapat ditekan tingkat inflasi menjadi 4.94 % ternyata pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan menjadi 6.5%. ini adalah peran pemerintah sebagai stabilisator dalam perekonomian, menghilangkan ketidakberesan yang terjadi dalam perekonomian.

b. Menekan Angka Pengangguran

Peranan pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran hanya sebatas atau melalui kebijaksanaan, karena pemerintah tidak akan sanggup menciptakan lapangan kerja bagi seluruh angkatan kerja yang ada. Disamping itu, keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah ikut membatasi gerak pemerintah guna menciptakan lapangan pekerjaan.

Dengan mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang menyangkut kemudahan untuk mengadakan investasi, rangsangan untuk investasi yang dibebankan pemerintah melalui kebijaksanaan telah dapat dinaikkan investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dengan keluarnya PP No. 17/1992 yang memperbolehkan PMA dimiliki saham 100% untuk seluruh sector ekonomi (Sebelumnya harus bekerja sama dengan pengusaha nasional), telah menaikkan Investasi PMA 1992 menjadi 10.3 milyar US dari 8.8 milyar US pada 1991

Merupakan salah satu contoh kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Disamping itu, sangat perlu diberikan kemudahan untuk mengurus prosedur (segi administrasi) bagi investor yang ingin mengadakan investasi. Peran pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran hanya sebatas kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan PP No. 17/1992 diharapkan akan banyak tercipta lapangan kerja. Dengan adanya peningkatan investasi PMA ini.

Pada 1994 keluar deregulasi yang cukup berani memperbolehkan investasi asing menanamkan modalnya pada sector

yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga hal ini merupakan rangsangan bagi PMA karena selama ini sector tidak bisa dimasuki. Akibatnya investasi PMA meningkat menjadi 23.724.3 US pada 1994.

c. Menjaga Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi akan memberikan dampak yang luas pada segala aspek kenidupan. peningkatan pendapatan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pertumbuhan Ekonomi yang tinggi. Memacu pertumbuhan Ekonomi merupakan tujuan akhir kebijaksanaan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah. sehingga pemerintah akan mengarahkan segala kebijaksanaan guna mencapai tujuan tersebut

Dan kedua kebijaksanaan (moneter dan fiskal) ini. mana yang lebih tepat untuk memecahkan kemacetan selain pertumbuhan Ekonomi. Karena dengan menjalankan satu kebijaksanaan bukan berarti meniadakan kebijaksanaan lainnya. Akan tetapi, selain pelaksanaannya tentu ada penekanan terhadap salah satu kebijaksanaan dari dua kebijaksanaan tersebut.

Dengan menjalankan kebijaksanaan fiskal tentu penurunan pajak dan peningkatan pembelian pemerintah merupakan langkah yang harus diambil. Kalau kebijaksanaan moneter yang menjadi pilihan. factor suku bunga perlu ditingkatkan guna merangsang masyarakat meningkatkan tabungannya. Dengan demikian dana untuk investasi dapat ditingkatkan sekaligus akan dapat menekan tingkat inflasi selain perekonomian. Jadi kebijaksanaan mana yang lebih tepat untuk menjalankan guna mengatasi resesi Ekonomi terlebih dahulu harus diketahui penyebab kemacetan yang terjadi untuk mencapai pertumbuhan Ekonomi. akan tetapi. kedua kebijaksanaan mana yang telah lebih tepat untuk dijadikan guna mengatasi resesi Ekonomi. terlebih dahulu harus diketahui penyebab kemacetan yang terjadi untuk mencapai pertumbuhan Ekonomi. Akan tetapi. kedua kebijaksanaan tersebut digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi permintaan agregat

Kebijaksanaan fiscal memegang peranan yang sangat penting selain pembentukan kebijaksanaan pengeluaran dan penerimaan suatu Negara. Pengeluaran dan penerimaan akan mempengaruhi perluasan kesempatan kerja, tingkat produksi dan tingkat harga. Pengeluaran Negara akan menambah pendapatan masyarakat (ini akan meningkatkan daya beli). Penerimaan pajak akan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap hasil produksi atau permintaan akan produksi oleh masyarakat berkurang.

Untuk perekonomian Indonesia yang lebih ditekankan guna mencapai pertumbuhan Ekonomi adalah kebijaksanaan moneter. Mulai dari 1980-an pemerintah lebih banyak mengeluarkan kebijaksanaan fiscal. Lagi pula pemerintah akan mengalami kesulitan dengan menjalankan kebijaksanaan fiscal. Selain itu pajak sector pengeluaran tidak bisa dipompa atau diperbesar karena Indonesia menganut anggaran berimbang (*balance spending*) bukan menganut anggaran deficit (*dohcric spending*). Akan tetapi, dengan kebijaksanaan moneter yang dikeluarkan pemerintah telah dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Mule Nasution, 1997:1566-160)

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA

Selama perekonomian Indonesia pemerintah telah menganggarkan setiap tahun penerimaan yang akan membiayai seluruh pengeluaran APBN dapat dilihat dan sector penerimaan dan sector pengeluaran.

Sector Penerimaan dalam APBN\

I. Penerimaan Dalam Negeri

- a. Penerimaan minyak dan gas bumi
- b. Penerimaan di luar minyak dan gas bumi
 1. Pajak penghasilan
 2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

3. Bea masuk
4. Cukai
5. Pajak ekspor
6. Pajak lainnya
7. Ipeda atau Paiak bumi dan bangunan
8. Penerimaan bukan pajak
9. Penerimaan penjualan BBM

II. Penerimaan Pembangunan

- a. Bantuan Program
- b. Bantuan Proyek

Sektor Pengeluaran Selain APBN

I. Pengetuaran Rutin

1. Belanja pegawai dan pension
2. Belanja barang
3. Subsidi daerah otonom
4. Bunga cicilan utang
5. Lain lain

II. Pengeluaran Pembangunan

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Sosial
3. Bidang Umum
4. Bantuan Proyek

Dalam pembentukan APBN setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah kemudian mengajukan ke DPR untuk diminta per-setujuannya. APBN yang dianggarkan setiap tahun selain pelaksanaan tentu akan mengalami penyimpangan. kadang sector penerimaan mengalami peningkatan dan yang dianggarkan. Sektor pengeluaran tidak bisa dipastikan secara tepat akan sesuai dengan sector penerimaan. Walaupun Indonesia menganut anggaran berimbang (balance spending). dalam pelaksanaan atau realisasi setiap tahun anagaran tetap mengalami penyimpangan baik dan sector penerimaan maupun dan sector pengeluaran Ketidak seimbangan ini bukan berarti Indonesia menganut

anggaran yang bersifat deficit, tetapi patokan pengeluaran tetap akan mengacu pada terhadap anggaran yang telah ditetapkan DPR. Kalau anggaran yang bersifat deficit segala pengeluaran tidak mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan, pengeluaran bisa melebihi anggaran yang telah ditetapkan Untuk melihat bagaimana anggaran yang telah ditetapkan DPR dan realisasinya setiap tahun selain pelaksanaannya. dapat dilihat dari tabel-tabel yang ada

Sektor penerimaan selain negeri anggaran pendapatan Negara secara keseluruhan tidak pernah tercapai. seperti anggaran 1989/1990 dan 1990/1991 penerimaan selain negeri dianggarkan sebesar Rp 25 250 milyar dan Rp 31.584 milyar Realisasinya Rp 23.004 milyar dan Rp 28.740 milyar. sehingga selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp 2 246 milyar dan Rp 2.844 milyar. Kalau diperhatikan penerimaan yang tidak memenuhi target pada anggaran penerimaan ini adalah penerimaan diluar minyak bumi dan gas target penerimaan di luar minyak bumi dan gas adalah Rp 17.350 milyar (1989/1990) Rp 20.801 milyar (1990/1991) Ini memberikan gambaran terhadap kita tentang masih lemahnya sector penerimaan pajak sebagai pembiayaan pembangunan, walaupun sector penerimaan pajak ini mempunyai potensi yang sangat besar selain perekonomian Indonesia Kalau sector penerimaan pajak bisa di maksimalkan dan wajib pajak yang ada bantuan (pinjaman) luar negeri tentu akan bisa dikurangi Aparat pajak yang bersih merupakan prasyarat untuk meningkatkan sector penerimaan pajak ini. dan solusi antara aparat pajak dengan pengusaha harus bisa dideteksi oleh administrasi perpajakan yang ada.

Sektor penerimaan minyak bumi dan gas setiap tahun lebih tinggi realisasinya dibandingkan dan yang dianggarkan kecuali anggaran 1987/1988. Untuk anggaran 1989/1990 sektor ini telah melebihi dan yang ditargetkan sebesar Rp 1.627 milyar (dianggarkan Rp 7 900 milyar dan realisasinya Rp 9.527 milyar), sedangkan anggaran 1990/1991 kelebihan penerimaan sector minyak bumi dan gas ini Rp 469 milyar (dianggarkan Rp

10.783 milyar dan realisasinya Rp 11 252 milyar). Kelebihan penerimaan sector minyak bumi dan gas bumi ini disebabkan pada saat penetapan APBN patokan harga minyak mentah sebagai sector penerimaan lebih kecil dari harga minyak mentah yang terjadi di pasar Internasional. Selisih inilah yang menyebabkan adanya kelebihan penerimaan sector minyak dan gas bumi Selain APBN untuk anggaran 1993/1994 penetapan harga minyak bumi yang dimasukkan selain sector penerimaan adalah 18 US \$ Apabila nanti harga minyak bumi yang tegadi di pasar internasional lebih tinggi dan 18 US \$. ini akan menciptakan kelebihan penerimaan bagi pemerintah dan sector minyak dan gas bumi Besarnya kelebihan tersebut didapat dari selisih harga yang terjadi di pasar internasional dikurangi dengan harga patokan selain APBN

Penerimaan pembangunan yang terjadi justru mengalami hal yang sebaliknya karena realisasi anggaran pembangunan lebih kecil dari anggaran pembangunan yang ditetapkan selain APBN Realisasi anggaran pembangunan Ini memberikan gambaran pada kita bahwa, banyak anggaran yang tidak bisa diwujudkan selain proyek dan program Artinya dalam pelaksanaan proyek dan program yang telah dianggarkan tidak bisa selesai begitu habis tahun anggaran yang bersangkutan Akibat keterlambatan-keterlambatan penyelesaian proyek dan program inilah yang menyebabkan kecilnya realisasi anggaran peambangunan bila dibandingkan dengan anggaran yang tersedia Pada anggaran 1989/1990 anggaran proyek dan program yang tidak bisa dihabiskan (tersisa) adalah sebesar Rp 1.334 milyar (anggaran penerimaan pembangunan Rp11 325 mrlyar sedangkan realisasi anggaran pembangunan ini Rp 9.991 milyar). Sedangkan anggaran 1990/1991 anggaran proyek dan program yang tidak bisa diwujudkan adalah sebesar Rp 1.860 milyar (penerimaan pembangunan Rp 11.289 milyar dan realisasi anggaran pembangunan Rp 9.429 milyar). Jadi seluruh atau sebagian proyek dan program yang ditargetkan selain anggaran 1990/1991 tidak bisa diselesaikan tepat waktunya. Hal ini membenarkan gam-

baran betapa lemahnya administrasi pembangunan yang ada. dan ini bisa juga disebabkan kurangnya koordinasi antar lintas sektoral (antar departemen).

Pengeluaran rutin untuk belanja Negara pegawai dan pension yang dianggarkan selain APBN anggaran 1989/1990 selain realisasinya telah dapat ditekan sehingga terjadi penghematan anggaran yang tersedia. Anggaran belanja pegawai dan pension adalah Rp 5 966 milyar, sedangkan realisasi belanja pegawai dan pension adalah Rp 4.998 milyar. Dengan demikian terjadi penghematan pengeluaran belanja pegawai dan pension sebesar Rp 968 milyar Pada anggaran 1990/1991 penghematan untuk belanja pegawai dan pension sebesar Rp 708 milyar (Rp 6 909Rp6.201). Penghematan ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan bila benar-benar diterapkan pengawasan melekat secara menyeluruh pada setiap departemen. karena banyak belanja pegawai yang tidak semestinya keluar Sebagai contoh perjalanan dinas yang tidak mendesak perlu ditiadakan seminar-seminar yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pengembangan sumberdaya manusia perlu dibilangkan.

Belanja barang pada anggaran 1990/1991 tercantum sebesar Rp 1.721 milyar, sedangkan realisasi belanja barang adalah Rp 1 702 milyar. maka terjadi penghematan sebesar Rp 19 milyar Sedangkan anggaran 1989/1990 belanja barang sebesar Rp 1.477 milyar dan realisasinya adalah Rp 1 492 milyar. maka terjadi kelebihan pengeluaran untuk belanja barang dibandingkan anggaran yang tersedia sebesar Rp 15 milyar. Ini merupakan pemborosan untuk belanja barang pada anggaran 1989/1990 Pemborosan ini tidak perlu terjadi bila benar-benar diperhitungkan kebutuhan barang bagi operasional administrasi permintaan.

Pengeluaran untuk pembayaran bunga dan utang selain APBN sudah terlalu memberatkan. karena setiap tahun anggaran beban yang ditanggung APBN untuk jenis pengeluaran ini semakin besar yang paling memberatkan APBN untuk pengeluaran pembayaran bunga dan cicilannya terutama untuk utang

luar negeri Untuk utang dalam negeri tidak terlalu memberatkan karena utang tersebut selain bentuk rupiah Pada anggaran 1989/1990 beban utang ditanggung oleh APBN 33,46%. pembayaran utang yang dianggarkan Rp 12.237 milyar dan APBN Rp 36.575 milyar. Realisasi pengeluaran yang terjadi untuk utang APBN adalah. APBN Rp 20.739 milyar (non-pembangunan) dan Rp 12 351 milyar (anggaran pembangunan), sehingga seluruh pengeluaran adalah Rp 32.990 milyar. Realisasi pembayaran utang anggaran 1989 adalah Rp 10 940 milyar (33.16%). Pada anggaran 1990/1991 telah ditargetkan pengeluaran untuk utang selain APBN 30.28% (untuk utang Rp 12.984 milyar dan APBN Rp 42.873 milyar). Sedangkan realisasi pembayaran utang dan APBN selain 1990/1991 adalah, utang Rp 11.939 milyar dan APBN Rp 38.168 milyar atau 31,28% Dengan beban pembayaran utang yang ditanggung APBN tersebut tidak bisa ditutupi oleh utang baru yang telah disetujui untuk Indonesia(sampai Maret 1992 disetujui oleh IGGI) Kita jangan lupa. tanpa adanya utang yang diberatkan masyarakat Intenasional terhadap Indonesia semenjak Orde Baru. pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai sekarang akan bisa dinikmati oleh masyarakat Karena modal awal pembangunan semenjak Orde Baru adalah utang yang diberatkan masyarakat Intenasional tersebut(dulu pemerintah masih sangat kekurangan selain pembangunan)

Besarnya utang Indonesia yang telah dipakai untuk pembiayaan pembangunan sampai pada 1990 adalah 67.908 US\$ Dsr (debt service ratio) yaitu perbandingan antara jumlah cicilan dan bunga yang harus dibayarkan dengan nilai ekspor yang didapat selain satu tahun, ini memberikan gambaran bahwa 30,9% (DSR = 30.9) dan hasil ekspor digunakan untuk membayar utang Indonesia (Kompas 17/2-1993) Pada 1992 telah terjadi peningkatan utang Indonesia, yaitu utang pemerintah 48.8 milyar US\$ dan swasta 23 milyar US\$ Peningkatan utang Ini sebenarnya bukan diakibatkan peningkatan pinjaman baru pada luar negeri (bukan peningkatan utang swasta) Akan tetapi. adanya apresiasi mata uang yen (peningkatan mata uang yen) terhadap mata uang

asing lainnya sesuai peningkatan mata uang yen (karena 40% utang pemerintah Indonesia selain bentuk yen). Terutama peningkatan ini terjadi pada 1985. karena apresiasi yen terhadap dollar AS hampir 50% (yaitu dari 240 yen/dollar AS menjadi 120 yen/dolar AS) Dengan adanya apresiasi yen ini akan lebih banyak rupiah sendiri mengalami depresiasi (penurunan nilai) terhadap yen jepang Misalnya. 1 yen dibutuhkan Rp 30.- dengan adanya depresiasi rupiah 10%. maka untuk memperoleh 1 yen dibutuhkan Rp 33.-

Pengeluaran untuk pembangunan dan tahun ketahun meningkat seiring peningkatan aktivitas perekonomian nasional. karena pemerintah berkewajiban untuk menciptakan prasarana (infrastruktur) guna dapat mempertahankan gerak langkah pertumbuhan ekonomi Penyediaan sarana jalan. komunikasi. pelabuhan, dan transportasi harus diadakan pemerintah untuk memperlancar arus barang dan jasa selain perekonomian Indonesia Pengeluaran pemerintah selain penciptaan sarana guna memperlancar aktivitas perekonomian, juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (pembangunan sekolah. sarana kesehatan, bantuan untuk pembangunan daerah lainnya). (Mulia Nasution, 1997 160-174)

F. KEBUAKAN FISKAL

1. Sejarah Dan Filosofi APBN

Tak dapat disangkal lagi APBN mempunyai konsekuensi atas keadaan perekonomian Di lain pihak APBN dipengaruhi dan di tentukan oleh keadaan social, politik, keamanan, serta keadaan Ekonomi Sejak masa kemerdekaan sampai dengan sebelum era pemerintahan Orde Baru diakhir tahun 1960 an. fungsi APBN tidaklah berjalan dengan baik kebijakan APBN defisit dijalankan selain periode waktu sebelum pemerintahan orde baru tidak jelas ditunjukkan mencapai suatu tujuan tertentu. Hal Ini disebabkan karena tidak stabilnya situasi sosial politik. dan ekonomi serta keamanan Defisit anggaran belanja yang besar dan

memuncak pada periode waktu akhir pemerintahan orde lainya telah menimbulkan keadaan inflasi yang sangat gawat, mencapai lebih dan 500% per tahun di tahun 1966. pada waktu itu boleh dikatakan APBN sama sekai tidak berfungsi

Baru setelah pemerintahan orde baru diakhi tahun 1960'an dan sangat efektif sejak awal tahun 1970'an fungsi APBN bisa berjalan Pada mulanya dialami keadaan Ekonomi dengan lingkaran output (produksi) nasional rendah dan dibarengi dengan adanya inflansi sangat tinggi Dua kebijakan Ekonomi telah dipakai menanggulangi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Kebijakan moneter adalah tindakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan / atau tingkat suku bunga Selain situasi inflansi disertai rendahnya output Maka kebijakan yang telah diambil berupa penurunan atau pengurangan jumlah uang beredar serta kenaikan lingkaran suku bunga pinjaman (kredit) bank. Dua hal tersebut telah mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi dan investasi agregatif yang selanjutnya telah mengakibatkan penurunan inflasi Meskipun untuk sementara masih belum bisa menaikkan tingkat produksi nasional serta kesempatan kerja Sementara itu dari segi kebijakkan fiskal kebijakan berupa APBN seimbang. Hal ini dilakukan dengan menurunkan secara drastic pengeluaran pemerintah terutama yang bersifat non-ekonomis serta mengusahakan Penerimaan pajak dan penerimaan dari sector lain yang kemudian berkembang dengan cepat berupa Penerimaan darisector minyak. Penerimaan pajak telah digalakkan namun sejauh ini secara relative kenaikan jumlahnya belum signifikan Penurunan secara drastic pengeluaran pemerintah telah menurunkan angka laju inflasi secara drastis pula

Sejauh ini prinsip APBN seimbang selalu dipertahankan Hal Ini terutama karena pengalaman dimasa lampau APBN defisit akan membawa akibat terjadinya inflasi Meskipun demikian volume besarnya APBN selalu bertambah besar secara riel dan tahun ketahun Table dibawah menunjukkan APBN besar perinciannya.

Dalam anggaran penerimaan meliputi Penerimaan selain negeri serta penerimaan pembangunan yang pertama bersifat tahunan merupakan pendapatan tahunan berupa penerimaan dan sektor minyak dan gas bumi, penerimaan pajak dan cukai, serta penerimaan lain-lain Penerimaan pembangunan berasal dan luar negeri berupa bantuan program yang murni maupun dirupiahkan, serta bantuan proyek Anggaran pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang pertama bersifat tahunan berupa belanja pegawai dan barang, subsidi daerah otonom. bunga dan cicilan utang luar negeri, serta pengeluaran rutin lainnya Sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran untuk pembangunan daerah. bantuan proyek yang murni maupun dirupiahkan subsidi pupuk dan penyertaan modal, serta pengeluaran pembangunan lain-lain.

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
Pemerintah (Trilyun Rupiah) 1987/1988**

(1) Pos dan Keterangan / Rincian	(2) Jumlah
Anggaran Penerimaan	22.78
Penerimaan Dalam Negeri	17.23
Minyak Dan Gas Bumi	6.94
Pajak Dan Cukai	9.14
Lain Lain	1.15
Penerimaan Pembangunan	5.54
Bantuan Program : Murni Dan Di Rupiahkan	1.12
Bantuan Proyek	4.42
Anggaran Pengeluaran	22.78
Pengeluaran Rutin	15.03
Belanja Pegawai Dan Barang	5.48
Subsidi Daerah Otonom	2.65
Bunga Dan Cicilan Utang Negeri	6.80
Lain lain	1.10

Pengeluaran pembangunan

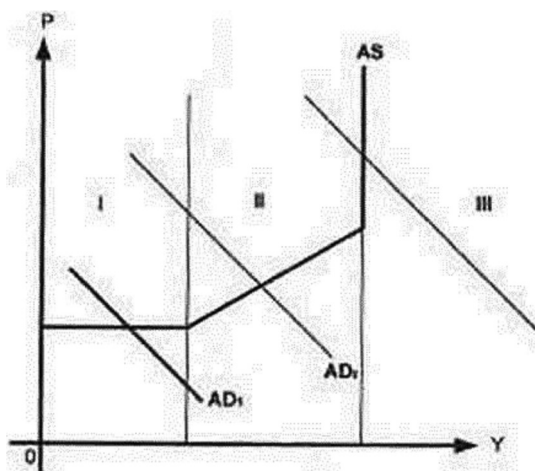
Pembangunan Daerah	7.75
Bantuan Proyek : Murni Dan Dirupiahkan	1.18
Subsidi Pupuk, Penyertaan Modal Dan Lain-Lain	1.15

Sumber : Republik Indonesia, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). 1988/89-1989/90

Yang dimaksud dengan anggaran belanja Negara (budget) adalah semua anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh tingkat pemerintah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Anggaran belanja ini direncanakan setahun sebelumnya

Budget menggambarkan jumlah uang yang akan dibelanjakan oleh pemerintah dan menjelaskan pos-pos pengeluaran Budget harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diperiksa apakah memerlukan perbaikan atau perubahan sebelum disetujui oleh DPR

Selain untuk mewujudkan stabilisasi perekonomian, pembelanjaan pemerintah ditujukan untuk memacu pertumbuhan Ekonomi Secara grafik kebijakan fekal dapat digambarkan sebagai berikut



Dampak kebijaksanaan fiscal terhadap pertumbuhan

Keterangan

Keynesian Case

Pada kondisi ini, tingkat harga bersifat kaku (rigid) sehingga kurva AS bersifat elastis sempurna. Pertambahan output tidak akan mengakibatkan kenaikan harga maupun pendapatan nasional (Y). Kebijakan pemerintah menaikkan pendapatan nasional (Y) sedangkan tingkat harga tidak mengalami perubahan.

Positive Siope

Kondisi ketika terjadi pengeseran kurva AS yang menyebabkan kenaikan tingkat pendapatan nasional (Y) sekaligus menyebabkan turunnya harga (P)

Classical Case

Pada kondisi ini kurva AS bersifat inelastis sempurna berdasarkan asumsi full employment. Selain hal ini tidak dimungkinkan adanya pertambahan output tanpa investasi baru. Pada kondisi ini harga sangat mudah meningkat jika terjadi peningkatan AD.

APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Selain hal ini tidak dimungkinkan adanya pertambahan output tanpa investasi baru. Pada kondisi ini harga sangat mudah meningkat jika terjadi peningkatan AD.

- a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa
- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya.
- c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang meliputi misalnya, pembayaran subsidi/bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pension, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana

untuk melaksanakannya Sisi penerimaan menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut diperoleh Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu

- a) Pajak (berbagai macam)
- b) Pinjaman dan bank sentral
- c) Pinjaman dan masyarakat selain negeri
- d) Pinjaman dari luar negeri

Dahulu pajak adalah satu-satunya sumber untuk pembiayaan kegiatan pemerintah Tidak ada pajak tidak ada kegiatan pemerintahan Sekarang, pajak masih merupakan sumber keuangan Negara yang paling penting bagi semua Negara didunia Namun bagi pemerintah dinegara-negara modern ada beberapa cara lain untuk memperoleh dana tambahan Yang pertama pemerintah bisa “meminjam” dana dan bank sentralnya seperti halnya seseorang mengambar kredit dari bank Tetapi ada satu perbedaan penting antara kredit bank sentral kepada pemerintah dengan kredit bank kepada seseorang atau perusehaan Perbedaan ini adalah bahwa bank sentral hanya bisa memberikan kredit dengan jalan menciptakan uang inti (reserve money) Bank sentral tidak bisa menciptakan uang giral seperti bank-bank umum biasa, ‘sebab’ uang giral bank sentral. adalah salah satu unsur yang Inti

Dan penambahan uang inti) berarti (lewat money mulbplier) penambahan jumlah uang yang beredar (AMs). Oleh sebab itu selain ungkapan yang lebih populer, pemberian kredit bank sentral kepada pemerintah adalah identik dengan Percetakan uang baru. (yang lebih tepat sebenarnya adalah penciptaan uang inti baru).

Cara lain untuk memperoleh dana adalah meminjam dari masyarakat selain negeri Caranya adalah dengan mengeluarkan obligasi dan menjualnya dipasar yang selain negeri. Bila masyarakat (termasuk bank-bank) membeli surat berharga Ini, maka pemerintah memperoleh dana yang semula ada ditangan masyarakat (dan sebagai gantinya, masyarakat memegang obligasi pemerintah). Cara ini disebut open market operations operasi

pasar terbuka) Biasanya bank sentral bertindak sebagai 'agen' pemerintah selain melakukan open market operations Cara ini hanya bisa dilakukan di Negara-negara yang sudah memiliki pasar surat berharga (bursa efek dan saham) yang sudah maju Bagi Negara-negara sedang berkembang, sehingga kebijaksanaan open market operations hanya mempunyai kegunaan yang terbatas. Bagi Negara-negara maju. open market operations adalah suatu cara pembelanjaan keuangan Negara yang sangat penting

Cara yang terakhir untuk memperoleh dana adalah dengan meminjam dan luar negeri. Yang dilakukan disini adalah "mengembangkan" obligasi pemerintah dipasar uang luar negeri (Misalnya, pemerintah Indonesia telah menjual obligasinya dipasar uang hampur dan Tokyo) Selain hal ini pemerintah Indonesia menerima dana (dalam bentuk mata uang asing atau 'devisa') dan si pembeli diluar negeri menerima surat tanda berhutang obligasi) pemerintah Indonesia (beserta janji kapan membayar kembali dan dengan bunga beberapa) Cara Ini lebih cocok apabila pemerintah membutuhkan dana selain bentuk devisa (Misalnya, untuk membiayai kebutuhan impornya)

Cara diatas adalah untuk memperoleh 'kredit komersial dan luar negeri, yaitu pinjaman dengan bunga seperti yang berlaku dipasar pada saat itu. Bagi beberapa Negara, kredit komersial mungkin dirasa cukup berat dilihat dari persyaratan pembayaran bunga maupun jangka waktu pengembaliannya Khusus bagi Negara sedang berkembang tersedia kemungkinan untuk memperoleh 'kredit lunak", yaitu pinjaman dengan bunga dibawah bunga yang berlaku dipasar uang dan dengan jangka waktu yang lebih longgar Pemberi kredit ini adalah pemerintah Negara-negara maju yang memang mempunyai program untuk membantu pembangunan Negara-negara berkembang, yaitu Negara-negara 'donor"; dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk membantu Negara-negara berkembang (seperti bank dunia. Asian Development Bank, Dana Moneter Internasional (IMF), dan sebagainya).

2. Kebijakan Fiskal Dan keseimbangan Pendapatan Nasional

Dalam suatu kehidupan perekonomian yang pemerintah belum melakukan campur tangan melalui kebijaksanaan riskalnya, maka sumber pendapatan nasionalnya adalah pengeluaran masyarakat itu untuk barang konsumsi © dan pengeluaran untuk investasi (I). sehingga perumusan pendapatan nasionalnya adalah $Y = C + I$

Akan tetapi dengan akibatnya pemerintah melalui kebijaksanaan fiskalnya yang dengannya pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang menarik pajak dan masyarakat. maka komposisi dan pendapatan nasional masyarakat tersebut menjadi berubah, tidak lagi sebagai $Y = C + I$. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti tersebut di atas ada yang bersifat sebagai government expenditure / purchase (G). dan lagi yang bersifat sebagai government Transfer (Tr),

Bilamkana demikian, maka pendapatan nasional dari suatu masyarakat yang pemerintahnya telah secara aktif menjalankan politik fiskalnya maka pendapatan nasional masyarakat tersebut dilihat dan segi pengeluarannya terdiri dari :

- Pengeluaran Konsumsi ©
 - Pengeluaran investas* (I). dan
 - Pengeluaran-pengeluaran Negara (G + Tr)
- Sehingga dengan demikian maka $Y = C + I + G + Tr$

Dari pendapatan nasional tersebut. maka sebagian akan digunakan untuk konsumsi ©. untuk ditabung (S). dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar pajak (Tx) kepada Negara Dari jurusan itu maka pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai $Y = C + S + Tx$ Apabila kedua perumusan ini dihadapkan satu sama lain, maka diperolehlah persamaan baru, yaitu:

$$C+H+G+Tr = C + S + Tx$$

Atau

$$I + G + Tr = S + Tx$$

Perumusan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional dan suatu masyarakat itu berada selain keseimbangan Meskipun 6, asalkan $I + G + Tr = S + Tx$. maka pendapatan nasional akan tetap berada selain keseimbangan

Timbul persoalan. berapakan besarnya pendapatan nasional yang berada selain keseimbangan itu ? pada prinsipnya ada dua cara untuk menentukan perumusan atau formula yang dapat dipergunakan untuk menemukan besarnya pendapatan nasional selain keseimbangan. yakni;

$$\begin{aligned} 1) \quad Y &= C+I+G \\ C &= a+bY^0 \\ YD &= Y + Tr - Tx \end{aligned}$$

Maka

$$\begin{aligned} Y &= C+I+G \\ &= a + bYD +I+G \\ &= a+b(Y+Tr - Tx) +I+G \\ &= a+bY+bTr - bTx) +I+G \end{aligned}$$

$$Y - bY = a+bTr - bTx +I+G$$

$$(I-b) Y = a+bTr-bTx+I+G$$

$$Y = \frac{a+bTr - bTx +I+G}{I-b}$$

$S+Tx = G+Tr+I$

$$S+Tr= G+Tr+I$$

$$Y^0 - C+Tx = G+Tr+I$$

$$Y^0 - (a+bY_0) + Tx = G+Tr+I$$

$$(Y+Tr-Tx) - \{a+b(Y+Tr-Tx) + Tx = G+Tr+I$$

$$Y+Tr-Tx-a-bY-bTx+Tx=G+Tr+I$$

$$Y-bY=Tr+Tx+a+bTr-bTx-Tx+G+Tr+I$$

$$(1-b)Y=a+bTr+bTx+G+I$$

$$Y = \frac{a+bTr-bTx+G+I}{1-b}$$

Contoh pendapatan nasional, konsumsi dan saving dalam keseimbangan adalah demikian Bilamana diketahui bahwa selain suatu masyarakat :

- 1) Fungsi konsumsi (C) = $0.75Y + \text{Rp. } 40.$ - milyar
- 2) Investasi (I) = $\text{Rp } 40,-$ milyar
- 3) Pajak (Tx) = $\text{Rp } 80.$ - milyar
- 4) Gov Expenditure (G) = $\text{Rp. } 120.$ - milyar
- 5) Gov Transfer (Tr) = $\text{Rp } 80.-$ milyar

Hitunglah besarnya pendapatan nasional, konsumsi dan saving equilibrium. Jawabannya adalah demikian :

$$Y = \frac{1}{1-b}(a-bTx+bTr+G+I)$$

$$= \frac{1}{1-0.75}(40-0.75 \times 10+0.75 \times 80+120+80)$$

$$= 4(40-30+60+200)$$

$$= 4 \times 270 = 1.080$$

$$C = 0.75 Y + 40$$

$$= 0.75(1.080+80-40)+40 = 880$$

$$S = Y - C$$

$$= (1.080+80-40) - 880$$

$$= 240$$

Kontrol :

$$S+Tx = I+G+Tr$$

$$240+40 = 80+120+80$$

$$280 = 280$$

3. Dampak Kebukaan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variable yang dapat meningkatkan permintaan agregat. hal ini telah disinggung sebelumnya Pengeluaran pemerintah dapat digolongkan :

- Government expenditure (G)
- Government transfer (Tr)

Maka pendapatan nasional masyarakat suatu Negara dengan peran pemerintah yang secara aktif menjalankan politic fiscal dapat di rumuskan :

$Y = C + I$ Pendapatan nasional tanpa campur tangan pemerintah

$Y = C + I + G$ Pendapatan nasional dengan campur tangan pemerintah

Dari pendapatan nasional tersebut, maka sebagian akan dipergunakan untuk konsumsi. untuk tabungan, dan sebagian lagi digunakan untuk membayar pajak. Dengan masuknya variable pajak pada pendapatan nasional maka perumusannya adalah :

$$Y = C + S + Tx$$

Untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dengan masuknya perhitungan variable pengeluaran pemerintah dan pajak dapat dirumuskan

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C + S + Tx$$

Dengan berubahnya perumusan pendapatan masyarakat, maka konsumsi masyarakat juga akan ikut berubah. seperti perumusan dibawah ini

$$C = a + MPC (Y + Tr - Tx)$$

$$C = a + MPC Y_d$$

Untuk perumusan pendapatan nasional itu sendiri akan mengalami perubahan sesuai perubahan perumusan konsumsi yang terjadi pada persamaan Pendapatan nasional adalah .

$$\begin{aligned}
 Y &= C+I+G \\
 &= a+MPC(Y+Tr-Tx)+I+G \\
 &= a+MPC Y + MPC Tr - MPC Tx + I+G
 \end{aligned}$$

$$Y - MPC Y = a + MPC Tr + I + G$$

$$Y (1 - MPC) = a + MPC Tr - MPC Tx + I + G$$

$$Y = \frac{a + MPC Tr - MPC Tx + I + G}{(1 - MPC)}$$

Contoh:

Selain sebuah perekonomian diketahui fungsi konsumsi $C = 40 + 0.75 Y_d$. investasi yang terjadi selain perekonomian adalah 60. pajak yang ditarik pemerintah 40. Pengeluaran pemerintah untuk memajukan perekonomian adalah 100. dan untuk subsidi adalah 60. Berapa besarnya pendapatan nasional, konsumsi dan saving pada tidak keseimbangan pendapatan nasional

Jawab:

$$\begin{aligned}
 Y &= \frac{40 + (0.75 \times 60) - (0.75 \times 40) + 100 + 60}{(1 - 0.75)} \\
 &= \frac{40 + 45 - 30 + 100 + 60}{0.25} = \frac{215}{0.25} \\
 &= 860
 \end{aligned}$$

$$C = 40 + 0.75 Y_d$$

$$Y_d = 860 - 40 + 60$$

$$Y_d = 880$$

$$C = 40 + 0.75 (880) = 700$$

$$S = Y_d - C$$

$$S = 880 - 700 = 180$$

Untuk membuktikan apakah perekonomian selain keadaan seimbang atau tidak, dapat diadakan pengecekan :

$$S + Tx = I + G + Tr$$

$$180 + 40 = 60 + 100 + 60$$

$$220 = 220$$

Berdasarkan pengujian tersebut perekonomian berada selain titik kesetimbangan (ulia Nasution, 1997 : 180-182)

(2) Cara yang kedua adalah dengan menggunakan perumusan berikut:

$$S+Tx = G+Tr+I$$

$$S+Tx = G+Tr+I$$

$$YD-C+Tx=G+Tr+I$$

$$YD-a(a+bYD)+Tx=G+Tr+I$$

$$(Y+Tr-Tx) - \{a+b(Y+Tr-Tx)\} + Tx = G+Tr+I$$

$$Y+Tr-Tx - a-bY-bTx+Tx = G+Tr+I$$

$$Y-bY=-Tr+Tx+a+bTr-bTx-Tx+G+Tr+I$$

$$(I-b) Y=a+bTr+bTx+G+I$$

$$Y = \frac{a+bTr-bTx+G+I}{I-b}$$

Contoh pendapatan nasional, konsuma dan saving selain keseimbangan adalah demikian Bilainana diketahui bahwa selain suatu masyarakat :

- 1) Fungsi konsumsi (C) = 0.75Y+Rp40.-milyard
- 2) Investasi (I) = Rp 80,-milyardd
- 3) Pajak (Tx) ~ Rp 40 -milyard
- 4) Gov expenditure (G)= Rp 120, -milyard
- 5) Gov, Transfer (Tr) = Rp 80, -milyard

Hitunglah besarnya pendapatan nasional konsumsi dan saving equilibrium Jawabannya adalah demikian :

$$\begin{aligned} Y &= \frac{I}{I-b} (a-bTx+bTr+G+I) \\ &= I (40-0.75 \times 40 + 0.75 \times 80 + 120 + 80) \\ &= 4(40-30+60+200) \end{aligned}$$

$$= 4 \times 270 = 1.080$$

$$C = 0,75Y + 40$$

$$= 0.75(1.080+80-40)+40=800$$

$$S = Y_D - C$$

$$= (1.080+80-40)-880$$

$$= 240$$

G. DAFTAR PUSTAKA

F. Denburg Thomas. Makro Ekonomi. Jakarta Erlangga. 1994

Nasution Mulia Pengantar Ekonomika Makro. Jakarta : Djambatan 1997.

R. Soediyono. Ekonomi Makro Pengantar Analisa Pendapatan Nasional. Yogyakarta: Liberty, 1985).

Sobri. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta Penerbitan Fakultas Ekonomi. 1982.

Suparmono. Pengantar Ekonomika Makro. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Sukirno Sadono. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Yogyakarta : Bina Grafika. 1981.

Suparmoko M. Pengantar Ekonomika Makro. Yogyakarta : BPFEE. 1980.

Wijaya M Faried. Ekonomika Makro. Yogyakarta : BPFEE 2000.

William A Me Eachern. Penerjemah Srgit Triandon. Ekonomi Makro. Jakarta Salemba Empat. 2000.

TEORI UANG SELAIN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam yang Allah datangkan bersama Muhammad SAW sebagai pengemban risalah adalah suatu sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam. Maka suatu pemerintahan harus menerapkan dan mengembangkannya keseluruh dunia. Islam telah mengalir sebagai urusan yang ada didunia ini sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah yang mewajibkan setiap orang untuk berpegang teguh padanya menerapkannya dan terikat dengan hukum-hukumnya karena seluruhnya adalah syari'al Allah, bukan peraturan yang berasal dan manusia

Islam telah mengharuskan pada semua pengikutnya umatnya untuk menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administrasi terhadap harta yang diperoleh termasuk juga cara penggunaannya Sehingga memungkinkan bagi setiap Individu untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah dalil-dalil syara' telah mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan. Jenis-jenisnya. bagaimana pengelolaannya. pihak-pihak yang berhak menerimanya, don pos-pos pembelanjanya.

Selain makalah ini, kami bermaksud menjelaskan tentang uang dilihat dari sudut pandang Islam. Tentang hukum-hukumnya, tentang fungsi, tujuan; dan kegunaannya selain Islam, tentang inflasi, dan apa pandangan pemikir-pemikir Islam tentang uang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan uang.

Guna memahami makna yang lebih mendalam tentang apa itu uang, tidak ada salahnya bila kita mencoba untuk memahami uraian-uraian yang kami coba tulis dibawah ini

B. KONSEP UANG

Konsep uang selain Ekonomi Islam berbeda dengan konsep Ekonomi konvensional, menurut Ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan capital / modal. Sementara ini kita salah kaprah menempatkan uang. uang adalah barang khalayak (masyarakat luas / public goods). Uang bukan monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang di suatu negara. Sementara itu selain konsep Ekonomi konvensional. konsep uang tidak jelas, Misalnya selain buku Money, Interest dan Capital (1939) karya Colin Rogers, uang diartikan bertukaran (Ifitenoangeadiiity), sebagai uang atau capital Ketidak jelasan selain konsep ini dapat menimbulkan kekacauan

Secara definisi uang adalah benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpanan nilai semua barang (Drs. Muhammad, 2002 : 32) Dengan adanya uang maka dapat dilakukan proses Jual beli hasil produksi. dengan uang hasil penjualannya itu la dapat memberi barang barang keperluannya Jika dengan sengaja orang menumpuk uangnya atau tidak dibelanjakan berarti uang tersebut tidak beredar, hal ini sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli, produk-produk di pasaran. Jadi proses jual beli tidak dapat dipisahkan dengan uang Sebagai perbandingan dengan teori Ekonomi konvensional-kapitalis-Islam membicarakan uang sebagai sarana penukaran dan penyimpanan inilah tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau Jika digunakan untuk membeli jasa Oleh karena itu. uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit.

Orang perlu memahami kebijakan Rosulullah SAW bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan

beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem Ekonomi melalui cara yang tidak diketahui (On Muharmmt, XC2.37).

Perbedaan lainnya. menurut konsep Ekonomi Islam. uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept, sedangkan capital bersifat stockconcept. Selain Ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh Frederick Inishkin selain buku of Ekonomc of inoney. Banking, end Financial institutions (WM). Buku Ini mengungkapkan konsep living Fisher sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Keterangan :

M : Jumlah uang	V : Perputaran uang
P : Tingkat perputaran uang	T : Jumlah barang yang diperdagangkan

Persamaan di atas menunjukkan semakin cepat perputaran uang (v''). semakin besar pendapatan (income), menegaskan juga bahwa uang adalah flow concept. Fisher mengatakan, sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (demand for hoiding money) dengan tingkat suku bunga Konsep ini hampir sama dengan konsep Ekonomi Islam bahwa uang adalah flow concept, bukan stock concept.

Dalam buku Milshkin juga diungkapkan konsep Marshall-Pigou dari Cambrige, yaitu :

$$M = Kpt$$

Keterangan :

M : Jumlah uang	K : I / V
P : Tingkat harga barang	T : Jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara sistematis k dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan. secara filosofi kedua konsep ini berbeda Huruf k pada persamaan Marshal-Pigou menyatakan bahwa demand for

holding money adalah suatu proporsi (K) jumlah pendapatan (PT) Semakin besar k, semakin besar demand for holding money (Ini untuk tingkat pendapatan tertentu (PT)). Ini berarti uang adalah stock concept, yang selain konteks ini, dapat menjadi alat untuk menyimpan kekayaan (store of wealth)

Tetapi demikian kala tidak boleh menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional semata-mata terletak pada fakta bahwa Islam memandang uang sebagai flow concept sedangkan Ekonomi konvensional memandangnya sebagai stock concept. Pandangan seperti itu keliru. Sebab kenyataannya, selain Ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan pendapat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris di suatu kubu dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu lain. Misalnya, Fisher mengaitkan uang adalah flow concept sedangkan kelompok dari Cambridge menyalakan uang adalah stock concept

Menurut konsep Ekonomi Islam capital is private goods, sedangkan money is public good. Uang yang mengalir adalah double goods (flow concept), sedangkan yang mengendap sebagai milik seseorang (stock concept) adalah milik pribadi (private good) (Adrwarman A Karini 2002 /21)

Konsep Islam	Konsep Konvensional
Uang tidak identik dengan modal	Uang sering diidentikan dengan modal
Uang adalah public goods	Uang (modal) adalah private goods
Modal adalah privat goods	Uang (modal) adalah flow concept Bagi Fisher
Uang adalah flow concept	Uang (modal) adalah stock concept bagi Cambridge School
Modal adalah stock concept	-

Sampai tahun 1980-an, konsep public goods belum dikenal dalam teori ekonomi. Konsep ini muncul seiring dengan ber-

kembangnya ekonomi lingkungan, ketika banyak dibicarakan masalah externalitas public goods, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep public goods tercermin dalam sabda Rasulullah. “ Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput” Selain pemanfaatan public goods. Islam mendorong dibentuknya perserikatan dibentuknya masyarakat dan muzara’ah

Pemahaman terhadap konsep private goods dan public goods dapat diperjelas dengan mencontohkan mobil sebagai private goods (capital) dan jalan tol sebagai public goods (money). Jika mobil tersebut memanfaatkan jalan tol. barulah ia dapat menikmati jalan tol itu Tetapi jika mobil tersebut tidak dimanfaatkan jalan tol untuk tidak menikmati sarana tersebut Dengan kata lain, jika dan hanya jika uang diinvestasikan selain proses produksi. kita akan mendapatkan uang lebih banyak

Menurut konsep konvensional, baik mobil di parkir di garasi maupun digunakan di jalan tol tidak ada bedanya. Mereka tetap harus dapat menikmati manfaat jalan tol itu. Artinya. mereka tetap menginginkan lebih banyak uang tanpa mempedulikan apakah uang itu diinvestasikan pada proses produksi atau tidak inilah keanehan Teori bunga (interest rate). (Adrwarman A Karini 2002 /21)

C. FUNGSI DAN TUJUAN UANG

Sebagaimana telah ada pada sebelumnya, uang selain Islam menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai alat tukar dan alat ukur dan nilai. Melalui uang nilai sesuatu barang akan diketahui, dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal serupa dikemukakan oleh muridnya (Ibn Qayyini). uang atau keeping uang dimaksudkan untuk benda itu sendiri tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang dari sisi lain, kaitannya dengan masalah uang Al Ghazai mengatakan. bahwa. uang bagaikan kaca mata. Kaca mata tidak memiliki warna tetapi ia dapat merefleksikan semua warna Uang tidak memiliki harga

tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. (Drs. Muhammad 2002)

Melihat fungsi uang tersebut. menunjukkan bahwa selain Islam adanya uang dapat memberikan fungsi / kepuasan kepada pemakainya. Oleh karena itu. uang bukanlah suatu komoditas, uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan Akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Dan pernyataan banyak pendapat maka ada 4 fungsi uang diantaranya

1. Uang sebagai Slandar Ukuran Harga dan Unit Hitungan

Fungsi uang termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang Karena para ahli ekonomi semestinya mengutamakan fungsi ini selain definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonoini dari seluruh fungsi-fungsi lain. Dan ini tidak dilakukan oleh para ahli Ekonomi (Al Ghazali)

Uang adalah standar ukuran harga. yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa. dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya Pada system barter, sangat sulit mengukur setiap komoditas terhadap komoditas lainnya Demikian juga harga sebuah jasa terhadap Jasa-Jasa lainnya Seperti contoh apabila pemilik unta ingin menukarkan untanya dengan gandum Misalnya, dia tidak mengetahui berapa harga unta sesuai ukuran gandum yang harus diserahkan sebagai pertukaran dengan unta. Ketika Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk membuat uang. uang itu dijadikan sebagai standar ukuran nilai umum untuk menghitung harga komoditi dan jasa Maka bisa diukur nilai setiap komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang (.....)

Uang selain fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga selain ekonomi. seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak. atau ampere untuk mengukur tegangan listrik. atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume (isl). (.....)

Misalnya dikatakan harga anak unta ini 1000 Lira Suriah, dan sewa rumah 1m 2000 Lira Suriah, dan pembayaran perawatan dokter 200 Lira Suriah Demikianlah uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap hitungan selain ekonomi baik oleh produsen atau konsumen. Tanpa itu. tidak mungkin baginya untuk melakukan penghitungan keuntungan atau biaya- biaya.

Secara umum tidak ada perbedaan di antara para ahli ekonomi tentang uang yang harus bersifat tetap secara proporsional pada daya ukar sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai standar harga ekonomi. Dan inilah yang dipertegas oleh Ibnu al- Qayywn selain pernyataannya: Dirham dan dinar adalah harga komoditi Dan harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal ukuran nilai harta Harus bersifat spesifik dan akurat. tidak naik dan tidak turun (nilainya). Bisa dibayangkan kecacauan yang terjadi di pasar-pasar jika panjang meter berubah-ubah tanpa perkiraan dari waktu ke waktu terkadang panjang meter 150 centimeter, kadang 75 centimeter dan kemudian 90 centimeter Tentu banyak urusan manusia dan Interaksi mereka akan mengalami kekacauan

Pada kenyataan itulah yang terjadi selain interaksi antar manusia setelah diberlakukannya uang kertas “Wajib” yang tidak memiliki daya tukar berkekuatan tetap sehingga beresiko mengalami berbagai kondisi inflasi.

2. Uang sebagai Media Pertukaran (Medium of Exchange)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setup individu untuk pertukaran komoditi dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras kalau dalam peiniik apel berangkat ka pasar untuk menemukan orang yang meiniiki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya.

Ketika orang-orang sudah mernbuat uang, peiniik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia dapat membeli apa saja barang dan jasa yang la

kehendeki begitulah fungsi uang sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

Fungsi Ini menjadi sangatlah penting selain ekonomi maju. di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan. tapi batas pada barang tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang dan jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan Dengan demikian. uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam :

- a. Proses penjualan barang atau dengan pembayaran uang
- b. Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang

3. Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai

Ungkapan para ahli ekonomi tentang “ uang sebagai media penyimpanan nilai” adalah orang yang mendapatkan uang, kadang tidak meneluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia Inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau mengalami kerugian yang tak terduga

Menyimpan barang itu sendiri sangatlah susah. karena ada yang tidak bisa bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya tambahan dalam pemeliharaan Sedangkan uang berfungsi untuk menyimpan daya tukar dengan mudah demikianlah proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian. Tapi menyimpan uang itu. yakni cukup dengan proses nilai barang (uang), jelas fungsi uang sebagai media penyimpanan nilai

Ada dua poin yang mesti diutarakan : pertama bahwa perkataan para ahli ekonomi. uang adalah media penyimpanan nilai mendapat bantahan dari Prof. Mahmud al-Su'ud. Menurutnya: 'mereka katakan bahwa orang yang memiliki uang bisa me-

nyimpan nilai mereka maksudkan bahwa orang yang memiliki uang bisa menyimpan (nilai) materi seperti mereka menyimpan uang. Ini adalah ilusi yang bathil. (Muhamamd Abu)

Dalam mengutarakan pendapat ini, beliau mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- a. Uang tidak bisa dianggap seperti komoditas layaknya yang dibutuhkan bendanya. Yakni. Tidak mengandung nilai pada bendanya. Dan itu lebih jelas tanpa keraguan lagi bila kita melihat uang kertas.
- b. Asas utama kehidupan Ekonomi adalah produksi. Produksi ini saja yang mengandung nilai. Sedangkan uang sama sekali tidak bisa menjadi tempat nilai karena nilai kebendaanya tidak menyamai apapun juga. disamping fungsinya sebagai alat tukar yang beredar untuk proses pertukaran kebutuhan.
- c. Kita ingin menjadikan uang bersifat permanent hingga kita temukan alasan untuk apa yang dinamakan bunga

4. Uang Sebagai Standart Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standart untuk pembayaran tunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media pembayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu nia jual dengan pembayaran tunda.

Dr. Ismail Hasyim dalam mempelajari fungsi ini menerangkan : Bahwa transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi diserahkan pada waktu yang akan datang. Karena ini dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, dan uang bisa melakukan fungsi ini “ dalam buku pengantar ekonomi

(Muqqaddimah al-iqtishad) : “Fungsi ini khusus dalam mengukur pembayaran yang menjadi hak pada masa mendatang seperti utang-utang misalnya.”

Menurut Ahmad Hasan, pendapat sebagian ahli Ekonomi bahwa uang adalah ukuran dan standar untuk pembayaran-pembayaran tunda (loan as exp) tidak bisa diterima. Sebab, jika yang mereka maksud adalah menunda pembayaran uang yaitu menunda penyerahan uang maka yang ditunda adalah uang.

Jika yang mereka maksud menunda penyerahan barang. Jualan sedang pembayaran uang sudah tunai. juga tidak bisa diterima. Tidak tepat ungkapan mereka bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengulangan (hasil) terhadap fungsi uang yang pertama: standar ukuran nilai. Uang adalah ukuran dan nilai standar harga komoditi dan jasa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

D. NILAI WAKTU UANG DALAM ISLAM

Dalam Islam (tidak dikenal nilai-waktu uang (time value of money), yang dikenal adalah nilai-ekonomi waktu (economic value of time). Teori time value of money merupakan kekeliruan karena diambil dari ilmu teori pertumbuhan penduduk (populasi). bukan dari ilmu keuangan. Konsep yang dikenal oleh Islam adalah nilai-Ekonomi waktu (economic value of time). Mislanya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. return on capital diperhitungkan. Return on capital tidak sama dengan return on money karena return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sector ini sedangkan return on money berkaitan dengan tingkat suku bunga (interest rate) Penentuan nasabah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan projected return. Jika ternyata actual return bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya. yang digunakan adalah angka actual; bukan angka proyeksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal nilai waktu uang. Waktu hanya memiliki nilai-Ekonomi jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return (Adi Warman.....)

Konsep time value of money pada dasarnya, merupakan intervensi konsep biologi selain bidang Ekonomi. Maksudnya konsep linie value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi di-formulasikan dengan rumus sebagai berikut. $P_t = P_o (1 + g)^{1..n}$ Kemudian rumus tersebut diadopsi sebagai teori bunga majemuk menjadi $FV = PV (1 + i)^n$

Dalam hal ini kita sebagai orang muslim harus dapat memahami bahwa uang bukanlah sesuatu yang hidup yang dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Teori tersebut bukanlah Teori Ekonomi. selain teori Ekonomi ada sesuatu yang mengecil dan menjadi besar yang disebabkan oleh upaya-upaya Di selain Ilmu Ekonomi dapat muncul risk-return profile Dengan demikian, berkurang dan bertambahnya jumlah uang bagi seseorang jika upaya segala sesuatu adalah yang normal.

Di selain system ekonomi Islam, konsep time value of money tentunya tidak akan terjadi Untuk menganalisis hal ini, ada ajaran kuat dalam Islam, yaitu terdapat selain surah Al Ashr: 1-3 Dari surah Al-Ashr ini menunjukkan bahwa bagi semua orang adalah sama kuantitasnya. yaitu 24 jam selain sehari. 7 hari selain seminggu Namun nilai dari waktu tersebut adalah tergantung pada seseorang tersebut memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu. siapa pun pelakunya tanpa memandang suku. agama dan ras, selama sunatullah. ia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Selain Islam yang dimaksudkan bukan hanya keuntungan di dunia, namun yang dicari keuntungan di dunia dan akhirat Oleh karena itu. pemanfaatan waktu bukan harus efektif dan efisien tetapi harus Juga didasari dengan keimanan.

Implikasi selain dunia bisnis. ajaran Al-Qur'an tersebut mengindikasikan, bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung

dan rugi Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Bisnis sendiri pada dasarnya adalah hubungan antara return dan risk. bisnis bukanlah aktifitas yang mendatangkan keuntungan tanpa ada resiko Sebagaimana dijelaskan pada konsep time value of money bahwa sebagai pengganti atas situasi ketidakpastian maka dimunculkan konsep discount rate

Dalam Ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga mu'jall (bayar tangguh) dapat dibenarkan. (Drs.....)

Hal tersebut dibenarkan karena :

1. Jual beli dan sewa -menyewa adalah sector riil yang membuat economic value added (nilai tambah Ekonomis)
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa). sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Dengan kata lain ada beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan analisis yaitu

- 1) Harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar daripada harga yang dibayar sekarang
- 2) Not due to inflation nor interest foregone
- 3) Adanya panahan hak sipemilik barang. Seperti asumsi rujukan Zaid Ibn Ail Zainal Abidin Ibn Husein Ibn Abi Thalib

Demikianpula penggunaan discount rate selain menentukan nisbah bagi hasil, juga dapat digunakan. Nisbah akan dikalikan dengan pendapatan aktual. bukan dengan pendapatan yang diharapkan Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa- menyewa. Sebab selain transaksi bagi hasil. hubungan antara kedua pihak. tidak terjadi antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil. hubungan yang terjadi adalah hubungan pemodal dengan yang memproduksi modal tersebut Hak bagi

mereka berdua akan timbul ketika usaha memproduksi modal tersebut telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Hak mereka adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut. sesuai kesepakatan awal bahwa bagi hasil tersebut akan dilakukan atas pendapatan atau keuntungan.

Dengan demikian, uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktu yang memiliki nilai Ekonomi. Dengan Catatan bahwa waktu tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan istilah atau batasan-batasan Ekonomi.

Sehubungan dengan tertahannya hak pemilik barang dalam transaksi Ekonomi, yang berkaitan dengan nilai waktu dapat diilustrasikan sebagai berikut: Apabila suatu barang dijual dengan tunai dengan untung sebesar Rp 500, maka penjual dapat membeli barang lain dan membeli barang belinya tersebut. Dengan demikian, keuntungan penjual tersebut (dimungkinkan) dapat berlipat. Namun apabila barang dijual dengan tangguh bayar, maka hak penjual tertahan dan tidak dapat membeli barang lain. Sebagai kompensasi atas tertahannya hak penjual dan pembeli, maka Islam memberikan harga lebih tinggi dan harga tunai.

Dengan transaksi *mudarabah / musyarakah* dan transaksi jual beli memastikan keterikatan antara sector moneter dan sector riil. Oleh karena itu pula, salah satu rukun jual beli adalah ada barang dan ada uang (ma'kud 'alaih). Dengan demikian, future trending dan margin trading yang tidak diikuti dengan goods delivery adalah tidak sah. Berkenaan dengan ini, maka pada dasarnya konsep Islam menjaga keseimbangan antara sector riil dengan sector moneter.

Di dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya money demand for speculation. Sebab spekulasi tidak diperbolehkan dan kebaikan dan system konvensional, yang memberikan bunga pada harta. Selain Islam, harta adalah sesuatu yang dikenal zakat jika disimpan telah mencapai halnya. Oleh kerennya, motif money for transaction serta money demand for precautionary dikenal dalam ekonomi Islam.

Dalam sirah pernah terjadi. bahwa selain keadaan banyaknya terjadi perang di jaman fiasutolah money demand for precautionary relative tinggi dikalangan keluarga sahabat yang ditinggal perang Selain sejarah juga tercatat bahwa ketika ditandatangani perjanjian perdamaian Hudaibiyah, maka money demand for precautionary turun drastis dan selanjutnya mempercepat velocity of money Begitu pula ketika terjadi Fathul Makkah money demand for precautionary turun lebih jauh lagi dan menambah velocity of more)

E. NILAI TUKAR UANG DALAM ISLAM

Dengan meneliti transaksi jual beli selain bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar intenasional, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan Jual beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal :

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa
Misalnya pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing
Misalnya pertukaran dolar dengan pound Mesir
3. Pembelian barang dengan mata uang tertentu. serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing
Misalnya membeli posawal dengan dolar, serla pertukaran dobr dengan dinar Irak selain satu kesepakatan
4. Penjualan barang dengan mata uang, dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia.
5. Penjualan promis dengan mata uang tertentu
6. Penjualan sabah dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu

Jual bei promis dan saham. menurut syara' mutlak diharamkan Sebab, promis-promis tersebut mempunyai fungsi yang telah ditentukan, sehingga bisa dimasuki praktik riba. Se-

dangkan saham. yang sebenarnya merupakan surat andil selain perserorangan itu statusnya batil syara' serta tidak diperbolehkan Sedangkan pembelian barang dengan mata uang. pertukaran mata uang dengan mata uang asing. penjualan mata uang dengan mata uang. maka masing-masing kegiatan diatas merupakan dua aktivitas yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Sehingga untuk masing-masing aktivitas tersebut bila diberlakukan hukum-hukum Jual beli dan pertukaran. serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi.

Shart adalah penukaran mata uang satu dengan mata uang lain. Adakalanya pertukaran mata uang tersebut merupakan pertukaran mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Adakalanya pula pertukaran tersebut antar mata uang yang berbeda Jenisnya. seperti pertukaran emas dengan perak, dan perak dengan emas Adapun syarat pentukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis adalah sama persis-berat dan jenisnya-dan sama sekali tidak boleh melebihikan satu dan yang lainnya Sebab. tindakan semacam itu merupakan riba, dan hukumnya haram, seperti pertukaran emas dengan emas yand lainnya. termasuk pertukaran antara uang kertas yang nilainya bisa ditukar menjadt emas (Convertible paper money) dengan emas. Oleh karena itu. selain keadaan semacam ini tidak berlaku kurs pertukaran mata uang

Sedangkan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya seperti pertukaran emas dengan perak. pertukaran poundsterling dengan dolar, rubel dengan franc.

hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahkan ditempat. Dimana perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. Jadi. kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya

Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah :

“juallah emas dengan perak sesuka kalian dengan syarat hanus kontan” (HR Imam At- Tarmidzi darn Ubadan bin Shamit)

Ubadan bin shamit mengatakan

“Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjula emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan yang lain, maka siapa saja yang menambahkan atau mencari tambahan, maka dia telah melakukan riba”
(HR Imam Muslim)

Imam Muslim meriwayatkan hadist dari Abu Bakar yang mengatakan :

“kami telah perintahkan (Yaitu oleh Rasulullah SAW) untuk membeli perak dengan emas, sesuka kami dan membeli emas dengan perak seska kami” Abu Bakar berkata *“ Beliau ditanya seorang laki-laki”* lalu Beliau menjawab *“ Harus tunai (kontan)”* kemudian Abu Bakar berkata : *“ Demikianlah yang aku dengarkan”*

Dari malik bin Aus Al-Hadistsan yang mengatakan *“ Aku pernah mencari-cari sambil bertanya “ siapa yang mau menukar dirham – dirham ini ? kemudian Thahah bin Ubaidilah dimana dia berada di dekat Umar bin Khathab berkata “ Tunjukkan emasmu kepada kami lalu bawalah kepada kami, apabila cocok kami akan memberimu uang, lalu umar berkata Tidak. Demi Allah, engkau harus memberikan uangnya atau engkau kembalikan emasnya kepadanya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda: uang (ditukar) dengan emas adalah riba*

Dengan demikian tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan Apabila pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat, maka pertukaran tersebut statusnya rusak (tasid). Nabi saw bersabda:

“Emas (ditukar) dengan uang bisa riba kecuali sama-sama sepaket.”

Nabi SAW melarang menjual emas dengan uang. dengan cara kredit. serta melarang barang yang tidak ada. dijual dengan barang yang ada Oleh karena itu masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majlis. Apabila masing-masing berpisah. sebelum masing-masing menyerahkan barang.

maka pertukaran tersebut batal karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu telah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah maka barang yang belum diserahkan berikutan ganti rugi yang diterimanya tadi statusnya batal, sementara barang yang telah diserahkan berikutan ganti rugi yang diterima statusnya sah. Sebab adanya perbedaan transaksi tersebut diperbolehkan

Adapun faktor yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dan kedua penukar kepada mata uang yang menjadi penukar lain. Sedangkan pertukaran antara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam satu negara, seperti antara emas dengan perak, perak dengan emas, sangat jelas. Dimana biasanya terjadi antara emas dengan perak. Sebab biasanya negara tersebut mempraktikkan sistem uang emas dengan uang perak, dan diantara kedua mata uang tersebut terdapat kurs pertukaran mata uang. Kurs tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar. Sedangkan perubahan kurs pertukaran mata uang antara mata uang yang sama, yang diambil oleh negara dan dua jenis yang berbeda, itu tidak berbahaya. Sebab, statusnya sama seperti pertukaran harga barang. Adapun pertukaran mata uang antara dua mata uang yang berbeda jenisnya yang dimiliki oleh dua negara, walau lebih itulah yang biasanya menimbulkan masalah oleh karena itu, pertukaran tersebut harus dibahas sebagai satu realitas kemudian bagaimana hukumnya serta kurs pertukaran itu sendiri, juga harus dijelaskan.

Sedangkan pertukaran tersebut sebagai suatu realitas adalah bahwa ada beberapa negara telah menganut sistem uang yang berbeda termasuk adanya perbedaan penetapan negara-negara yang menganut sistem uang emas dengan negara-negara yang menganut sistem fiat money. Ketika beberapa negara tadi menganut sistem uang emas, maka kurs pertukaran mata uang di antara negara tersebut, atau perhitungan pertukaran antar mata uang tersebut kursnya harus selalu relative stabil.

Kurs pertukaran mata uang antara dua negara merupakan perkiraan antara berat emas murni pada mata uang negara

pertama dengan berat emas murni pada mata uang negara kedua. Padahal, kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem uang emas tersebut tidak mungkin mengalami perubahan. kecuali melampaui dua batasan tertentu yang sama-sama bergantung pada pengeluaran, dimana emas tersebut di-transfer untuk keduanya Kedua batasan tersebut dinamakan dua batasan emas. Dan dilihat dari segi pengeluaran pengeluaran tersebut umumnya kecil, sehingga kita bisa – dengan adanya lompatan tadi – mengalkan bahwa kurs pertukaran mata uang antara negara yang menganut sistem uang emas adalah kurs yang selalu relative stabil.

Bila ada beberapa negara telah menganut sistem fiat money, maka pada saat itu munculah masalah penentuan kurs pertukaran mata uang tersebut Dan pada saat menukarkan suatu mata uang menjadi emas dengan kurs tertentu tadi dilarang. maka masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat ini adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antarnegara yang menganut sistem fiat money tersebut ?

Solusinya adalah, bahwa sejumlah mata uang kertas yang berbeda tersebut merupakan barang-barang yang berbeda, yang diputar di bursa uang dunia Dimana mereka membelinya bukan untuk bendanya melainkan untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang lain di tempat-tempat tertentu dimana asal barang tersebut. Atas dasar inilah, maka kurs pertukaran mata uang adalah perkiraan pertukaran antara dua mata uang

F. INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Salah satu permasalahan Ekonomi sekarang. yang ilmu Ekonomi sendiri tidak mampu menginterpretasikan secara jelas dan tepat serta memberikan sanksi yang tepat untuk mencegah terjadinya dampak negatif. adalah masalah inflasi mata uang. Bahkan ketidak mampuan Ini telah diakui oleh pakar-pakar Ekonomi barat sendiri.

Prof. Moris Elih mengatakan; 'problem terbesar yang dihadapi oleh perekonomian pasar barat yang tidak terselesaikan. sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga asli mata uang. Hal yang menjadi penghalang terhadap kemampuan Ekonomi. Keadilan pembagian *income* dan jaminan penggunaan terhadap sumber-sumber, dan ketenangan kehidupan sosial Fakta membuktikan. bahwa ketidakadilan dan kecurangan yang dirasakan masyarakat barat. datangnya dari perubahan dan perbedaan bentuk *income* yang timbul dari perubahan nilai harga asli mata uang ' (Dr. Ahmad Hasan, 2006:273)

1. Definisi Inflasi

Ada beberapa konsep Ekonomi dalam menentukan makna inflasi. Sebagian pakar Ekonomi menjelaskan makna Ekonomi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi Itu sendiri Namun. adapun yang menginterpretasikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh Inflasi

Dengan demikian, banyaknya Teori-Teori yang menginterpretasikan makna Inflasi, membuat definisi inflasi pun ikut bervariasi. sehingga sulit memahaminya apabila hanya melihat satu sisi saja Dengan demikian penentuan makna Inflasi pun. secara tepat dan teliti menjadi sulit Berikut ini beberapa definisi inflasi

1. Definisi berdasarkan teori kuantitas

Inflasi mata uang berdasarkan Teori ini adalah setiap kelebihan pada kuantitas mata uang yang berlaku. hingga menyebabkan kelebihan pada level umum terhadap nilai harga. Konsep ini dianut oleh sebagian besar pakar Ekonomi abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 namun, Definisi ini mendapat kritikan disebabkan ketidakjelasan dan ketidaktelitian. Definisi ini tidak menyebutkan kapan kelebihan mata uang menjadi inflasi. Sebab tidak setiap kelebihan mata uang menyebabkan naiknya harga

2. Definisi berdasarkan teori pemasukan dan pengeluaran

Teori ini mendefinisikan inflasi berdasarkan sebab-sebab dari timbulnya inflasi itu sendiri. Oleh sebab itu, inflasi adalah kelebihan pada ratio pengeluaran dan pemasukan (Income) karenanya kelebihan pada pasokan dan pengeluaran mata uang dapat menyebabkan naiknya harga, sehingga terjadilah inflasi. Adakata tidak berubah di saat kuantitas komoditi yang ada dalam keadaan stabil.

Definisi Inipun tidak terlepas dari kritikan bahwa ia mengharuskan kenaikan umum pada harga. yang disebabkan dari kenaikan *income* mata uang Akan tetapi Kenaikan kenaikan harga terkadang hanya pada sebagian komoditi saja lalu bagaimana mengintepretasikan kenaikan tersebut?

3. Definisi berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh inflasi

Inflasi adalah kelebihan pada level harga umum. Definisi inilah yang dipegang oleh sebagian besar pakar Ekonomi, sehingga menjadi definisi umum dari fenomena inflasi. Meskipun demikian. ada beberapa kritikan terhadap definisi ini. antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagian penganut dfinisi ini tidak menjelaskan minimal waktu untuk mengetahui kenaikan harga sehingga kenaikan tersebut dapat dinamakan dengan inflasi Apakah yang dimaksudkan dengan kenaikan yang terus-menerus? Atau hanya kenaikan sementara?
- b. Mereka juga tidak menentukan prosentase kenaikan yang dapat dijadikan standr sebagai inflasi
- c. Inflasi odalah fenomena moneter. Oleh sebab itu. penanggulangnya menurut adanya politik Moneter Dengan demikian. tidak benar mengatakan bahwa inflasi adalah kenaikan pada harga
- d. Definisi ini tidak menyebutkan sebab terjadinya kenaikan harga
- e. Definisi ini keliru. sebab fenomena kenaikan umum harga adalah satah satu hasil dan dampak yang ditimbulkan

oleh inflasi. Oleh sebab itu inflasi itu sendiri sangat berbeda dengan kenaikan harga. yang mana apabila terjadi inflasi terjadi pula kenaikan harga. Jadi. tidak mungkin menjadi hasil yang ditimbulkan oleh inflasi sebagai inflasi itu sendiri.

4. Sebagian pakar Ekonomi berpendapat bahwa kalimat inflasi mengandung banyak makna dan konsep

- a. Inflasi pada harga Ini apabila terjadi kenaikan harga diluar kebiasaan
- b. Inflasi pada *income* Ini terjadi apabila munculnya fenomena kenaikan pada pasokan *income* uang pada per-individuan, diluar standar normal
- c. Inflasi pada mata uang Ini termasuk setiap terjadinya kelebihan yang besar dan kesinambungan pada uang yang beredar di pasar
- d. Inflasi pada biaya Ini termasuk kenaikan yang terjadi pada unsur-unsur produk yang berlaku di pasar-pasar komoditi

tampaknya pada konsep inflasi ini terkumpul kritikan-kritikan yang diarahkan pada konsep-konsep lainnya, dan ini berarti mengelurkan Inflasi dari hakekatnya Definisi inflasi sebagaimana yang penulis pahami adalah para ekonomi telah sepakat bahwa di bawah naungan sistem standar emas keistimewaan yang mendasar terhadap standat Ini adalah kestabilan nilai harga yang sangat relatif Mereka Juga sepakat bahwa di antara dampak yang ditimbulkan oleh Inflasi adalah kenaikan umum pada level harga. Inilah titik persamaan dari beberapa definisi inflasi yang lelah lalu,

Oleh sebab itu. menghubungkan antara dua titik ini adalah suatu keniscayaan untuk menentukan makna yang tepat untuk Inflasi. Maka menurut sistem standar emas harga menjadi sangat relatif Ini disebabkan karena sistem emas adalah sistem yang lahir secara spontan, sebagaimana yang telah dikalakan oleh para pakar ekonom

2. Bentuk - bentuk inflasi (Dr. Ahmad Hasan, 2006)

Perbedaan yang terjadi antara para pakar ekonomi tentang konsep Inflasi. menjadikan mereka berbeda selain menentukan bentuk-bentuk inflasi. Ada yang membaginya menjadi : inflasi komoditi, inflasi income, inflasi biaya, inflasi modal, inflasi laba keuntungan. dan inflasi pengeluaran. Akan tetapi disana terdapat dua macam bentuk inflasi yang disepakati oleh para ekonom, yaitu

1. Inflasi yang bertebihan (hiper inflation)

Inflasi yang berlebihan adalah inflasi yang sangat berbahaya, sebab dia dapat menyebabkan kenaikan harga dengan ratio yang sangat tinggi, serta dapat menurunkan nilai harga uang mencapai peringkat rendah Inflasi dengan bentuk ini muncul dari akibat :

- a. munculnya kehancuran sosial dan runtuhnya aktivitas perekonomian
- b. ketidak mampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan kepercayaan rakyat/ masyarakat
- c. terjadinya perang yang menghancurkan

contoh dari bentuk inflasi Ini adalah inflasi yang diambil oleh mata uang Jerman setelah PD pertama, dan yang dialami oleh mata uang irak setelah perekonomian negara tersebut diblokir.

2. Inflasi yang bergerak dengan perlahan

Bentuk Inflasi ini juga samat disebut dengan inflasi menengah atau inflasi yang tidak aktif. adalah inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga dengan pertahan, tapi berkelanjutan

Sedangkan menurut Al - Maqrizi, Inflasi dibagi menjadi (Anwar.....)

1. Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (natural-inflation)
Inflasi ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan.
2. Inflasi akibat kesalahan manusia.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Inflasi

Seperti biasa para pakar ekonomi berbeda pendapat dalam menentukan sebab-sebab terjadinya inflasi. Perbedaan tersebut didasari perbedaan konsep tentang inflasi. Al-Ustad Husain Ghanim-Penasehat ekonomi untuk PBB – mengatakan : (Dr Ahmad.....)

“ Fenomena inflasi adalah fenomena perekonomian yang sangat berbahaya dan misteri. Oleh sebab itu, inflasi menurut pakar ekonomi sama halnya dengan penyakit kanker menurut para medis. Yang sebenarnya tidak bisa diketahui secara pasti. Maka dari itu sampai sekarang pakar-pakar ekonomi belum berhenti menentukan solusi yang dapat memberantas secara tuntas penyakit yang menyerang perekonomian ini. “

Ada beberapa penyebab timbulnya inflasi yang disebutkan oleh para pakar Ekonomi, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ekspansi yang diberikan oleh bank-bank dalam memberikan Dimad (sandaran) Kemudahan yang diberikan oleh bank-bank untuk membentarkan Dimad terhadap organisasi-organisasi. produsen-produsen dan yang lainnya mengakibatkan penambahan pasar dengan jumlah uang yang sangat besar.
2. Pendanaan yang melebihi standar anggaran. Kelemahan anggaran adalah kelebihan biaya belanja negara dari pemasukan. sehingga memaksa pemerintah untuk meminjam dengan memotong aset-aset kekayaan negara sebagai backing terhadap mata uang kertas

3. Keuangan belanja militer Anggaran belanja militer, baik dana persiapan perang maupun ditengah terjadinya perang. atau anggaran belanja pasca perang adalah satah satu sebab yang terpenting munculnya fenomena inflasi. Sebab, dana belanjamiliter anggaran per tahunnya mencapai milyaran dolar Amcrika Dan ini sama sekali tidak berfungsi meningkatkan produksi negara. bahkan sebaiknya, hanya meruntuhkan produktivitasnya.

Charles Lepanson mengatakan "perang Vietnam" adalah salah satu sebab terjadinya inflasi di Amerika Serikat Sebab biaya yang dikeluarkan setara langsung mencapai 14 milyar dolar Amerika sampai pada tahun 1971"

Sebab-sebab inflasi menurut al-maqrizi, diantaranya (Adiwarman.....)

- a. Korupsi dan administrasi yang buruk
Kita lihat kaitkanya sebab inflasi ini dengan rekapitulasi perbankan yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp 257 tntiun. Jumlah pastinya memang belum ada tetapi yang jelas pemerintah akan membayar bunga obligasinya dan APBN Bila saja setelah rekapitulasi Itu perbankan menjadi sehat. Kredil macet turun drastis. bolehlah dikatakan jumlah sekian itu merupakan harga yang wajar Yang dikhawatirkan adalah perbankan tetap saja tidak sehat dan kredil macet tetap saja menghantui. Bukan apa-ap. Selama budaya kata boleh dan bentuk-bentuk KKN lainnya belum hilang ditambah lagi dengan administrasi bank yang buruk. kredit macet hanya menunggu waktu saja Makin besar kredit macet. makin mahal biaya dana makin banyak pula rupiah yang beredar Ini berarti inflasi
- b. Pajak berlebihan yang memberatkan petani
- c. Jumlah mata uang fulus (tembaga) yang berlebihan atau yang oleh mitron Friedman disebut inflation is just monetary phenomenon. Jelaslah bahwa teori Inflasi Friedman—bapak kaum monetaris—hanya merupakan bagian kecil dan

teori inflasi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi memberikan perhatian khusus ketika membicarakan sebab yang ketiga. Selain pengamatannya, ternyata kenaikan harga-harga (inflasi) yang terjadi adalah selain bentuk jumlah fulusnya. Misalnya, untuk sepatu yang sama dipertukarkan jumlah fulus yang lebih banyak. Akan tetapi jarang sekali harga naik jika ditukar dengan dinar (emas). Untuk itulah Al-Maqrizi menasehati agar Jumlah fulus dibatasi hanya pada tingkat inilah yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan kecil.

Mari kita lihat sebab ketiga ini dan kaitannya dengan rekapitulasi perbankan. Apa yang dilakukan pemerintah dengan program rekapilaksasi adalah menambah modal bank di satu sisi dan mencatatnya sebagai Investasi bank selain bentuk obligasi di sisi lain. Dengan kata lain, bantuan modal pemerintah harus digunakan oleh bank untuk membeli obligasi. Tidak ada kucuran pemerintah, Dana segar harus berasal dari pemegang saham bank. Selain kerangka pikir Al-Maqrizi hal ini tentu lebih baik dibanding bila pemerintah mengucurkan dana segar karena dampak inflasi tidak terjadi sekaligus, Akan tetapi akan lebih baik lagi bila obligasi tersebut tidak menggunakan instrumen bunga. tetapi bagi hasil maka penambahan rupiah akan mengikuti pertumbuhan sektor rill, tidak sekedar bertambah begitu saja.

Sebab utama inflasi adalah kelebihan kuantitas mata uang kertas dari backing perak dan emas yang mengimbanginya. Sebab selain mata uang kertas ini mempunyai hubungan kuat dengan emas dan perak. maka bank-bank sentral akan memperketat pengeluaran mata uang kertas sesuai dengan prosentase yang seimbang. Oleh sebab itu pemerintah yang tidak memperketat pengeluaran mata uang kertas. akan sangat berpotensi terjadinya inflasi. Apapun yang dikatakan orang tentang peranan politik moneter untuk reformasi, peran ini tidak lebih dari kerangka sebuah teori (Dr. Anwar Hasan 2006-2011)

4. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh inflasi

Iniam Syafi'i r.a adalah orang pertama yang berbicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh inflasi. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Nawawi dan perkataan Imam Syafi'i: 'Imam Syafi'i beserta ashab (murid-murid)nya melarang pemimpin untuk mencetak dirham yang tidak murni berdasarkan hadis shahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa yang Ghasena (menipu) kami (kaum muslimin), maka tidaklah termasuk golongan kami'' (HR) disamping itu Percetakan dirham yang tidak murni Juga akan merusak nilai mata uang, kerugian terhadap hak orang lain, menyebabkan naiknya harga, sulitnya mendapatkan pemasukan dan kerusakan-kerusakan lainnya

Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Inflasi secara umum. (DR. Ahmad Hasan 2001)

1. Dampak inflasi terhadap pengembalian pendistribusian *income* yang sesungguhnya

Yang dimaksud *income* sesungguhnya dalam sejumlah kuantitas komoditi dan layanan yang dapat didapatkan oleh setiap individu dengan *income* moneter yang mereka memiliki.

Dan pemilik *income* ini dapat dikelompokkan menjadi dua.

a. Orang yang memiliki *income* yang tetap

Kelompok ini adalah orang yang paling merasa dirugikan dengan sebab turunnya nilai beli mata uang dan naiknya harga barang Kelompok ini tergotong dan para pensiunan penerrimaan bantuan social, bunga dokumen uang, serta orang-orang yang memiliki *income* dari penyewaan berjangka panjang. Sebab, kemungkinan perubahan gaji pensiunan dan bantuan sosial sangat kecil, sedangkan bunga telah ditentukan lebih dulu. Dan mengingat bahwa *income* ini sifatnya tetap – dalam waktu yang lama – maka kelompok ini sangat merasakan pengaruh dari anjloknya nilai beli mata uang dan naiknya harga barang.

Income Ini tidak akan berubah, mengiringi perubahan level harga barang, Maka dengan kondisi demikian *income* yang mereka dapatkan nilainya mengecil dibandingkan naiknya harga komoditi dan layanan.

Misalnya, seseorang yang telah pensiun mendapatkan gaji pensiunan yang besarnya Ls.2.000,-/bulan Sementara level harga telah naik sebesar 50%. Maka. pada saat itu pensiunan tadi tidak mampu membeli— dengan gajinya—kecuali hanya separuh komoditi dan layanan yang dulunya dia dapatkan secara total. Dengan kata lain gaji sesungguhnya yang dia tenma = Ls. 1.000 saja /bulan.

b. Pemilik *income* dan gaji yang tetap

Kelompok ini berbeda dari golongan yang pertama, sebab *income* dan gaji mereka mempunyai kemampuan— meskipun terbatas— untuk berubah mengikuti naiknya level harga barang. Namun demikian perubahan *income* dan gaji tersebut tidak seperti presentasekan harga barang Ini disebabkan lemahnya serikat kerja di hadapan para bisnismen.

Penerimaan gaji (pegawai pemerintah) biasanya mendapatkan ekstra gaji ketika level harga barang naik. Akan tetapi ekstra tersebut tidak diberikan kepada mereka, kecuali setelah masa bakti yang lama, dengan persentase yang lebih kecil dari presentase kenaikan harga barang Dengan demikian, kelompok Ini Juga dirugikan dengan anjloknya nilai beli mata uang dan naiknya level harga barang.

Misalnya, seorang guru yang menerima gaji sebesar Ls. 4.000.-bulan. maka apabila terjadi kenaikan pada level barang sebesar 50% Maka sesungguhnya gaji yang dia terima adalah sebesar Ls 2.000-saja Sebab kuantitas mata uang yang diterima tidak bisa dijadikan standar. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah harga beli uang

tersebut ketika dinilai dengan komoditi dan layanan yang berlaku.

2. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi terhadap tuntutan keuangan yang berjangka Tuntutan keuangan yang berjangka terdiri dari utang, penjualan dengan pembayaran yang berjangka maskawin (mahar) yang berjangka, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori ulang. Maka apabila terjadi kenaikan harga barang, dan anjloknya nilai mata uang, orang yang berulang merasa sangat dirugikan Sebabnya orang yang memberikan pinjaman merasa diuntungkan.
3. Dampak yang dilinibufcan oleh Inflasi erhadap akhlak Terjadinya kenaikan harga barang dan anjloknya nilai tukar mata uang – sementara gaji pegawai tetap pada level yang ada – biasanya mereka terpaksa untuk memenuhi kebutuhan material dengan cara mengeksploitasi tugas mereka, sehingga terjadilah Islilah sogok menyogok.

Fenomena seperti ini sangat jelas terlihat pada masa sekarang, bahkan telah menjadi rahasia umum. Kondisi seperti ini tidak akan pulih kecuali setelah perbaikan terhadap kondisi kelompok masyarakat ini. Misalnya dengan cara menaikkan gaji mereka sesuai dengan kenaikan harga barang hal ini untuk mewujudkan kepada mereka standar yang mencukupi kebutuhan.

5. Langkah Untuk Mengatasi Inflasi

1. Cara mengalasi inflasi menurut teori perekonomian telah sampai pada fase al-tawazhul el-kamil (kesempurnaan) Misalnya kapasitas produksi dan sumber perekonomian tidak mengalami kemacetan, maka setiap individu berorientasi untuk menabung, sehingga tuntutan terhadap uang semakin meningkat. Selain hal ini munculah ketimpangan antara menabung dan menginvestasikan lalu munculah problem pengangguran. Solusi yang ditawarkan oleh Kanz – pada situasi seperi ini – adalah menurunkan

suku bunga, pajak, dan menambah modal investasi. Dengan demikian, perekonomian dapat kembali pulih kepada fase al-Tawazuh al-kamil. Setelah nilai suku bunga dan pajak pun dinaikan kembali.

Kemudian muncul lagi yang dinamakan dengan teori Philip yang membantu menambah keyakinan terhadap ide-ide Teori Kanz. Dia berpendapat bahwa di sana ada hubungan yang saling mempengaruhi antara ratio inflasi dan ratio pengangguran. Sebab, ketika ratio pengangguran mengecil, maka mengecil pulalah ratio gaji selain bentuk uang. Oleh sebab itu, maka total untuk mengatasi inflasi terkandung di baik meningkatnya pengangguran, karena pengangguran adalah nilai harga yang harus dibayar untuk mengatasi inflasi. Katau begitu berarti masalahnya tersembunyi di balik penyatuan antara ratio pengangguran dengan rasio Inflasi.

Akan tetapi solusi ini tidak membuahkan hasil. Sebab, Teori Kanz hanya memperhatikan politik keuangan, dan mengabaikan politik moneter, sehingga mengakibatkan melemahnya rangsangan investasi, akibat dan naiknya pajak. Begitu pula naiknya utang negara dan aparat bank yang mengakibatkan terlalu banyak mengeluarkan mata uang kertas, yang telah terdeteksi adanya ratio Inflasi yang sangat tinggi beserta adanya pengangguran. Dengan demikian Teori Kanz – beserta ide-idenya – tidak terlepas dari kegagalan.

2. Cara mengatasi inflasi menurut teori Chicago (emas dan perak)

Teori ini muncul setelah kegagalan teori Kanz, dimana teori ini sangat berbeda dengan ide-ide yang ada pada teori Kanz. Teori ini beranggapan bahwa tidak ada kaitan antara inflasi dan pengangguran. Sebab, inflasi adalah fenomena moneter semata. Ia hanya menggambarkan kehilangan keseimbangan antara supply dan permintaan uang. Maka dengan adanya kelebihan yang tidak diinginkan pada supply uang,

memaksa individu untuk berlepas dan suplay yang melebihi permintaan melalui tambahan pada anggaran belanja. Dan ini dengan perannya-mengakibatyykan kepada kenaikan level harga umum.kelebihan pada level harga umum ini tidak mungkin terjadi inflasi. Dengan demikina, cara mengatasi inflasi, tersimpan pada tumbuhnya kuantitas uang dengan rasio yang sesuai dengan bertambahnya bentuk produksi, serta jumlah penduduk. (Dr. Ahmad Hasan)

Dr. Husain Syahhatah – spesialisasi pakar Ekonomi Islam – berpendapat bahwa solusi inflasi terkandung pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang, dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi.
- b) Mengarahkan belanja dan melarang terlalu berlebihan, mu-badzir dan belanja yang tidak bermanfaat
- c) Larangan menyimpan (menimbun) harta dan mendorong untuk menginvestasikannya
- d) Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan terhadap unsur manusia secara moral dan material

Tampaknya, pengetahuan terhadap sebab Inflasi secara benar dapat memberikan solusi yang berhasil untuk problem ini Sebagaimana selain pembahasan yang lalu, bahwa penyebabnya tersembunyi pada peredaran mata uang kertas melebihi backing emas dan perak. Dan sini maka solusinya adalah mengembangkan hubungan erat antara mata uang kertas dengan emas dan perak (sebagai backing). Di samping itu meningkatkan produk yang menuntut untuk menyimpan deposito dalam bentuk emas dan perak

G. UANG SELAIN PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu. uang didefinisikan sebagai sesuatu

yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga misalnya harga adalah standar untuk barang sedangkan upah adalah standar untuk manusia yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga manusia. Sementara promis saham dan sejenisnya tidak bisa disebut sebagai uang. (*taqiyuddin an nabhani*)

Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa Ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga Satuan- Satuan ini menjadi alat tukar (*medium of exchange*). Satuan-satuan Inilah yang disebut dengan sebutan uang.

Berbicara mengenai mata uang. Bagi kalangan umat Islam sebenarnya bukan merupakan hal yang baru Umat Islam telah akrab dengan mata uang yang terbuat dari emas disebut Dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak yang disebut Dirham Mata uang ini telah digunakan secara praktis sejak kelahiran Islam hingga runtuhnya khalifah Ustmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I. oleh karena kebanyakan orang Islam dijajah oleh barat dengan sistem kapitalisnya. Maka seluruh aspek ekonomi dan kehidupan juga mengikuti pola-pola kapitalis termasuk masalah mata uang. Menurut keterangan Abdul Qndim Zallum. dinar dan dirham telah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Istam Mata uang Ini diperoleh dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dinegara-negara sekitarnya Para perdagangan jika pulang dari Syam. Mereka membawa dinar emas Romani (*Byzantium*), dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia (*Sassanid*) Juga terkadang mereka membawa dirham Himyar dari Yaman. Dengan demikian, sudah banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz. berupa dinar emas romawi dan dirham perak Persia (*Drs. Muhammad*)

Islam telah menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat untuk memperkirakan nilai-nilai barang dan tenaga tersebut dengan ketentuan yang baku yaitu dengan satuan-

satuan uang tertentu. Ketentuan itu bisa dipahami dan beberapa hal berikut :(*taqiyuddin an nabhani*)

Pertama ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (*kanzul mal*), Islam hanya mengkhususkan larangan *kanzul mal* tersebut untuk emas dan perak. padahal harta itu mencakup semua benda yang bisa dijadikan kekayaan. Qamh, kurma dan uang adalah harta. Semeniaranya *kanzul mal* tersebut hanya nampak pada uang saja. bukan pada barang dan tenaga larangan menimbun harta disini. maksudnya adalah larangan menimbun uang karena uang adalah alat tukar umum.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahkan di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih (QS. At-Taubah: 34)

Kedua Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah Ketika Islam mewajibkan diyat, Islam telah menentukan diyat tersebut selain ukuran tertentu dalam bentuk emas.

“Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 onta dan terhadap pemilik emas, (ada kewajiban) sebanyak 1.000 dinar “ (HR. An.nasa’i)

Dan ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian Islam juga menentukan ukuran tertentu selain bentuk emas.

Tangan itu wajib dipotong, (apabila mencuri) 1/4 dinar atau lebih (HR. Bukhari)

Ketiga Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak

sajalah sebagai standar uang. Dimana standar barang dan tenaga akan dikembalikan kepada standar tersebut Juga dengan pijakan emas dan perak inilah semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan.

Keempat ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan mishab emas dan perak Dengan adanya zakat emas dan perak tersebut. telah menentukan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak

Kelima Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money charger) yang terjadi selain transaksi uang. hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi selain bentuk financial yang dinyatakan selain Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak Sedangkan pertukaran mata uang itu adalah menjual mata uang dengan mata uang lain yang adakalanya menjual mata uang dengan mata uang sejenis atau menjual dengan mata uang asing

1. Uang Menurut Ibnu Khaldun

Tradisi keilmuan ekonomi Islam telah dimulai jauh sebelum lahirnya Adam Smith Bayangkan saja tujuh talus tahun sebelum Bapak Ekonomi Konvensional itu menulis buku the wealth of nation, seorang ulama Islam bernama Abu Hamid al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian Tradisi keilmuan ini terus berlanjut Dua ratus tahun setelah al-Ghazali menjelaskan peranan uang selain perekonomian, di Tunisia seorang ulama bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun alias Abu Zayd, menjelaskan lebih lanjut tentang uang (Drs. Muhammad)

Ibnu Kaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif Bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi. uang yang melimpah

itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja meningkatkan pendapatan pekerja. dan menimbulkan permintaan atas sektor produksi lainnya. Pendapat ini menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama kata itu negara yang telah mengeksport berarti mempunyai kemampuan memproduksi lebih besar dan kebutuhan domestiknya sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien selain produksinya.

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali Ibnu Klandun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak. namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah. Bahwa ia bernilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya. Maka pemerintah tidak dapat merubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak diselainnya. Katakan pemerintah mencetak uang nominal Rp 10.000 yang setara dengan setengah gram emas. Bila kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 sen baru dan diteapkan nilainya setara dengan seperempat gram emas uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai (Dr. Muhammad)

Oleh karena itu, Ibnu Khaidun selain menyarankan di-gunakannya uang standar emas atau perak beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain bolen berflutuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangan. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di suatu kota, harga makanan akan menjadi murah. Demikian sebaliknya. Contoh menarik kita bisa lihat terjadi paceklik pada masa Khalifah Umar Ibnu Khathab. Waktu itu khalifah mengimpor gandum dan pusat (Kairo) ke Madinah dan

selanjutnya harga gamdum turun Jadi. pada masa itu Umar telah mengenal bagaimana cara mengendalikan harga (Adiwarman A Karim) Suatu pelajaran berharga bagi para ekonom modern untuk mengkaji ulang Teori ekonomi yang dia bangun. (Drs. Muhammad) dan melanjutkan tradisi keilmuan ekonom Islam (Adiwarman A Karim)

2. Mata Uang Di Zaman Khalifah

Didalam satu rumah koleksi yang ada di Paris, ditemui empat mata uang peninggalan Khalifah Islam. Mata uang itu adalah mata uang yang dicetak pada pemerintahan Imam Ali r a tiga mata uang lainnya adalah mata uang perak yang dicetak di Damaskus dan Merv sekitar tahun 60-70 Hijriyah. (Drs, Muhammad) Sebenarnya. di zaman Khalifah Umar dan Utsman. r.a . mata uang telah pula dicetak selain dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum pada mata uang tersebut Pada masa pemerintahan Umar pernah timbul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit namun dibatalkan karena baru disetujui oleh para sahabat yang lain Mata uang khalifah Islam yang memiliki ciri khusus baru dicetak pada masa khalifah Ali r.a namun sayang peredarannya sangat sedikit.ltu karena keadaan politik pada masa itu

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Muawiyah dengan mencantumkan gambar dan pedang Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyah, Zaid juga mengeluarkan dirham dengan mencantumkan nama khalifah. Cara yang dilakukan Muawiyah dan Zaid ini masih dipertahankan sampai saat ini. termasuk di Indonesia. Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Baru pada zaman Ibnu Zubair. mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak namun peredarannya terbatas di Hejaz Sedangkan Mus'ab gubernur Kufah mencetak dengan gaya persia dan Romawi. Pada 72-74 H. Bishri bin Marwan mencetak uang yang disebut attawiyah Sampai dengan zaman ini mata uang khalifah beredar bersama dengan dinar Romawi dirham Persia

dan sedikit *humyarta* Yaman. Barulan pada zaman Abdul Malik (76 H). pemerintah mendirikan tempat percetakan uang. antara lain di Darabjarb. Suq Ahwaz. Sus, Jay.Manjdar.Mjywn, Ray. Abarqubadh dan mata uang khalifah dicetak secara terorganisasi dengan kontrol pemerintah.

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri atas pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar Pecahan yang lebih kecil didapat dengan memotong mata uang. Imam Ali r.a misalnya, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dan dinar (HR. Abu Dawud) Dirham terdiri atas beberapa pecahan masih (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sh''tra (1/60 dirham). Nilai tukar dinar-dirham relatif stabil pada jangka waktu yang panjang dengan kurs dinar-dirham 1:10 pada saat itu. perbandingan emss dan perak adalah 1,7 sehingga satu dinar 20 karat setara dengan sepuluh dinar 14 karat Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat dan pada saat yang sama dinar dikurangi berat emasnya dan 4.55 menjadi 4.25 gram Di zaman Ibnu Faqih (289 H). nilai dinar menguat menjadi I 17 namun kemudian stabil pada kurs 1:15.

Setelah reformasi moneter Abdul Malik. ukuran-ukuran nilai adalah: satu dinar 4.25 gram, satu dirham 3.98 gram satu uqiyya 40 dirham, satu mitsqal 22 karat satu rill (Liter) 12 uqiyya setara 90 mitsqal, satu qist 8 riil setara setengah sa'. satu qafiz 6 sa' setara seperempat artaba, satu qist 60 sa'. satu Jarib 4 qafiz Cukup mengejutkan ternyata seribu tahun kemudian. kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika pada 1792-1334 M Berbeda dengan langkah yang diambil Abdul Malik dengan reformasi moneternya. Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun di negaranegeera Eropa nilai mata uang emas menguat kisaran I 15.5 sampai 1:16.0, walhasil mata uang emas mengalir keluar dan mata uang perak mengalir masuk Amerika Kejadian ini yang dikatakan oleh Thomas Gresham (1857 M) Ini sebagai good money drives out bad money atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik.

3. Uang di zaman Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (1263-1328) lahir, besar dan wafat di zaman pemerintahan Bani memiliki Ketika itu harga-harga dinyatakan dan dibayar dalam dirham yang merupakan peninggalan Bani Ayyuhi Namun. karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dan tembaga yang disebut fulus Dengan demikian dirham digunakan untuk transaksi – transaksi besar. sedangkan untuk transaksi – transaksi yang lebih kecil digunakan fulus.

Diperkenalkannya fulus sebagai mata uang memberi inspirasi kepada beberapa kepala pemerintahan Bani Mumluk untuk menambah jumlah uang Berbeda dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Percetakan fulus relatif lebih mudah dilakuakn karena tembaga lebih mudah didapatkan. Pemerintah mulai terlena dengan kemudahan mencetak uang baru. Keadaan memburuk ketika Sulan Kitbaha dan Zahir Barquq mulai mencetak fulus dalam jumlah sangat besar dan dengan nilai nominal yang lebih besar dan nilai kandungan tembaga didalamnya Fulus banyak dicetak namun masyarakat menolak kehadiran fulus tersebut.

Menyadari kekeliruan Sultan Kitbagha kemudian menyatakan bahwa fulus ditentukan nilainya dari beratnya dan bukan dari nominalnya. Dengan adanya batasan tersebut maka untuk menambah jumlah fulus Sulan Barquq mulai mengimpo tembaga dari negara negara Eropa Percetakan uang menjadi industri dengan didirikannya pabrik Percetakan fulus di Kairo dan Alexandria. Fulus dipergunakan secara luasdirham hilang dari peredaran dari inflasi membung. Bila diawal pemerintahan Bani Mumluk satu dirham mengandung $\frac{2}{3}$ perak dari sepertiga tembaga maka di zaman pemerintahan Nasir satu dirham mengandung $\frac{2}{3}$ tembaga dan $\frac{1}{3}$ perak Situasi mulai membaik di zaman pemerintahan cucu Nasir yang bernama Nasir Hasan (1358), yaitu ketika pemerintah menyatakan fulus yang beredar tidak berlaku lagi dan mengeluarkan mata uang baru Dalam

keadaan seperti percetakan uang yang berlebihan. Beliau lebih lanjut menasehati sulta mendapat keuntungan dari Percetakan tersebut tersebut. Dalam istilah finansialnya seignorage. yaitu selisih biaya percetakan dengan nilai nominal uang yang dicetak Pemerintah juga tidak boleh menyatakan uang yang ada ditangan masyarakat tidak berlaku untuk kemudian mencetak uang Jenis baru. Biaya percetakan uang haruslah menjadi APBN yang diambil dan bailul mat

Secara khusus Ibnu Taimiyah Juga mengomentari praktik mengimpor tembaga dan negara-negara Eropa sebagai bagian dan bisnis uang Secara garis besar. Ibnu Taimiyah menyampaikan lima poin penting (Adiwarman A Karim)

1. Perdagangan uang akan memicu Inflasi
2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai.
3. Perdagangan domestik akan mrnrurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang.
4. Perdagangan internasional akan menurun
5. Logam berharga akan mengalir keluar dan Negara

Untuk poin pertama Ibnu Qayyim. Salah satu murid Ibnu Thamiyah, secara lebih eksplisit menyatakan bahwa riba tidak hanya berarti riba yang terang-terangan (riba al-jail) namun juga berarti riba yang terselubung (riba al-khafi). Lebih lanjut. Ibnu Qayyim menyatakan batapa riba terang-terangan harus dihentikan seketika sedangkan pelarangan riba terselubung dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk cara yang dapat menimbulkan riba Beliau kemudian menegaskan bahwa pelarangan kedua jensi riba ini akan mengantarkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Dalam kaitanya dengan riba terselubung ini, Ibnu Thaimiyah melarang transaksibal al'inah. Mislanya si A menjual sapi kepada si B secara tangguh tempo 2 bulan dengan

harga Rp 2 juta. Pada saat yang sama, si A membeli kambing sapi itu dan si B secara tunai dengan harga Rp 1 juta. Transaksi ini jelas-jelas riba menurut Ibnu Thaimiyah. Bai-al-inah digolongkan tindakan tawarruq, yaitu siasat untuk mengambil keuntungan dan perdagangan uang.

Ibnu Thaimiyah juga melarang mudd'ajwah. Misalnya Si A menukar satu gram perak yang dicampur dengan tembaga dengan satu gram perak murni. Semua keburukan yang terkandung dalam pelanggaran riba ada dalam transaksi ini. Bahkan mungkin lebih besar dan tindakan kriminal penipuan, dan kekacauan. Untuk beberapa kasus Ibnu Thaimiyah membolehkannya dengan syarat bahwa tidak ada kesepakatan di awal, baik terang-terangan atau terselubung atau tidak ada niat untuk bersiasat. Misalnya dalam hal bai- al-inah transaksi jual beli pertama telah selesai sempurna tanpa ada syarat transaksi kedua harus dilakukan.

Jelaslah riba dan segala transaksi yang mengarah pada riba tidak diperbolehkan. Perdagangan uang merupakan salah satu diantaranya.

4. Uang Menurut al-Ghazali

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith, seorang ulama Islam bernama Abu Hamid al- Ghazali telah membahas uang selain perekonomian. Beliau menjelaskan ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam transaksi barter transaksi hanya terjadi apabila kedua pihak mempunyai kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya (Drs. Muhammad)

Al-Ghazali berpendapat, dalam Ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang misalnya unta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi juga sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan penukaran

dan menetapkan nilai yang wajar dan penukaran tersebut. Menurut Imam Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tapi dapat merefleksikan semua warna.

Uang tidak mempunyai harga. tetapi mereflesikan harga semua barang. atau selain istilah Ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (direct utility function) Hanya bila uang Itu digunakan untuk membeli barang. barang itu akan memberi kegunaan. Selain Teori Ekonomi neo klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dan daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (direct utility function). Apapun debal para ekonom konvensional, kesimpulannya tetap sama dengan al-Ghazali uang tidak dibutuhkan untuk uang Itu sendiri

Merujuk pada Al-Quran al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang Orang demikian dikatakannya sebagai penjahat Yang lebih buruk lagi adalah yang melebur dinar dan dirha menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah SVVT dan kedudukannya lebih rendah dan orang yang menimbun uang Dikatakan demikian karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dan peredaran. sedangkan meleburnya berarti menarik dan peredaran selamanya. Dalam teori moneter modern penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu adapun peleburan uang sama artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi

Peredaran uang palsu sangat dikecam Selain konteks zaman ini. uang palsu adalah uang yang kandungan emas-peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Al-Ghazali mengajakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang sejenis itu lebih berbahaya dari pada mencuri seribu dirham Alasannya, mencuri adalah satu dosa. sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kalau uang ini dipergunakan dan akan merugikan siapapun

yang menerimanya dalam jangka waktu yang lama, Lihatlah betapa jeli nya Al-Ghazali dalam perekonomian modern, hal ini berarti tidak boleh mencetak uang baru dengan nominal sama. tetapi mempunyai nilai yang lebih lemah (Adiwarman A Karim)

Apakah uang harus selalu terbuat dari emas dan perak? Bagaimana dengan uang logam atau uang kertas seperti sekarang? Inipun telah dibahas oleh Al-Ghazali. Beliau bahkan membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi. Menurut Al-Ghazali perdagangan dinar dengan dinar ibarat memenjarakan uang sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Makin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli barang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar (Adiwarman A Karim)

Keadaan riil menunjukkan bahwa perkembangan pasar uang dunia saat ini, sebagian besar uang digunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri. Hanya 5% dan transaksi di pasar uang yang berkaitan dengan transaksi pasar barang dan jasa. Bahkan, volume transaksi pasar barang dan jasa hanya 1.5% dibandingkan turn over transaksi di pasar uang.

5. Uang Menurut Al-Maqrizi

Taqiyuddin Ahmad Al Maqrizi (1364-1442 M) adalah salah satu murid Ibnu Khaldun temukan. Spesialisasi beliau adalah uang dan inflasi. Walaupun di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kedua aspek ini tidak membulatkan masalah sama sekali. namun dengan berjalannya waktu banyak kepala pemerintah yang meninggalkan nilai-nilai Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Linai saja. Misalnya sistem anggaran defisit. Di zaman Rasulullah hartanya satu kali ditukarkan yaitu sebelum perang Hunain. Bahkan dibayar. Inasatlah peren usai. Bandingkan dengan zaman Wazir Ibnu Furot (908-911) atau Afc Ibnu Isa (912-

816) ketika defisit anggaran dilakukan dengan memjam dari bankir-bankir Yahudi dan Natrani selain jangka panjang. bahkan Hainid bin Abbas harus pula membayar denda sebesar 20 000 dinar.

Begitu pula dengan mata uang dinar dan dirham yang di jaman Rasulullah berasal dari Romawi dan Persia. Kalaupun di jaman Khulafaur Rasyidin mulai dicetak mata uang khas Islam, maka nilainya sama dengan nilai kandungan emas atau perak diselainnya. Bandingkan dengan jaman Sultan Kamil Ayyubi yang memperkenalkan mata uang fulus (tembaga). Sultan Kutbugha. Zahir Barquq yang mencetak fulus dalam jumlah besar dengan mengambil keuntungan dan percetakan (seignorage) Lihat pula bagaimana hati-hatinya, sahabat Rasulullah menjaga diri mereka dari segala bentuk riba, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Umar r.a melarang seorang sahabat meninggalkan mitra transaksinya walaupun sekedar masuk rumah, untuk mencegah timbulnya riba. demikian pemahaman kehati-hatian Umar r.a sabda rasul kecuali serangan dengan serangan. tunai. “ bandingkan dengan apa yang berkembang pada jaman bani Mamluk yang sampai - sampai Ibu Qayyim menegaskan pelarangan dua jenis riba yaitu riba al-jaly (terang -terangan) dan riba al - khafy (terselubung). Dan akhirnya pula bagaimana Rasulullah dan para sahabat hidup dengan sederhana, bandingkan dengan wazir di jaman Abbasiyah yang mempunyai simpanan ratusan ribu dinar di bank - bank yahudi dan nasrani. Nampaknya yang melatarbelakangi al maqriz mengambil spesialisasi uang dan inflasi.

H. TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG DALAM ISLAM

Kata penting dalam bahasa Ekonomi diantaranya adalah permintaan dan penawaran. Dua hal ini merupakan perkara yang penting baik selain kaitannya dengan barang maupun uang. Karena kenyataan menunjukkan bahwa permintaan uang sama dengan permintaan barang yang dapat ditawarkan. Di atas telah

disebutkan bahwa uang diperlukan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Tidak ada seorangpun yang memerlukan uang untuk mendapatkan uang kembali lantaran uang tidak bermanfaat. Oleh karena permintaan uang didasarkan pada permintaan barang yang tidak terbeli maka terkadang barang menjadi persediaan yang menumpuk Hal Ini terjadi bila harga dasar penawaran berbeda dengan harga permintaan Harga terjadi karena ada proses tawar-menawar Keadaan ini berlanjut sampai terjadi perbedaan antara permintaan dan penawaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan permintaan uang dan permintaan barang adalah satu dan sama sekarang ini dalam sistem keuangan penawaran jumlah uang dapat ditingkatkan dengan memperluas kredit Selain hal demikian pemerintah dapat memperoleh pinjaman jangka pendek dan bank sentral. Bank sentralah yang mengeluarkan mata uang dan memperluas pos-pos pengeluaran nasional sehingga persediaan uang dapat diperbesar. Selain kedua kasus tersebut persediaan uang dapat ditingkatkan tanpa memperbesar jumlah produksi. Tetapi hal Ini dapat mengakibatkan dua cara yang barangkali akan mematahkan peronomian nasional karena salah arah, yaitu:

- a. Nilai uang merosot dibandingkan dengan komoditi
- b. Usaha pembunga uang dan perdagangan berdasarkan bunga menjadi berkembang Inilah yang menjadi penyebab kerusakan perekonomian

Sebagai akibat meningkatnya penawaran uang. maka harga-harga menjadi melonjak. Selain istilah Ekonomi pelonjakan ini disebut "Kurva penawaran menanjak". Selain kondisi semacam ini penawaran juga akan sama dengan permintaan. Perbedaan harga penawaran dan permintaan akan hilang Hal Ini dianggap harga komoditi sebenarnya dipasaran Selain keadaan ini mungkin akan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum suplai uang meningkat Terkait dengan teori permintaann dan penawaran uang selain Ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permintaan Uang Menurut Mazhab Iqtishaduna

Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk tujuan pokok yaitu transaksi dan berjaga-jaga (Investasi). Secara sistematis formula permintaan uang dapat dituliskan sebagai berikut

$$Md = Md \text{ trans} - Md_{\text{per}}$$

Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat peredaran yang dimiliki oleh seseorang. Di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat.

b. Permintaan Uang Menurut Mazhab Mainstream

Seperti halnya pada mazhab pertama di mana permintaan uang selain Islam hanya dikategorikan selain dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Perbedaan baru terlihat setelah kita membicarakan bagaimana perilaku permintaan untuk motif berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa saja yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Landasan filosofi dari teori dasar permintaan uang ini adalah bahwa Islam mengarahkan segala sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Hoarding money atau penimbunan kekayaan merupakan 'kejahatan' penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi ulama yang digunakan oleh mazhab ini. Ini dilakukan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan produktif. Pengenaan kebijakan ini akan berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Secara matematis, permintaan uang untuk mazhab kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut

$$M_d = M_d \text{ trans} - M_d \text{ per}$$

$$M_d \text{ trans} = f(Y)$$

$$M_d \text{ per} = f(Y.u)$$

Tingkat pajak atas aset yang menganggur diwakili oleh p , maka semakin kecil permintaan uang untuk motif berjaga-jaga karena pada tingkat p yang tinggi biaya resiko yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak terhadap uang kas tersebut menjadi naik. Selain kondisi seperti ini orang akan berusaha memperkecil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah cara mengurangi kekayaan yang idle. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai M relatif rendah, maka menyimpan uang kas relatif tidak mempunyai resiko yang tinggi. Tinggi rendahnya resiko menyimpan uang kas (Q) dipengaruhi oleh besarnya tingkat (l) pajak atas aset yang menganggur (u) dikurangi dengan resiko investasi (v). Dengan demikian secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$Q = u - v$$

Dalam persamaan dibawah ini dapat dituliskan bahwa variabel pendapatan (u) berbanding positif dengan banyaknya permintaan uang dan berbanding terbalik dengan nilai pajak yang dikenakan asset atau kekayaan yang dianggurkan. (u)

$$M_d = f(Q.u)$$

Semakin tinggi nilai u , maka velocity at money akan meningkat. Peningkatan velocity of money ini akan mengurangi permintaan uang untuk berjaga-jaga dan sekaligus akan meningkatkan permintaan uang untuk transaksi. Peningkatan uang yang digunakan untuk transaksi dan investasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.

c. Permintaan Uang Menurut Mazhab Alternatif

permintaan uang dalam mazhab Ini, erat kaitannya dengan konsep endogenous uang selain Islam. Teori endogenous

dalam Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut: ‘keberadaan uang pada hakekatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sector riil’’. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang disektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.

Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu Nilai tambah uang terjadi jika hanya ada pemanfaatan secara Ekonomik selama uang tersebut digunakan. Dengan demikian, tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah, akan tetapi nilai tambah, akan bergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu. Secara makro Ekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil. Konsep inilah yang kemudian menjadi landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor mikro Ekonomi.

Menurut Choudhury, permintaan uang adalah representasi dan keseluruhan kebutuhan transaksi selain sektor riil Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil meningkat maka permintaan uang akan meningkat Variabel-variabel yang memengaruhi permintaan uang meliputi variabel soslo ekonomi (f), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (f), dan informasi objek masyarakat akan kondisi riil perekonomian. Permintaan uang dan penawaran uang diepengaruhi oleh besarnya profit sharing atau *expected rate of profit*. Tinggi rendahnya *expected rate of profit* ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan actual ekonomi.

Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dan menginvestasikan uang disektor riil Ketika permintaan uang untuk kegiatan investasi ini meningkat, maka akan berdampak pada penurunan nilai *expected rate of profit*. Begitu juga sebaliknya apabila permintaan uang menurun maka

nilai *expected rate of profit* akan turun Secara matematis Choudhury memformulasikan permintaan uang sebagai berikut :

$$Ms = (\pi, y, p, S, R, X, Y)[\theta] = \sum_{b=1}^N Md (r, y, p, S, X, Y)[\theta]$$

$$Ms = \sum_{b=1}^N Md = \sum_{n=1}^N Ms = \sum_{b=1}^N \sum_{b=1}^N Md = Md$$

$$b= 1,2,3 \dots,N$$

$$Ms = (\pi, y, p, S, R, X, Y)[\theta]$$

Permintaan uang sebagai manifestasi dan aktual kapasitas transaksi sektor riil adalah penjumlahan dan total permintan uang oleh individu atau lembaga keuangan: mewakili tingkat keuntungnya adalah pendapatan riil p adalah tingkat harga-harga atau inflasi. rb menunjukkan ratio bagi hasil antara shabihul mal dan mudhario dalam bank(b) atau lembaga keuangan S adalah total pengeluaran nasional R adalah reserve requitment yang dikeluarkan oleh Bank sentral kepada bank-bank umum.

Dari formula diatas dapat dilihat bagaimana hubungan antara variabel yang ada terhadap permintaan alau penawaran uang Variabel y = pendapatan riil yang dimiliki oleh seseorang akan berhubungan secara positif dengan banyaknya permintan uang Sedangkan variabel independent dimana p adalah harga-harga atau inflasi mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan banyaknya permintaan uang Semakin tinggi harga barang secara umum, maka orang akan cenderung memilih untuk menyimpan ungnya selain dalam bentuk barang sehingga ketika inflasi meningkatkan maka permintaan uang akan turun bersamaan itu puta. permintaan akan kepemilikan barang akan meningkat S sebagai variabel pengeluaran nasional berhubungan secara positif dengan permmtaan yang ada Sedangkan X dan V masing-masing adalah variabel untuk teori Ekonomi dan kebijakan pemerintah sebagai induced knowlage adalah pengetahuan masyarakat akan kondisi objektif dari tiap-tiap variabel, kuantitas pengetahuan ini juga berpengaruh terhadap besarnya permintaan uang yang diinginkan oleh saorang pelaku ekonomi.

I. FUNGSI DAN KEGUNAAN UANG DI ZAMAN RASUL SAW

Mata uang (*an-nuqud*), secara bahasa berarti dirham tertentu. Mengeluarkan bagian dirham yang palsu atau memberikan dan mengambil dirham. Hal ini seperti yang terungkap dalam hadist Jabir dan yang lainnya, yaitu saat Rasulullah SAW menjual sesuatu kepadanya (Jabir) maka beliau bersabda “Uangkanlah kepadaku harganya”, Maksudnya “berikanlah uangnya kepada beliau segera” *Nuqud* bisa Juga berarti mata uang (‘umlah) Itu sendiri”

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan baik berbentuk uang logam maupun bukan Dengan uang pula seluruh barang. usaha dan jasa dapat dinilai.

Setelah Islam datang Rasulullah SAW menetapkan (dengan taqirir penggunaan) dinar dan dirham tersebut dan menetapkannya sebagai mata uang Rasulullah juga menetapkan timbangan mata uang dinar dan dirham seperti yang telah berlangsung pada Quraisy Dan Tharus dan Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda:

لَوْزُنُ وَزَنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah.

Diriwayatkan oleh Al-Baladzury dari Abdulah bin Tsa’labah bin Sha’ir ‘Dinar Hirakky dan dirham persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyyah. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya dalam jual beli kecuali menjadikannya (timbangan) lantaran mereka sudah mengetahui timbangan mitsqal. Timbangannya adalah 22 qirath kurang (satu dirham) Kisra Dan Timbangan to dirham tama dengan 7 Mitsqal Satu rithi sama dengan 12 uqiyah, dan setiap satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan Rasulullah SAW membiarkan hal itu, Begitu pula

Abu Bakar. Umar, Utsman. dan Ali, Dengan demikian kaum muslim telah menggunakan bentuk, cetakan dan gambar dinar Hirakky dan dirham Kisra pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar As Sbididiq. dan awal pada masa Khalifah Umar.

Timbangan dinar Islam tidak berbeda dengan timbangan dinar pada masa Jahiliyah. Sedangkan untuk dirham timbangan-nya bermacam-macam. Imam Al- Baladzury meriwayatkan

dari Hasan bin Shalih bahwa "Mata uang yang dibuat oleh orang-orang Persia Itu berbeda-beda yang besar dan ada yang kecil. Dirham besar mereka tetapkan timbangany seberat satu mitsqat, sama dengan 20 qirath. Dirham kecil mereka tetapkan timbanganny seberal 12 qirath Sedangkan dirham yang lainnya (yang sedang) mereka tetapkan timbangannya sebesar 10 qirath, yaitu setengah mitsqat.

itulah uang yang digunakan pada masa Jahiliyyah, dan seperti itulah timbbangan- timbangannya, Islam mengaku semua Jenis mata uang tersebut, dan mengakui penggunaannya sebagai alat pembayaran berlaku dan beredar di tengah-tengah masyatakat sekaligus dijadikan sebagai standar bagi nilai barang dan jasa. Semua itu adalah (merujuk) pada timbangan penduduk Makkah. Meski demikian sesungguhnya Islam tidak Menetapkan hsanya satu alat tukar pada saat menetapkan hukum-hukum jual beli dan perburuhan Islam memberi keleluasan pada manusia untuk melakukan pertukaran barang manfaaf dan jasa dengan apa saja sehingga tercapai keridhaan di dalamnya, tanpa mengharuskan satu macam (alat lukar) sebagai dasarnya. Akan tetapi. meskipun Islam memberikan keleluasaan melakukan pertukaran dengan apa saja yang mereka inginkan, Islam telah menjadikan mata uang yang digunakan selain transaksi tukar menukar berupa emas dan perak. Dijadikannya emas dan perak sebagai tolak ukur selain menilai barang dan jasa. Sekaligus sebagai dasar berlangsungnya seluruh bentuk transaksi. Dijadikan pula emas dan perak dengan timbangan berat tertentu, yaitu timbangannya penduduk Makkah. Sebagaimana hadist timbangan adalah timbangan penduduk Makkah"

Islam telah mengaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak serta menganggapnya sebagai mata uang. (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Sebagian dari hukum-hukum itu adalah :

1. Larangan Menimbun Emas dan Perak Firman Allah SWT:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih” (Qs. At-Taubah : 34)

diharamkannya menimbun emas dan perak selain kedudukannya sebagai (Zat) emas dan peraknya juga selaku mata uang dan alat tukar Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan seluruh aktivitas .

2. Mengaitkan Keduanya Dengan Hukum-hukum Tertentu Yang Bersifat Permanen dan Tidak Akan Berubah :

a. Mewajibkan zakat pada keduanya dengan statusnya sebagai mata uang. dan (nilai) ukuran harga selain jual-beli, serta (nilai) upah atas jasa Islam menetapkan nishab pada dinar emas dan dirham perak Sebagaimana hadis “pada setiap 20 dinar (Zakatnya) setengah dinar Dan. pada setiap 200 dirham (zakatnya adalah) 5 dirham “

b. Tatkala Islam mewajibkan diyat, maka pembayarannya ditetapkan dengan menggunakan keduanya Islam telah menetapkan Jumlah tertentu (dalam diyat) yakni 1000 dinar emas, dan 12.000 dirham perak. Dari Ibnu Abbad disebutkan :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِي قَتَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرًا أَلْفًا

“Bahwa seorang laki-laki dari Bani ‘ Adiy telah dibunuh, maka Nabi SAW menetapkan diyatnya 12.000” (HR. Ashabus Sunan)

Maksudnya dari mata uang dirham, Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm, dan bapaknya dari kakenya. bahwa Nabi SAW telah menulis surat kepada penduduk Yaman. Tertulis: 'Sesungguhnya pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, dan bagi pemilik emas (diyatnya aualah) 1.000 dinar (.....)

- c. Tatkala Islam mewajibkan sanksi potong tangan bagi pencuri, Islam menentukan pula kadar (nishab) yang mengharuskan memotong tangan pencuri yakni 1/4 dinar emas, dan 3 dirham perak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai standar bagi segala sesuatu yang di curi. Dan Aisyah r a. diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مُسْلِم

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (nilai pencuriannya) ¼ dinar atau lebih, “ (HR. Muslim juz 3, hal. 1312

Dari Ibnu Umar bawasannya Rasulullah SAW bersabda, Pencuri dipotong tanganya pada (pencurian) perisai yang nilainya 3 dinar”

3. Pada waktu menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam transaksi keuangan, islam menjadikannya dalam bentuk emas dan perak. Yang dimaksud dengan pertukaran (ash shart) disini adalah pertukaran barang dengan barang, jual beli uang dengan, baik yang sejenis seperti membeli emas dan perak, atau sebaliknya. Dari Abu Bakar berkata “Rasulullah SAW telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali emmbeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami (.....)

Islam lebih mengaitkan hukum-hukum Ini dengan emas dan perak, dengan sifatnya sebagai mata uang dan alat tukar. juga

(nilai) harga di dalam jual beli adalah ketetapan dari Rasulullah SAW yang telah menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang yang menjadi penentu (nilai) harga di dalam jual beli dan (nilai) upah atas jasa

Ini menunjukkan bahwa mata uang di selain Islam adalah (berbentuk) emas dan perak. Karena seluruh hukum yang terkait dengan uang terkait pula dengan emas dan perak dengan kedudukannya sebagai (nilai) harga atas seluruh barang dan jasa. sebagai mata uang selain proses tukar menukar baik berbentuk (mata uang) cetakan maupun (emas dan perak) tantakan.

Mata uang yang beredar pada masa Rasulullah yang dianggap sebagai mata uang yang menjadi ukuran (nilai) harga dan barang yang diperjualbelikan dan nilai upah atas jasa hanya menggunakan emas dan perak Tidak ada mata uang selain perak dan emas baik logam maupun non-logam Saat itu belum ada mata uang dan logam tembaga atau timah juga belum ada mata uang terbuat dari kulit. atau uang keras.

J. DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto Ekonomi “Islam Suatu Kajian Kontemporer” Jakarta Gema Insani Press. 2001
- An- Nabbani, Taqyuddin “membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam” Surabaya : Rislal Gusti, 1998
- Hasan Ahmad “ mata Uang Islam” Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad, Drs “ Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam “ Jakarta: Salemba Empat, 2002

KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang mengenai kebijakan Ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi pada masa Islam Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor dalam hal perdagangan perekonomian di masa itu. Apalagi dengan faktor yang mempengaruhi stabilitas dan fluktuasi nilai uang demikian juga dengan pertimbangan metode-metode yang digunakan oleh para pemimpin Islam pada proses investasi. Ini cenderung dapat membantu mengetahui adanya kebijakan moneter. Perlu diketahui bahwa ekonomi moneter dan fiskal merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam ekonomi Islam Ini merupakan hasil dan permasalahan moneter dan fiskal dalam Ekonomi Islam yang pernah dilakukan pada tahun 1978 yang bertangsiung di Mekkah dan pada tahun 1981 dilakukan di Islamabad. Hal ini menuntukkan bahwa betapa pentingnya masalah moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam hasil dan kegiatan ini memberikan upaya kristalisasi gagasan yang besar. Ilmu moneter dan fiskal adalah saiah satu bidang kajian Ilmu moneter Ilmu moneter merupakan bagian dan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi.¹ Pada umumnya kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang merupakan tingkat yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran intemasional. Alasan mempe-

¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2003, bersumber dari Nopirin, *Ekonomi Moneter*, hal 1-2 dengan modifikasi dan penyesuaian pada sistem ekonomi islam

lajari kebijakan moneter dan fiskal dalam Ekonomi Islam antara lain :²

1. Dengan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat diketahui lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter serta mekanisme ekonomi bagi hasil.
2. Menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan kebijakan moneter terhadap perkembangan / kegiatan ekonomi Islam.
3. Menganalisis mekanisme kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian, jelas bahwa perekonomian berusaha untuk menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi Hal ini sangat penting dalam pembangunan kebijakan ekonomi seperti kebijakan perdagangan, kurs devisa / perpajakan, industri dan produksi juga pertanian Tetapi kebijakan moneter sering dilupakan sebagian masyarakat pada umumnya. Ini disebabkan oleh adanya kebijakan moneter yang masih kurang dianggap penting Apalagi masih kurang mempunyai peranan yang menentukan bagi laju pertumbuhan ekonomi mengenai masalah pemerataan pendapatan dan persediaan kesempatan kerja.³ Selain itu, kebijakan moneter juga berperan penting dalam membantu merealisasikan tujuan-tujuan Islam Akan tetap mengingat tidak adanya bunga dan alat (instrumen) suku bunga diskon serta operasi pasar terbuka dalam suatu bentuk surat berharga pemerintah yang mengandung bunga. Sistem moneter termasuk lembaga keuangan yang merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat. Di samping itu, ada sarana lain yang perlu dikaitkan seperti kebijakan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem

² Muhammad, *Op.cit*, hal 8 sumber dari Nopirin, *Op.cit* hal 1

³ Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara : Jakarta, 1997

moneter secara baik, biasanya otontas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem dan mempercayai bahwa uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrument penting dan kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Hal itu juga berlaku dalam sistem ekonomi Islam. Hanya saja perbedaannya tertetak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam.

B. TEORI KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

1. Definisi Kebijakan Moneter dalam Islam

Ekonomi moneter dan fiskal merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam Ekonomi Islam Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik biasanya otoritas moneter narus melakukan pengawasan. kepada keseluruhan sistem Otoritas moneter biasanya juga mempercayai bahwa uang bukanlah suatu selubung yang sederhana Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrument penting dan kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern Hal ini juga berlaku dalam sistem ekonomi Islam. Akan tetapi perbedaan mendasarnya adalah terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Dengan alat kebijakan moneter Ini juga akan menjadi berbeda. Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya nampak jetas pada waktu perekonomian tersebut berusaha untuk menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi. Pada masa pembangunan umumnya disadari betapa pentingnya kebijakan ekonomi yang lain seperti kebijakan perdagangan. kurs devisa, perpajakan. kebijakan industri dan produksi, kebijakan pertanian tapi sering dilupakan orang betapa pentingnya kebijakan moneter Beberapa kebijakan moneter yang telah banyak dipraktekkan terutama di negara kita sejak Orde Baru antara lain: ⁴

⁴Sinungan, Muchdarsyah, *Op.cit*

- a. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan.
- b. Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar baik kepada sektor-sektor yang prioritas maupun sektor-sektor yang non prioritas untuk meningkatkan kesempatan kepa pada pemerataan pendapatan masyarakat.
- c. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi
- d. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah melalui pemberian kredit-kredit KIK dan KMKP, misalnya meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga keuangan untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam rangka memperlancar kegiatan perdagangan masyarakat dan lalu lintas pembayaran uang.

Kebijakan moneter bersama-sama dengan kebijakan keuangan negara dan neraca pembayaran merupakan tiga aspek kebijakan ekonomi makro yang erat kaitannya satu dengan yang lain. Secara bersama-sama ketiganya harus dlusahakan agar serasi dan seimbang, yang satu menunjang yang lain dan secara bersama-sama mengusahakan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan terutama sasaran-sasaran yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan menciptakan suatu keadilan ekonomi bagi seluruh komponen-komponen ataupun lapisan-lapisan masyarakat yang kesemuanya akan bisa menciptakan kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter yang cocok untuk kegiatan-kegiatan perekonomian pada masa sekarang merupakan sarana-sarana untuk meningkatkan pembentukan tabungan masyarakat dan pengarahan penggunaan tabungan tersebut atau alokasi tabungan ke dalam investasi yang sangat berguna bagi sasaran-sasaran pembangunan. Kesemuanya itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

kebijakan moneter dan perbankan dapat menunjang suasana dan meningkatkan kegiatan serta kegairahan perekonomian masyarakat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka pengumpulan tabungan masyarakat maupun penyalurannya harus bisa dilakukan oleh sektor perbankan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan ini bisa dilakukan dengan menerapkan pola kebijakan moneter perbankan maupun perkreditan yang bisa menjawab tantangan-tantangan ekonomi melalui perbaikan-perbaikan sistem dan pelayanan, perbaikan-perbaikan manajemen, perbaikan cara kerja perantara keuangan untuk segala kegiatan masyarakat sehingga kegairahan ekonomi bisa diciptakan. Kesemuanya ini bisa disatupadukan untuk mengisi semua tahap pembangunan serta isi-isi kerja pembangunan yang bisa meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kebijakan moneter yang dijalankan bersama-sama oleh bank sentral, Bank-Bank Umum, Bank-Bank Koperasi, Bank-Bank Pembangunan dan Bank-bank Sekunder yang ada di seluruh Indonesia baik Bank-Bank Milik Pemerintah maupun Bank-Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing semuanya disatupadukan bersama dengan semua lembaga-lembaga keuangan non bank baik lembaga-lembaga asuransi, lembaga-lembaga penertiban dan perdagangan surat berharga maupun lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan bisa digunakan untuk mengerahkan masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam alokasi-alokasi yang sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan. Pada dasarnya kebijakan moneter bisa diringkaskan dengan melihat bagaimana kebijakan moneter dan pembangunan itu digabungkan sebagai sasaran untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat sebagai berikut:⁵

- a. Kebijakan moneter digunakan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah yaitu melalui pemberian KIK / KMKP dan fasilitas-fasilitas lainnya serta

⁵Sinungan, Muchdarsyah, *Op.cit*

mendorong pertuasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun di sektor informal, serta pemerataan pendapatan masyarakat dan menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat sehingga bisa tercapai usaha-usaha swasembada ataupun usaha-usaha lain

- b. Kebijakan moneter digunakan juga untuk meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat yaitu mcnghimpun semua simpanan masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito ataupun dalam bentuk surat bertiarga. kemudian oleh (lembaga-lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank) disalurkan kembali kepada masyarakat untuk digunakan bagi pembiayaan-pembiayaan investasi.
- c. Kebijakan moneter digunakan juga untuk bisa memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi khususnya untuk menjaga kestabiian harga-harga dengan menekan tingkat inflasi serendah mungkin dan kalau dapat selalu berada dalam posisi single-digit
- d. Kebijakan moneter juga digunakan untuk menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan ststem lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap sehingga pengaturan dan arah pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisiensi.

Salah satu pegangan yang paling pentlng dari kebijakan moneter adalah bagaimana mengatur kebijakan suku bunga dan kebijakan kreditur dalam kaitan ini perlu dtperhatikan bahwa kebijakan suku bunga akan bisa menunjang tercapainya sasaran kebijakan moneter yang bisa mendorong tabungan masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi. Sedangkan di lain pihak kebijakan suku bunga akan ikut juga mendorong kegiatan produksi, terutama kegiatan produksi dan industri yang bisa banyak menyerap tenaga kerja serta mengarahkan kegiatan usaha golongan lemah misalnya melalui penetapan tingkat bunga yang rendah yaitu kredit KIK / KMKP, kredit mini, kredit candak culak, kredit

pedesaan dan sebagainya. Dalam era pembangunan perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank amat dibutuhkan masyarakat. karena itu pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter. Pemerintah sebagaimana eratnya kaitan antara bank dan uang. Pengaturan arus uang dari dan masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan moneter di Indonesia dipimpin Dewan Moneter yang diketahui oleh Menteri Keuangan dan anggotanya. Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Sentral. Sebagai anggota Dewan Moneter Bank Sentral disertai tugas untuk membina bank-bank mengatur peredaran uang dan menjalankan operasi moneter. Karena itu, Bank Sentral adalah pelaksana dan kebijakan moneter pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. Dewan Moneter sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral memberikan pengarah dan pedoman kerja kepada Bank Sentral demi menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat⁶

2. Tujuan Kebijakan Moneter dalam Islam

Bank Indonesia⁷ bertanggung jawab melaksanakan serta mengawasi bekerjanya sistem moneter dan perbankan la bertugas melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh Dewan Moneter dan pemerintah Perumusan secara umum tujuan kebijakan ekonomi yang hendak dicapai yaitu untuk “ mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat’ tidaklah cukup. Tujuan kebijakan moneter haruslah dirumuskan secara spesifik yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja bagi faktor-faktor produksi hingga dicapai tingkat output kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dengan menggunakan piranti-piranti untuk mempengaruhi dan mengatur penawaran uang

⁶Sinungan, Muchdarsyah, *Op.cit*

⁷Wijaya, Faried, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta : BPFE, 1990, hal 184

atau jumlah uang yang beredar dengan tujuan menstabilkan harga dan output total dan kesempatan kerja jangka pendek serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain, kebijakan moneter akan menaikkan atau menambah jumlah uang beredar selama perekonomian mengalami resesi dan kemandegan untuk merangsang pengeluaran dan sebaliknya membatasi dan mengurangi supply uang selama masa inflasi untuk mengerem pengeluaran. Mula-mula otoritas moneter menetapkan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai piranti / teknik kebijakan moneter yang dipilih Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi besarnya cadangan aktual dan cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank-bank umum dan juga cadangan kelebihan dengan menggunakan piranti kebijakan yang telah dipilih tersebut. Karena cadangan kelebihan merupakan dasar kemampuan bank-bank umum menciptakan uang dengan memberikan pinjaman maksimum sebesar cadangan kelebihan maka dengan melalui teknik pengendaliannya Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yaitu jumlah yang bank-bank umum mampu dan bersedia memberikan pinjaman pada tingkat suku bunga. Mengikuti teori Keynesia yang menyatakan bahwa permintaan dan penawaran uanglah yang menentukan tingkat suku bunga maka bila permintaan masyarakat akan uang sudah tetap tertentu, manipulasi jumlah uang yang beredar atau penawaran uang akan mempengaruhi tingkat suku bunga serta jumlah atau besarnya pinjaman yang ditawarkan oleh Bank-bank umum. Seperti telah diketahui pengeluaran investasi merupakan fungsi atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sehingga perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi tingkat keputusan pengeluaran oleh pihak swasta terutama keputusan pengeluaran investasi yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat output kesempatan kerja, pendapatan dan tingkat harga.

Kebijakan moneter dalam Ekonomi Islam akan mencoba menyelesaikan atau mencapai lujuan bahwa Islam tegak dalam sektor sosio-ekonomi. Beberapa tujuan penting yang dapat dirumuskan

dislnt, menurut Iqbal dan Khan, diartaranya :⁸

- a. Economic Well-being with full employment and optimum rate of economic growth
- b. Sosio-economic justice and equitable distribution of income and Health
- c. Stability in the value of money

Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadlilan sosial ekonomi dan kesesuaian distribusi pendapatan serta kesejahteraan merupakan tujuan yang sangat penting bagl kebijakan moneter hanya dalam kerangka Islam. Lebih-lebih tujuan yang pertama dan ketiga yang dirumuskan diatas akan nampak sama di permukaan, dan akan sangat kelihailan perbedaannya dan dua sistem yang didasarkan pada moral sementara kapitalisme adalah sistem sekuler dan netral-moral.

Pandangan senada di ungkapkan oleh **Umer Chapra**, bahwa tujuan dan fungsi yang paling penting untuk dijadikan bahan diskusi dalam rangka mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan perbankan islam adalah sebagai berikut :⁹

- a. Kelayakan ekonomi yang luas berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum
- b. Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
- c. Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil
- d. Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

⁸ Muhammad, *Op.cit*, hal 6 bersumber dari Munawar Iqbal dan Muhammad Fahim Khan, *A Survey of Issues and Programme for Research in Monetary dan Fiscal Economies of Islam*, Jeddah : ICRIE King Abdul Aziz University, 1998

⁹ Muhammad, *Op.cit*, hal 16 sumber dari M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1995 hal 34

Dan empat tujuan dan fungsi tersebut diatas. sepintas dapat dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi tersebut adalah yang ada dalam sistem kapitalis Akan tetapi. kalau dikaji lebih dalam. walaupun kelihatannya ada yang sama. namun sesungguhnya ada perbedaan dalam penekanan Perbedaan tersebut adalah terletak pada perbedaan komitmen kedua sistem tersebut tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan manusia Di dalam Islam tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dipisahkan dan ideologi dan keyakinan Tujuan merupakan masukan yang penting bagi sebagai-hasil yang justruktur Tujuan membawa sanksi dan sejauh tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada Al- Qur'an dan Sunnah, maka menjadi keharusan bukan persoalan tawar-menawar politik dan untung-untungan Walaupun demikian, hal ini merupakan strategi. yang penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dan demikian pula Islam memberikan (membuat) kontribusi yang unik Kemungkinan kontribusi Islam adalah terletak pada keseluruhan tujuan dan fungsi di atas.

3. Alat-Alat Kebijakan Moneter Islam

Di dalam Ekonomi Islam, sistem bunga harus dilarang. Aturan ini melahirkan dua instrumen penting dalam Kebijakan moneter pada sistem ekonomi kapitalis, discount rate dan kegiatan pasar terbuka dalam pengaman pemerintah yang menggunakan sistem ekonomi - bunga. Walaupun, hal ini tidak akan mendatangkan kerugian ahli ekonomi muslim memiliki pandangan instrumen alternatif untuk kebijakan moneter, yang akan membantu tidak hanya dalam pengaturan persediaan uang yang sesuai dengan permintaan uang, tetapi juga membantu sepenuhnya kebutuhan pemerintah untuk mempertemukan defisit 'kesungguhan'nya dan mencapai tujuan sosial-ekonomi masyarakat muslim. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat terdiri atas elemen-elemen berikut ini.¹⁰

¹⁰Muhammad, Op.cit, hal 17 sumber dari M . Umer Chapra, hal 195 juga M. Iqbal dan M Fahim Khan, 1981, hal 90

- a. Target pertumbuhan dalam M dan Mo
- b. Peran serta masyarakat dalam permintaan permintaan tabungan
- c. Penyediaan cadangan yang sesuai dengan ketentuan
- d. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai
- e. Sertifikat deposito

Elemen-elemen ini akan dapat berjalan apabila sistem yang ada dalam kelembagaan atau tatanan kelembagaan keuangan dapat berjalan secara normal. Disamping itu, situasi sosial politik suatu negara akan mempengaruhinya.

4. Sumber-Sumber Moneter dalam Islam

Kebijakan moneter memiliki fungsi antara lain melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat khususnya dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Fungsi ini menjamln bahwa pertumbuhan moneter adalah memungkinkan dan tidak *excessive* atau defisien. Dari sisi pendekatan ekonomi Islam ada sumber-sumber ekspansi dalam kebijakan moneter antara lain : ¹¹

1. Fiat Money Creation

Bank Sentral membuat uang dikarenakan ada dua alasan Yang pertama ketika pemerintah meminjam secara langsung dari bank tersebut. Kemudian yang kedua. ketika Bank Sentral memutuskan melakukan “ perluasan “ kegiatan pasar terbuka

2. Kredit Money

Pada sistem ekonomi saat ini deposit Bank Komersiai merupakan bagian yang signifikan dan persediaan uang Deposit ini dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a. Primery deposit merupakan uang atau modal dasar bank
- b. Derevatif deposit merupakan cadangan fraksional yang didapatkan Bank Komersiai dari ekstensi kredit. Derevetif

¹¹ Muhammad, Op.cit, hal 11

ini mengarah pada penambalan persediaan uang yang dilakukan pemerintah atau Bank Sentral mencetak mata uang. Dalam Ekonomi Islam, penggalangan ini merupakan masalah penting sehingga penciptaan uang merupakan hak istimewa masyarakat (sosial) sehingga Bank diizinkan untuk memberikan kredit atau Bank Sentral akan menerapkan 100 persen sebagai cadangan bank (reserve requirement).

c. Balance of Payment Surplus

Keseimbangan surplus pembayaran adalah sumber lain dan ekspansi uang, tetapi hal ini tidak begitu penting bagi negara Islam sebab banyak negara Islam yang mengalami Balance of Payment Defisits dan di beberapa negara mendapatkan nilai surplus. Nilai surplus tersebut tidak dihasilkan dari sektor swasta. Oleh karena itu pendekatan ini tidak mengarah kepada ekspansi otomatis pada persediaan uang Hal ini akan terjadi jika pemerintah mengeluarkan surplusnya di dalam negeri dan sektor swasta. Secara kemungkinan, keseimbangan defisit pembayaran tidak akan melanggar jika pemerintah suatu negara mengeluarkan secara teratur menurut kemampuan ekonomi untuk menghasilkan supply maka tidak akan terjadi inflasi sebagai akibat dan Balance of Payment Surplus.

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “ mencukupi ” dan tidak “ berlebihan ”, perlu memotori secara hati-hati dengan adanya sumber moneter antara lain :¹²

a. Defisit Fiskal

Tidak ada kontroversi di kalangan para ekonom mengenai apakah defisit fiskal dapat dan memang telah dilakukan menjadi sumber penting bagi ekspansi moneter “ ekspansif ” Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-

¹² Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press

sumber rill pada laju yang lebih cepat dan yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Bahkan di negara-negara industri utama, defisit fiskal yang besar telah menjadi sebab utama kegagalan memenuhi target supply uang. Hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapus inflasi pada kebijakan moneter. Akan tetapi seperti yang secara sangat tepat dinyatakan oleh para ekonom yang tergabung dalam **Economists Advlstory Group Bussiness Research Study**. “ Makin besar ketergantungan sektor pemerintah kepada sistem perbankan makin sukar bagi Bank Sentral untuk melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten¹³ Karena itu, kalau tidak ingin kebijakan moneter menjadi kurang selektif atau tertalu restriktif. harus ada koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasional. ini menggarisbawahi perlunya suatu kebijakan fiskal yang non inflasioner dan realistis di negara-negara muslim. Karena itu, suatu pemerintahan muslim yang ber-sungguh-sungguh komitmen kepada pencapaian sasaran ini harus melakukan suatu kebijakan fiskal yang konsisten dengan sasarnya ini lebih penting karena pasar-pasar uang di negara-negara muslim relatif terbelakang dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meregulasi supply uang seperti yang dapat dilakukan dalam kebijakan fiskal. Ini tidak dengan sendirinya meniadakan defisit fiskal tetapi memaksakan batasan bahwa defisit diperbolehkan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang berbasis luas dalam kerangka harga harga yang stabil. Bagaimanapun juga, penghapusan defisit fiskal yang “ berlebihan ” tetap menjadi sebuah harapan kosong di negara-negara muslim selama penyebab utama defisit tidak dituntaskan. Diantaranya yang penting adalah sebagai berikut pertama ketidak mampuan atau ketidaksediaan pemerintah untuk me-

¹³ *Ibid*, bersumber dari Economic Advisory Group, *Banking System and Monetary Policy in the EEC* (London *Finansial Times*, 1974) hal 100

tingkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan noninflasioner lainnya untuk memenuhi pengeluaran produktif dan penting lainnya. Kedua, kurangnya kesediaan pada sisi pemerintah untuk mengeliminasi atau mereduksi secara substansial pengeluaran mereka yang mubazir dan tidak produktif. Karena itu, suatu pemerintahan Islam harus jika ingin sesuai dengan nama yang di sandangnya menghapuskan kedua sumber penyebab defisit itu. Keseluruhan struktur pajak di negara-negara Muslim perlu diuji secara tidak memihak. Terdapat beberapa sektor dalam perekonomian negara muslim yang terkena pajak berlebihan, bukan karena pertimbangan-pertimbangan sosio ekonomi yang rasional. Tetapi karena keinginan untuk memenuhi keinginan kelompok tertentu. Jika system pajak di rasionalisasi, ketidakmerataan dalam sistem akan dapat dihapuskan dan pelaksanaan perpajakan akan dapat ditingkatkan secara substansial dengan suatu dampak ekonomi yang lebih baik pada insentif output, dan distribusi. Akan tetapi hal ini bukanlah tugas yang enak karena masih tersedia sumber-sumber daya yang mudah bagi defisit melalui pinjaman yang tetap di lirik pemerintah. Perlunya mengeliminasi pengeluaran yang tidak produktif dan mubadzir merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim. Akan tetapi, terutama bagi pemerintah, hal ini tidak bisa dihindari karena mereka menggunakan sumber-sumber daya yang disediakan oleh rakyat sebagai suatu amanah dan menggunakannya secara mubadzir atau tidak produktif merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanah ini. Sumber-sumber daya yang tersedia di tangan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya adalah terbatas di semua negara termasuk di negara-negara muslim yang berkembang. Sumber-sumber daya ini perlu dimanfaatkan secara efisien dan efektif dibarengi dengan perasaan tanggung jawab kepada Allah. Kesungguh-sungguhan dalam menggunakan dana-dana tidak dapat diapai hanya dengan menghapuskan hiasan-hiasan luarnya. Ia memerlukan suatu pandangan yang hati-hati terhadap keseluruhan program pengeluaran sesuai dengan ajaran-ajaran

Islam memusatkan perhatian bukan saja pada berapa jumlah yang harus dikeluarkan, tetapi juga bagaimana hal itu akan dibelanjakan. Kalau hal ini tidak dilakukan, suatu pemerintah muslim yang tidak bertanggung jawab, akan menemukan sumber-sumber dayanya kepada pasar tertutup sehingga akan melakukakan pinjaman secara semena-mena dari bank sentral dan hal ini akan menyebabkan kehancuran perekonomian di samping menggalang realisasi pemenuhan sasaran Islam. Sesudah semua pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir dieliminasi, neraca pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian (a) pengeluaran rutin, (b) pengeluaran proyek, dan (c) pengeluaran darurat. Semua pengeluaran pemerintah rutin termasuk biaya pada proyek yang tidak disetujui bagi persiapan bagi hasil, dapat dibiayai oleh penerimaan dari pajak seperti yang dijelaskan tadi. Ketiadaan pembiayaan lewat utang bagi tujuan ini harus menjadi rahmat tersembunyi dan membantu memperkenalkan disiplin dalam pengeluaran pemerintah, yang realisasinya digagalkan oleh kemudahan memperoleh pembiayaan berbasis bunga. Dalam proyek-proyek yang memiliki biaya sangat tinggi, pembengkakan harus dihindari seperti yang sudah disebutkan di depan melalui penentuan waktu yang tepat dan memasang semua proyek dalam suatu rencana perspektif dan menggunakan leasing atau sewa beli (hire-purchase) selama mungkin. Jika perlu bagi kemaslahatan umum proyek-proyek yang disetujui lewat pembiayaan penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah, tetapi pembiayaan harus dicapai oleh penjualan saham kepada lembaga-lembaga financial dan publik. Suatu penentuan harga yang berorientasi secara komersial, harus diadopsi tanpa dibarengi dengan subsidi umum. Semua subsidi yang diperlukan bagi orang-orang miskin atau kelas menengah yang rendah harus dipersiapkan dari penerimaan pajak donasi, atau qardhul hasan. Pembiayaan lewat penyertaan modal dan penentuan harga komersial harus dapat menghapuskan beberapa produk yang kurang diperlukan dan tidak produktif yang kadang-kadang pemerintah melakukannya untuk memenuhi kepentingan *vested*

interest. Hal ini tentu saja memerlukan penyeimbangan sosial antara melayani publik dan produksi swasta sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Semua pembiayaan darurat seperti pembiayaan untuk peperangan, yang tidak dapat dibiayai oleh kedua cara diatas, harus dibiayai dengan pinjaman wajib seperti yang harus dibahas. Peperangan berarti pengorbanan dan pengorbanan yang dilibatkan pada orang-orang kaya hanyalah bunga yang ditiadakan bagi mereka pada pinjaman tersebut. Peperangan yang tidak diinginkan oleh rakyat dan mereka tidak bersedia untuk melakukan pengorbanan yang tidak berarti harus ditiadakan. Walaupun demikian, pemerintah dapat dibatasi untuk meminjamkan bagi pembiayaan delisit yang tidak dapat dihindarkan dan persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkannya melakukan hal demikian dalam suatu batasan tertentu, melalui pinjaman dari bank sentral dalam kerangka non inflasioner, seperti yang telah disebutkan dan sebagian namun juga harus dibahas dan bank-bank komersional seperti seperti yang juga telah dibahas.

b. Penciptaan kredit bank komersial¹⁴

Deposit bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagian kemudahan untuk analisis deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, “deposito primer” yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito dtbank sentral). *Kedua*, “deposito derivative” yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersional dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Deposito derivative demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini persis seperti devisa pemerintah memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam

¹⁴ Umer Chapra, Op.cit, hal 140

output ekspansi dalam deposito derivative harus diatur dalam pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapuskan efek yang memmbulkan ketidakstabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang, dan secara substansial mengurangi amplitude fluktuasi ekonomi

c. Surplus Neraca Pembayaran¹⁵

Hanya sebagian kecil negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran sedangkan sebagian besar dan mereka mengalami devist. Mereka yang mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sektor swasta dan tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakan secara domestik. sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai. Jika dalam suatu negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dan adanya surplus neraca pembayaran

Di negara-negara yang mengalami defisit. sumber utama defisit berasal dan ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui devisit transaksi berjalan dan kebocoran modal "bawah tanah". Hal ini tidak dapat dihapuskan tanpa reformasi sosio ekonomi pada tingkatan yang tebih dalam dan Kebijakan fiskal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seperti yang telah dan akan dibahas. Mekanisme kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang

¹⁵ *Ibid*, hal 140

benar-benar riil dan mencapai sasaran- sasaran sosio-ekonomi masyarakat Islam lainnya. Mekanisme disini antara lain :

1) Target pertumbuhan dalam M dan M_0 ¹⁶

Setiap tahun. Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang yang d'inginkan (M) sesuai dengan ekonomi yang diinginkan, tetapi yang berkesinambungan dan stabilitas mata uang. Target pertumbuhan dalam M ini harus dilihat ulang setiap kuartai atau kapan saja bila diinginkan dengan melihat kinerja perekonomian dan trend variabel-variabel penting lainnya. Hal ini disebabkan karena target moneter menganggap bahwa kecepatan pendapatan uang (*income velocity of money*) dapat diprediksi dengan tepat selama periode tersebut. Sementara itu, seperti yang telah disebutkan terdahulu, hal ini dapat diharapkan lebih tepat dalam suatu perekonomian Islam sesudah penghapusan bunga dan implementasi reformasi yang disarankan. Walaupun begitu, ia akan diperlukan untuk menjaga target agar tetap terkontrol. Target-target ini jangan terlalu sering diubah kecuali terdapat gejolak-gejolak ekonomi baik domestik maupun eksternal. Mengingat telah diakui bahwa pertumbuhan dalam M_0 atau uang berdaya tinggi (*high powered money*) yang didefinisikan sebagai mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, bank sentral harus mengatur ketersediaan dan pertumbuhan M_0 . Tentu saja, hal ini menuntut suatu kebijakan fiskal yang berorientasi kepada sasaran dan pengaturan yang tepat terhadap akses lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit dan bank sentral. Seperti yang sudah disebutkan di depan, suatu kebijakan fiskal yang baik perlu bagi semua negara untuk memenuhi target-target moneter. Akan tetapi, nyaris tidak dapat dihindarkan di negara-negara muslim dimana peran kebijakan moneter secara alami terbatas karena kurangnya pasar uang yang terorganisasi dengan baik. Karena penciptaan M_0 terjadi karena hak khusus yang dinikmati oleh bank sentral untuk menciptakan uang yang memang merupakan hak prerogatifnya,

¹⁶Umer Chapra, Po.cit, hal 141

sumber-sumber daya yang dapat diturunkan dan kekuatan ini harus dimanfaatkan hanya untuk memenuhi sasaran-sasaran masyarakat Islam yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Mereka harus dipergunakan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu merealisasikan ide-ide umat yang merupakan satu saudara, yang tidak akan terpisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Untuk merealisasikan tujuan di atas bank sentral harus membuat total M_0 , yang diciptakannya tersedia, sebagian bagi pemerintah dan sebagian bagi bank-bank komersial dan lembaga keuangan khusus. Proporsi M_0 , yang dialihkan penggunaannya oleh bank sentral bagi masing-masing lembaga ini harus ditentukan oleh kondisi perekonomian sasaran-sasaran ekonomi Islam dan keinginan kebijakan moneter. Sebagian M_0 diberikan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek kepentingan sosialnya termasuk penyediaan perumahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi yang miskin. Sebagian M_0 yang dibenkan kepada bank komersial, yang pada umumnya dalam bentuk pinjaman *mudharabah* dan bukan mengandung diskonto, harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai alat control kuantitatif dan kualitatif untuk mengontrol kredit. Ia harus memadai untuk memungkinkan bank-bank komersial membiayai aktivitas pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam sektor swasta tanpa menimbulkan kepanasan inflasioner. Dalam merasionalkan kredit di antara bank-bank komersional bank sentral harus selalu memonitor promosi kredit bank komersial untuk tujuan-tujuan dan sektor-sektor tertentu sesuai dengan keseturuhan sasaran perekonomian Islam. Sebagian laba yang diraih oleh bank sentral dari pinjaman ini harus dibenkan kepada pemerintah untuk dipergunakan membiayai proyek-proyek yang ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, dan sebagian disimpan oleh bank sentral untuk memenuhi pengeluarannya.

2) Saham Public Terhadap Deposito Untuk (Uang Giral)¹⁷

Sebagian uang giral bank komersial. sampai ukuran tertentu, misalnya 25 persen, harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkannya membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial di mana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan. Ini merupakan tambahan bagi jumlah yang dilimpahkan kepada pemerintah oleh bank sentral untuk melakukan ekspansi basis moneter (M_0) Alasan di balik usulan ini, seperti yang sudah disebutkan didepan adalah pertama. bank-bank komersial bertmdaK sebagai agen. kedua bank-bank yang tidak membayar pengembalian apa pun pada uang giral. dan ketiga publuk bdak menanggung resiko apa pun pada deposit ini sekiranya ini sepenuhnya dijammm Karena itu. adalah adit untuk mengharapkan bahwa sumber-sumber daya masyarakat yang monganggur dan dimobilisasikan dipergunakan untuk kemaslahatan umat Salah satu cara yang penting dalam menggunakannya untuk kemaslahatan umum adalah dengan mengalihkan sebagian deposito untuk yang dimobilisasi kepada perbendaharaan publiik untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosiai tanpa memaksakan be ban pada pundak publiik lewat pajak yang dikumpulkan untuk tujuan Ini oleh perbendaharaan Seperti yang telah ditunjukkan didepan, pemerintah hams memikul Deban sebagian ongkos total memobilisasi deposito untuk. Memberikan peiayanan kepada para deponan yang berkaitan dengan deposit ini dan membiayai skema asuransi deposit

Periu dltambahkan dislni bahwa rasio 25 persen yang disebutkan di depan adalah sebagai batas maksimal datam keadaan normal Barangkali hal itu dapat diiampai dalam keadaan-keadaan yang eksepsional. yaitu ketika terjadi keadaan darurat nasional atau ketika pemerintah harus berperan sebagai lokomotif dalam sebuah perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Datam sebuah resesi, bank-bank cenderung memiliki likuiditas berlebihan dan penggunaan yang lebih besar dalam menanggung ongkos memobilisasi dan mencicil deposito ini. Dalam situasi

¹⁷Umer Chapra, *Op.cit*, hal 142

normal, rasio yang dipakai sebagai suatu mekanisme untuk menyalurkan sebagian laba ekstra bank pada saat perekonomian *boom* dan mengurangi likuiditas sektor swasta.

3) Cadangan Wajib Resmi¹⁸

Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu, misalnya 10-20%, dan deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Bank Sentral harus membayar ongkos memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersial, persis seperti pemerintah menanggung ongkos memobilisasi 25 persen deposito untuk yang dialihkan kepada pemerintah. Cadangan resmi ini dapat divariasikan oleh bank sentral dengan anjuran kebijakan moneter. Alasan di balik cadangan wajib hanya diberlakukan kepada deposito unjuk, seperti yang telah disebutkan di depan adalah sifat ekuitas kepada deposito *mudharabah* dalam perekonomian Islam. Mengingat bentuk ekuitas lain dikecualikan dari cadangan wajib resmi, tak ada alasan untuk mewajibkan deposito *mudharabah* dengan ketentuan semacam ini. Hal ini tidak harus berdampak buruk pada kontrol sirkulasi uang yang harus direalisasikan melalui kontrol uang berdaya tinggi pada sumbernya seperti yang sudah disebutkan di depan.

Dapat dikatakan bahwa cadangan wajib resmi juga akan membantu menjamin keamanan deposito dan likuiditas yang memadai bagi system perbankan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui suatu kewajiban modal yang lebih tinggi, adanya aturan-aturan yang baik dan dijalankan dengan tepat, termasuk rasio likuiditas yang sesuai, dipekuat dengan system pengujian bank yang efektif. Hal ini lebih dipilih untuk menahan sebagian deposito *mudharabah* melalui dana kewajiban cadangan yang cenderung membuat kurang mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk ekuitas lainnya dengan meletakkan bank-bank komersial kepada istiusi-intuisi finansial lainnya dengan meletakkan bank komersial pada suatu posisi

¹⁸ *Ibid*, hal 143

yang relatif kurang menguntungkan. Dapat juga dikatakan bahwa pada praktiknya, perbedaan antara giro dan tabungan atau deposito berjangka menjadi kabur, terutama jika cek dapat ditulis untuk deposito berjangka. Kemungkinan seperti ini secara substansial dapat dikurangi dalam sistem Islam karena sifat ekuitas deposito *mudharabah* dan keterlibatan dalam resiko yang diperlukan. Walaupun demikian, bank-bank Islam mungkin bersedia, seperti halnya dengan mitra mereka bank-bank konvensional, untuk mencairkan cek yang ditulis untuk deposito tabungan atau membolehkan penarikan deposito *mudharabah* sebelum kadaluarsa (jatuh tempo) dengan atau tanpa pembentahan. Untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, bank-bank harus mempertahankan sejumlah kecil deposito demikian sebagai kas dalam saku, menyusul praktik perbankan konvensional. Jika mereka dituntut juga untuk mempertahankan cadangan dengan bank sentral untuk deposito ini, cadangan-cadangan beku dan tidak tersedia bagi bank untuk memperoleh penarikan.

Dana-dana yang diterima oleh bank sentral melalui kewajiban cadangan resmi dapat dipergunakan untuk memungkinkannya dengan dua tujuan. Sebagian dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya melayani peminjaman sebagai *leader of last resort*. Seperti yang telah disebutkan di depan bank-bank komersial Islam, dengan sumber-sumber daya yang ada padanya dalam kerangka bagi hasil mungkin akan mendapatkan tugas memprediksi *cashflow*-nya yang lebih sulit daripada perbankan konvensional. Karena itu, disamping persiapan-persiapan yang sudah disarankan tadi, mungkin ada peluang ketika memerlukan bantuan dan bank sentral sebagai *leader of last resort*. Bank sentral dapat menciptakan suatu pengumpulan umum untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui suatu pengumpulan umum untuk meningkatkan proporsi tertentu dan total cadangan khusus atau diversifikasi proporsi tertentu dan total cadangan resmi bank komersial. Fungsi utama pengumpulan ini adalah untuk memungkinkan bank sentral berfungsi sebagai *leader of last resort* dalam batas-batas yang disepakati untuk meng-

hadirkan penggunaan fasilitas ini secara tidak benar. Dalam suatu krisis, bank sentral dapat melampaui batasan-batasan ini. seperti yang telah disarankan. dengan hukuman-hukuman yang tepat dan peringatan-peringatan serta suatu program korektif yang sesuai. Sisa dana yang ditingkatkan melalui cadangan-cadangan wajib dapat diinvestasikan oleh bank sentral Islam, seperti yang dilakukan oleh bank sentral kapitalis. Karena obligasi pemerintah yang mengandung bunga tidak tersedia, bank sentral Islam menapun juga. Ia harus menahan diri dan melakukan Investasi untuk mengelola kebijakan moneter.

4) Pembatas Kredit¹⁹

Alat-alat yang disebutkan diatas akan mempermudah bank sentral dalam melakukan ekspansi yang diinginkan pada uang berdaya tinggi, ekspansi kredit masih dapat melebihi batas yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena pertama, tidak mungkin menentukan secara akurat kucuran dana kepada system perbankan, selain yang telah tersedia oleh pinjaman *mudharabah* bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih kurang berkembang, seperti yang ada dinegara-negara muslim, *kedua*, hubungan antara cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak akurat benar. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai faktor internal dan eksternal perekonomian. Karena itu, perlu menempatkan batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Dalam alokasi batasan diantara bank-bank komersial individual perlu melakukan kehati-hatian sehingga terjamin terwujudnya kompensasi yang sehat di antara bank-bank.

5) Alokasi Kredit yang Berorientasi Kepada Nilai²⁰

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki oleh publik, kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum

¹⁹ Ibid, hal 145

²⁰ Ibid, hal 145

Kriteria untuk alokasi ini, seperti dalam kasus sumber-sumber daya yang disediakan Allah pada umumnya, harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan kemudian memaksimalkan keuntungan privat.

Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa

- a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat dan
- b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

Cara yang tepat untuk mencapai tujuan pertama adalah dengan mempersiapkan suatu perencanaan yang berorientasi kepada nilai dan kemudian menyambungkan perencanaan ini dengan sistem perbankan konvensional untuk implementasi yang efisien. Pendekatannya harus: *pertama*, menjelaskan kepada bank-bank komersial tentang sektor dan area mana dalam ekonomi yang harus didorong lewat pembiayaan bank-bank komersial dan apa sasaran-sasaran yang harus direalisasikan; *kedua*, mengadopsi dan tindakan-tindakan institusional untuk tujuan ini seperti yang dibahas dibawah ini. Tak ada upaya yang dilakukan untuk mengangkat bank-bank komersial dengan suatu jaringan kontrol. Operasi kekuatan-kekuatan pasar telah diakui oleh Islam namun dalam kerangka nilainya. Sekiranya perencanaan tersebut menentukan kerangka nilai dan tindakan-tindakan institusional yang diperlukan itu dilakukan, tidak perlu memiliki kontrol-kontrol yang kaku atau memiliki intervensi yang berlebihan.

Alasan yang secara norma diberikan oleh bank-bank komersial untuk memberikan sebagian kecil dana (kredit) kepada pengusaha kecil dan menengah adalah resiko yang lebih besar yang dilibatkan dalam pembiayaan semacam ini. Karena itu, usaha kecil menghadapi dua kesulitan: tidak mampu mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau mendapatkannya dengan persyaratan yang mencekik (dalam bentuk ongkos dan kolateral) dibandingkan dengan mitra usaha besar mereka.

Dengan demikian, pertumbuhan dan kelangsungan hidup usaha kecil tergantung meskipun mereka memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan memasok output dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, resiko dan pembiayaan semacam ini perlu dikurangi. Resiko dapat dikurangi dengan memperkenalkan suatu skema jaminan pinjaman yang dijamin sebagian oleh pemerintah dan sebagian oleh bank komersial. Dalam hal bank-bank Islam, *schme* jaminan tidak dapat menjamin pengembalian utang dengan bunga seperti dalam bank-bank konvensional. Betapapun juga, skema itu harus dapat menahan bank-bank untuk meminta jaminan kolateral dalam usaha kecil yang surat-surat pengesahan umumnya telah terdaftar atau dtberl sertifikat oleh skema jaminan. *Scheme* akan melakukan ini sesudah dilakukan investigasi yang tepat terhadap usaha yang dimaksud la juga akan melakukan training bisnis untuk untuk mempertahankan rekening yang diinginkan dan dipersiapkan agar selalu dapat diaudit kapan saja saat diperlukan. Dengan demikian, sejumlah besar btsnis skaia kecil akan dapat memperoleh pembiayaan dari bank tanpa harus menyerahkan koleteral yang diperlukan untuk resiko nonkomersial yang akan ditutup untuk menlngkatkan ketersediaan dana bagi usaha kecil dan menengah. Pada saat terjadinya kegagalan pasar atau kerugian, bank tentu akan ikut berbagi konsekuensi dengan bisnis, sesuai dengan proporsi pembiayaan yang diberikan.

Biaya tambahan yang ditetapkan oleh bank-bank komersial dalam melakukan evafuasi dan pembiayaan kepada usaha kecil harus diganti sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah, bergantung pada sifat kasus dan tujuan-tujuan yang diberikan. Ongkos yang harus ditanggung oleh pemerintah terjadi karena *scheme* di atas dijustifikasikan dengan mengikuti kepentingan yang lebih besar dan tujuan-tujuan ekonomi Islam. Ongkos sebagian atau seluruhnya diganti oleh biaya gradual yang dikumpulkan oleh pemerintah dan keuntungan yang diraup dan pembiayaan demikian oleh pemerintah dan usaha kecil.

Teknik di atas harus diperkuat dengan diperkuat dengan penggunaan control kualitatif dan selektif yang lebih efektif dan luas. Pembiayaan *mudharahah* bank sentral tidak dapat diberikan kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu. Di samping itu, bank sentral dapat menerima resiko bagi hasil yang lebih rendah jika hal ini dipandang perlu untuk merealisasikan tujuan mendistribusikan pembiayaan bank komersial bagi sejumlah besar usaha produksi barang dan jasa yang diperlukan.

6) Teknik yang lain²¹

Senjata kualitatif dan kuantitatif diatas dapat dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan. Termasuk diantaranya adalah "rayuan moral" (*moral Suasion*) yang akan menempati kedudukan penting dalam perbankan sentral dalam islam. Bank sentral melalui kontrak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran kepada mereka tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dewan Ideologi Islam Pakistan dengan beberapa ulama telah menyarankan instrument untuk melakukan variasi dalam rasio bagi hasil bagi pembiayaan yang disediakan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial dan untuk menentukan saham para deposan dan pengusaha sehubungan dengan deposito *mudharabah* yang diterima dan pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank komersial. Sementara itu, indikasi suatu range dan rasio bagi hasil yang masuk akal antara para deposan, bank dan pengusaha dapat berfungsi sebagai suatu pedoman, namun hal itu tidak diperlukan bagi bank sentral untuk meregulasi rasio-rasio ini, seperti yang sudah disarankan oleh Dewan. Hal ini disebabkan karena rasio pada dasarnya akan bergantung pada profitabilitas, yang bergantung pada sejumlah faktor yang berbeda dari sector kesektor yang sama. Karena itu, menentukan suatu rasio yang

²¹ *Ibid*, hal 147

seragam tidak dapat diterapkan sementara menentukan suatu *band* tidak juga bermanfaat, jika *band* itu luas.

Menurut Dewan, sekalipun jika rasio tersebut diatur oleh bank sentral untuk “mereduksi kompetensi yang tidak sehat di antara lembaga financial”, juga tidak baik untuk melakukan variasi rasio ini terlalu sering sebagai suatu instrument kebijakan moneter. Karena merupakan suatu lembaga nirlaba, bank sentral itu sendiri tidak ada persoalan mengambil saham yang lebih rendah dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran tertentu yang secara nasional dituntut, tetapi mengapa para deposan, bank-bank komersial atau pengusaha dipaksa harus menerima kurang dari saham keuntungan yang adil dan masuk akal? Lebih-lebih, jika terjadi kerugian syarial menentukan bahwa kerugian-kerugian harus ditanggung menurut rasio pembiayaan yang diberikan, dengan mengabaikan apakah pembiayaan itu berasal dari bank sentral atau dari sector swasta. Sementara itu, bank-bank komersial akan senang memperoleh rasio keuntungan yang lebih tinggi, sekiranya rasio itu diwajibkan oleh bank sentral. Mengapa para deposan atau kalangan bisnis yang diberi kredit bersedia menerima rasio yang lebih rendah juga jika hal itu diluar proporsi rasio hasil mereka? Disamping itu, apabila rasio telah ditandatangani dalam kontrak yang merupakan hal pokok menurut syariat, rasio tidak dapat diubah sebelum masa kontrak berakhir. Untuk mengubahnya sekalipun bagi suatu kontrak baru, juga tidak diperlukan karena ini akan menimbulkan ketidakadilan.

Karena itu, lebih baik meninggalkan penentuan rasio dengan melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai persepsi kondisi pasar dan profitabilitas. Bagaimanapun juga, bank sentral atau pemerintah dapat melakukan intervensi bila dirasa perlu untuk menjamin keadilan dan menghapus kompetensi yang tidak sehat. Tiga instrument yang dapat dipakai oleh bank sentral untuk menciptakan suatu dampak yang lebih langsung pada cadangan bank-bank komersial dan pada suku bunga diskonto dan operasi pasar adalah uang giral pemerin-

tah yang ada pada bank-bank komersial persetujuan tukar mata uang asing oleh bank sentral dengan bank-bank komersial dan “pengumpulan umum”. Sekiranya cadangan bank komersial ingin ditingkatkan atau dikurangi, bank sentral bisa—jika diberi kekuasaan untuk berbuat demikian—menggeser uang giral pemerintah ke atau bank komersial. Dengan demikian, akan mempengaruhi cadangan mereka secara langsung

Efek yang sama juga dapat dicapai dengan penggunaan, dalam suatu batas tertentu, perjanjian pertukaran mata uang asing (dimungkinkan di negara-negara yang tidak memiliki kontrol devisa). Bank sentral dapat menukar mata uang lokal dengan valuta asing ketika bank merasa tertekan, dengan berusaha bahwa bank tersebut akan membeli kembali valuta dan bank sentral setelah melalui suatu periode tertentu yang berlaku, tentu tunduk kepada sebaran. Sebaran antara laju pembelian dan pembelian kembali dapat divariasikan oleh bank sentral untuk menghukum atau meringankan bank-bank pada saat menghadapi persoalan likuiditas.

Instrument ketiga yang juga dapat dipakai secara efektif untuk tujuan-tujuan kebijakan moneter oleh bank sentral yang mirip pemberian diskonto kembali dalam bank-bank sentral konvensional adalah “penghimpun umum”, seperti yang sudah disebutkan. Ini seperti perjanjian kooperatif antara bank-bank dalam naungan bank sentral untuk menyediakan keringanan kepada bank-bank pada saat menghadapi persoalan likuiditas.

Instrument lainnya juga telah disarankan dalam literature perbankan Islam tiga diantaranya adalah²²

- a. membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar;
- b. rasio pembenan kembali pembiayaan;
- c. rasio pemberian pinjaman.

Keunggulan masing-masing instrument akan dibahas dibawah Ini.

²² *Ibid*, hal 149

Instrument berbasis penyertaan modal tidak dapat dipergunakan untuk operasi pasar terbuka karena sejumlah alasan. *Pertama*, ia tidak diinginkan oleh bank sentral untuk membeli dan menjual saham-saham dan perusahaan sektor swasta. Semua yang dapat ia lakukan adalah menjual dan membeli saham perusahaan sektor pemerintah. *Kedua*, instrument berbasis penyertaan modal tidak dapat memiliki kedalaman yang diperlukan di mana sekuritas pemerintah cenderung memilikinya, sedangkan operasi pasar terbuka dalam bentuk instrument semacam ini akan mempengaruhi harga-harga secara signifikan kecuali jika dipergunakan dalam keadaan yang sangat terbatas, yang tidak memadai untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. *Ketiga*, variasi dalam harga pada instrument berbasis ekuitas yang dilakukan dalam operasi pasar terbuka oleh bank sentral, tidak dengan sendirinya bermanfaat atau menghukum para pemegang saham perusahaan yang saham-sahamnya dipergunakan untuk tujuan ini. Hal demikian tidak diinginkan karena tujuan utama operasi adalah untuk meningkatkan atau mengurangi likuiditas sektor swasta dan mengantarkan kesenjangan dalam pasar saham.

Rasio peminjaman telah didefinisikan oleh Dr. Siddiq sebagai presentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial sebagai *Qardhul hasan* bagi nasabah mereka. Rasio pemberian pembiayaan kembali telah didefinisikan olehnya yaitu suatu pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial sebagai bagian dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh mereka. Telah diusulkan bahwa bank-bank komersial harus dituntut untuk memberikan sebagian tertentu dari mata uang giralnya kepada pemerintah sebagai *qardhul hasan*. Bank-bank komersial harus mampu mendapatkan pinjaman sertifikat *qardhul hasan* atas kehendak bank sentral, bergantung pada sejauh mana kebutuhan untuk meringankan kekurangan likuiditas temporer bank komersial dan menyediakan kepada mereka uang berdaya tinggi ketika dipandang perlu. Akan tetapi, hal itu bukanlah tanggung jawab bank komersial untuk

memberikan *qurdhul hasan* kepada para nasabah mereka disektor swasta kecuali sebatas kewenangannya. Karena itu tidak perlu bagi bank sentral untuk menentukan suatu rasio peminjaman atau pembiayaan kembali untuk tujuan-tujuan ini.

Strategi yang diusulkan diatas tidak mengklaim bahwa permintaan swasta terhadap uang dapat diperkirakan secara jitu oleh bank sentral. Semua yang dikandung oleh strategi tersebut adalah bahwa mengingat kapasitas perekonomian untuk mcnghasilkan laju pertumbuhan rill tertentu dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah untuk tidak memperoteh defisit fiskalnya melebihi batas yang diinginkan oleh target-target moneter bank sentral dapat (dalam suatu batas kesalahan) melakukan estimasi uang berdaya tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan target laju pertumbuhan pada uang berdaya tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan target laju pertumbuhan pada uang beredar dan jumlah kredit *mudharabah* yang dapat disediakan bagi bank komersial selama periode tertentu. Oleh karena proyeksi itu tidak selalu benar karena adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan ramalan atau karena terjadi perubahan-perubahan variabel ekonomi yang penting target harus selalu dilihat ulang secara periodik dan direvisi kapan saja bila dirasa perlu. Sementara itu, pada jangka panjang terdapat pasar uang yang belum benar-benar terorganisasi. Hal ini disebabkan karena mata uang (*currency*) yang beredar merupakan bagian terbesar dan basis moneter dan dalam suatu periode pendek (minggu, bulan, kuartal) rasio perubahan dalam mata uang terhadap perubahan dalam uang yang beredar mungkin tidak stabil.

Untuk menggantikan efek ketidakstabilan jangka pendek dalam multiplier (penggandaan) uang bank sentral harus selalu waspada dan menghindari ketegangan liquiditas karena hal ini akan merusak iklim bisnis. Dalam system kapitalis, pengetatan ini menyebabkan melonjaknya suku bunga, penjualan jatuh, dan kebangkrutan manakala bank-bank tidak mau *me-roll over* kredit sedangkan dalam sistem Islam, mereka cenderung menyebabkan penjualan jatuh dan kerugian baik kepada bank maupun

pengusaha. Karena itu bank sentral harus melakukan segalanya untuk mengurangi pengetatan likuiditas dalam rangka disiplin yang telah dtsarankan. Ia harus dapat merealisasikan ini lewat penggunaan sebagian atau seluruh instrument kebijakan moneter seperti yang telah disarankan termasuk “penghimpunan umum”, kredit *mudharabah* bank sentral kepada bank-bank komersial, rasio pinjaman dan pembiayaan kembali terhadap uang giral pemerintah, rasio cadangan wajib resmi pembatasan tertinggi kredit dan manipulasi bank sentral terhadap uang giral pemerintah yang ada pada bank-bank komersial diperkuat dengan instrument lainnya, seperti rasio likuiditas dan perjanjian nilai tukar.

Barang kali perlu mempertimbangkan hukum Freidaman yang lebih sederhana yaitu dengan mengadopsi laju pertumbuhan tahunan yang tetap dalam M untuk mempertahankan pertumbuhan sekuler dalam output dan perubahan kecepatan untuk menghindari seringnya melakukan “tambal sulam”. Bagaimanapun juga, jika formula semacam itu diadopsi harus tanpa komitmen pasar bebas yang berlebihan ala friedman. Peran negara (pemerintah) uang positif dan kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perekonomian Islam.

5. Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi dalam sistem moneter Islami antara lain:²³

a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan lembaga yang dipercaya dalam mengelola dalam persediaan uang dengan melibatkan masalah *Fiat money* seperti halnya pengawasan Bank Komersiai. Bank Sentral akan menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Banyak uang yang diharapkan capat dilakukan satu dan dua cara yang ada. Dalam skema satu, Bank Sentral akan

²³ Muhammad, *Op.cit* , hal 13 bersumber dair Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan *Op.cit*, hal 19-20

membukakan rekening investasi di bank-bank anggotanya. Pada skema lainnya, Bank Sentral akan membagi M_0 secara menandai bagi pemerintah seperti kredit bebas bunga dan menempatkan ke bank komersial maupun lembaga kredit tertentu sebagai deposito *Mudharabah*.

b. Bank Anggota

Bank Anggota dalam sistem Islam adalah bukan bank komersial tradisional (konvensional). Selanjutnya untuk melengkapi jasa perbankan secara teratur mereka juga akan melakukan investasi langsung. Mungkin dengan menggunakan istilah khusus untuk kelembagaan yang demikian disebut dengan “*bank bisnis / business bank*”. Jasa perbankan yang ada adalah seperti yang dilakukan oleh bank komersial seperti *rekening cheque, valuta asing, letter of kredit* dan sebagainya. Produk-produk barunya dapat dilakukan dengan menekankan pada aktivitas investasi. Berbagai macam, antara lain :

- a. Investasi langsung
- b. Profit Sharing Ventures
- c. Aktivitas Leasing
- d. Central Deposit Certificate (CDC)

c. Perbendaraan (Treasury)

Dalam hal ini memiliki tiga cabang yaitu cabang distribusi, alokasi dan cabang *market correction*. Cabang distribusi bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan seperti halnya distribusi zakat. Cabang alokasi akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang kebutuhan pokok hidup masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Cabang *market correction* akan menangani masalah monopoli, eksternalitas dan ketidakaturan pasar.

Tiga lembaga lainnya yang dipertukan dalam Ekonomi Islam antara lain :²⁴

²⁴ Muhammad, *Op.cit* , hal 14 bersumber dari Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan *Op.cit*, hal 22-23

d. Lembaga pinjaman konsumen / masyarakat (*Customer Loan Instituslon*)

Adanya pelarangan bunga dalam sistem Islami, rnaka persediaan pinjaman kepada masyarakat (pinjaman konsumsi) akan ditangani oleh lembaga khusus. Beberapa orang berkeinginan bahwa bank anggota dapat melakukan fungsi tersebut dengan membuat aturan bahwa tiap-tiap bank akan menyediakan memberikan presentasi yang kecil pada pembiayaan pada bebas bunga. Sementara itu yang lain mempercayai bahwa ini tidak mungkin terjadi dikarenakan hal itu akan mempengaruhi keuntungan bank dan ketika bank menggunakan pembiayaan *Mudharabah* dan juga akan mempengaruhi aliran dana bank yang akan mendapatkan pembiayaan atau kredit. Akan tetapi orang-orang yang membutuhkan kredit ini dalam banyak kasus adalah orang yang banyak memiliki sedikit hubungan bisniss dengan bank. Oleh karena itu, hal ini akan memungkinkan membuat lembaga khusus untuk kredit yang demikian itu dana yang dibenkan oleh lembaga tersebut dapat disumbangkan oleh pemerintah dari dana zakat

e. Pasar Modal (*Stock Market*)

Adanya lembaga semacam ini tidaklah unik dalam sistem Islam tetapi lembaga ini terialu penting jika dilupakan. Jika *Mudharabah* mcnjadi model investasi yang sangat dominan maka efisiensi dan stabilitas pasar saham akan lebih penting. Pasar saham dalam kapitalitas menurut Iqbal dan Khan dikatakan bahwa keadaan ini tidak dapat diterima (*Aceptable*) dalam ekonomi Islam dimana equity financing sangat dianjurkan Hal ini dlperlukan untuk menjamin bahwa pengusaha dapat meningkatkan kecukupan modal dan equitasnya tanpa kesulitan dan investor dapat menjual sahamnya dan melakukan share dimana mereka membutuhkan likuiditas. Larangan riba dapat dijadikan alat untuk menanggulangi terjadinya spekulasi, sehingga dapat memperkecil terjadinya fluktuasi harga saham.

f. Kerja Sama Investasi (*Investment Cooperation*)

Disamping *Mudharabah*, syirkah akan menjadi model investasi yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam dunia modern, tipe pendekatan personal dalam syirkah akan memiliki cakupan yang terbatas. Oleh karena itu, hal ini akan diperlukan untuk meningkatkan kerja sama investasi yang di dalainnya orang dapat berbagi baik dalam modal maupun manajemen.

C. TEORI PERMINTAAN UANG DALAM ISLAM

Dalam bahasa ekonomi, permintaan uang dan penawaran uang tidak pernah lepas. Hal ini merupakan dua alternate yang sangat penting baik yang berkaitan dengan barang maupun uang. Karena itu kenyataannya menunjukkan bahwa permintaan uang sama dengan permintaan barang yang dapat ditawarkan hal ini dapal disinggung bahwa uang sangat diperlukan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Tidak ada seorangpun yang memerlukan uang untuk mendapatkan uang kembali lantaran uang tersebut tidak bcrmanfaat. Oteh karena itu permintaan uang didasarkan pada permintaan barang yang tidak terbeli maka terkadang barang menjadi persediaan yang menumpuk. Hal Ini terjadi, jika dasar penawaran berbeda dengan dasar permintaan. Harga terjadi karena ada permintaan dan penawaran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permintaan barang dengan permintaan uang adalah satu dan sama.

Dalam Islam hanya dikenal dua motif permintaan akan uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Karena Islam melarang tindakan spekulasi, Instrumen moneter tidak menggunakan vanabel yang mengarah kepada motif spekulasi. Penggunaan instrument pengganti suku bunga dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang penting dan mendesak serta mendorong investasi yang produktif dan efisien. Terkait dengan permintaan uang dan penawaran uang dalam Ekonomi Islam antara tain :

1. Permintaan Akan Uang menurut Mazhab Iqtishaduna²⁵

Permintaan akan uang ditujukan hanya untuk memenuhi tujuan pokok, yaitu untuk transaksi atau berjaga-jaga atau untuk investasi.

$$Md = Md_{trans} + Md_{per}$$

Permintaan akan uang untuk transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan akan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga meningkat. Fungsi permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi juga permintaan akan uang untuk investasi dan tabungan) di tentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Dalam perniagaan komoditi secara kredit, **Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib** membolehkan pembayaran dengan harga lebih tinggi dari pada harga tunai. P_t sebagai besar harga yang akan dibayar kredit lebih besar daripada harga tunai P_o . P_t / P_o adalah rasio harga antara harga bayar tangguh (*uture price*) dengan harga bayar kini (*present price*). Apabila harga bayar tangguh meningkat, permintaan akan uang tunai ini berkurang karena orang lebih senang memegang barang yang pada waktu mendatang harganya meningkat. Pada waktu Rasulullah, permintaan akan uang dilandasi hanya oleh dua motif yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga.

$$Md = Md_{tr} + Md_{pr} : \text{apabila } Md_{pr} \downarrow \text{ maka } Md_{tr} \uparrow$$

Meningkatnya permintaan akan uang untuk transaksi meningkatkan velositas (peredaran) uang $V \uparrow$ yang selanjutnya mengakibatkan meningkatnya harga bayar tangguh P_t / P_o . Misalnya, seorang pedagang setiap buian mampu menjual 10 buah mangga sedangkan keuntungan setiap mangga 10 dirham, maka dalam satu bulan keuntungannya adalah 100 dirham. Apabila ia menjual mangga yang akan dilunasi pembeli pada bulan depan ia akan mengenakan biaya sebesar 10 kali dan keuntungan setiap

²⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta : IIIT, 2002, hal 150

penjualan. Dengan demikian, harga bayar tangguh bagi penjualan mangga ini adalah 10 kali atau sesuai dengan besarnya volatilitas / banyaknya transaksi yang biasanya terjadi. Setiap fungsi akan uang untuk transaksi berjaga-jaga dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Md trans} = f(Y)$$

$$\text{Md per} = f(Y, P_T/P_o)$$

Dalam formula akan permintaan uang di bawah terlihat bahwa variabel bebas pendapatan (= Y) mempunyai koefisien yang positif dan harga bayar tangguh mempunyai koefisien negative.

$$\text{Md per} = f(Y, P_T/P_o)$$

Dalam grafik digambarkan permintaan akan uang memiliki kemmngan (slope) negatif ke kanan, garis vertikal mewakili nilai P_T / P_o dan jumlah Md berada pada garis horizontal. Pergerakan sepanjang kurva (titik a ke titik b) pada kurva Md I dipengaruhi oleh perubahan-perubahan harga pada P_T / P_o . sedangkan pergeseran kurva dari Md I ke Md 2 diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada variable eksogen seperti peningkatan ekspor atau impor.

2. Permintaan akan uang menurut Mazhab Maintrem²⁶

Seperti mazhab pertama mazhab ini berpendapat permintaan akan uang dalam Islam hanya dikenal untuk berjaga - jaga. Perbedaannya terletak pada perilaku permintaan akan uang untuk berjaga-jaga dan variabel yang mempengaruhinya Landasan filosofis teori dasar permintaan akan uang adalah arahan Islam agar sumber-sumber daya secara dimanfaatkan maksimum dan efisien. Dalam hal ini, *hoarding money* atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan penggunaan uang. Strategi utama Mazhab Mamtrem adalah pengenaan pajak terhadap asset produktif yaog

²⁶ *Ibid*, hal 152 diformulasikan dari Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, Jakarta : Bangkit Daya Insani, 1995

menganggur (*Dues of Idle Cash*) dengan tujuan mengalokasikan sumber dana pada kegiatan usaha produktif. Kebijakan ini berdampak pada pola permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Secara sederhana dapat dianalogikan sebagai berikut : Ahmad yang memiliki kekayaan berupa tanah yang hanya dianggurkan tidak mendapatkan nilai tambah dan kekayaannya agar tanah tersebut memiliki nilai tambah, Ahmad harus mengelola tanah itu secara produktif. Instrumen yang digunakan adalah pajak terhadap tanah yang dianggurkan tersebut artinya Ahmad akan terkena resiko pembebanan pajak apabila tanah miliknya tetap dianggurkan. Secara sistematis, permintaan akan uang untuk mazhab kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M_d = m_d \text{ trans} + M_d \text{ per}$$

$$M_d \text{ trans} = f(Y)$$

$$M_d \text{ per} = f(Y, \mu)$$

Tingkat *Dues of Idle Fund* diwakili oleh nilai semakin tinggi nilai, semakin kecil permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya resiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik. Secara alamiah, dalam kondisi seperti ini orang akan berusaha memperkecil jumlah pajak kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan yang menganggur. Sebaiknya, apabila nilai a relatif rendah, tindakan memegang atau menyimpan uang tunai relatif tidak berisiko. Tinggi rendahnya tingkat resiko menyimpan uang tunai (Ω) dipengaruhi oleh besarnya *Dues of Idle Fund* (μ) dikurangi resiko investasi.

$$\Omega = \mu - \Psi$$

Dalam persamaan berikut, variabel pendapatan (Y) berbanding positif dengan banyaknya permintaan akan uang dan berbanding terbalik dengan nilai pajak yang dikenakan terhadap asset atau kekayaan yang dianggurkan (μ). Peningkatan

velocity of money akan mengurangi permintaan akan uang untuk berjaga-jaga dan sekaligus meningkatkan permintaan akan uang untuk transaksi. Peningkatan jumlah uang yang digunakan untuk transaksi dan investasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Suatu yang penting dalam pengelolaan uang adalah kebijakan pemerintah ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang yaitu dengan memainkan peranan biaya atas uang yang menganggur dan bukan dengan menaikkan dan menurunkan jumlah uang yang beredar.

3. Permintaan akan uang menurut Mazhab Alternatif²⁷

Permintaan akan uang dalam mazhab ini erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai : “ Keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil “. Teori ini kemudian menjembatani pertumbuhan uang di sektor dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah uang tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu, melainkan melalui pemanfaatan uang tersebut secara ekonomis. Artinya nilai uang tidak harus selalu bertambah seiring dengan pertambahan waktu. tetapi penambahan nilai itu tergantung pada usaha yang dilakukan. Secara makro ekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi perubahan dan pertambahan di sektor riil. Konsep ini menjadikan landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor mikro ekonomi. Menurut M. A Choudhury, permintaan akan uang adalah representasi keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, semakin meningkat permintaan akan uang. Variabel yang mempengaruhi permintaan akan uang adalah variabel sosio-ekonomi (X), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (Y), dan informasi obyektif masyarakat akan

²⁷ Ibid, hal 155 diformulasikan dari M.A Choudbury, *Money in Islam and Study in Islamic Politic Economic*, London : Routledge : 1997

kondisi riil perekonomian. Tidak seperti teori exogenous uang dalam literatur konvensional, mazhab alternatif berpendapat permintaan akan uang dan penawaran akan uang dipengaruhi oleh besarnya pembagian keuntungan (*Profit Sharing*) atau tingkat keuntungan yang diharapkan (*Expected Rate of Profit*). Tinggi rendahnya *Expected Rate of Profit* merupakan representasi prospek pertumbuhan aktual ekonomi. *Expected rate of profit* merupakan harapan perolehan keuntungan dan investasi uang di sektor riil. Jika investasi meningkat, permintaan akan uang tunai menurun. Apabila *Expected Rate of Profit* meningkat, penawaran investasi juga akan meningkat. Tingginya penawaran investasi menyebabkan berkurangnya jumlah uang tunai riil masyarakat artinya peningkatan *Expected Rate of Profit* akan meyakinkan orang bahwa pemegangan uang tunai secara bertahap akan menghilangkan kesempatan mendapatkan keuntungan bisnis. Secara sistematis **M. A Choudhury** menformulasikan permintaan akan uang sebagai berikut :

$$M_s = \mu y, p, S, R, X, Y (0) = \sum M_{d_0} (r, y, p, S, X, Y)(0)$$

$$M_s = \sum M_{d_0} = \sum M_{s_0} = \sum \sum M_{d_{b_j}} = M_d$$

$$B = 1, 2, 3, \dots, N$$

$$M_d = f(r, y, p, s, X, Y)(0)$$

Permintaan akan uang sebagai manifestasi aktual kapasitas transaksi sektor riil adalah penjumlahan total permintaan akan uang oleh individu atau lembaga keuangan “ mewakili tingkat keuntungan, y adalah pendapatan riil, p adalah tingkat harga-harga atau inflasi. r_b menentukan rasio *profit sharing* antara shahibul maal dan mudharib dalam bank (b) atau lembaga keuangan (b). S adalah total pengeluaran nasional. R adalah *reserve requirement* yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank-bank umum.

4. Pandangan Definisi Permintaan Uang

Dalam hal motif memegang uang ketiga mazhab ekonomi Islam menggunakan variabel penjelas yang berbeda. Mazhab

Iqtishoduna berpendapat bahwa permintaan akan uang adalah fungsi tingkat rasio harga tangguh terhadap harga tunai (P_t / P_0). Mazhab mainstream menggunakan pajak terhadap dana yang dianggurkan (*dues on idle fund*) dan tingkat pendapatan sebagai variabel independent fungsi permintaan akan uang. Sementara itu, menurut mazhab ketiga, permintaan akan uang dan penawaran akan uang memiliki satu fungsi yaitu M . Adapun variabel yang mempengaruhinya Y (= kebijakan pemerintah), X (= sosial-ekonomi), 0 (= knowledge-induced). Instrumen yang digunakan sebagai finansial intermediary adalah pembagian keuntungan (*profit sharing*) atau *expected rate of profit*.

Konsep uang yang beredar dalam tiga mazhab Ekonomi Islam dengan adanya permintaan uang. Pada bab ini dibicarakan tentang mata uang. Yang dimaksud adalah dinar dan dirham yang merupakan satuan moneter di kerajaan Roma dan Persia. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, kedua mata uang ini diimpor, dinar dari Roma dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor kedua negara tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada dibawah kekuasaannya. Biasanya jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal meningkat maka uang inilah yang diimpor. Sebaliknya bila permintaan uang turun maka komoditaslah yang akan diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pembatasan impor uang karena permintaan internal dari Hijaz terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak terpengaruh terhadap penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam perekonomian Roma dan Persia. Sekalipun demikian, selama pemerintahan Nabi, uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata melainkan dari hasil perdagangan dengan luar negeri. Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi yang lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar atau dirham sama dengan nominal (*face value*) uangnya. Karena itu keduanya

dapat dibuat perhiasan atau ornament. Karena alasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan yang sangat elastis.

D. KEBIJAKAN MONETER DI ZAMAN RASULULLAH

Perekonomian yang ada di Jazirah Arabia ketika zaman Rasulullah SAW merupakan ekonomi dagang bukan merupakan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai Jalur Dagang Utara. Antara Syam dan Yaman disebut Jalur Dagang Selatan. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi :²⁸

- Valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham.
- Sistem devisa bebas ditetapkan tidak ada halangan sedikit-pun untuk mengimpor dinar atau dirham.
- Transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan pedagang.
- Cek dan *promissory note* lazim digunakan, misalnya Umar bin Khatab ra menggunakan instrument ini ketika melakukan impor barang yang baru dari Mesir ke Madinah.
- *Instumen factory* (anjak piutang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama **Al-Hiwalah** tetapi tentunya bebas dari unsur bunga.

Pada masa itu bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya bila permintaan uang

²⁸ Adiwirman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001 hal 28

turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang, sehingga nilai uang stabil. Permintaan uang hanya untuk berjaga-jaga. Permintaan uang yang riil dilarang. Penimbunan mata uang dilarang sebagaimana penimbunan barang juga dilarang. Transaksi *talaqqi rukban* dilarang, yaitu mencegat penjual dan kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Hal demikian merupakan tindakan distorsi harga. Distorsi harga merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi *kali bi kali* dilarang, yaitu bukan transaksi dan bukan pula transaksi tunai. Keistimewaan dalam islam dalam hal transaksi adatah bahwa transaksi tunai boleh transaksi tidak tunai boleh namun melarang transaksi *future* tanpa ada barangnya. Transaksi maya merupakan satah satu unsur riba. Segala bentuk riba dilarang. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabiilitas. Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan defisit anggaran. Didalam Islam, yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan liquiditas. Uang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang adalah dianjurkan dengan jalan *Qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudhorobah. Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman informasi, metode supervise, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi. Jelaslah kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabiilitas

1. Uang Dan Kebijakan Moneter Pada Masa Islam²⁹

Menurut Kadim As-Sadr, penulisan artikel yang berjudul *Money and Monetary Politics In Early Islamic Period*, ditujukan untuk mempelajari secara mendalam mengenai, media tukar yang digunakan pada awal periode Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan fluktuasi nilai uang, metode untuk menarik tabungan dan pengarahan proses investasi yang digunakan oleh para pemimpin Islam pada periode awal. Alasan Sadr mengupas tiga bahasan tersebut adalah bahwa pokok bahasan ini sangat membantu mencapai pengetahuan tentang kebijakan moneter di awal periode Islam dan perannya dalam pengembangan ekonomi pada masa awal terciptanya masyarakat Islam.

a. Pentingnya Perdagangan dan Media Pertukaran Pada Awal Islam

Secara geografis, Hijaz terletak di antara 3 benua yaitu Asia, Eropa dan Afrika yang memiliki keuntungan karena dilalui rute perdagangan antara Persia dan Roma. Ditambah rute perdagangan selatan³⁰ yang melewati bagian Selatan dan Timur Arabia dengan keuntungan adanya pasar-pasar musiman yang didirikan bergantung pada aktivitas perdagangannya. Rute dagang yang berada di antara Yaman dan Syam dikembangkan pada saat Hasyim mengambil alih kepemimpinan bangsa Quraisy yang merupakan hasil usaha Hasyim untuk mendapatkan perjanjian dan izin dan Raja-Raja Roma, Persia, Utopia dan Yaman Selanjutnya. perdagangan ini berkembang dan mendapat banyak keuntungan dan kekayaan Makkah memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan karena Ka'bah terletak di sana dan suku-suku di Arab datang sekali dalam setahun untuk menunaikan ibadah Haji sebagai tempat suci, Ka'bah memberikan keamanan yang penting bagi kegiatan perdagangan Hal itu

²⁹ Muhammad. *Ibid*, hal 143 diambil dari Kadim As-Sadr, *Money and Monetary Politics in Early Islamic Period*. Tehran : Sohid Bahesti University

³⁰ *Ibid*, hal 144 dari Ali Akbar Fayad, *History of Islam*, Second Print, Tehran : Enteshart Daneshgah, Tehran (Publications of Tehran University, 1979, hal 23)

merupakan bukti bahwa perdagangan merupakan dasar perekonomian di Arabia sebelum Islam datang. Jenis uang yang digunakan pada saat itu adalah Dirham dan Dinar. Keduanya mempunyai nilai besar yang tetap dan memiliki kandungan perak atau emas yang tetap. Oleh karena itu tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika Dirham dinilai sebagai satuan uang, nilai Dinar adalah perkalian dari Dirham dan jika diasumsikan Dinar sebagai satuan uang nilai Dinar adalah 10 kali Dirham. Walaupun demikian, Dirham lebih umum digunakan dan pada Dinar itulah yang menyebabkan mata uang Dirham lebih populer di dunia usaha bangsa Arab.

Bentuk uang yang lain yang digunakan pada awal Islam adalah kredit. Selain sebagai mekanisme pembayaran, kredit memiliki kelebihan lain misalnya melakukan transaksi yang nilainya cukup besar. Penggunaan transaksi kredit sebelum Islam merupakan fakta bahwa cara transaksi ini dengan beberapa modifikasi merupakan warisan dari Islam. Metode transaksi lain yang digunakan di Arabia yang juga diterima Islam dengan beberapa modifikasi adalah pembelian utang seseorang atau obligasi oleh pihak lainnya dan biasanya surat utang diperlukan. Ini merupakan bukti lain adanya penggunaan kredit pada awal Islam. Pada saat yang sama volume kredit dibandingkan dengan jumlah uang dalam sirkulasi cukup besar jumlahnya. Tingkat penggunaan instrumen kredit terbatas pada beberapa pedagang.

b. Penawaran dan Permintaan Uang Pada Awal Islam

Pembahasan ini mengenai mata uang yaitu Dinar dan Dirham yang merupakan satuan moneter di kerajaan Roma dan Persia³¹. Besarnya volume impor Dinar dan Dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor kedua negara tersebut dan wilayah-wilayahnya yang berada di bawah kekuasaannya. Jika permintaan uang pada pasar internal meningkat maka uanglah yang diimpor. Hal ini, tidak adanya pembatasan terhadap impor uang karena

³¹ *Ibid*, hal 146

permintaan internal di Hijaz terhadap Dinar dan Dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam perekonomian Roma dan Persia. Oleh karena itu, penawaran uang terhadap pendapatan sangat elastis. Tinggi rendahnya permintaan yang bergantung pada frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Sementara itu situasi yang kurang kondusif menimbulkan permintaan uang untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang tidak diduga dan tidak diketahui sebelumnya. Akibatnya, permintaan uang pada umumnya bersifat permintaan untuk transaksi dan jaga-jaga dan tidak ada motif penggunaan uang. Ini disebabkan penimbunan uang dilarang dan tidak ada seorang pun yang berhak menyimpan uang dengan tujuan spekulasi pada nilai tukar.

Sebelum Islam datang praktek *talaggi r-rukban* sudah dilakukan yaitu praktek bisnis yang terjadi serombongan kalifah pedagang mendekati kota. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan khalifah terhadap informasi harga pasar, pemilik modal memboronog barang mereka dengan harga murah kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Transaksi ini juga dilarang oleh Rasulullah. Sementara itu, *gana'im* (harta rampasan perang) yang diperoleh dan berbagai peperangan dibagikan kepada seluruh muslim sehingga standar hidup dan pendapatan mereka meningkat. Itu terjadi pada masa periode awal Islam diikuti dengan penawaran dan permintaan uang yang telah ditentukan. Ketika penawaran naik maka penawaran yang berlebih akan diubah menjadi emas dan perak. Akibatnya, tak ada penawaran atau permintaan berlebih dan pasar akan tetap berada pada keseimbangan. Olen karena itu, nilai uang dalam jangka pendek adalah aktivitas-aktivitas yang dilarang dan dinyatakan ilegal oleh pembuat syariah seperti *kanz* dan *talaggi r-rukban*. Perubahan yang menjadi aset lain, terutama instrumen finansial dapat menyebabkan ketidakstabilan pada pasar uang. Hal ini menimbulkan pengaruh bila dilakukan dalam volume besar dan adanya pasar aset finansial yang aktif ini tidak terdapat dalam pasar pada awal Islam dikarenakan volume kredit bila

dibandingkan dengan uang tunai relatif tidak signifikan dan penggunaan jenis instrumen finansial dalam bentuk konsep atau nota perjanjian utang dan dengan potongan harga tidak signifikan bila dibandingkan dengan volume penggunaan Dinar dan Dirham dalam peredaran uang. Dengan demikian, pembelian dan penjualan instrumen perjanjian bukanlah transaksi yang umum bahkan kurang populer dalam seimbang pada jangka panjang dan nilainya tetap stabil.

c. Kecepatan Peredaran Uang

Faktor lain yang mempengaruhi stabilitas nilai uang adalah kecepatan peredaran uang. Larangan tindakan *kanz* (penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah Dinar dan Dirham keluar dan perputaran dan juga larangan bunga bank. Kedua larangan tersebut mendorong percepatan peredaran uang secara signifikan. Struktur pasar masih memiliki pengaruh kuat terhadap kecepatan peredaran uang. Penghapusan struktur monopoli pasar perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, permintaan efektif dan juga permintaan transaksi terhadap uang pun meningkat. Peningkatan volume aktivitas ekonomi juga mempercepat peredaran uang. Dalam perekonomian pertanian dan ekonomi berpindah-pindah pada masa awal Islam dengan cara barter sehingga dinar dan dirham tidak digunakan dalam perdagangan. Ketika komoditas dikeluarkan dengan uang, proses perdagangannya menjadi lambat sehingga mempengaruhi percepatan perputaran perekonomian secara keseluruhan. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah percepatan peredaran uang cenderung meningkat. Hal ini keberhasilannya dipengaruhi oleh peperangan yang pernah dilakukan menguatkan rasa percaya diri dan optimisme masa depan yang lebih baik dikalangan kaum Muslimin. Setelah peperangan Hudaibiyah, optimisme ini semakin meningkat sehingga peningkatan volume aktivitas ekonomi mempercepat peredaran uang.

d. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Nilai Uang

Kebijakan yang tepat perlu diambil untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan dan biasanya disertai dengan peningkatan jumlah permintaan dan juga peningkatan kemampuan produksi dan ketenagakerjaan dan secara positif mempengaruhi nilai uang. Masalah dan sudut pandang kebijakan fiskal adalah pengaturan pengeluaran untuk biaya perang yang rata-rata terjadi setiap dua bulan. Besamya seluruh pengeluaran pada awal tahun Hijriyah merupakan sesuatu yang luar biasa bahwa keuangan negara tidak mengalami defisit anggaran.³² Dalam satu kesempatan Rasulullah metakukan pinjaman setelah penaklukan Mekkah untuk membayar masyarakat Mekkah yang baru memeluk Islam. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu kurang dari setahun setelah kembali dari perang Hunayn.

Kebijakan yang lain adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum Muslimin dalam melakukan aktivitas produksi dan ketenagakerjaan. Adanya kerjasama, kemampuan aktivitas perdagangan dan pertanian menjadi meningkat. Demikian juga dapat meningkatkan penawaran agrerat masyarakat. Peningkatan penawaran agrerat membawa perekonomian dan stabilitas nilai uang kepada suatu tingkat keseimbangan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan dibidang perekonomian, kesejahteraan dan ketenagakerjaan muslim terus meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan keuangan negara kaum muslim, pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan yang membutuhkan |umlah sumber daya yang besar. Oleh karena itu, nilai uang dengan tingkat harga tetap stabil. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang melalui perluasan tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang.

e. Mobilisasi dan Pemanfaat Tabungan

Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal Islam adalah memobilisasi dan mengarahkan tabungan kedalam proyek-proyek investasi yang diwujudkan melaiui pengem-

³² *Ibid*, hal 150

bangun peluang investasi yang sesuai dengan ajaran Islam Kegiatan utama ekonomi adalah jasa pertanian, perdagangan dan kerajinan³³ maka bentuk perjanjian yang sah untuk aktivitas ini adalah *Mudharabah, Muzara'ah, Musagat dan Masyarakat*. Beberapa cara pemerintah menyediakan fasilitas yang secara tidak langsung diorientasikan pada proses investasi antara lain memberikan berbagai kemudahan bagi produsen untuk memproduksi. memberikan keuntungan pajak terutama bagi unit produksi baru, meningkatkan efisiensi produksi sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam berinvestasi. Metode perpajakan dalam Islam tidak membayarkan insentif aktivitas ekonomi karena penarikan pajak dilakukan secara proporsional terhadap keuntungan. Pendapatan sewa dan *guast-rend* dari berbagai macam aktivitas ekonomi. Aktivitas lain untuk menyalurkan tabungan kedalam investasi dilakukan dengan memberikan pembiayaan tanpa bunga (*Qard Hasan*). Meminjamkan uang tanpa bunga sangat dianjurkan dan merupakan awei baik seperti disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu pandangan seorang muslim meminjamkan uang tanpa bunga merupakan suatu investasi dengan return yang jelas dan aman untuk mendapatkan ridha Allah.

Dan sudut pandang makro ekonomi, pinjaman tanpa bunga akan menciptakan suatu sistem efisiensi dana untuk produksi atau konsumsi dengan asumsi yang meminjamkan dengan yang meminjam memiliki informasi yang sempurna. Oleh karena itu, sistem ini mendorong peningkatan kesejahteraan umum dan ekspansi *agrerat supply*.

f. **Praktek Bisnis Yang Dilarang**³⁴

Pembuat kebijakan Islam membuat serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk mendorong mengalirnya tabungan kepada investasi sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan tabungan pada hal-hal yang tidak dibenarkan dan sia-sia dengan batas-batas yang ada

³³ *Ibid*, hal 151

³⁴ *Ibid*, hal 153

- **Kanz (Penimbunan Uang)**

Kanz merupakan kegiatan menimbun uang (Dinar atau Dirham) yang akan mengurangi persediaan uang di pasar sehingga permintaan uang akan meningkat karena perputaran uang menurun, sehingga **Kanz** sangat merugikan karena mempengaruhi perputaran uang. Dengan dilarangnya penimbunan harta ini, nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan.

- **Riba**

Hal yang paling sering dilakukan dalam penggunaan uang tabungan yang disimpan masyarakat adalah masalah riba pinjaman (*Usury Loan*) baik untuk perdagangan ataupun untuk konsumsi. Riba transaksi (perdagangan) terjadi adanya utang piutang, kreditur menginginkan pelunasan uang yang diterima lebih besar dan uang yang diutangkan. Riba ini dilakukan pada saat pedagang dengan menukarkan barangnya dengan barang yang sama dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari pandangan kaum Quraisy, riba adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari tabungan yang mereka miliki karena debitur pada saat mengeluarkan biaya. Rasulullah juga melarang compound usury (riba yang diterima secara kesiuruhan, biasanya pada waktu jatuh tempo) dan pada akhir tahun hijrahnya Rasul, seluruh bentuk riba dan transaksi yang ribawi dilarang. Akhirnya, riba dihilangkan dari kegiatan ekonomi pada awal keislaman dan tabungan hanya dapat digunakan untuk tujuan tersebut di atas.

- **Larangan Transaksi Kali bi-Kali³⁵**

Transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah uang dan barang dipertukarkan selang beberapa waktu setelah kontrak ditandatangani. Jika transaksi ini tidak dilarang maka berbagai macam pasar masa yang akan datang untuk emas.

³⁵ Kali bi-kali adalah transaksi dimana kontrak dibuat saat / namun baik barang maupun uangnya dibayarkan pada masa yang akan datang

perak dan aset berharga lainnya dapat dikembangkan dan porsi tabungan akan dialokasikan untuk spekulasi dalam pasar ini. Larangan transaksi ini, akan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan tabungan untuk hal-hal setain produksi barang dan jasa, yaitu mencegah terjadinya pasar uang seperti halnya mencegah terciptanya Loan Market dengan menghapuskan riba.

2. Kebijakan Rasulullah SAW³⁶

Sejak nilai tukar rupiah merosot terus. Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Dari sisi kemampuan Surat Bank Indonesia menyedot rupiah hasilnya mulai Nampak. Akan tetapi besaran makro lainnya dan industri perbankan malah sebaliknya. **The Asian Banker Journal**, Mei 1998 dalam editorialnya menampitkan perkiraan para bankir bahwa tingkat kredit bermasalah di Indonesia pada tahun 1998 ini mencapai 20 %, bahkan para analisis memperkirakan 50-55 %. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutak-atik suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, mmyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam yang lainnya terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai Jalur Dagang Selatan, sedangkan antara Romawi dan Persia disebut Jalur Dagang Utara sedangkan antara Syam dan Yaman disebut Jalur Dagang Utara dan Selatan. Perekonomian di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab bahkan menjadi alat bayar yang sudah resmi (dinar dan dirham). Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada sedikitpun untuk mengimpor dinar

³⁶Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2001

atau dirham. Transaksi yang tidak tunai diterima di masyarakat luas di kalangan pedagang. Cek dan promissory notes lazim digunakan misalnya Umar Ibnul- Khatab r.a menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah *instrumen factoring (anjak piutang)* yang baru populer tahun 1980-an telah dikenal dengan nama Al Hiwalah tapi tentunya bebas dari unsur bunga. Bila para pedagang mengeksport barang berarti dinar/ dirham diimpor. Sebaliknya bila mengimpor barang berarti dinar/ dirham diekspor. Jadi dapat dikatakan bahwa keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar uang adalah *derived market* dan keseimbangan *aggregate supply* dan *agregate demand* di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastisitas kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas dan perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga nilai kestabilan ini, ada beberapa hal yang dilarang antara lain:

- a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga - jaga
- b. Penimbunan mata uang sebagaimana dilarangnya penimbunan barang
- c. Transaksi *talaqqi rukban* yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi
- d. Transaksi kali bil kali yaitu bukan transaksi tidak tunai, inilah indahny islam. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba.
- e. Segala bentuk riba dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini sekaligus stabilitas, islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran.

Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh dilimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan *qard* (pinjaman kebajikan) sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman. Informasi metode supervisi manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Akumulasi dan informasi bisnis ini akan menurunkan tingkat resiko investasi. Jelas kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaigus stabilitas.

3. Instrumen Kebijakan Rasulullah³⁷

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian diatas adalah bahwa tidak ada satupun instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat Ini diberlakukan pada masa periode keislaman. Karena mmimnya sistem perbankan dan karena penggunaan uang sebagai alat tukar, tidak ada alasan untuk melakukan perubahan *supply* uang melalui kebijakan *diskresioner*. Lagipula kredit tidak memiliki peran dalam menciptakan uang faktomya antara lain kredit hanya digunakan diantara pedagang, peraturan pemerintah tentang *promissory notes* (surat pinjaman / kesanggupan) dan *negotiation instrumen* (alat-atat negosiasi) yang dibuat sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan sistem kredit menciptakan uang *Promissory notes* atau *billof exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang atau untuk mendapatkan sejumlah dana segar, namun surat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Setelah surat ini dikeluarkan, kreditur dapat menjual surat tersebut tetapi debitur tidak dapat menjuai uang atau komoditas sebelum ia menenma surat tersebut. Untuk itu, tidak ada pasar uang jual beli *negotiable instrumens*, spekulasi

³⁷ Muhammad, *Op.cit*

dan penggunaan pasar uang. Jadi sistem kredit tidak dapat menciptakan uang.

Aturan diatas mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam riba nasi'ah atau transaksi yang sah menurut Islam, dimana barang dibeli saat ini namun pembayarannya dilakukan kemudian uang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan kata lain uang diperlukan dengan sesuatu yang benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, bahkan dalam kasus ini uang diperlukan dalam kerangka yang Islami. Transaksi lain seperti judi, riba, kali-bi-kali, jual beli *superficial promissory note* dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan antara arus uang dan barang dapat dipertahankan. Mengingat perputaran uang dalam periode tertentu relative stabil, dapat disimpulkan jumlah uang dalam suatu perekonomian sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi.

Alat / instrument lain yang dipergunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah uang beredar adalah dengan jual beli surat berharga (operasi pasar terbuka). Sudah jelas bahwa pasar terbuka ini tidak ada dalam sejarah perekonomian Islam pada awal perkembangannya. Metode ketiga yang juga saat ini digunakan adalah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank. Tingkat bunga ini tidak diterapkan karena adanya larangan yang berkenaan dengan riba dalam Islam.

Kecuali itu, sistem yang diterapkan pemerintah menyangkut konsumsi, tabungan investasi dan perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu saat system ini menjamin keseimbangan uang dan barang. Pada sisi lain adalah untuk mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat. Lagipula, adanya imbalan pahala untuk usaha dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya serta partisipasi dari para sahabat Rasulullah dalam perdagangan dan pertanian telah menambah nilai dari kegiatan ini di mata kaum Muslimin. Al-Qur'an menggambarkan perhatian kaum Muslimin dalam

penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT, sehingga memperluas pandangan kaum Muslim untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini lebih memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan menyalurkan kekayaan yang dimiliki untuk hal-hal yang tidak mendapatkan hak yang terlalu istimewa melalui *qard hasan*, infaq dan wakaf

4. MANAJEMEN MONETER ISLAM³⁸

a. Sejarah Sistem Moneter

Sistem moneter dikendalikan dengan menerapkan sistem dua mata uang (*bimetalic standard*) yang terdiri dari emas dan perak. Sejarah yang menunjukkan bahwa rasio peredaran Dinar dibandingkan dengan Dirham sebesar 1 : 10 hanya berlaku sampai pada masa keempat khalifah. Ketidakstabilan rasio tersebut mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang Dinar dan menggunakan Dirham sebagai alat transaksi, sehingga peredaran Dinar semakin kecil. Fenomena ini dikenal sebagai hukum bersaham yaitu *bad money tends to drive good money out of circulation*³⁹. Berdasarkan *gold currency standard*⁴⁰, nilai mata uang suatu negara dapat dikonversikan atau disetarakan dengan emas dengan tingkat legal yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Menurut catatan sejarah *gold currency standard* dikenal dalam 3 variasi yaitu :

1. *Gold Coin Standard* merupakan sistem moneter dimana gold coin aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar.
2. *Gold button standard* merupakan standard moneter dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa uang nasional disetarakan dengan emas
 - b. Emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batangan

³⁸ *Ibid.* hal 160

³⁹ *Ibid.*, hal 159 dari chapra, hal 2

⁴⁰ *Ibid.*, hal 159 sumber dari chapra, hal 2 Standar Internasional ini berlaku sejak 1880

- c. Emas tidak beredar dalam perekonomian
 - d. Emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank
3. *Gold exchange standard* yang lebih dikenal sebagai **Bretton Woods System** yaitu merupakan kesepakatan internasional di bidang moneter dimana mata uang merupakan *kiat money* yang dapat dikonversikan ke dalam emas dengan tingkat harga tertentu⁴¹.

Kebutuhan keuangan pada PD II dan pasca perang menuntut kembalinya standar emas. Namun mengalami kesulitan dan **Bretton Woods System** yang akhirnya secara umum diadopsi setelah PD II. **Bretton Woods System** diterapkan banyak hal yang terjadi memaksa AS demotisasi emas pada Agustus 1971 disebabkan antara lain:⁴²

- a. Mulai penghujung tahun 1950-an pertumbuhan stok emas dunia tidak mencukupi untuk membiayai pertumbuhan output dan perdagangan dunia sehingga terjadi kesulitan likuiditas.
- b. Kebutuhan likuiditas ini dibiayai oleh supply dolar Amerika Serikat melalui defisit perdagangannya.
- c. Defisit perdagangan AS yang berkelanjutan mengakibatkan menurunnya cadangan emasnya yang menyulitkan kemampuan negara ini mempertahankan kesetaraan dollar dengan emas.

Setelah di demonetisasinya emas oleh AS, maka berakhir pula sistem **Bretton Woods** dan sebagai titik awal mula *Fully-Fledged Managed Money Standard* yang sama sekali tidak terikat dengan nilai emas. Konsekuensi dari hal tersebut, ada 2 fenomena yang terlihat yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar. Hal ini diketahui bahwa uang merupakan alat ukur nilai yang penting dalam kehidupan karena penurunan nilai rill

⁴¹ *Ibid*, hal 159

⁴² *Ibid*, hal 160, Chapra, hal 2

uang akan memiliki efek buruk bagi kehidupan sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Manajemen Moneter Islam⁴³

Dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas akan permintaan akan uang dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Dengan demikian setiap instrumen yang mengarah kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana secara tidak produktif akan ditinggalkan.

Menurut teori Keynes, pada dasarnya permintaan spekulatif akan uang dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga (*the theory of liquidity preference*). Pergerakan suku bunga merupakan refleksi pergerakan permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi. Semakin tinggi permintaan akan uang untuk spekulasi, semakin rendah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Demikian pula sebaliknya, jika permintaan akan uang spekulatif menurun, suku bunga relatif meningkat.

Penghapusan suku bunga penetapan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang mengganggu, serta penghilangan insentif bagi pemegang uang *idle* mendorong orang melakukan.

- *Qard* (meminjamkan harta kepada orang lain)
- *Penjualan muajjal*
- *Mudharabah*

Para pemilik dana akan menginvestasikan dana pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar (*actual return*). Semakin tinggi permintaan akan uang untuk investasi di sektor riil, tingkat harapan keuntungan yang akan diraih relatif menurun. Karena besarnya tingkat *actual return* tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga, permintaan akan uang akan lebih stabil.

Tingginya fluktuasi suku bunga menyebabkan ketidakpastian dalam berinvestasi sehingga investor berusaha mengurangi

⁴³Umer Chapra, *Op.cit*, hal 158

resiko investasi dengan mengalihkan investasi jangka panjang kepada investasi jangka pendek. Dominasi investasi dalam jangka pendek mengakibatkan lemahnya fundamental perekonomian.

Penggunaan bunga sebagai *opportunity cost* tidak memberikan jaminan terhadap penggunaan dana yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme kontrol suku bunga dalam mengalokasikan untuk apa dana pinjaman tersebut digunakan. Bunga merupakan biaya modal (*cost of capital*) yang harus dibayar di masa mendatang, yang membuat para peminjam dana berusaha mendapatkan nilai tambah guna menutupi biaya bunga. Karena tidak ada mekanisme kontrol, juga rentannya fluktuasi suku bunga, dana dialokasikan untuk usaha-usaha yang tidak bersinggungan di sektor riil. Tindakan ini diambil karena dasar pengambilan keputusan mereka bukan nilai tambah di sektor riil, tetapi nilai tambah uang, yang bisa didapatkan dari dunia maya. Perilaku ini akan mengurangi sumber dana pinjaman yang dapat diinvestasikan di sektor riil yang berguna menambah produktivitas dan sumber lapangan kerja baru.

Ketika *actual return* dan investasi di sektor riil menurun karena lesunya kondisi ekonomi, pemegang dana akan mengurangi investasi dan lebih senang memegang uang tunai riil. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan biaya atas aset atau dana yang dianggurkan, yang menempatkan pemilik dana sebagai penanggung biaya peniduran uang.

Strategi dasar dalam manajemen moneter Islam menurut mazhab kedua adalah:

1. Peniadaan suku bunga sebagai biaya kapital (*cost of capital*) dan pengenaan pajak bagi aset produktif yang menganggur (*dues on iddle fund*) akan mendorong pemilik modal menginvestasikan sejumlah kekayaan pada sektor riil yang produktif.
2. Adanya mekanisme sistem bagi hasil dalam transaksi syirkah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama menggerakkan roda perekonomian dan pada

akhirnya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Jika kesempatan usaha dimiliki oleh semua orang, pemerataan pendapatan akan terealisasi.

3. Terciptanya kepastian berusaha yang didukung oleh ketiadaan suku bunga di muka dalam transaksi pijam-meminjam. Satu-satunya perhitungan biaya dana pinjaman yang ditentukan di muka adalah perhitungan resiko bagi hasil (*profit sharing ratio*). Besarnya keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam dana adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan keuntungan aktual yang didapat. Kondisi ini memungkinkan terciptanya kepastian berusaha bagi peminjam dana. Oleh karena besarnya *profit sharing ratio* tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga, dunia usaha akan relatif lebih stabil.

Strategi dasar dalam manajemen moneter Islam menurut mazhab ketiga sebagai berikut:

1. Bahwa M_s mengikub besarnya M_d , atau dengan kata lain keseimbangan $M_s=M_d$ selalu terjaga. Sedangkan M_d merupakan fungsi Permintaan Agregat (AD) M_s juga merupakan fungsi Permintaan Agregat (AD)
2. Bahwa penentuan besarnya M_s yang merupakan refleksi dari M_d ditentukan melalui *shuratlc process* (proses musyawarah) yang melibatkan para pelaku ekonomi di sektor riil.
3. *Shuratic process* akan efektif bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang merata (*induced knowtedge*)

a) Uang Untuk Investasi Produksi⁴⁴

Manajemen moneter berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan adanya penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-

⁴⁴Muhammad, *Op.cit*, hal 161

-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan aliran kas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Biasanya, mengalir pada golongan kaya yang mampu memenuhi syarat jaminan tersebut. Namun pada umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif tetapi juga untuk *conspicuous consumption* (konsumsi barang mewah, barang yang hanya untuk symbol status dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat) dan spekulasi ini mengakibatkan cepatnya ekspansi permintaan uang untuk keperluan non produktif dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat. Penyaluran pinjaman ini mengakibatkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Situasi ini harus dibalik artinya distribusi kekayaan dan harta harus menyeluruh pada semua golongan dan lebih diarahkan pada hal-hal atau investasi yang bersifat produktif, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Kemungkinan masyarakat mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperoleh sehingga meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut dibiayai oleh pinjaman yang menyebabkan turunnya tingkat tabungan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya suku bunga dan rendahnya tingkat investasi dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja

$$M/p = f(Y, r)^{45}$$

M / P berhubungan langsung dengan Y dan merupakan *invers* (kebalikan) dan tingkat bunga. Dalam teori ekonomi Keynes menunjukan bahwa agregat out put dan tingkat bunga menjadi pusat bagi permintaan uang riil. Hal ini menunjukan bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen permintaan uang / manajer moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil permintaan uang untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif. Permintaan uang

⁴⁵Umer Chapra, *Op.cit*, hal 8

untuk konsumsi yang berlebihan dan spekulasi cenderung lebih tidak stabil, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, permintaan uang harus diarahkan pada upaya untuk investasi produktif.

b) Permintaan Uang (Money Demand)

Manajemen moneter Islami (syari'ah) adalah manajemen moneter yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efektif dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan 3 instrumen utama antara lain:⁴⁶

1. *Value Judgements* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bukan untuk konsumsi yang berlebihan (*conspicuous consumption*), pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.
2. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan social ekonomi dan politik yang salah satunya adalah dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber.
3. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sistem ini, permintaan uang dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien.

Lembaga perantara keuangan yang berdasarkan pada *equity sharing* cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan sta-

⁴⁶Umer Chapra, *Ibid*, hal 14-15

bilitas perekonomian dibandingkan dengan lembaga keuangan berdasarkan pinjaman. Untuk mengurangi permintaan uang pada usaha-usaha yang tidak produktif dan tujuan spekulatif, Islam mencoba memperkecil dana yang mengendap (*idle cash*) dengan ancaman zakat. Dengan ini akan mendorong para penyimpan mengarahkan dana simpanannya untuk investasi produktif. Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islami, tidak hanya dapat meminimisasi ketidakstabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen permintaan uang. Dengan stabilnya permintaan uang dalam perekonomian Islami, akan menciptakan stabilitas yang lebih baik bagi *velocity of circulation of money*.

$$M_d = f (Y_s, S, \Pi)^{47}$$

Dimana

- Y_s : Barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam
- S : Semua nilai dan kelembagaan social dan moral (termasuk lembaga zakat) yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya dan yang dapat membantu memperkecil M_d tidak hanya untuk konsumsi yang tidak bermanfaat. investasi yang tidak produktif, tetapi juga tidak untuk motif-motif spekulasi
- Π : Tingkat bagi hasil pada system yang tidak memperbolehkan penggunaan tingkat bunga bagi lembaga perantara keuangan.

3. Penawaran uang-Target Moneter (Mo)

1. Target Market

Untuk menciptakan keseimbangan antara money demand dan money supply, banyak pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan uang yang

⁴⁷ *Ibid*, hal 16

konststen dengan realisasi pencapaian tujuan sosio ekonomi dengan kerangka stabilitas harga dan memantapkan rentangan target pertumbuhan penawaran uang yang akan membantu tercapainya kecukupan permintaan ini secara memungkinkan. Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai dengan target diperlukan Instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan Mo.

2. Pencapaian Pertumbuhan M yang di targetkan

Dalam pencapaian ini, bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan Mo. Dalam hubungan ini terdapat tiga sumber utama yaitu high powered money yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredil bank sentral kepada bank komersia! dan surplus neraca pembayaran⁴⁸. Kelebihan defied pada anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sector moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit di capai. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama dan high power money dapat di atur dengan baik yang merupakan suatu hal yang tidak realistis bagi Negara Islam yang membicarakan mengislamkan perekonomiannya tanpa ada usaha serius mengatur defisit anggaran pemerintah yang sesuai dengan asas manfaat. Penyaluran pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial dapat dalam bentuk *mudhorobah* yang berarti bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjamannya kepada bank komersial. Di pihak lain, bank komersial juga harus lebih hati-hati dalam menyalurkan kreditnya kepada debitur, baik untuk sector pemerintah maupun swasta.

Tujuan untuk menghindari pemanfaatan kredit pada kegiatan-kegiatan spekulasi dan non produktif. Jika dapat dikendalikan maka aktifitas moneter telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.

⁴⁸ Chapra, *Op.cit*, hal 19, 1996

d. Instrumen kebijakan moneter

Jika *High Powered Money* diatur dengan mengontrol anggaran defisit pemerintah, maka ada batas fluktuasi jangka pendek pada volume uang yang sebanding hubungannya dengan tabungan yang dikumpulkan. Instrumen moneter yang dapat diterapkan dalam perekonomian Islam ditempuh dengan dua instrument besar.

1. **Kontrol Kuantitatif penyaluran kredit** di dukung dengan instrument monctcr berupa :

a. **Statutory Reserve Requirement**⁴⁹

Banyak bank sentral melakukan reduksi dan *eliminasi reserve requirement* untuk menjadikan bank lebih kompetitif. Tetapi tidak mungkin dilakukan dalam ekonomi islam, sebab *reserve requirement* sebagai instrument penting untuk kelangsungan berlangsungnya kebijakan moneter. Disini *discount rule* dan pasar terbuka tidak dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Sebagian dananya yang berasal dari *demand deposito* dan bank komersial pada bank sentral sebagai *statutory reserve*.

Reserve requirement hanya berlaku pada demand deposit. Sedangkan bagi mudhorobah deposit tidak diperlukan *reserve requirement* karena mudhorobah merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut dan kemungkinan memiliki laba maupun reslko rugi berdasarkan sistern ekonomi Islam, lebih baik melakukan pembatasan pada pemanfaatan mudhorobah deposits melalui *statutory reserve requirement*.

b. **Credit Collng**⁵⁰

Dengan mengandalkan *reserve requirement* yang dapat memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *high powered money* belum menjamin keberhasilan manajemen moneter. Hal ini dapat mengakibatkan ekspansi

⁴⁹ Muhammad, *Op.cit* hal 166

⁵⁰ *Ibid*, hal 167

kredit melampaui dan jumlah yang di targetkan. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah hubungan antara *reserves* yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit belum memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena itu, *money supply* mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal maupun eksternal yang kompleks, maka perlu juga dipertimbangkan **credit ceilings** atau pagu kredit untuk menjamin total kredit yang disalurkan konsisten dengan target moneter.

c. Government Deposits⁵¹

Instrumen ini cukup berarti dalam mempengaruhi *reserves* daripada bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral keadaan dari bank komersial. Instrumen moneter di Saudi Arabia sangat efektif dalam mempengaruhi *reserves* bank komersial secara langsung yang fungsinya sama seperti operasi pasar terbuka yang mempengaruhi *reserves* bank komersial secara tidak langsung.

d. Common Pool⁵²

Common Pool adalah instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit yang di kuasanya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggutangi masalah likuiditas. Instrumen ini bagi bank komersial pada bank sentral dapat juga secara efektif digunakan dengan cara yang sama seperti fasilitas *rediscounto* yang digunakan bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas bank komersial.

e. Moral Suation⁵³

Moral Suation merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip

⁵¹ *Ibid*, hal 167

⁵² *Ibid*, hal 167

⁵³ *Ibid*, hal 167

syari'ah. Melalui kontrak-kontrak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian, bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran-saran guna mengatasi masalah-masalah yang di hadapi perbankan dan hal ini akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan

f. Equity Base Instrumens⁵⁴

Instrumen ini dapat dtgunakan untuk operasi pasar terbuka yang berdasarkan penyertaan dengan alasan :

- Sementara pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan
- *Equity based instrument* tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam
- Variasi harga *equity based instrument* yang dikeluarkan oleh bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan / pinalti dan pemegang saham perusahaan.
- Kemungkinan naiknya harga saham yang di beli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi khususnya ketlka secara fundamental mereka tidak menyetujuinya

g. Change In The Profit and Loss Sharing Ratio⁵⁵

Beberapa sarjana Muslim menyarankan variasi rasio bagi laba dan rugi untuk aktivitas mudhorobah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada para wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudhorobah di bank komersial. Dalam mekanisme mudhorobah keuntungannya berubah-ubah dan rasio bagi hasil dan rugi ditentukan oleh keuntungannya.

⁵⁴ *Ibid*, hal 168

⁵⁵ *Ibid*, hal 168

Tingkat keuntungannya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sektor jenis bisnis yang dilakukan.

2. Merealisasikan tujuan sosio ekonomi mencakup instrument moneter⁵⁶

a. Treating the created money as fay'

Uang (Mo) diciptakan Bank Sentral yang berasal dan pelaksanaan hak prerogatifnya yang membawa keuntungan karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang yang lebih kecil daripada nilai nominalnya yang disebut dengan *money seigniorage*. Dengan adanya *money seigniorage*, Bank Sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fay' atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi social ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pajak ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan bagi golongan kaya sehingga pemakaian instrument Ini dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.

b. Goal oriented allocation of credit

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Dana yang di himpun oleh perbankan, sebagian besar dari penabung kecil. Namun pemanfaatan dalam bentuk kredit tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Konsekuensi usaha kecil ini, sangat sulit untuk memperoleh pembiayaan dan bank apalagi dengan persyaratan utamanya dengan jamman. Hal ini pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam. Walaupun usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapat-

⁵⁶ *Ibid*, hal 168

an untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahnya dan manajemennya.

5. Manajemen Moneter : Kasus di SUDAN⁵⁷

Sebelum Islamisasi, sistem perbankan Bank Sentral Sudan (*Central Bank Of Sudan-BOS*) sangat tergantung pada Instrumen langsung yaitu *interest rate controls, credit ceilings, statutory liquidity ratios, bank rate (rediscount rate)* Instrumen ini tempatnya sangat efektif pada awalnya, ditandai dengan sistem keuangan tidak ada persaingan (*non-competitive financial*) dan pasar modal primer dan sekunder kurang dikembangkan serta adanya kelangkaan modal sebagai hasilnya BOS mengambil jalan instrumen tidak langsung (*Indirect instruments*) seperti persyaratan cadangan (*reserve requirement*) dan operasi pasar terbuka (pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah).

Kebijakan moneter di Sudan merupakan masalah yang berkaitan dengan tujuan kebijakan makroekonomi yang mencakup upaya peningkatan tingkat pertumbuhan GDP dan stabilitas moneter melalui penurunan tingkat inflasi. Tujuan antara lain:

- a. Membantu mencapai tujuan strategis komprehensif negara
- b. Mencapai keseluruhan tujuan ekonomi, yaitu
 - Mengembangkan sektor ekonomi yang diprioritaskan.
 - Mengurangi inflasi
- c. Berusaha mencapai distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang wajar
- d. Melanjutkan Islamisasi sistem perbankan dan meningkatkan image bank Islam sebagai bank yang komprehensif dan memberikan layanan penuh

⁵⁷ Muhammad, Op.cit hal 169, diambil dari artikel **Indirect Instrument of Monetary Control in Sudan**

- e. Menjamin bahwa kredit yang tidak sehat akan diselesaikan oleh bank sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku.
- f. Mendorong tegaknya dan pengembangan portofolio kredil

Untuk mencapai target. Bank Sentral Sudan menggunakan seperangkat instrumen moneter baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun kebijakan moneter dalam ekonomi Islam maupun non-Islam bertujuan untuk mencapai tujuan makro-ekonomi yang sama instrumen ini digunakan untuk tujuan yang secara sungguh-sungguh berbeda diantara 2 sistem tersebut.

1. Ukuran/ Aturan Sisi Penawaran (*Supply*)

Instrumen ini bertujuan untuk mengontrol kredit dan sistem perbankan instrumen batas kemampuan pembayaran bank, yang meliputi:

a. Statutory Reserve Ratio

Setiap bank harus menyadangkan pada simpanan di BOS (Bank Of Sudan) sedfcitynya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dan total dana simpanan masyarakat (dengan pengecualian simpanan investasi) yang direfteksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut.

b. Internal Liquidity Ratio

Bank-bank komersial harus mencapai dan menjaga rasio likuiditas sebesar 10% dan dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang local.

c. Credit Ceilings

Platon kredit diprioritaskan pada pembiayaan yang ditujukan pada sektor-sektor penting

- Sektor pertanian, sektor ekspor. sektor industri. sektor pertambangan dan energy, sektor transportasi dan pergudangan, professional, pengrajin dan bisnis keluarga akuran kecil, sektor perumahan rakyat, investasi pada pasar saham resmi Khartoum

2. Ukuran / Aturan Sisi Permintaan (Demand)

Bank Of Sudan telah berhasil menerapkan mekanisme margin keuntungan persentase partisipasi dengan musyawarah dan ukuran permintaan lainnya sebagai instrumen moneter khususnya pada beberapa tahun terakhir untuk mengatur biaya pinjaman. BOS menerapkan sistem *floor rate* dibandingkan dengan *ceiling rate* yang digunakan sebagai alat *moral suasion*.

BOS memperkenalkan 2 instrumen OMO yang sesuai dengan syariah yaitu :

1. CMC (*The Central Bank Musyawarah Certificate*)

Dimana fungsi sekuritas Bank Sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil

2. Government Musyawarah Certificate

Yaitu instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas yang menjanjikan pada investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan sebelumnya atas dasar investasi mereka pada kumpulan aset pemerintah yang berbentuk kepemilikan pada perusahaan publik atau patungan yang menguntungkan dalam operasinya. Kegunaan GMC adalah untuk pembiayaan anggaran instrumen OMO bagi BOS, mobilisasi tabungan nasional, mendorong investasi sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.

3. Ijarah Certificate (Sukuk)

Yaitu suatu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka panjang yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan sekuritas aset pemerintah berwujud seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan dan lain-lain. 3 perjanjian dasar instrumen finansial dalam *Sukuk* ini antara lain

perjanjian pembelian aset, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penjualan aset

6. Manajemen Moneter : Kasus Di Indonesia

Bank Indonesia diamanahkan untuk menyiapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah kepada bank/cabang syariah yang mengalami kesulitan likuiditas⁵⁸. Manajemen moneter yang diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No 10 tahun 1998 perbankan berusaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999. Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan sistem perbankan saat ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyak berdirinya Bank Syariah, bank yang didirikan langsung maupun melakukan konversi dari bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia dituntut untuk lebih hati-hati dalam mengawasi bank-bank umum di bawah pengawasannya agar tidak mengganggu pertumbuhan bank syariah. Seiring dengan itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan informasi tentang Peraturan Bank Indonesia bagi Bank Giro Wajib Minimum, Kliring, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Giro Wajib Minimum sebagai *statutory reserve requirement* adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan serta juga merupakan peran sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Jika terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM maka akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk bank yang melakukan pelanggaran GWM ini dikenakan sanksi baik

⁵⁸ Muhammad, *Op.cit*, hal 147

kekurangan dan minimum maupun kekurangan negative. Ketentuan yang berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi bagi pelanggaran saldo giro negatif dan tata cara pengenaan sanksi untuk bank-bank yang bersaldo giro negative.

Pengertian saldo giro negatif pada bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syariah sebagai berikut:

- a. Kantor pusat bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro Kantor Pusat Bank dan saldo rekening giro UUS (Unit Usaha Syariah) pada Bank Indonesia yang mewilayahinya lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting
- b. Kantor cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor cabang bank konvensional dan saldo rekening giro kantor cabang pada Bank Indonesia yang melayam kliring lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menurut sistem akunting.

Apabila terjadi saldo giro negatif maka pada:

- a. Kantor pusat bank maka semua kantor bank baik yang melakukan kegiatan konvensional maupun syariah di seluruh Indonesia dari bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam Kliring.
- b. Kantor cabang bank maka semua kantor bank baik kantor cabang konvensional maupun kantor cabang syariah yang berlokasi pada wilayah kantor Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.

Tata cara dan persyaratan peserta kliring untuk kantor cabang syariah dan bank umum konvensional diperlakukan sama dengan bank umum. Sistem kliring ini dapat dilakukan dengan cara manual, semi otomatis, otomatisasi dan elektronik. Sertifikat IMA merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh bank-

bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bank-bank syariah yang kekurangan dana dan jangka waktunya 90 hari. diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat WBI adalah instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation/OMO*). Instrumen ini digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan uang yang beredar dengan jalan menambah/ mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, melalui bank-bank syariah. Instrumen ini dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Pembayaran dan pelunasan SWBI adalah melalui debit/kredit rekening giro bank yang ada di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo dana akan dikembalikan beserta bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter juga merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makro ekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar dan suku bunga. Dengan demikian agar kebijakan moneter tersebut efektif diperlukan perbankan yang sehat sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai agen intermediasi.

Bank Sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter misalnya melalui politik diskonto, cadangan minimum, pasar terbuka ataupun perkreditan yang dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar ataupun kredit perbankan. Pengaruh kebijakan moneter ini terasa pada sektor moneter perbankan yang di transfer ke sektor riil di buktikan bahwa perubahan dalam indikator Moneter (tingkat bunga, inflasi, kredit dsb) akan mempengaruhi sektor riil (misalnya konsumsi dan investasi) sehingga kegiatan ekonomi akan terpengaruh. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mencapai target makro ekonomi yang telah ditetapkan adalah intervensi politik terhadap Bank Indonesia yang kemudian mempengaruhi kebijakan moneter atau Bank Indonesia sendiri yang berpolitik. Hal ini bisa menyebabkan melesatnya target investasi yang pada gilirannya mempengaruhi nilai tukar rupiah, suku bunga, penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi serta pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Economic Review dan **federal Reserve AS** memperkenalkan **Unholy Trinity Theorem** yang menerangkan hubungan antar tiga variabel ekonomi makro yaitu system kurs, control devisa dan kebijakan moneter untuk mengandalkan inflasi. Pemerintah suatu negara dapat mengontrol dua dari tiga variabel tersebut namun tidak dapat mengontrol ketiganya sekaligus. Dalam ekonomi Islam sejak zaman Rosulullah sampai Khuafaur Rosyiftn, devisa digunakan sebagai alat pembayaran resmi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karimn, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta : IIIT, 2002

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer*, Jakarta : IIIT, 2002

Farted Wijaya, *Ekonomika Makro*, Yogyakarta : BPFE, 1990

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*.
Jakarta : Salemba Empat. 2003

Muhammad Umer Chapra, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta :
Gema Insam Press 2000

Nopirin. *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta BPFE : 2003

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

A. PENDAHULUAN

Setiap tahun pemerintah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kemudian mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi APBN. RAPBN itu berisi berbagai perencanaan, intinya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi neoklasik mempercayakan, bahwa kebijakan publik biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memacu tarif pada subsidi asing. Dalam bahasa ekonomi yang termasuk sebagai kebijakan publik salah satunya berupa kebijakan fiskal. Sehingga kebijakan fiskal dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrument manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah (Muhammad, 2002:107)

Bagaimana kebijakan Islam dalam hal fiskal? Lahimya kebijakan fiskal suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Fiskal adalah salah satu bagian atau instrument ekonomi publik. Pembahasan mengenai ekonomi publik biasanya sangat rumit karena masuknya faktor-faktor non-ekonomi ke dalamnya. Aspek-aspek sosial, politik dan strategy dalam kebijakan ekonomi publik itu penting dan tidak boleh dipisahkan, karena kehidupan adalah suatu kesatuan.

Kebijakan fiskal secara tradisional dikenal dengan keuangan publik. merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan (Muhammad, 2002:179-100)

Di dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal telah berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara Islam dan dikenal dalam teori ekonomi Islam yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama.

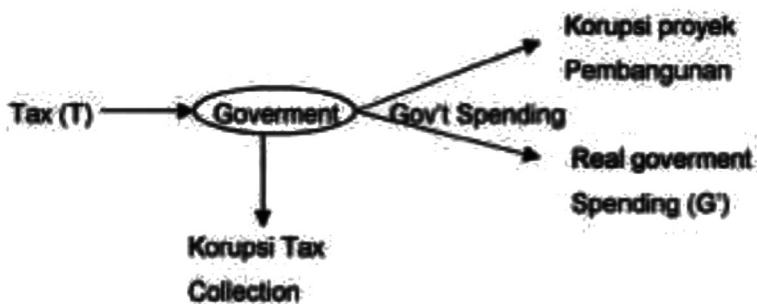
Munculnya Islam membuka zaman baru dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah suatu peristiwa yang tiada bandingnya. Beliau adalah utusan Allah SWT yang terakhir dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh umat manusia (*Rahmatan-lillalamin*). Michael Hard dalam bukunya yang terbaru, menempatkan beliau dalam daftar seratus orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah. Kata Hard. "Muhammad SAW terpilih untuk menempati posisi pertama dalam urutan seratus tokoh dunia yang paling berpengaruh, karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling baik di dalam kedua bidang: bidang agama dan bidang duniawi."

Setelah dihina dan dikejar-kejar orang-orang kafir Mekkah selama tiga belas tahun, Rasulullah hijrah ke kota Yathrib kota saingan Mekkah yang sejak itu disebut dengan nama Madinah. Pada saat hijrah, keadaan di kota yathrib masih sangat kacau. Mereka belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Sehingga tidak terdapat hukum dan aturan, maka tidak ada kewenangan ataupun sistem pajak dan fiskal. Kedatangan beliau dan para pengikutnya dari Mekkah diterima dengan baik serta antusias dan penduduk Madinah. Di Madinah beliau telah menjadi pemimpin suatu komunitas kecil yang terdiri dari para pengikutnya yang jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu.

Kaum lainnya, seperti kaum Yahudi juga telah menerimanya. Rasulullah pun menjadi pemimpin bagi bangsa Madinah Di bawah kepemimpinannya. Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi Negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya diseluruh Jazirah Arab, lengkap dengan aparatur negara yang jumlahnya sesuai dengan keadaan waktu itu. Sepuluh tahun menjelang wafatnya, Rasulullah telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Makkah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabtanya dalam memimpin dan akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh (Adiwarman azwar Karim, 2002:19).

Hubungan kebijakan fiskal dengan akibat yang ditimbulkan oleh praktek korupsi buruknya administrasi tinggi pajak. serta excessive seignorage yang mengakibatkan kegagalan pasar.

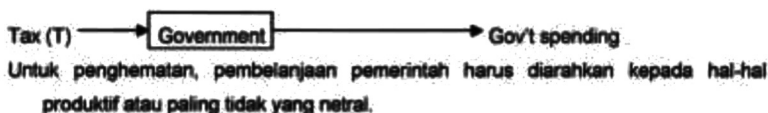
1. Korupsi dan kelemahan administrasi (corruption and bad administration)



$$G = T - \text{alfa} - \text{beta}$$

Alfa dan beta adalah wasteful spending

2. Excessive



3. Excessive seignorage



B. KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

1. Pengertian Dasar Teori Fiskal Dalam Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Al Qur'an adalah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran dan pendapatan. Keterangan ini mencerminkan suatu rancangan baru terhadap pengkajian masalah kebijakan fiskal, yang dikatakan Profesor R W Lindson, "Dalam membuat pengeluaran Pemerintah dan dalam memperotek pemasukan Pemerintah, penentuan jenis, waktu, dan prosedurlah yang harus diikuti". Tentu saja hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan khas tertentu. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Dalam teori, tentunya sistem perpajakan yang digunakan oleh negara-negara sekuler modern mengusulkan berdasarkan teori socio-politik dan keuntungan sosial maksimum dengan tujuan kesejahteraan umum rakyat. Sejauh tujuan yang dikehendaki tercapai, tujuan itu sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Tapi J S Mill dalam bukunya *Representatif Governments* secara tepat mengemukakan bahwa dalam prakteknya badan perundang-undangan merupakan perwakilan minoritas kecil yang biasanya merebut kekuasaan negara dengan kekayaan mereka atau dengan kapa-

sitas organisasi mereka. Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimana kita dapat menghadapi bahwa kebijakan fiskal akan dipahami dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat.

Negara Islam bukan suatu teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideology yang berperan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kebijakan fiskal dalam suatu negara Islam harus sesuai sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umat manusia tidak dapat dtcapai bila seluruh sistem hukum dan ekonomi tidak membicarakan kebijakan fiskal saja, dan hal ini konsisten dengan sifat-sifat Illahi yang pokok, yaitu: a.Maha Pemberi Rezeki, b.Maha Pemurah, dan Maha Pengasih. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang telah menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti ditetapkan dalam Al- Quran dan sunnah (Muhammad Abdul Manan, 1997:230).

Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tiga sektor membagi aktivitas perekonomian kedalam tiga pelaku utama dalam perekonomian, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Atau dengan kata lain, dalam perekonomian tersebut ada campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsi pemerintah.

Dengan adanya campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsinya, sisi pengeluaran dalam perekonomian terdin dan pengeluaran sektor rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Kemudian pada sisi pendapatan menggambarkan pendistribusian pendapatan oleh rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk membayar pajak kepada pemerintah, dan sisanya ditabung. Apabila sektor pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya kepada sector rumah tangga, maka subsidi

atau tunjangan ini ditambah pada pendapatan masyarakat. Atau dengan kata lain, pendapatan masyarakat akan bertambah apabila terdapat subsidi atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh sektor pemerintah.

Pengeluaran yang berasal dari sektor rumah tangga disebut juga pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran yang berasal dari perusahaan atau investasi perusahaan (I), dan pengeluaran dari sektor pemerintah adalah berupa pengeluaran pemerintah (G). Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang ada dalam perekonomian tiga sektor merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dari sektor rumah tangga, pengeluaran sektor perusahaan, dan pengeluaran sektor pemerintah. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$E = C + I + G$$

Kemudian untuk sisi pendapatan, pendapatan masyarakat didistribusikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga (C). Untuk membayar pajak (Tx), dan sisanya untuk tabungan (S). Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya (transfer payment/Tr) kepada sektor rumah tangga, hal ini akan menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian pada sisi pendapatan (Y) dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut

$$Y = C + Tx + S - Tr$$

Perekonomian akan berada dalam kondisi keseimbangan pendapatan yang diperoleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Atau secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = E$$

Karena pengeluaran seluruh masyarakat terdiri dari pengeluaran rumah tangga (C), investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah (G) maka syarat keseimbangan dalam perekonomian ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = C + I + G$$

Atau cara lain dapat digunakan untuk menentukan syarat keseimbangan dalam perekonomian yaitu dengan menyamakan antara komponen pendapatan dengan komponen pengeluaran. Dengan demikian dapat dituiis sebagai berikut :

$$E = C + Tx + S - Tr$$

$$Y = C + I + G$$

Kondisi keseimbangan teriad jika : $Y = E$

$$C + I + G = C Tx S-Tr$$

Atau

$$I + G = Tx + S-Tr$$

Persamaan diatas menunjukkan syarat keseimbangan padaa perekonomian tiga sektor Persamaan diatas juga dapat dituliskan:

$$S - I = G - Tx + Tr$$

Pada sisi kiri (S-I) disebut dengan istilah surplus sektor swasta dan pada bagian sisi kanan ($G - Tx + Tr$) disebut juga dengan defisit anggaran belanja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila surplus sektor swasta sama dengan defisit anggaran belanja.

Seperti halnya dengan analisis pendapatan Nasional pada perekonomian tiga sektor ini, pengeluaran konsumsi rumah tangga © masih kita gunakan pengeluaran konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan dengan proporsional dengan pendapatan. Atau secara sistematis dapat ditulis seogai berikut :

$$C = Co + b Yd$$

Yang menyatakan, bahwa:

Co = besarnya konsumsi otonom

$$B = MPC$$

Yd = Pendapatan nasional siap pakai (Desposable, yaitu pendapatan (Y) yang sudah dikurangi pajak (Tx) dan ditambah dengan pembayaran transfer (Tr))

Atau

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Kemudian untuk pengeluaran sektor perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah (G) masih diperlukan sebagai variabel eksogen. Atau dengan kata lain pengeluaran untuk investasi oleh perusahaan dan pengeluaran pemerintah merupakan variabel konstan.

Pajak yang ditarik pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang sifatnya tetap (lum-sum tax) dan pajak yang besar kecilnya tergantung dan besar-kecilnya pendapatan nasional (proportional tax) Atau dapat dapat dituiis sebagai berikut:

$$\text{Pajak lum-sum tax : } T_x = T_{x0}$$

$$\text{Pajak proporsioanl : } T_x = tY$$

Pajak tak langsung sering bersifat regresif, terutama bila komoditi yang kena pajak merupakan suatu kebutuhan hidup. Dipandang dari segi adanya struktur pajak progresif, sesungguhnya pajak langsung jauh tebih dikendaki danpada pajak tak langsung. Bila suatu kebijakan kesempatan kerja penuh menghendaki kecenderungan marjinal yang tinggi untuk konsumsi tampaknya perpajakan progresif diperlukan untuk memudahkan kekayaan dari golongan kaya yang memiliki kecenderungan konsumsi marjinal yang relative rendah, kepada golongan miskin, yang mempunyai kecenderungan konsumsi marjinal yang sangat tinggi.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena hal ini, maka pendapatan tidak dipajak pada sumbemya atau bila pendapatan ini bertambah tetapi pada tabungan dan penimbunan yang dipajak.(Adiwarman.2002:232-233).

Berkat langkah-langkah yang diambil Rasulullah pada waktu sesudah hijrah ke Madinah kesejahteraan kaum Muslimin meningkat pesat Setelah beberapa tahun berhijrah, para muhajirin

sudah mempunyai tempat tinggal pekerjaan dan standar kehidupan yang bagus. Peningkatan kesejahteraan ini di satu sisi menyebabkan pembayaran zakat oleh kaum Muslimin menjadi wajib, karena pendapatan per kapita mereka telah melebihi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Seperti yang kita ketahui, kegiatan utama ekonomi pada awal perkembangan Islam meliputi perdagangan, pertanian dan peternakan. Pendapatan dan dua kategori pertama dapat diuangkan dalam dinar dan dirham yang merupakan unit moneter pada awal perkembangan Islam. Batas minimum untuk mengeluarkan zakat bagi pedagang dan pengrajin tentu dalam bentuk dinar dan dirham.

Nisab untuk para petani pun ditentukan. Batas untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian yang berupa gandum, gers (sejenis gandum), kismis dan kurma adalah lima wasq atau sekitar 847 kilo pertahun. Apabila petani menanam sendiri, pendapatan dasar bebas pajaknya adalah 3.392 kilo per tahun. Hal ini di asumsikan bahwa nilai dari keempat hasil panen adalah sama. Namun jika yang dimaksud “petani* adalah penggarap tanah atau pemilik kebun pendapatan dasarnya adalah setengah dari jumlah yang tadi disebutkan.

Nisab peternak ditentukan dengan cara yang hampir sama dengan di atas. Zakat untuk domba, lembu dan unta secara berurutan adalah 40 domba, 30 lembu dan 5 unta. Jika kita mengasumsikan bahwa nilai setiap unta adalah 10 domba dan nilai setiap ekor lembu adalah 5 domba, maka pendapatan dasar bebas pajak bagi peternak adalah 240 domba per tahun. Sekarang jika kita mengasumsikan bahwa harga dan domba adalah 10 dirham, nisab peternak adalah sekitar 2400 dirham. Kemudian jika kita menganggap bahwa peternak hanya memelihara domba atau unta saja, nisab pendapatan tahunan peternak masing-masing adalah 400 dirham 1.500 dirham dan 500 dirham. Jika kita memasukkan ongkos produksi bagi ketiga kegiatan yang telah disebutkan tadi atas kegiatan di padang rumput Hijaz, maka

akan kita lihat bahwa nisab peternak akan sama pada setiap kasus dan pengeluaran zakat mereka melebihi pedagang.

2. Kebijakan Pemasukan Terhadap Non-Muslim

Sesungguhnya suatu Negara Islam cenderung memperlakukan kaum Muslimin dan non-Muslimin secara berbeda, dalam hal pengumpulan pemasukan. Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taqhlub yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslim. Banu Taqhlub adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Umar mengenakan Jizyah kepada mereka tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sadaqah. Namun Ibnu Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi asset Negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sadaqah yang harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka pun menyetujui dan menerima membayar sadaqah ganda (Muhammad Abdul Mannan 1997: 232-233)

C. FUNGSI DAN KEBUANGAN FISKAL DALAM ISLAM

1. Peranan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.

Pada sistem sosial sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah. Pada sistem kapitalis peranan sektor publik relatif

kecil tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin,

Beberapa hal penting ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :

- a. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintah Muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dan orang-orang Muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab Suci Al-Qura
- b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Perubahan ini secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter tetapi juga pada kebijakan fiskal. Ketika bunga mencapai tingkat keseimbangan dalam pasar uang tidak akan dapat dijalankan, beberapa alternatif harus ditemukan. Salah satu alat alternatifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang idle.
- c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas-bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dan pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Oleh karena itu, ukuran public debt menjadi lebih kecil.
- d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan per-angkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Muslim yang masih terbelakang. Pembayaran pajak dalam ekonomi Islam adalah secara jelas sebagai bagian dari upaya- upaya mengembangkan Islam.

- e. Negara Islam merupakan Negara yang sejahtera dimana kesejahteraan memiliki makna yang luas dan konsep Barat Kesejahteraan meliputi aspek material dan aspek spiritual dengan lebih besar menekankan pada sisi spiritual. Negara Islam bertanggung jawab untuk melindungi agama warga Negara, kehidupan, keturunan, dan harta milik. Jadi, segala sesuatu itu secara tidak langsung meningkatkan barang-barang itu.
- f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya tetapi juga pada harta bendanya untuk menjaga agama
- g. Akhirnya namun hal yang sangat penting, hak perpajakan dalam Negara Islam tidak tak terbatas. Beberapa orang kebanyakan mengatakan bahwa kebijakan perpajakan di luar apa yang disebut zakat ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berada dari penafsiran sistem ekonomi sekuler. Namun mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Setelah dihina dan dikejar-kejar kafir Mekkah selama tiga belas tahun, Rasulullah beserta pengikutnya hijrah ke kota Yathrib yang sekarang dikenai dengan kota Madinah. Di Madinah dalam waktu yang singkat Rasulullah menjadi pemimpin suatu komunitas kecil yang terdiri dari pengikutnya serta kaum lainnya. Dibawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi Negara yang

sangat besar dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya di Jazirah Arab, lengkap dengan aparatur Negara. Rasulullah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah.

Sebagai pemimpin dari suatu negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau seperti:

1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya
2. Merehabilitasi muhajirin Mekkah di Madinah.
3. Menciptakan kedamaian dalam negeri
4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
5. Membuat konstitusi negara
6. Menyusun sistem pertahanan negara
7. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara

Sebelum membahas tentang tahap-tahapan tersebut, ada dua aspek yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Pertama adalah adanya fenomena unik yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Segala aspek keluarga, komunitas, institusi dan pemerintahan berubah menuju prosedur-prosedur yang baru, semua peraturan dan regulasi disusun berdasar Al Qur'an, dengan memasukkan karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraan, persamaan kebebasan dan kebersamaan.

Kedua, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan atau pun moneter. Karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwariskan harta, dana, maupun persediaan dari masa lampau. Sementara sumber keuangan pun belum ada. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak dapat dimobilisasi dalam waktu dekat. Keadaannya masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan sehingga Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi masalah-masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan. Tahapan-tahapan berikut inilah yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut:

Tugas pertama adalah mendirikan sebuah masjid. Tanah yang digunakan untuk membangun masjid didapatkan dari dua anak yatim piatu dengan harga sepeutuh dinar yang dibayarkan oleh Abu Bakar. Masjid tersebut dibangun dengan struktur yang sangat sederhana dengan menggunakan batu dan batu-bata yang dijemur. Atapnya ditutup dengan daun-daun palem dan tiangnya terbuat dari batang-batang pohon. Masjid tersebut dibangun secara sukarela. Rasulullah beserta dengan pengikutnya bergotong-royong menyelesaikan pembangunan masjid ini. Selain menjadi tempat ibadah, masjid tersebut juga digunakan untuk beberapa tujuan lainnya, seperti tempat pertemuan parlemen (dewan perwakilan rakyat), kesekretariatan, mahkamah agung, markas besar tentara, kantor urusan luar negeri, rumah bagi para tamu, pusat pendidikan, tempat pelatihan bagi para penyebarluasan agama (seperti pesantren), asrama, baitul maal, tempat para dewan dan utusan, atau singkatnya berfungsi sebagai Islamic Centre. Oleh karena masjid tersebut memiliki multi fungsi, Negara baru tersebut dapat menghindari pengeluaran yang terlalu banyak untuk pembangunan infrastruktur.

Tugas kedua dari Rasulullah adalah memecahkan permasalahan Muhajirin (pengungsi dari Mekkah) yang hanya membawa sedikit persediaan baik yang sudah tiba di Madinah maupun yang masih dalam perjalanan. Mereka berjumlah sekitar 150 keluarga. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka di Madinah tidaklah mudah. Mata pencaharian mereka yang tergantung pada bidang pertanian dan tidak ada bantuan keuangan, menjadikan tugas ini sangat sulit dilakukan. Namun Rasulullah SAW dapat menyelesaikannya dengan cara baru. Beliau menanamkan tali persaudaraan antara individu atau kelompok Anshor dan Madinah dengan Muhajirin yang setiap individu atau keluarga dan kelompok Anshar memberikan sebagian hartanya kepada saudara Muhajirinnya sampai mereka mendapatkan mata pencaharian baru untuk melangsungkan hidupnya.

Untuk kedamaian dan keamanan dalam negeri, Madinah dinyatakan sebagai daerah anti pelanggaran, "di antara kedua

Harrahnya (daerah pegunungan berapt di sekitar Madinah) padang rumputnya tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang. dan tidak diperbolehkan membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan. atau pun peperangan.”

Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar dan juga membuat konstitusi bagi jalannya pemerintahan. Rasulullah mengeluarkan piagam (charter) yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu Negara. Sementara itu hak-hak kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara telah ditentukan secara jelas.

4. Kebijakan Fiskal Masa Kekhalifahan Abu Bakar Siddiq

Selama sekitar 27 bulan dari masa kepemimpinannya. Abu Bakar telah banyak mengangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar Zakat kepada Negara. Salah satu suku telah mengumpulkan Zakat dan mendistribusikannya diantara mereka sendiri tanpa sepengetahuan Hazrat Abu Bakar.

Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan Zakat Seperti yang ia Katakan pada Anas (seorang amil), bahwa “jika seorang yang harus membayar satu unta betina berumur setahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina yang berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor Zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua kambing padanya, “sebagai kelebihan pembayarannya dalam kesempatan yang lain, ia menginstruksikan pada amil yang sama, “kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat dipisahkan (ditakutkan akan teradi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan Zakat).

Pada masa Rasulullah, pendapatan baitul maal (selain hewan) disimpan di Masjid Nabawi, tapi pada saat itu tidak ada uang tunai yang tersisa. Berapapun uang yang masuk, langsung didistribusikan pada saat itu juga termasuk ketika baitul maal menerima uang sebesar 80.000 diham dari Bahrain.

Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sikh, yang terletak di pinggir kota Madinah tempat baitul maal dibangun. Abu Ubaida ditunjuk sebagai penanggung jawab baitul maal. Setelah 6 bulan Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk baitul maal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan sehingga pada saat dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangari.

Menurut Siti Aisyah, ketika Abu terpilih, beliau mengatakan, "Umatku telah mengetahui yang sebenarnya bahwa hasil perdagangan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga tapi sekarang saya dipekerjakan untuk mengurus kaum Muslimin. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dan baitul maal ini. Menurut beberapa keterangan beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari baitul maal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham pertahun.

Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah atau gajinya. Ketika dibentahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Dibentahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak yang tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin, seekor unta pembawa air dan sehelai kain pakaian biasa Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat. Ketika semua ini diberitahukan

kepada Umar, ia berkata Oh Abu Bakar! Kamu membuat tugas dari penggantianmu menjadi sangat sulit.

5. Kebijakan Fiskal Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab Al Faruqi

Sebelum kematiannya, Abu Bakar menominasikan Hazrat Umar sebagai penerusnya dan pencalonan tersebut diterima secara aklamasi “Masuknya Umar dalam kekhalifahan.” tulis Amir Ali, “adalah nilai yang tinggi bagi Islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat” (dan kemampuan administrasi).

Baru-baru ini, seorang penulis dari Amerika, Michael H Hart, dalam bukunya *The Hundred*, buku yang merengking orang-orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia, menempatkan Umar pada posisi ke-51 dalam urutan tersebut Ia menulls keberhasilan Umar sangat mengagumkan. Setelah Rasulullah SAW yang ditempatkan pada posisi pertama Umar adalah figure utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah-daerah kekuasaan, Islam diragukan dapat tersebar luas seperti sekarang ini. Bahkan sebagian besar wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, Syria, Palestina, Mesir (bagian dan Kerajaan Byzantium), Iraq (bagian dari Kerajaan Sassaid) dan Persia (pusat dari Sassaid) ditaklukkan dan dia dijuluki *Saint Paul of Islam* oleh dunia barat.

Kontnbusi terbesar Umar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H Abu Hurairah. Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500 000 dirham Kharaj. Itu adalah jumlah yang besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis Syura untuk menanyakan pendapat mereka dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut

tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk Ummah. Untuk menyimpan dana tersebut, baitul maal yang regular dan permanent didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqram (yang selama hidup Nabi menyimpan data mengenai suku-suku dan sumber aimya serta keluarga Anshar) ditunjuk sebaga pengurus baitul maal (sebagai menteri keuangan) bersama dengan Abdurahman bin Ubaid Al-Qari serta Muayqab sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul maal meningkat (kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua | ula dinar).

Baitul maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara Islam dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi (tunjangan Umar tetap 5 000 dirham setahun dan dua stel pakaian untuk setahun. satu untuk musim dingin, dan satunya untuk musim panas, serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji). Ia tidak mengambil keuntungan materi atas posisinya yang biasanya diiakukan oleh pemerintah zaman sekarang.

Walaupun uang dan properti baitul maal dikontrol oteh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti Zakat dan ushr), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Qur'an.

Properti baitul maal dianggap sebagai "harta kaum muslim", sedangkan Khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang bangkrut, membayar hutang diyat untuk kasus-kasus tertentu (seperti membayar diyat prajurit

Shebani yang membunuh seorang Kristen untuk menyelamatkan nyawanya) dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial (seperti membayar Hind Bint Ataba dan lainnya). Bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.

Bersamaan dengan reorganisasi baitul maal, Umar mendirikan Dewan Islam yang pertama yang disebut al-Divan, yang sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan yang lainnya dalam basis yang regular dan tepat.

Khalifah juga membentuk sebuah komite yang terdiri dari Nassab ternama (orang ahli dalam sejarah keluarga dan keturunan) untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Daftar tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:

Pertama orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi SAW. Kedua mereka yang ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Ketiga, imigran ke Abyssini dan Madinah. Keempat mereka yang bertarung dalam Qadissiyya atau yang hadir dalam sumpah Huddaybiyya dan seterusnya. Kaum wanita, anak-anak dan para budak juga diberi tunjangan. Orang-orang Mekkah (bukan Muhajirin) diberi tunjangan 800 dirham. warga Madinah 25 dinar, muslim di Yaman, Syria, dan Iraq 200 sampai 300 Dirham, anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing 100 dirham. Tambahan pensiun untuk kaum muslim adalah gandum, minyak, madu. dan cuka dalam jumlah tetap. Kuantitas dan jenis barang berbeda-beda disetiap wilayah.

Adalah yang pertama dalam sejarah dunia dimana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya. Sistem yang mencampur pensiun militer dan politik menjadi satu ini, dikatakan oleh berbagai sejarawan suatu hal yang menakjubkan, tetapi Haikal melaporkan bahwa Hakim bin Hizam, mengatakan “Amirul-

Mukminin Orang Quraisy adalah pedagang dan apabila kau memberi mereka tunjangan, mereka akan meninggalkan perdagangan. Mungkin akan tiba saatnya nanti pemimpin mereka menghentikan tunjangan, sementara mereka berhenti menjadi pedagang Dapat dibayangkan bagaimana nasib mereka.”

Ramalan itu terbukti benar dan ketika tunjangan mereka dihentikan pada masa Abbasiyah, Hijas menjadi mandul dan tidak dapat memperoleh vitalitasnya kembali. Umar tidak pernah menginginkan terbentuknya ketompok prejudis maupun membuat orang Arab malas dan tergantung. Menurut Shibli, langkah itu merupakan tahap pertama mobilisasi Negara, mulai dari Quraysi dan Anshar menyadari efek yang sangat jauh, terutama pada strata social. Umar memutuskan untuk meningkatkan batas bawah Ataya tahun depan, tetapi pembunuhan terhadapnya mengakhiri semua rencana itu.

6. Kebijakan Fiskal Masa Kekhalifahan Usman Bin Affan

Usman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang |ujur dan saleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah seorang dan beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi SAW. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan khalifah kedua. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti lebih fatal baginya dan juga bagi umat Islam.

Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balk, Kabul Ghazni, Kerman dan Sistan dttaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara

pembentukan organisasi kepolisian tetap. Sampai dengan 30 tahun setelah hijrah, tidak ada armada laut Muslim. Pernah sekali Muawiyah, Gubernur Syria memmta izin pada Umar untuk memimpin ekspedisi kelautan. Umar mengkonsultasikannya dengan beberapa orang, termasuk Gubenur Amar Din Ash, dan memberitahukan kepada Muawiyah, bahwa percobaan beresiko semacam ini harus dihindari. Umar sangat terusik ketika ia mendengar tentang adanya ekspedisi eksplorasi oleh salah seorang Gubernurnya menjadi Thana (semenanjung barat India) dan memperingatkannya dengan keras.

Ketika Usman menjadi khalifah, Muawiyah meminta izin untuk menyerbu Syprus, tetapi Usman mengerti bahwa Umar pernah menolak usulan tersebut, dia pun menolaknya. Pada tahun 27, Muawiyah kembali menulis surat kepada Usman dan dia membalasnya “jika engkau berlayar dengan istrimu, kami izinkan engkau melakukannya, bila tidak jangan lakukan”. Berkaitan dengan itu Muawiyah berlayar dengan kapal besar, ditemani istnnya. Begilu pula panglima lainnya Ubadah Ibnu Samit membawa istrinya bersamanya. Kemudian Syprus ditaklukkan dan pada tahun 30 setelah hijriah kaum Muslimin telah mengorganisasikan angkatan lautnya semakin baik sejalan dengan dikuasainya Rhodes dan Byzantium. Setelah dua tahun, ketika orang-orang Syprus melanggar perjanjian, Muawiyah kembali menyerbunya pada tahun 33 sesudah hijriah, dengan lima ratus kapal Di Mesir, ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir kaum Muslimin di bawah perintah Amar mampu mongerahkan dua ratus kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian, kaum Muslimin membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca da Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam, Sementara itu biaya pemeliharaan angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dan beban pertahanan di periode ini.

7. Kebijakan Fiskal Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Setelah terbunuhnya usman, maka timbul anarki di ibukota Negara dan pada hari kelima, ali dengan suara bulat terpilih menjadi khalifah menggantikan usman. Ali menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya yang pertama. Segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Usman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Usman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh usman. Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendirinya sernasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Usman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak. Diantaranya yang menolak adalah Muawiyah. Gubernur Syria, yang kemudian bersama sekutu-sekutunya menuntut balas atas kematian Usman.

Ali berkuasa selama lima tahun, Sejak awal dia selalu mendapat perlawanan dari kolompok yang bermusuhan dengannya, pemberontakan kaum Khanji dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independent di daerah Syria dan kemudian Mesir. Khalifah sudah memindahkan ibukota dari Madinah ke Kufah tetapi tidak ada gunanya. Menurut sebuah riwayat, dia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan dari baitul maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Apa pun faktanya, hidup ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan Negara. Suatu hari saudaranya aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat. Kemudian Aqil pergi menemui Muawiyah mengajukan permohonan yang sama dan dia diberi uang dalam jumlah yang cukup besar. Gubernur Ray pun dijabloskan ke penjara oleh khalifah dengan tuduhan penggelapan uang Negara.

Masih ada ketidakjelasan permasalahan yang dilakukan oleh Ali dalam membebaskan khums atas ikan atau hasil laut. Menurut Baladhuru, Ali membebaskan para pemilik hutan (*Ajmat*) 4.000 dirham. Dia menulis kepada mereka sebuah pernyataan yang ditulis dialas sehelai perkamen. Hutan-hutan ini terhampar di daerah istana raja Namruz di Babilonia. Di hutan ini, terdapat negara yang dalam, yang menurut beberapa orang, tanah untuk batu-batu istana dibuat, dan menurut yang lainnya, itu adalah tanah longsor.

Ibnu abbas. Gubernur Ali di Kufah, memungut zakat atas sayuran yang tidak membusuk yang digunakan untuk bumbu. Seperti sudah dinyatakan sebelumnya, Ali tidak hadir pada pertemuan Majelis Syuro di Djabiya (masuk wilayah Madinah) yang diadakan oleh Umar untuk menyepakati peraturan-peraturan yang sangat penting yang berkaitan dengan daerah taklukan. Pertemuan itu juga menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Maal, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Semua kesepakatan itu berlawanan dengan pendapat Ali. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, dia mendistribusikan seluruh pendapatan dari propmsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Busra, dan Kufa. All ingin mendistribusikan Sawad namun dia hams menahan diri karena takut terjadi perselisihan. Nahju Balagha lebih jauh menambah. Prinsip ulama dari pemerataan distribusi uang rakyat diperkenankan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua perhitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai perhitungan bank. Mungkin cara itu merupakan solusi yang terbaik dipandang dari segi hukum dan keadaan Negara yang sedang mengalami perubahan kepemimpinan. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan para pengikutnya di Irak.

Kurang atau lebih alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilangkan seluruhnya, karena

daerah sepanjang garis pantai seperti Syria, Palestine, dan Mesir berada dibawah kekuasaan Muawiyah. Tetapi dengan adanya penjaga malam dan patroli (diciptakan oleh Umar), Khalifah keempat tetap menyediakan polisi regular yang terorganisir, yang disebut Shurta, dan pemimpinnya diberi gelar Sahibus Shurta. Fungsi lain dari Baitul Maal masih tetap sama seperti yang dulu dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada periode ini.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Malik Asher bin Harith. Surat itu antara lain mendiskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim, abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berurusan dengan sipil, pengadilan dan angkatan perang. Ali rnenekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berhubungan langsung dengan rakyat melalui pertemuan yang terbuka, terutama dengan orang-orang miskin orang yang teraniaya dan orang-orang cacat. Disurat itu juga ada instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan membahas para tukang catut, penimbun barang dan pasar gelap Singkatnya surat itu menggambarkan kebijakannya yang ternyata konsep-konsepnya ditiru secara luas dalam administrasi publik, bahkan kebijakan itu ditiru oleh para Gubernur yang melawan Islam dan di Mesir. di tempat Muhammad Ibn Abu Bakar, terbunuh di medan perang bersama dengan para pendahutunya dan khalifah kehilangan daerah Mesir dan daerah-daerah lainnya dan yang tersisa hanyalah dokumen yang bersejarah.

D. PASAR BARANG DAN JASA DALAM ISLAM

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam tentang perdagangan dan niaga adalah tolok ukur dan kejujuran dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan lakaran yang tidak benar, dan menciptakan ikhtikad baik dalam transaksi bisnis.

Sumpah palsu. Sekarang banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar dewasa ini dan sebagian dan ketidakacuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh pengusaha. Abu hurairah berkata Aku mendengar Rasulullah SAW berkata "Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya) (Bukhari) Selanjutnya Diriwayatkan Abu Oharr (kemudian) berkata "Hancur dan hilanglah mereka (sungguh)! Siapakah mereka itu ya Rasulullah!" Nabi SAW berkata "Mereka adalah orang yang memamerkan kemewahan dengan melorotkan celananya sampai ke bawah tumit. mereka yang selalu membicarakan kewajiban yang dilakukannya kepada orang lain, dan mereka yang menjual habis barangnya dengan melakukan sumpah palsu." (Muslim).

Takaran yang Benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus dilakukan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dan faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Dalam Al-Qur'an telah di jelaskan:

“Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menemuka takaran dan orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang unjuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaktah orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dtbangkitkan pada suatu hari yang besar, dan ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka, tersimpan dalam Sijjin” (QS.AI Mutafifin, 83:2-7).

Etika baik Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menimbang etika baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini. Dari pengamatan yang diteliti diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua belah pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini terdapat perintah jelas dalam Kitab Suci Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena “yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan” (Q.S Al Baqarah, 2:282-283). Hendaknya tulisan tersebut harus menguraikan syarat-syarat yang disetujui dengan jujur dan sebagai tindakan pencegahan adanya kemungkinan yang buruk ditentukan bahwa syarat-syarat perjanjian diimlakan oleh orang yang menanggung hutang. Bila si penanggung hutang atas namanya, lemah akalnya, lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu maka walinya atau orang yang mewakili kepentingannya yang harus mengimlakan syarat-syarat perjanjian tersebut. (Q.S Al Baqarah, 2:282).

Dari analisis di atas jelas bahwa perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan modern tidak demikian. Karena itu, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Dan Negara Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang

berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.

2. Perdagangan Barter

Perdagangan barter pernah merupakan praktek sehari-hari yang berlaku. Walaupun setelah berlakunya ekonomi uang, volume perdagangan barter sebagian besar menjadi berkurang namun arti penting perdagangan barter sampai sekarang pun tidaklah dapat dianggap kecil artinya Islam juga telah mengakui perdagangan barter seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebenarnya Islam menekankan pada para pedagang agar barang atau benda yang cacat dan tidak berharga tidak diberikan sebagai pengganti barang dan benda yang baik (Q.S An Nisa: 4-2). Bila terdapat cacat pada barang yang dijual, hal ini haruslah dinyatakan kepada pembeli. Demikianlah Hakim ibn Hizam meriwayatkan "Rasulullah SAW berkata "Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Bila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan putus." (Bukhari).

Sebelum Islam terdapat dua jenis penjualan, yaitu Muna-badhah dan Mulamasah Dalam. Hal ini pembeli tidak mendapat kesempatan memeriksa barang yang dibelinya, karena itu dinyatakan tidak sah (Bukhari). Sesungguhnya barang dan komoditi untuk dijual haruslah berlaku pada pasar terbuka. dan pembeli serta agennya harus mengenal keadaan pasar sebelum membuat pesanan pembelian barang atau komoditi secara besar-besaran. Seharusnya penjual tidak diperkenankan untuk menarik keuntungan dari ketidaktahuan pembeli akan keadaan pasar dan harga yang berlaku. Semua hal ini jelas ditetapkan oleh Nabi SAW.

Berdagang berhala dan makanan/mmuman haram, seperti anggur, daging babi dan hewan mati tanpa disembelih tidak boleh

(Bukhari). Islam tidak memberantas pemujaan terhadap berhala dan karena itu tidak mungkin memperkenankan berdagang berhala. Mengenai makanan/minuman haram, seorang Muslim sudah tentu tidak berurusan dengan hal itu, karenanya ia pun tidak diperkenankan menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa kulit hewan yang mati jangan dibuang percuma karena harus diperoteh keuntungan darinya (Bukhari). Melakukan perdagangan dan perdagangan barter dalam hal ini jelas tidak dilarang dan ketentuan yang sama dapat diperkenankan bagi benda-benda lain yang dilarang seperti tulang dan lemak hewan mati, dan sebagainya.

3. Usaha Monopoli

Dalam perekonomian Islam yang terpenting ialah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu tiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangai tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat islami. Dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulasi dalam Islam.

Karena pada umumnya si pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi bagi hasil produksinya (monopoli mendambakan pemusatan suplai dalam satu tangan), maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang bersaing memaksimumkan labanya dengan menyamakan biaya marginal dengan harga. Karena harga ditentukan, dia akan terus memproduksi, kian lama kian banyak hingga biaya marginalnya menyamai harga. Tetapi dalam monopoli penerimaan marginal tidak sama dengan harga, melainkan selalu kurang dari harga. Karena permintaan untuk produksinya kurang dari elastis secara sempurna maka si pelaku monopoli dapat mengharapkan untuk menjual hasil produksi yang bertambah dengan harga yang kian lama kian rendah. Pendapatan keseluruhannya bertambah bila ia menghasilkan lebih banyak, karena harga unit tambahan akan ditambah pada

pendapatan keseluruhannya. Tetapi dipihak lain, pendapatan keseluruhannya ini akan menurun, karena unit hasil produksinya yang terdahulu harus dijual dengan harga yang lebih rendah. Karena itu, pendapatan marginal mungkin mudah negatif, walau harga positif. Diketahui bahwa harga sebagai penerimaan rata-rata penerimaan keseluruhan dibagi oleh keseluruhan pengeluaran. Karena itu pendapatan marginal kurang dari rata-rata.

Karena situasi yang paling menguntungkan bagi si pelaku monopoli diwakili oleh hasil produksi dengan biaya marginal yang sama dengan pendapatan marginal maka si pelaku monopoli akan merasa lebih menguntungkan baginya jika menghentikan produksi selanjutnya sebelum pendapatan marginal menjadi negative. Karena pendapatan marginal tetap lebih rendah daripada harga rata-rata maka produksi barang-barang yang optimum tidaklah mungkin. Akhirnya hal ini akan menyebabkan berkurangnya penggunaan sumber daya dan menimbulkan pengangguran.

Sebenarnya, banyak keuntungan teoritik system usaha bebas yang tergantung pada asumsi tersirat yaitu tercapainya persaingan bebas. Tapi, celaknya kegiatan kapitalisme yang sesungguhnya telah menambah kekuasaan dan pengaruh perserikatan kartel, dan monopoli-monopoli raksasa. Para konsumen, pekerja miskin dan masyarakat secara keseluruhan pun menjadi korban dari suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli seperti itu. Suatu tatanan seperti yang telah memperlihatkan tiadanya harmoni antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial. Yang akan dikemukakan di sini ialah bahwa suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli merupakan suatu yang berlawanan dengan prinsip untuk keuntungan sosial sebanyak-banyaknya yang diusulkan agar tercapai oleh suatu Negara Islam. Karena itu, suatu Negara Islam seharusnya mengutuk jenis tatanan ekonomi seperti ini dan harus dapat mengendalikan monopoli, baik dengan membuat undang-undang atau dengan perencanaan ekonomi secara menyeluruh. Perlu dicatat di sini bahwa dalam beberapa kegiatan (yaitu perusahaan-perusahaan

pelayanan masyarakat) mungkin monopoli tidak bertentangan dengan jiwa Islam karena persaingan dapat menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya.

4. Usaha Spekulatif

Seperti halnya monopoli, Islam juga melarang usaha spekulasi. Maksudnya adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu lain. Bila harga pada masa depan diharapkan lebih baik dari pada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membelinya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kelak. Demikian pula, bila harga masa depan diharapkan akan lebih rendah dari harga sekarang, para spekulasi akan menjualnya sekarang untuk menghindari penjualan pada harga yang lebih rendah nantinya. Para spekulasi, demikian dinyatakan, memberi keuntungan yang besar bagi para konsumen dan pemilik pabrik, karena akibat dari kegiatan mereka adalah untuk melicinkan harga sekarang ke tingkat harga masa depan.

Sejauh spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini sesuai dengan jiwa Islam. Namun bila diamati secara cermat, terungkaplah kenyataan bahwa para spekulasi itu pertama-tama tertarik pada keuntungan pribadi tanpa memedulikan kepentingan masyarakat banyak. Karena spekulasi sempurna cenderung menghancurkan diri sendiri, maka kebanyakan spekulasi dengan cara yang tidak jujur berusaha menciptakan kelangkaan barang dan komoditi secara dibuat-buat, dengan demikian terciptalah suatu tekanan inflasi pada ekonomi. Massa rakyat miskinlah yang menjadi korban. Dari segi kebijakan, Islam mengutuk praktek spekulasi seperti ini. Demikianlah diriwayatkan oleh Ma'mar yang menyatakan bahwa Nabi SAW berkata "*Barang siapa menumpuk persediaan gandum di masa kekurangan (dengan maksud memperoleh keuntungan kelak), dia*

berdosa besar." (Muslim dan Miskat). Selanjutnya diberitakan oleh Umar, Nabi SAW berkata. "*Barang siapa mengimpor gandum dari luar dan menjualnya dengan harga pasar, pemeliharaannya diberkahi sedangkan barang siapa yang menahan gandum dengan maksud menjualnya dengan harga mahal yang diperkirakan kelak. Allah tidak akan memberkatinya.*" Jadi menahan gandum dan komoditi lain untuk menaikkan harga secara disengaja dilarang, demikian pula *Najsh* atau menipu pembeli melalui pihak ketiga dengan menawarkan harga yang lebih tinggi (Bukhari). tetapi lelang atau penjualan terbuka pada penawar yang tertinggi, diperkenankan dalam Islam (Tarmidzi).

Islam telah berusaha mencegah usaha spekulatif dengan mengaitkannya dengan pandangan moral. Bahkan dalam suatu masyarakat kapitalis beberapa upaya dilakukan untuk mengendalikan usaha spekulatif. Dalam bukunya, *Economic of control* (hal: 97). Profesor Lerner telah mengemukakan bahwa kejahatan spekulasi yang agresif, paling baik bila dicegah dengan apa yang disebutnya bisnis spekulatif, yang dikendalikan oleh "kontra-spekulasi". Pemerintah hendaknya membentuk suatu badan yang mernbuat perkiraan harga yang tepat menggunakan sumber dayanya untuk membawa harga yang sesungguhnya ketingkat ini. Bila diperlukan Negara Islam harus mengembangkan sistem demikian, sehingga rakyat miskin, bahkan seluruh masyarakat dapat diselamatkan dan eksploitasi para spekulan terkutuk. Karena Negara sekuler modern sedang menuju pada materialisme, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, walaupun mereka bersungguh-sungguh. Mungkin karena inilah Profesor Taussig berusaha menemukan pemecahan masalah ini, dengan memperbaiki moral rakyat. Menurut pendapatnya "Obat paling mujarab tentunya adalah norma moral yang lebih baik untuk semua industri dan membangkitkan pendapat umum dalam menentang segala jenis perjudian". Dalam hubungan ini pendekatan Profesor Tassig terhadap masalah ini mirip dengan sudut pandang Islam. Sesungguhnya, prinsip perekonomian Islam merupakan perpaduan harmonis antara nilai moral dan material.

5. Perdagangan Internasional Dan Banting Harga

Bila seseorang mengkaji sejarah hukum perniagaan dia dapat melihat bahwa kaum Moro Muslim yang luas pandangannya mempunyai hubungan dagang yang ekstensif dengan Levant dari Barcelona dan tempat-tempat lainnya. Ada kantor perdagangan dan koneul di Tunisia sedangkan perdagangan besar diselenggarakan dengan Istambul. Perdagangan ini mencapai pelabuhan India dan Cina dan meluas sepanjang pantai Afrika sampai Madagaskar. Menarik untuk diketahui bahwa pada pertengahan abad kedelapan ketika Eropa masih berada dalam zaman kegelapan, bangsa Arab Muslim Spanyol yang berpandangan luas seperti Abdul Qasim dan yang lainnya telah menulis risalah tentang prinsip perdagangan, hukum perniagaan dan pajak. Sesungguhnya Islam telah memberi dorongan pada perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama ekonomi tapi juga untuk membentuk persaudaraan sejawad raya dengan saling bertukar ide dan pengetahuan. Oleh karena itu pasti timbul tingkat teknik yang berbeda di antara daerah perdagangan Islam secara efektif melakukan transaksi niaga dan perdagangan. Tingkat dan teknik ini harus berubah dengan berubahnya keadaan waktu.

E. PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KESEIMBANGAN PASAR

Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakatnya, yang sebagai tanggung jawabnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang diantaranya juga harus dipikul oleh anggota masyarakatnya demi menggapai masyarakat ideal Islam mensyaratkan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi para aparat sebagai pelaksana proyek : kesejahteraan masyarakat.

Syarat-syarat ini, ada diantaranya yang menyangkut pribadi aparat, misalnya eksistensi yang tinggi dan kesehatan fisik. Juga

terdapat syarat kelebihan intelegensia yang tinggi (untuk para penegak hukum) untuk berlaku bijak dan adil.

Tanggung jawab pemerintah bukan hanya terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dan serangan dari luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.

Pemerintah tidak berhak mengintervensi setiap konflik intern suatu badan usaha, kecuali konflik yang bersifat destruktif atau konflik yang lahir dan diabaikannya hak satu pihak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang. Jika yang terjadi demikian maka pemerintah harus turun tangan untuk membela yang dizalimi.

Apabila kita mau meneliti hukum-hukum fikih Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits, maka kita dengan mudah menemukan berbagai hikmah yang ada dibalik ketentuan-ketentuan syariah baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau tata usaha yang lain. Kita secara mudah memahami hikmah dibalik diharamkannya riba. Ikhtikar (penimbunan bahan kebutuhan manusia), dan perilaku ego mau untung sendiri, dengan menaikkan harga dituar garis kemanusiaan. Semuanya dilarang karena mengandung unsur keiahatan. Berbagai contoh ini bukanlah data statistik yang mati dan baku. Tetapi data ini meluas dengan simpulan umum yang analog dengan berbagai unsur kejahatan semua bentuk kejahatan dalam bisnis jelas haram.

Dari sini jelas masalahnya: pemerintah yang mempunyai otoritas harus mengembalikan masyarakat pada praktik berekonomi yang benar, sesuai dengan aturan Islam. Pemerintah jangan hanya memberantas riba, panimbunan dan praktik biadab lainnya, tapi juga memberantas berbagai faktor yang menyemarakkan praktik-praktik ini dan menelusuri sebab-musababnya. Anjuran meninggalkan riba, harus dibarengi dengan diberlakukannya infaq dan sedekah. Dengan demikian, ada solusi pro-

blem sosial yang terselesaikan yang diharapkan biang riba dan praktiknya dapat terkikis.

1. Pasar dan Pemerintah

a. Barang dan Pasar

Kebijakan fiskal dibuat karena gagalnya mekanisme pasar (*market failure*). Apabila kegagalan ini terus terjadi, akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan. yang dapat mengganggu keseimbangan permintaan agregat (AS) dan penawaran agregat (AD) pada aktivitas perekonomian.

ilmu ekonomi membedakan barang berdasarkan jenis sifat. yaitu private goods dan public goods.

- a. Private goods berupa barang-barang yang dapat diproduksi dan ditawarkan secara efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar.

Misalnya: mobil, rumah, dan pakaian.

- b. Publik goods berupa barang yang cenderung tidak dapat diproduksi dan ditawarkan secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah, Public goods dikelompokkan dalam dua bagian yaitu non-excludable goods dan non-rivalrous goods.

- Non-excludable goods berupa jenis barang yang orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan atau menikmatinya. Contoh atraksi pesawat udara (air show). Dalam hal ini pihak penyelenggara tidak dapat melarang orang yang tidak membeli tiket masuk menikmati atraksi udara tersebut dari luar arena pertunjukan. Contoh lainnya taman kota. masyarakat yang enggan membayar tiket masuk taman tersebut dapat menikmati keindahannya dari luar tanpa harus membayar.

Umumnya orang enggan membayar untuk non-excludable goods selama mereka dapat menikmatinya gratis. Karena kebanyakan orang enggan membayar, tidak

ada perusahaan swasta yang mau mengusahakannya. Oleh karena itu pemerintah yang harus menyediakannya. Terkait dengan itu, pemerintah mengenakan pajak kepada masyarakat, yang salah satu manfaatnya adalah untuk pengadaan barang yang tergolong non-excludable goods.

- Non-rivalrous goods berupa barang yang dapat digunakan atau dinikmati banyak orang tanpa mengganggu ketenangan orang lain. Menonton acara televisi. Semua orang dapat melakukannya secara serentak tanpa saling mengganggu. Untuk menutupi biaya operasional serta memperoleh keuntungan, perusahaan swasta menayangkan iklan. Contoh lainnya areal parkir yang luas sehingga orang dapat memarkirkan mobil tanpa menyebabkan terganggunya sesama pemakai jasa parkir.

Pasar yang kompetitif akan menghasilkan private goods secara efisien. Produsen dapat memperoleh keuntungan dan menjual private goods karena orang-orang membayar untuk memperoleh atau menikmatinya. Namun, produsen tidak dapat memperoleh keuntungan dari barang non-excludable dan non-rivalrous karena orang dapat menggunakan atau menikmatinya tanpa harus membayar

Oleh karena itu, akan lebih efisien jika public goods diproduksi bukan oleh perusahaan swasta tapi oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengambil keuntungan seiring dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat, misalnya dengan naiknya kesadaran masyarakat membayar pajak. Dalam hal ini penggunaan instrument pajak dapat dipertimbangkan.

b. Distribusi

Masyarakat beranggotakan beragam jenis orang ada yang kaya ada yang miskin, ada yang trampil, ada yang tidak. Karena inilah, secara alamiah terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi (equity) agar kesenjangan ini dapat dipersempit.

Equity adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (resources). Pemerintah harus membantu masyarakat kurang mampu dengan bantuan masyarakat yang lebih mampu. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak sumbangan, dan lainnya.

c. Transfer Tunai Barang dan Jasa

Pemerintah dapat menerapkan dua cara distribusi pendapatan, yaitu:

- a. Melakukan transfer tunai (cash transfer). Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan/uang transfer
- b. Memberikan bantuan barang secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan

Pemerintah tinggal menentukan cara mana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada,

Contoh:

Sekolah merupakan private goods karena merupakan barang excludable dan rivalrous. Semakin tinggi uang sekolah, kian banyak yang tidak mampu bersekolah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu membantu dengan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu, mendirikan sekolah-sekolah negeri dan memberlakukan kebijakan bebas uang sekolah (tuition fee)

Contoh lain adalah pelayanan kesehatan. Sebagai private goods, biaya kesehatan saat ini relatif sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat bawah atau miskin. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembagian obat dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu misalnya melalui Jaringan Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK) Pemerintah pun dapat memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

d. Kegagalan Pemerintah

Dari pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public goods secara efisien, oleh karena itu harus disediakan oleh pemerintah.

Dalam memproduksi public goods, pemerintah dapat menemui kegagalan karena dua hal berikut:

- a. Efisiensi dalam proses produksi
 - b. Buruk atau kurangnya informasi
- (Adiwarman Azwar Karim, 2002:108-110)

2. Tugas Pemerintah dalam Perekonomian

a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi praktik produksi dan jual-beli. Pemerintah juga harus melarang praktik yang tidak benar, baik dalam jual-beli, produksi, penimbunan atau sistem harga. Pemerintah juga harus menghentikan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Dan jangan lupa, pemerintah juga harus mengontrol kesehatan masyarakat, seperti mengontrol produksi makanan dan minuman. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independent (ahli al Hisbah). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

Imam Mawardi mengatakan “Praktek munkar yang dilakukan kedua belah pihak dengan kesadaran masing-masing akan dampak negative, seperti praktek riba, jual-beli yang tidak sah, atau apa saja yang sebenarnya mengalami cacat hukum Sar’i, maka tugas lembaga ini adalah melarang dan memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran.

Imam Mawardi melanjutkan, “Diantara praktek terlarang adalah penipuan pada pembeli dan rekayasa harga. Jika pembeli tidak mengerti tipu daya si penjual, maka sanksinya berat. Dan kalau pembelinya mengetahui akan tipu daya penjual, maka sanksi untuk penjual agak ringan”.

Ibnu Qayyim mengatakan, “Lembaga independent ini juga harus memerintahkan pelaku ekonomi agar salat jumat berjaja-

maah, menyampaikan amanah dan berlaku jujur. Lembaga ini juga harus menjadi teladan yang baik dan bentuknya meliputi ucapan maupun perilaku. Lembaga ini harus melarang perilaku khianat, mengurangi jatah takaran, penipuan hasil produksi, dan rekayasa barang dagangan. Lembaga ini juga harus mengontrol perangkat-perangkai dagangan, misalnya alat timbangan, juga mengawasi produsen pangan, pakaian dan berbagai produsen alat-alat kebutuhan”.

Selanjutnya Ibnu Qayyim memberikan argumentasi mengapa hal-hal di atas dilarang. Katanya, “Pelaku pelanggaran adalah perusak umat dan dampak bahayanya pada masyarakat umum tidak dapat dikendalikan. Sebab itu, mereka harus ditindak dan dtberi pelajaran tanpa henti. Sebab bencana yang diakibatkan sangat besar”.

Nas-nas yang dikemukakan para Fuqaha menunjukkan berbagai tanggung jawab yang dipikul pemerintah dengan melakukan kontrol terhadap gerak perekonomian. Agar kemerdekaan kreatif yang diberikan pada pemilik tidak disalahgunakan untuk membahayakan pihak lain. Salah besar, analisis yang mengatakan. bahwa kebebasan sang pemilik yang diberikan Islam tanpa catatan dan kendali dan membolehkan berbagai praktek pengerukan laba, tanpa peduli dengan kemaslahatan pihak lain, yang sebenarnya sangat ditekankan oleh Islam. Sebenarnya menurui Islam adalah kebebasan berkreasi dengan catatan jangan mengancam pihak lain.

b. Menghentikan Muamalah yang yang Diharamkan

Yang dimaksud muamalah yang haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan azas dasar Islam yang berdiri di atas dasar moral dan torjaganya kemaslahatan umum. Dan yang paling diharamkan adalah riba dan ihtikar (penimbunan).

Riba diharamkan Al-quran dengan sangat jelas, sekira tidak ada atasan untuk ragu dan tiada alasan untuk memperdebatkannya lagi Islam mewajibkan pemerintah mengharamkan riba.

Sebab riba merupakan kejahatan massal. Jika seseorang atau suatu kelompok membandel dan tetap melakukannya maka pemerintah dengan otoritasnya harus menghentikannya. Jika terdapat suatu kawasan yang penduduknya sangat sepekat melakukan riba, maka tetap harus dihentikan meskipun yang demikian meledakkan api perang. Sebab pelaku riba, jelas telah keluar dari rel Islam.

Penimbunan juga dilarang Islam. Penimbunan dimaksud adalah penimbunan barang-barang kebutuhan manusia, agar harga melangit lalu dapat menangguk untung besar. Laba dan praktek demikian jelas haram. Sebab kronologi kelangkaan diciptakan dari memanfaatkan kebutuhan manusia yang mendesak sebagai senjata untuk menaikkan harga, dengan laba yang berlipat-lipat.

Ihtikar (penimbunan) yang haram, dalam komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dan pasar, lalu ditimbun, hingga harga melambung dan si penimbun untung besar. Jelas sekali, betapa pelaku ini sangat merugikan masyarakat. Menurut konteks modern, penimbunan yang haram tidak perlu berbagai syarat yang dipaparkan Ibnu Qudamah. Karena penimbunan di zaman modern cakupannya luas dan kebutuhan manusia tidak terbatas pada bahan pokok saja.

Islam tidak berhenti hanya mengharamkan penimbunan. Tapi juga membongkar bahan-bahan yang timbun. Dengan demikian, penimbun tidak mendapatkan laba yang lipat ganda yang maunya hanya memenuhi ambisi ingin mendapatkan laba yang fantastic

c. Mematok Harga Kalau Dibutuhkan

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga: haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Diantaranya ialah riwayat Anas dan Rasulullah SAW. Anas berkata. "Di masa Rasul, pernah harga barang-barang melambung. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi Mereka

menghadap: Wahai Rasulullah hendaknya engkau mematok harga” Nabi lalu menjawab “Allahlah Zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saal saya bertemu Allah tak seorang pun menuntutku atas kezalimanku, baik dalam masatah jiwa atau harta” (HR Imam Enam: Bukhari, Muslim, Abu daud, Turmidzi, Ibn Majah, kecuali Nasa’i).

Tapi kondisi sosial di masa Rasulullah jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini dalam hal baik-tidaknya mematok harga. Dimasa Rasuillah, mungkin posisi penjual sangat lemah. Sehingga pematokan harga adalah sangat memberatkan bagi penjual. Sekarang kondisinya telah berubah. Sekarang posisi penjual justru kuat dalam hal penjual di era sekarang, tidak akan terkena dampak yang merugikan karena pematokan harga yang priontaskan bagi pembeli, yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah.

Berangkat dan realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara pematokan yang mengakibatkan kezaliman, yang berarti haram dan pematokan yang tanpa akibat kezaliman. Pada konteks terakhir, pematokan yang tidak terdapat unsure kezaliman, bahkan menciptakan keadilan bersama, selain juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas berhukum sah, bahkan bisa wajib.

Ibnu Qayyim mengatakan, “Petugas pasar, harusnya mengurus tata usaha yang berjalan dipasar pantauannya. Ia harus mengetahui komoditi apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu mematok harga. dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba diatas yang wajar. Petugas harus mengontrol aktivitas pasar dan jangan ada penjual yang mengais laba di atas wajar. Jika ada yang melanggar, maka diberi peringatan. Dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggaran ini dikeluarkan dan pasar”. Ini juga pendapat dan Imam Malik dan riwayat Asyhab, dan diikuti oleh Ibnu Habib dan senada dengan yang dikatakan Ibnu Musayyab.

Ibnu Qayyim berkata lagi, “Pematokan harga ada diantaranya yang mengandung unsur kezaliman, dan ini jelas haram. Misalnya mematok harga yang sangat tidak diinginkan penjual tanpa dasar yang sah atau melarang aktivitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat SyariaHnya) tidak melarang. Tapi, jika pematokan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, dan dilarang memungut diatas wajar maka pematokan yang demikian salah. dan sebagian kasus, bisa berhukum wajib

F. INSTRUMENT KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

1. Instrumen Yang Digunakan Dalam Kebijakan Fiskal Islam

Struktur APBN dan kebijakan yang diambil pada zaman pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah instrumen Kebijakan fiskal, yaitu:

a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah dengan mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar. Kesepakatan itu, yang menempatkan setiap anshar bertanggung jawab atas saudara muhajirinya, menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dan Anshar kepada muhajirin. Karena orang-orang muhajirin mempunyai kecenderungan konsumsi yang lebih besar dibanding kan orang-orang Anshar distribusi pendapatan cara ini telah meningkatkan permintaan total di Madinah.

Kebijakan lain yang diterapkan Rasulullah dimadinah pada era permulaan Islam setelah hijrah adalah menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional muslim dengan menerapkan kontrak-kontrak muzaraa, musaqat dan rnuhdharabah serta kerja sama terbatas antara muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan Anshar

yang memiliki tanah pertanian, perkebunan dan tabungan. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum musiiimin dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumberdaya tenaga kerja, lahan dan modal. Selanjutnya pada periode yang sama Rasullullah membagikan tanah kepada muhajirin untuk pembangunan pemukiman. Kebijakan ini juga meningkatkan partisipasi kerja dan aktifitas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting muhajirin akan tempat tinggal. Dengan cara ini tingkat kesejahteraan umum kaum muslim meningkat.

Selama masa Rasullullah, empat perlima harta rampasan dari setiap peperangan dibagi kepada setiap mujahidin yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Pembagian harta rampasan meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat.

Kebijakan yang diterapkan pada era permulaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal setiap oang termasuk non muslim, dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan permintaan total masyarakat.

b. Kebijakan pajak

Penerimaan pajak yang terpenting pada era permulaan Islam terdiri atas khums, zakat dan khara. Khums pada dasarnya adalah pajak proposional yang jumlahnya tidak konstan Ini monyebabkan kestabilan harga dan menurunkan inflasi dalam kondisi terjadi kelebihan permintaan atas penawaran. Pada saat yang sama pada masa stagnasi dan penurunan tingkat permintaan agregat, khusus mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total.

Zakat dikumpulkan berupa presentase tertentu dari perbedaan antara produksi dengan biaya variable, sehingga tidak mempunyai dampak pada harga atau jumlah produksi dan tidak menyebabkan penurunan supply total hasil pertanian. Kharaj adalah seperti sewa atas tanah. Pajak ini juga tidak mempunyai

dampak pada harga dan jumlah produksi sehingga penarikannya tidak mempengaruhi penawaran.

c. Anggaran

Sekalipun mengalami banyak perang besar yang membutuhkan dana yang besar selama masa Rasulullah, anggaran baitul maal jarang mengalami defisit. Pengeluaran dilakukan secara proposional sehingga keseimbangan dana ini selalu terjaga. Pada pemerintahan khalifah yang empat baitul maal tidak pernah mengalami defisit, bahkan pada masa Umar dan Ustman menunjukkan surplus yang besar.

d. Kebijakan fiskal khusus

Pengeluaran Negara, khususnya selama masa Rasulullah, dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah. Cara pertama ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dengan meminta bantuan dari kaum muslimin sehingga kebutuhan pasokan untuk gazwa dan sariya kerap terpenuhi dengan bantuan sukarela kaum muslimin atas permintaan Rasulullah. Cara kedua dilakukan dengan meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberi ganti rugi atas peralatan yang rusak tanpa membayar sewa atas penggunaannya. Hal yang terakhir ini biasanya merupakan bagian dari klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan suku-suku nonmuslim.

Cara ketiga adalah meminjam uang dari orang-orang tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekkah. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain, dan setelah harta rampasan dari perang tersebut dibagikan, hutang tersebut dilunasi. Bilal diperintahkan Rasulullah membantu orang-orang yang membutuhkan dan melunasi utang orang-orang yang tidak dapat membayar utangnya sendiri. Bilal dibenarkan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut jika dibutuhkan. Kendatipun tindakan meminjam hanya dilakukan

sekali oleh Rasulullah dan melunasinya sebelum akhir tahun, hal ini menunjukkan salah satu cara yang dibenarkan untuk menjalankan kebijakan fiskal.

Cara keempat ditempuh Rasulullah dengan menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim. Kebijakan ini adalah menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi keluarga dan praktis mencela penganggur. Selain itu, perbuatan baik seperti pinjaman tanpa bunga, waqaf dan shadaqah-menghasilkan redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pertukaran serta permintaan total. Pengharaman monopoli, riba dan kali-bi-kali (transaksi ijon = penjualan barang dimasa yang akan datang dengan pembayaran dimasa yang akan datang), serta transaksi-transaksi lain, termasuk keamanan terhadap konsumsi secara berlebihan. Sia-sia dan berbahaya selain meningkatkan efisiensi sektor swasta juga meningkatkan penawaran total serta kesejahteraan ekonomi umum.

Setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Saiah satu tujuan pengeluaran zakat adalah menyediakan kebutuhan bagi orang-orang fakir dan miskin disamping untuk mengkaji para pengumpul zakat. Khums juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan public. Pada saat yang sama. penerimaan yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi public secara umum. Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah, terutama dikeluarkan untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Akhimya seluruh dana yang tersisa dikirimkan kebaitul maal. (Adiwarman Karim. 2002, Hal: 112-115).

G. STRUKTUR APBN

1. Struktur APBN Dalam Islam

PENERIMAAN	PENGELUARAN
1. Kharaj	1. Penyebaran Islam
2. Zakat	2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Khums	3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
4. Jizya	4. Pembangunan infrastruktur
5. Penerimaan lain	5. Pembangunan armada perang dan keamanan
	6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial

- **Kharaj**

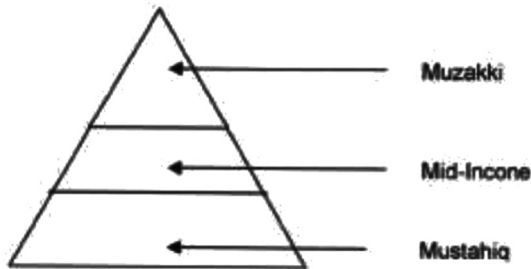
Kharaj atau biasa disebut pajak tanah, dalam pelaksanaannya kharaj dibedakan menjadi dua yaitu proposional dan tetap. Secara proposional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperempat, seperlima dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, kharaj proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali.

Kharaj dikenalkan pertama kali setelah perang khaibar ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dan hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.

Didalam hukum Islam dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh Negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani nonmuslim dan mana saja. Selama pemerintahan Islam, kharaj menjadi sumber penerimaan utama dari Negara Islam, dana itu dikuasai oleh komunitas dan bukan kelompok-kelompok tertentu.

- **Zakat**

Pengeluaran/pembayaran zakat didalam islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijraj dan terbentuknya Negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari rukun islam. Kewajiban itu,



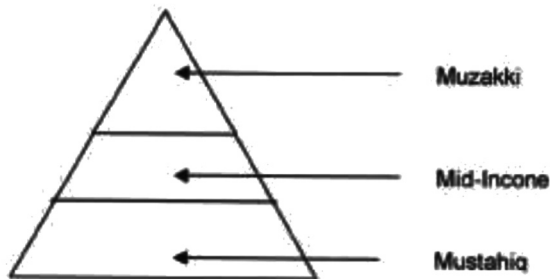
Artinya tidak ada lagi kau mustahiq (orang yang sangat miskin yang berhak menerima zakat).

Kebijakan fiscal



Langkah-langkah untuk mewujudkannya sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq ilustrasinya sebagai berikut:



2. Peningkatan distribusi pendapatan sehingga mustahiq menjadi kelompok masyarakat dengan penghasilan mid-income. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan ini sehingga pada zaman itu tidak ada kelompok mustahiq yang berhak 2 Peningkatan distribusi pendapatan sehingga mustahiq menjadi kelompok masyarakat dengan penghasilan mid-income Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan ini sehingga pada zaman itu tidak ada kelompok mustahiq yang berhak atas zakat.

Dari penelitian empiris diketahui bahwa marginal propensity to consume (MPC) kelompok orang berpenghasilan tinggi lebih kecil dan pada MPC kelompok orang yang berpenghasilan rendah.

MPC Masakim < MPC Mid-Income < MPC Mustahiq

Misalkan kita mempunyai komposisi kependudukan seperti tampak di tabel berikut

POPULASI (%)		MPC	Weighted MPC
Muzakki	20	0.2	0.04
Mid-Income	30	0.5	0.15
Mustahiq	50	0.8	0.40
TOTAL			0.59

Komposisi ini akan berubah jika pemerintah melakukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan seperti digambarkan diatas. sehingga kaum mustahiq berubah menjadi kelompok mid-income. Komposisi baru tersebut sebagai berikut:

POPULASI (%)		MPC	Weighted MPC
Muzakki	20	0.2	0.04
Mid-Income	30	0.5	0.40
Mustahiq	50	0.8	0.
TOTAL			0.44

Secara menyeluruh terjadi penurunan MPC, atau dengan kata lain terjadi peningkatan marginal propensity to save (MPS) (pemerintah Islam sangat mendorong masyarakat melakukan investasi karena dengan meningkatnya MPS, tingkat investasi masyarakat juga meningkat sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional (Y).

Setiap sumber pendapatan Negara dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Misalnya zakat penghasilan diberikan untuk hal-hal berikut:

- Membantu orang yang tidak mampu,
- Menolong fakir miskin,
- Menyiapkan perumahan bagi fakir miskin,
- Membayar gaji bagi orang yang mengumpulkan/mengelola zakat.
- Melunasi utang bagi orang yang tidak mampu melunasinya
- Menyebarkan Islam dikalangan nonmuslim
- Membebaskan budak dan
- Membiayai kegiatan sosial

H. ANGGARAN PENDAPATAN

1. Anggaran Pendapatan Pemerintah Islam.

Sumber-sumber pendapatan Negara pada zaman rasulullah SAW tidak terbatas pada zakat yang baru diperkenalkan pada tahun ke-8 hijrah.

Pada zaman Rasulullah SAW sumber penerimaan APBN terdiri atas Kharaj, zakat Khums dan kaffarah.

a. Kharaj atau pajak bumi.

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dan apakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur seorang

dewasa, seorang bebas. budak muslim ataupun tidak beriman
Cara memungut kharaj terbagi jadi dua jenis: kharaj menurut perbandingan (muqasimah). Dan kharaj tetap (wazifah). Kharaj menurut perbandingan ditentukan porsi hasil dan setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya, kharaj tetap adalah beban khusus pada tanah as sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan Kharaj menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen. sedangkan kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Dalam hal Kharaj tetap, tarif yang ditetapkan kholifah Umar atas tanah sawad pada umumnya dianggap menentukan. Tapi bila dapat sesuatu hal yang belum pernah ditetapkan Umar, maka kemampuan memikul pajaklah yang menjadi tolak ukur untuk mengenakan pajak Kemampuan memikul pajak maksimum ditetapkan sejumlah dari hasil.

AI-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak (taqah) bumi sebagai berikut orang yang menaksir kharaj atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan sebidang tanah, yang berbeda menurut tiga faktor tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah kharaj. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen. karena padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya. pada yang lebih tinggi harganya dan yang lain dank arena itu kharaj harus ditaksir sesuai dengan itu Faktor ketiga mengenai irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan kharaj yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang dialiri oleh air yang mengalir atau hujan.

Selama kualitas tanah tetap sama dengan irigasi dan keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah atau berkurang. Tetapi bila gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam

dan merugikan sipengolah maka Negara harus mengusahakan perbaikan dan sipemilik tanah tidak dikenakan kharaj selama tanah tetap.

Pandangan mazhab hanafi yang sesuai dan didasarkan atas kebiasaan kholifah Umar Mayoritas utama kholifah muslim berkecenderung tidak menerima pandangan mazhab syafi'i bahwa pada turunan Nabi harus dikumpulkan bersama untuk mendapatkan bagian mereka yang dibagai-bagi dikalangannya. Kita lebih mudah menerima pendapat syafi'i bahwa bagian Nabi seharusnya diberikan kepada imam sebanyak yang diambil Nabi selama masa hayatnya untuk digunakan memperkuat Islam.

Tetapi dinamisme Islam dan administrasi keuangan Islam jelas diperlihatkan oleh keputusan penting kholifah Umar mengenai pengembalian tanah sawad kepada para pemilik asli. Surat kholifah Umar kepada sa'ad bin abi waqqas mengatakan

“Dalam surat saudara, saudara mendesak agar tanah dan harta benda lain yang telah diberikan Tuhan kepada saudara sebagai rampasan perang harus dibagi-bagikan. Setelah menerima surat ini bagikanlah semua barang bergerak termasuk hewan-hewan kepada para tentara setelah mengambil seperlimanya, asal saja barang rampasan tersebut diperoleh saudara peperangan yang sesungguhnya, tetapi biarkan tanah dan unta tetap dalam tangan pemiliknya sehingga dapat digunakan sebagai tunjangan untuk kaum muslimin bila saudara membagikan hal tersebut belakangan itu untuk generasi sekarang, maka tak akan dapat lagi ditnggalakan untuk generasi yang akan datang.

Mazhab syafi'i berkeberatan untuk memberikan tanah kepada para pemilik aslinya bila tanah tersebut ditaklukan dengan kekerasan atas dasar, seperti barang bergerak, bahwa tanah tersebut adalah rampasan perang karena itu menjadi harta benda para prajurit. Mazhab hanafi menjawab bahwa dilaksanakan pilihan oleh imam dalam hal ini sesuai dengan kepentingan kaum muslimin, karena itu bila ia membagikan tanah itu kepada para prajurit mereka akan menempati dan mengolahnya,

dengan demikian mereka tidak turut dalam melakukan perang suci, musuh mereka akan kembali menyerang kaum muslimin. Disamping itu kaum muslimin pada waktu itu kurang cocok dengan pertanian Karena itu, bila tanah dikembalikan kepada mereka yang tidak beriman tetapi lebih terbiasa dengan pekerjaan ini dan diharuskan membayar kharaj. maka kaum muslimin dapat mengabdikan dirinya pada perang suci sepenuhnya. Selanjutnya. dalam hal ini mangakibatkan tidak terdapat prasangka jelek terhadap minat prajurit karena. walaupun dalam hal distribusi dan perolehan hasil lebih cepat, namun dalam hal lain mereka lebih persistem (tahan) Lagi pula generasi yang akan datang juga berhak atas tanah ini Seandainya tanah ini dibagikan kepada tentaranya yang menang terjadilah ketidakadilan terhadap kaum muslimin yang akan datang.

Pada kenyataannya, hal penting yang dapat ditarik dan analisis diatas ialah, tanpa mengubah tujuan pokok untuk mencapai keadilan sosial melalui perpajakan rincian hukum Islam yang mengalur sistem pajak dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman Demikianlah cara modern dalam menyita rampasan perang oleh Negara dapat dibenarkan bila harta ini dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Keadaan-keadaan yang memaksa dilaksanakannya distribusi barang rampasan perang dikalangan tentara muslim yang berjasa menaklukan kini tidak terdapat lagi. Dewasa ini para prajurit seluruh dunia muslim diberi gaji berdasarkan skala yang teratur dan fasilitas kehidupan modem yang berhubungan Jadi untuk memahami secara tepat jiwa hukum Islam (Al-Quran) penalaran dan pertimbangan rasional harus memainkan bagian yang penting dalam rencana masa depan suatu tatanan sosial Islami Menurut penulis dasar pokok keuangan Negara Islam mendatang adalah dinamisme dan keluwesan.

b. Barang pertambahan dan harta karun

Ada perbedaan pendapat tentang sifat pajak yang dikenakan pada perambangan dan harta karun. Menurut mazhab syaf'i

dan hambali. Pajak ini dianggap sebagai zakat sedangkan kaum hanafi menganggapnya sebagai persoalan barang rampasan, Tetapi tanpa menyinggung tentang persoalan tersebut kita dapat membicarakannya sebagai suatu sumber penghasilan. Bila suatu tambang yang padat dan dapat dilebur, mengandung emas, perak besi dan sebagainya, atau suatu harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin seperlima dan hasilnya harus diserahkan kepada Negara untuk memenuhi keadilan sosial. Tapi dewasa ini mengingat pentingnya pertambangan dan harta terpendam, maka semua tambang dinasionalisasi.

Kini pertanyaan pokok yang harus kita jawab ialah, apakah dari segi pandangan Islam, kecenderungan modern terhadap nasionalisasi tambang dibenarkan. Dalam Islam pintu jihad tidak pernah tertutup karena itu apa yang dibenarkan selama periode klasik Islam mungkin tidak begitu saja dapat dibenarkan karena perubahan waktu dan keadaan. Pertambangan merupakan suatu cabang tersendiri dari pengetahuan manusia baru akhir-akhir ini berkembang. Demikian juga pertumbuhan jenis usaha gabungan perusahaan yang monopoli harga dan produksi, dan perusahaan berdaarkan saham Karena itu eksploitasi tambang menjadi suatu usaha yang sangat menguntungkan bila setiap individu diperkenankan menikmati manfaatnya. pastilah ini akan mengarahkan pada penumpukan kekayaan dalam beberapa gelintir tangan dan mengakibatkan hadirnya pengisapan masyarakat oleh segelintir orang. Karena hal ini bertentangan dengan jiwa hukum Al qur'an. maka sistem modern nasionalisasi harta pertambangan dan harta terpendam dibenarkan asal saja perolehan dan tambang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini hadist berikut layak untuk dikutip :” Diriwayatkan oleh Abyad.

Ma'aribi bahwa ia mengunjungi Nabi dan meminta ijin mengusahakan danau garam di Ma'aribi Nabi mengabulkan permintaan itu tapi ketika itu seorang menyadari Nabi bahwa yang diberikan Nabi adalah telaga yang mengandung deposit

garam yang berharga. Megetahui duduk persoalannya, Nabi membatalkan pemberian ijin kepada Abyad

Demikianlah kita lihat bahwa Negara memiliki hak mengeksploitasi sumber mineral untuk kesejahteraan masyarakat, Selama masa klasik Islam eksploitasi sumber mineral terbatas pada permukaan tanah dan bukanlah suatu sumber keuntungan maha luas yang memungkinkan terciptanya suatu kelas multimilioner. Oleh karena itu, setiap individu diperkenankan mengerjakan tambang, Tapi keadaan telah berubah sama sekali menginggat keadaan yang telah dinyatakan tadi, Tetapi kami tidak bersedia untuk menyetujui nasionalisasi sepenuhnya pada sumber daya mineral dengan mengabaikan hak individu Negara Islam harus mebuatat ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang wajar dan adil yang selalu relatif bagi kebutuhan masyarakat dan harus ditentukan dengan memperhatikan gangguan dan kesusahan yang dialami oleh para pemilik dan penduduk tanah tersebut.

c. Jizyah

Sumber penerimaan berikutnya ialah jizyah-pajak yang dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi Kehidupannya misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dan dinas milliter. Golongan non muslim yang kehidupan dan harta bendanya terjamin seperti itu disebut Dhimmi. Banyak sekali kontroversi tentang dikenakannya Jizyah atas kalangan non Muslim. Ada orang yang berkata bahwa jizyah yang dipungut atas Dhimmi adalah sewa untuk tinggal di Negara muslim. Dan ada pula orang yang berkata bahwa jumlah itu diambil dan kalangan Dhimmi sebagai hukuman akan anutan keyakinan untuk menghina mereka. Demikianlah dikatakan bahwa selama ini proses pembayaran mereka dinista dengan kata ini : 'Hai Dhimmi " atau * Hai musuh-musuh Tuhan' Bayarlah Jizyah "

Tetapi bila kita lebih mendalami masalahnya dengan mudah dapat ditegaskan bahwa semua kecaman ini tidak benar. Adalah

tidak wajar untuk menganggap jizyah sebagai sewa dan pihak kalangan Dhimmi untuk berdiam di Negara Muslim. Seandainya hal itu benar maka wanita anak-anak orang yang sakit ingatan dan orang-orang tua juga akan dikenakan pajak tersebut. Tapi mereka itu tidak diharuskan membayar pajak ini, Maka berarti bahwa kesejahteraan rakyatlah yang mejadi dasar pertimbangan bagi dikenakannya jizyah atas kalangan non muslim. Lagi pula jizyah bukanlah pajak represif. Pendapat ini disokong oleh Aghnides dalam Mohammedan Theones of Finance, ketika ia menulis :

Jizyah yang dikenakan oleh Imam atas penduduk suatu wilayah (daerah) yang ditaklukan dengan kekuatan senjata” Tarif tahunan bagi orang kaya adalah empat pilihan delapan dirham yakin empat dirham sebulan bagi golongan menengah adalah setengah dan jumlah tersebut. serta bagi orang miskin yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya adalah seperempat dari jumlah tersebut. Pandangan tersebut diatas didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar Ustman, dan Ali, serta para sahabatnya yang menerima cara yang dilakukan mereka dengan perkataan lain, hal tersebut didasarkan pada ijma’ Tidak ada bukti sejarah yang mengungkapkan penjelasan mengenai istilah- istilah golongan kaya golongan menengah, dan golongan miskin, akan tetapi dalam penafsiran Al-Tahawi dinyatakan bahwa orang-orang yang memiliki harta senilai 200 dirham ke atas disebut golongan menengah. dan bagi orang yang memiliki kurang dari 200 dirham tergolong orang miskin”

Selain itu, adalah tidak benar untuk mengatakan bahwa Jizyah merupakan suatu bentuk hukuman Secara jelas konsep Jizyah didasarkan pada firman Tuhan Q.S At Taubah, 9:29 yang berarti.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mereka mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta tidak menganut agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka dalam keadaan tunduk”

Istilah “Sahirun” dalam ayat Al-Qur’an tersebut secara sederhana diartikan “kepatuhan” (submission). Pengertian itu didasarkan pada dua alasan Pertama. karena semua orang baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dibebaskan dan membayar jizyah Kedua. penggunaan kekuatan (kekerasan) untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain adalah jelas dilarang oleh Kitab suci Al-qur’an .Dengan demikian. saya sependapat dengan Imam Syafi’l yang berdasarkan pada kekuatan pendapat yang dipegang oleh sejumlah orang berpengetahuan (berilmu)-menyimpulkan bahwa kepatuhan (ketundukan) yang dimaksud oleh Al-Qur’an adalah bentuk kepatuhan orang kafir kepada aturan orang Islam (hukum Islam), sehingga orang tidak boleh digolongkan kepada status Dhimmi kecuali dengan syarat tunduk kepada hukum Islam

“Menurut pendapat palnig keras yang dikutip oleh Al Adawi. Pendudukan kalangan Dhimmi diharuskan untuk menunjukkan kebenaran mereka yang tertanam terhadap kaum muslimin. penolakan mereka terhadap Nabi dan kenyataan bahwa bila mereka semangat mempunyai kekuasaan mereka akan menghapuskan kaum muslim secara berangsur-angsur

Tetapi, keterangan Al Qur’an pada “ketundukan” janganlah diartikan dalam arti yang digunakan dalam usaha kehidupan biasa kita Kekerasan dalam mamperlakukan golongan.

Dhimmi selama proses pemungutan jizyah jelas bertentangan dengan jiwa Islam Seluruh masalah dikenakannya Jizyah harus dipahami dalam perspektif sejarahnya dalam lingkungan sosial-ekonomi yang primitive dikenakannya jizyah mungkin adalah pilihan terbaik, karena hal ini konsisten dengan prinsip keadilan alami. Setiap warga Negara harus membayar kewajibannya guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pencegahan serbuan dari luar. tidak peduli apakah ia seorang muslim atau non muslim. Sesungguhnya, jiwa Islam tercermin dengan tepat

dalam dikenakannya Jizyah atas kaum Dhimmi. Demikianlah Abu Ubaidah salah seorang jenderal Khalifah Umar, diriwayatkan pemerintah Gubernur, Salah seorang jenderal khalifah Umar, diriwayatkan memerintah gubernur suriah untuk membayar kembaili jizyah ketika tentara muslim tidak yakin akan dapat mempertahankan kaum Dhimmi dan suriah terhadap serangan kaum romawi Kemudian kitapun mempunyai bukti untuk menunjukkan bahwa dalam banyak hal anak-anak kaum Dhimmi diberi bantuan keuangan dari perbendaharaan Negara.

d. Kaffarah

Kaffarah berupa denda misalnya yang dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan badan disiang hari yang dilakukan pada bulan puasa. Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan Negara. Contoh lain adalah orang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris sehingga warisanya dimasukkan sebagai pendapatan Negara Pada zaman Umar bin Khatab RA diberlakukan zakat untuk melewati jembatan.

I. DAFTAR PUSTAKA

- An- Nabhani. Taqyuddm, ****Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam****
1996 . Risalah Gusti
- Kanm.Adiwarman. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". 2002
Pustaka Pclajar Manan. M, Abdul. "Teori dan Praktek
Ekonomi Islam". 1997 : PT. Dana Baku Prima Yasa
- Mangkoe Soebroio. Guritno/Teori Ekonomi Vlakro". 1998
Yogyakarta. STIF YKPN
- Muhammad. "Rebijakan Fiskal Dan F.konorai Islam", 2002 :
Jakarta. Satemta Fmpat
- Muhammad. "Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam". 2004
Yogyakarta. B

KESEIMBANGAN UMUM

PASAR UANG DAN PASAR BARANG

A. PENDAHULUAN

Setiap orang meini liki banyak barang yang dapat mereka lakukan untuk orang lain dan barang-barang tersebut juga dapat merupakan kebutuhan mereka yang diperoleh dan orang lain. System ini dapat dipergunakan di pasar, di mana barang-barang dapat diperjual belikan dapat dapat mengembangkan semangat kerjasama (gotong-royong) di bidang sosial-ekonoini Setiap orang meini liki banyak barang yang dapat mereka lakukan untuk orang lain, dan barang-barang tersebut juga dapat merupakan kebutuhan mereka yang diperoleh dari orang lain Sistem ini dapat dipergunakan di pasar, di mana barang-barang dapat diperjual belikan dapat dapat mengembangkan semangat kerjasama (gotong-royong) di bidang sosial-ekonoini

Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk bersikap adil dalam segala perbuatan kita, berlaku curang (tidak adil) bahkan sangat dilarang bahkan Allah sangat mencela orang yang berbuat curang terutama dikalangan pedagang yang ada di pasar-pasar¹

Seiring dengan keinginan orang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, sering membuat para pelaku pasar melakukan perbuatan, yang bisa mengganggu stabilan keseimbangan pasar baik pasar barang, jasa uang maupun tonaga kerja Keseimbangan pasar sangat berpengaruh datam kehidupan manusia, karena bila semua bisa seimbang maka irama kehidupan

¹ Surat Al Muthofifin 1-5, Al Qur'an dan Terjemahan. Depag 1999

datam masyarakat bisa berjalan dengan Indahnya, bila tidak seimbang maka suasana kehidupan masyarakat akan terganggu stabilitasnya

Salah satu contoh dari tidak seimbangan pasar adalah ketika nilai rupiah jatuh sangat drastis terhadap dolar Amerika Serikat. sehingga semua sektor produksi menjadi terpengaruh, kecacauan timbul dimana-mana. dan negeri ini hampir mengalami kebangkrutan ditahun 1998 yang lalu Semua itu bermula dari tidak seimbangnya perniagaan dan penawaran terhadap dolar dari rupiah dipasar uang, sehingga mempengaruhi semua sektor kehidupan harga-harga berubah dengan secepatnya dalam hitungan jam, sehingga sangat menyulitkan bagi pelaku pasar untuk mengikapinya, cenderung diam atau menunggu kondisi pasar ².

Dalam kondisi ekonomi ini yang memprihatinkan sekarang ini banyak banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar karena sulitnya mencair bahan untuk produksi, untuk itu banyak karyawan-karyawan yang di PHK karena perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Itu semuanya berawal dari ketidak seimbangan pasar. Oleh karena itu kita sebagai calon - calon wirausahawan yang selalu ingin usahanya lancar maka kita harus berhati-hati dalam mensikapi hal-hal yang demikian ini

Dalam kehidupan ekonomi kita harus tahu banyak hal tentang ilmu ekonomi, agar ketika kita akan terjun dalam dunia bisnis tidak akan mengalami suatu kegagalan yang mengakibatkan kita frustrasi

B. KESEJMBANGAN PASAR

Untuk lebih mudah menguraikan serta membahas marilah kita ulang secara ringkas tentang beberapa pengertian dasar yang diperlukan :

² Hasil diskusi dikomunitas pojok menara, Perpustakaan Masjid Agung Surakarta, 29 Mei 2005.

1. Ekuilibrium³ (keseimbangan).
Adalah suatu keadaan dimana tidak ada kecenderungan, akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar yang berlaku, yang menyebabkan perubahan keadaan keseimbangan yang telah terjadi. Ada ketidak seimbangan dalam sistemnya bila kekuatan-kekuatan pasar bekerja kearah terjadinya perubahan menuju keseimbangan yang baru.
2. Pasar Barang
Adalah terjadinya pertemuan antara perini ntaan dan penawaran terhadap barang disuatu tempat.
3. Pasar uang
Adalah pertemuan antara perini ntaan dan penawaran akan uang, yang akan ditemui harga uang yaitu bunga⁴.
4. Pasar Tenaga Kerja
Adalah pertemuan antara perini ntaan dan penawaran akan tenaga kerja, sehingga akan di temui harga tenaga kerja yaitu tingkat upah.

Keseimbangan dalam semua jenis pasar tersebut sangat mutlak untuk bisa diwujudkan dalam setiap aktivitas didalamnya.

Dalam studi ilmu ekonoini pembicaraan mengenai perini ntaan konsumsi, perini ntaan investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor maupun impor adalah sangat ditekankan sekali karena berkaitan dengan pasar barang Telah kita ketahui bahwa konsumsi ditambah investasi, di tambah lagi dengan pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih merupakan sisi perini ntaan agregat terhadap barang dan jasa, sedangkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan selain satu tahun yang disebut juga sebagai produk domestik bruto merupakan sisi penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonoini an.

Keseimbangan antara penawaran agregat dalam pasar barang itu dapat dinyatakan sebagai:

³ Farid Wijaya, Ekonoini ka Makro Aneka model Buku, BPFE Yogyakarta, 1999, Hal 8-9

⁴ Suparmoko M. Ekonoini ka Makro, BPFE Yogyakarta, 2000, Hal 241-245

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Y : Produk domestic bruto

C : Adalah konsumsi

I : Adalah investasi

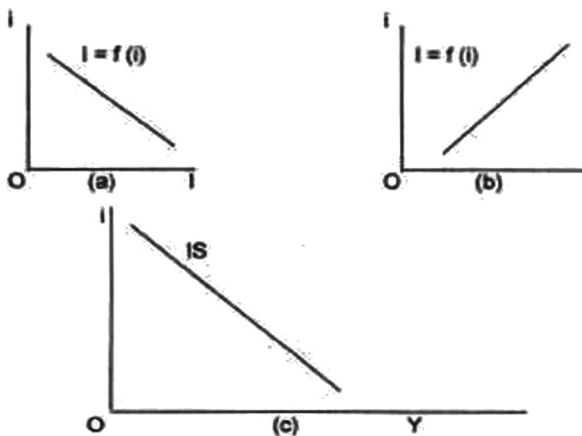
G : Adalah pengeluaran pemerintah

X : Adalah ekspor dan M adalah impor

(X-M) : merupakan ekspor netto yaitu Jumlah perini ntaan barang dan jasa pihak luar negeri.

Keseimbangan pendapatan nasional dapat pula diartikan sebagai keseimbangan dalam pasar yang menghendaki persyaratan investasi nasional (I) sama dengan tabungan nasional (S). atau $I = S$ atau injeksi total ($I + G$) sama dengan kebocoran total ($S + T$) (Drs. Suparmoko 2000 241).

Melalui proses penggandaan dapat kita lihat hubungan yang positif antara investasi dan pendapatan nasional yaitu kalau investasi meningkat, maka tingkat pendapatan nasional yang dapat diwakili dengan produk domestik bruto akan meningkat pula. Kita sudah mengetahui bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat investasi dan tingkat bunga, bila tingkat



Gambar 1.

Hubungan Antara Tingkat Bunga, Investasi dan Pendapatan Nasional, Kurva IS

bunga tinggi, maka Jumlah investasi akan rendah, dan bila tingkat bunga rendah jumlah investasi tinggi Sebagai akibatnya apabila tingkat bunga meningkat. maka Jumlah investasi akan menurun dan pada gilirannya akan menekan tingkat pendapatan nasional.

Kita dapat menggambarkan hubungan antara ketiga variabel itu seperti pada gambar 1.a dan 1.b pada gambar 1 b. di tunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jumlah investasi, dan pada gambar 1.b. di tunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan Jumlah investasi disebut dengan fungsi investasi; sedangkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional disebut fungsi IS Jadi fungsi IS adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional dalam keadaan keseimbangan pasar Parang yang di tunjukkan oleh pengeluaran investasi (I) sama dengan tabungan (S). dari fungsi IS itu tampak bahwa bila tingkat bunga naik, maka tingkat pendapatan nasional akan turun, dan apabila tingkat bunga turun maka tingkat pendapatan nasional akan naik, Dengan deini kian fungsi IS dapat di turunkan dengan menggunakan grafik empat kuadran. (lihat gambar 2.)

Kuadran pertama yang terletak disudut tenggara menunjukkan hubungan antara tingkat bunga (sumbu vertikal) dan tingkat investasi (sumbu horisontal) dan di perlihatkan dengan fungsi investasi. Kemudian pada sudut timur laut di tunjukkan hubungan antara tingkat tabungan (pada sumbu vertikal) dan tingkat investasi (pada sumbu horisontal) Untuk menjaini n adanya keseimbangan pendapatan nasional maka tingkat investasi harus sama dengan tingkat tabungan. sehingga garis 45 yang membagi sudut O menunjukkan keseimbangan antara tabungan dan investasi tersebut Selanjutnya pada sudut barat laut di tunjukkan hubungan antara tingkat tabungan (pada sumbu vertikal) dan tingkat pendapatan nasional (pada sumbu horisontal) yang di wakili oleh fungsi tabungan $S = -a + (1 - b)Y$; sehingga apabila telah di ketahui besarnya tingkat tabungan akan dapat di temukan pula tingginya tingkat pendapatan nasional. Akhirya pada sudut barat daya di tunjukkan hubungan antara tingkat bunga (pada

sumbu vertikal) dan tingkat pendapatan nasional (pada sumbu horisontal) yang di tunjukkan oleh fungsi IS.

Jadi fungsi IS kita peroleh dengan menghubungkan titik-titik yang dapat kita turunkan dengan menghubungkan antara gambar pada kuadran tenggara. ke timur laut kemudian ke barat laut dan ke barat daya (lihat gambar 2) ini salnya kita mulai dengan kuadran pada sudut tenggara yaitu dengan tingkat bunga pada i_0 dan pada jumlah investasinya. Titik-titik itu dapat kita peroleh karena kita sudah meini liki fungsi atau kurva investasinya. Dengan jumlah investasi setinggi i_0 , maka jumlah tabungan harus setinggi S_0 dan kita temukan pada kuadran timur laut dengan cara menarik garis lurus keatas dari kuadran tenggara ke kuadran timur laut Setelah kita menemukan tingginya S_0 pada kuadran timur laut dan titik itu kita tarik garis horisontal ke kuadran barat laut sehingga kita menemukan titik S_0 pada kuadran barat laut dan sekaligus kita dapat menemukan tingkat pendapatan nasional Y_0 dengan cara menarik garis kebawah dari fungsi tabungan yang sudah kita gambarkan terlebih dahulu Akhirnya kita dapat menarik garis lurus ke bawah ke kuadran barat daya dan titik Y_0 pada kuadran barat daya. Dengan menarik garis horisontal dari titik i_0 dan garis vertikal pada Y_0 yang kita beri nama titik E dalam prosedur yang sama seperi dalam menemukan titik E pada kuadran barat daya itu, kita dapat menemukan titik F. kalau kedua titik itu kita hubungkan, maka kita akan memperoleh apa yang kita sebut dengan kurve IS.

Diatas telah disinggung bahwa dalam keseimbangan pendapatan nasional di haruskan tingkat investasi (I) sama dengan tingkat tabungan (S), sehingga kita akan dapat pula menemukan kurve Is secara matematis.

Sebagai ini sal kalau di ketahui

Fungsi konsumsi	: $C = 100 + 0,75 Y_d$
Fungsi investasi	: $I = 125 - 600 i$
Fungsi tabungan	: $T_x = 20 + 0.2 Y$
Pengeluaran pemerintah	: $G = 50$

dimana $Y_d = Y - T_x$, maka kita akan dapat menurunkan fungsi IS. Dalam hal ini kita harus melihat keseimbangan antara injeksi total ($I + G$) dan kebocoran total ($S + T_x$); sehingga kita akan mendapatkan :

$$I + G - S + T_x$$

Kita masukkan nilai-nilai fungsi yang sudah di ketahui itu ke dalam persamaan ini:

$$125 - 600i + 50 = -100 + 0,25 (Y - 20 - 0,2 Y) + 0,2 Y$$

$$175 - 600i = -80 + 0,25 (0,8 Y) + 0,2 Y$$

$$175 - 600i = -85 + 0,4 Y$$

$$Y = 650 - 1500 i$$

Persamaan inilah yang disebut fungsi IS. Seperti yang tampak pada gambar 2 dibawah, kurva IS mempunyai lereng yang negative. Hal ini berarti apabila tingkat bunga turun, tingkat pendapatan nasional meningkat. Lereng yang negatif ini merupakan hasil dan hubungan yang berlawanan antara Jumlah investasi dan tingkat bunga. Oleh karena itu bila tingkat bunga turun, maka jumlah investasi akan bertambah dan selanjutnya tingkat pendapatan nasional akan menjadi lebih tinggi pula. Perlu diingat sekali lagi bahwa kurva IS diturunkan dan kurva I dan kurva S atau kurva $I + G$ dan kurva $S + T_x$. Oleh karena itu apabila salah satu kurva tersebut mengalami pergeseran maka kurva IS juga akan mengalami pergeseran, sebagai contoh apabila pemerintah meningkatkan Investasi dan investasi benar-benar meningkat maka kurva ($I + G$) bergeser kekanan dan akibatnya kurva IS yang baru selesai terjadi kenaikan investasi juga bergeser kekanan. Hal ini berarti bahwa apabila pada tingkat bunga yang sama kemudian terjadi kenaikan Jumlah Investasi, maka tingkat pendapatan nasional akan menjadi lebih tinggi.

Besarnya penambahan pendapatan nasional keseimbangan sebagai akibat adanya pembaharuan investasi sama dengan besarnya angka penggandaan investasi di kalikan dengan besarnya perubahan investasi. Ini misalnya angka penggandaan investasi itu

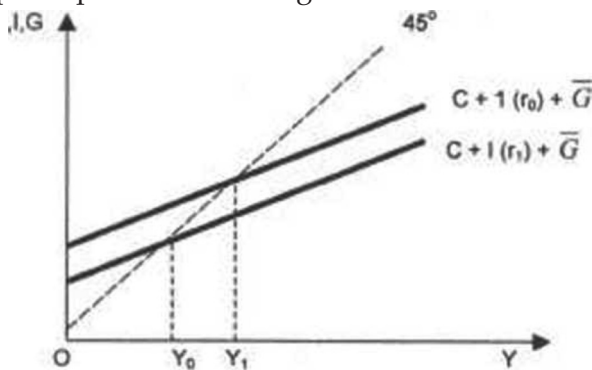
di ketahui setinggi 2.6 dan jumlah investasi meningkat dengan 20 satuan. Maka kenaikan tingkat pendapatan nasional akan sama dengan 50 tahun. Keadaan ini terlihat pada pergeseran kurva IS kekanan sebesar 50 satuan.

Sebaliknya bila masyarakat memutuskan untuk menambah tabungan, maka kurva tabungan pada kuadran barat taut akan bergeser kekanan. dan ini akan mempunyai akibat kurva IS bergeser ke kiri pada kuadran barat daya dengan kata lain kata lain pada tingkat bunga yang sama. Tingkat pendapatan keseimbangan nasional yang baru menjadi lebih rendah dan pada sebelum adanya peningkatan jumlah tabungan masyarakat Hal ini di sebabkan oleh adanya penurunan tingkat konsumsi dengan adanya peningkatan jumlah tabungan, dan berkurangnya konsumsi berarti menekan permintaan agregat dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat pendapatan nasional.

C. KESEIMBANGAN PASAR BARANG

Pasar barang

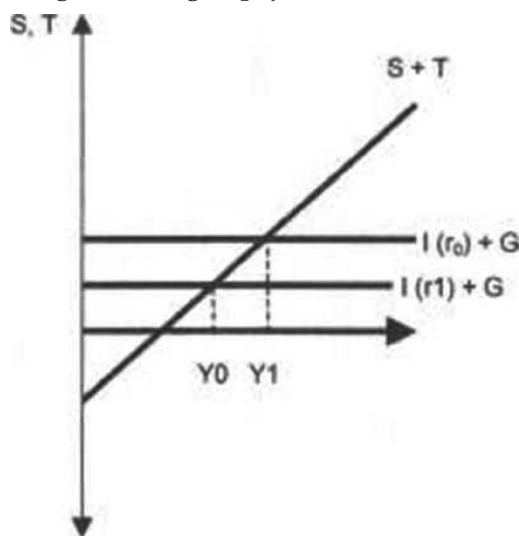
Adalah terjadinya penemuan antara permintaan dan penawaran terhadap barang di suatu tempat. Dalam bukunya Dr. Faned wijaya, M. M A menguraikan keseimbangan di pasar barang yang merupakan kelanjutan langsung dan pembahasan tentang teori penentu pendapatan keseimbangan



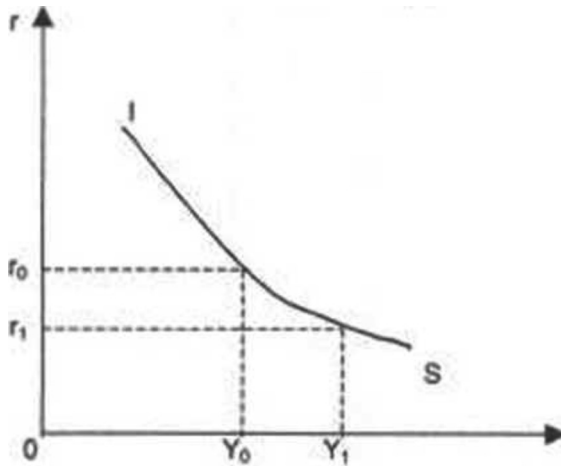
Gambar 2 (a)

Bahwa hubungan antara tingkat suku bunga dengan permintaan investasi merupakan hubungan negatif dan di gambarkan sebagai kurva yang berlereng menurun, di mana semakin tinggi tingkat suku bunga semakin rendah volume investasi, dan sebaliknya. Selanjutnya hubungan antara tingkat suku bunga dengan berbagai tingkat pendapatan keseimbangan di gambarkan pada gambar 2 (a), (b) dan (c). untuk mentrasir secara lebih jelas, selanjutnya kan di gunakan analisis empat kuadran terutama untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menggeser kurva IS. Sebagai pegangan di gunakan model A 2 ; model tentang penentuan pendapatan keseimbangan.

Pada gambar 2 (a), (b) dan (c) nampak gambaran berturut-turut tentang teori penentuan pendapatan keseimbangan dengan persilangan Keynesian dan keseimbangan tabungan -pajak dengan investasi pengeluaran pemerintah. yaitu pada gambar 2. (a) dan (b), selanjutnya pada gambar 2. (c) nampak keseimbangan di pasar barang yang menunjukkan tingkat suku bunga dan pendapatan keseimbangan di mana Investasi pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan pajak.



Gambar 2 (b)



Gambar 2 (c)

Seperti telah di uraikan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi adalah terbalik. Misalkan keadaan mula-mula tingkat suku bunga pada r_0 . maka tingkat pendapatan keseimbangan adalah Y_0 Selanjutnya bila tingkat suku bunga turun maka para produsen atau pengusaha akan menaikkan Investasinya Hal ini akan menggeser fungsi pengeluaran ($C + I + G$) serta pengeluaran ($I + G$) pada gambar 2. (a) dan (b) keatas Tingkat pendapatan keseimbangan. Setelah mengalami proses penggandaan pendapatan-pengeluaran. naik menjadi Y_1 , yang bersesuaian dengan tingkat suku bunga r_1 . berdasarkan pada kurva permintaan investasi serta persilangan Keynesian atau keseimbangan investasi-pengeluaran pemerintah dengan tabungan-pajak. kita dapat mencoba mencari pendapatan keseimbangan yang terjadi pada berbagai tingkat suku bunga Ini merupakan kurva IS. (Drs Faded Wijaya, M M A 1996:33)

Setiap teori mencoba menerangkan bekerjanya berbagai kekuatan yang menyebabkan perubahan, mencoba merumuskan berbagai hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Sudah barang tentu haruslah dilakukan imajinasi serta penyederhanaan variabel- variabel tersebut, karena di dunia nyata kaitan serta hubungan dan Saling mempengaruhi antara

begitu banyak variabel adalah kompleks hingga percobaan untuk menggambarkan selengkap mungkin variabel-variabel serta hubungannya menyebabkan teori tersebut kehilangan esensinya dimana hubungan antar variabel menjadi kurang dan sulit dimengerti. Sudah barang tentu ada beberapa variabel pokok dan penting, dan disinilah letak penggambaran serta penyederhanaan teori dalam usaha menggambarkan dunia nyata.

Untuk menganalisisnya pun diperlukan serangkaian anggapan-anggapan. Oleh karena itu teori selalu mendasarkan pada suatu model yang menurutnya dianggap cukup gampang dan enak untuk menganalisisnya dan cukup dapat menggambarkan secara memuaskan sampai batas tertentu situasi keadaan dunia nyata yang kita inginkan. Perumusan hubungan berbagai variabel ini secara lengkap, meskipun juga bisa sangat sederhana bentuknya, bisa dinamakan model Suatu teori mungkin menonjolkan suatu aspek atau variabel dan agak mengabaikan variabel atau aspek yang lain. begitu pula sebaliknya dengan teori yang lain Karena itu hubungan teori yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi agak atau bahkan bertentangan karena perbedaan arah penekanan, anggapan ataupun variabelnya.

Secara makro perekonomian suatu negara dapat dikatakan terdiri dari 3 (tiga) jenis pasar yaitu:

- 1) Pasar Barang.
- 2) Pasar Uang. dan
- 3) Pasar Faktor Produksi Khususnya Faktor Tenaga kerja

Pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual atau pertemuan antara permintaan dan penawaran dan disitulah terbentuk harga keseimbangan Jadi harga keseimbangan adalah harga yang di setujui oleh pembeli dan penjual bersama-sama⁵ dan di pasar faktor produksi akan terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran faktor produksi. Di pasar barang akan ditemui harga barang, kerja akan di temui harga tenaga kerja yaitu tingkat upah.

⁵ ibid

Sekarang kita bicarakan satu per satu tentang pembicaraan tentang masing-masing jenis pasar tersebut

D. KESEIMBANGAN DI PASAR UANG

Pasar uang

Adalah pertemuan antara perini ntaan dan penawaran akan uang, yang akan ditemui harga uang yaitu bunga. Sebagian masyarakat mengalaini kesulitan karena kekurangan persediaan sarana pertukaran yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan menurunkan perasaan dan semangat kerjasama dalam masyarakat. khususnya dalam hubungan kerjasama (gotong-royong) di bidang sosial ekonoini di antara masyarakat di mana mereka bersaing untuk memperoleh uang yang sediki jumlahnya, dengan kemungkinan akan mengakibatkan meningkatnya kejahatan, kekerasan, dan menurunnya moral masyarakat. Salah satu upaya pemecahan adalah dengan mengupayakan “barter 3-arah” (pertukaran barang) di pasar dengan menerbitkan Uang Pasar.

Seiringdengan banyaknya kebutuhan untuk mendapatkan uang, maka muncullah Pasar uang yang merupakan tempat pertemuan antara perini ntaan akan uang dan penawaran akan uang yang dapat menentukan tinggi rendahnya harga uang yaitu tingkat harga Apabila jumlah uang yang diini nta sama dengan Jumlah uang yang ditawarkan. maka terjadilah apa yang disebut dengan keseimbangan tingkat bunga di pasar uang.

Permintaan uang menurut Keynes di bedakan menjadi perini ntaan akan uang untuk transaksi, berjaga-jaga dan untuk spekulasi Permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga di pengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan perini ntaan uang untuk spekulasi di pengaruhi oleh tingkat suku bunga Oleh karena itu krta telah mebuliskannya sebagai

$$M1 = f(Y) \text{ dan } M2 = f(i),$$

Dimana:

M1 = perini ntaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga

M_2 = perini ntaan uang untuk spekulasi

Y = pendapatan nasional

i = tingkat bunga

Selanjutnya di sisi penawaran uang ⁶, Telah kita ketahui pula bahwa jumlah uang kart tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sedangkan jumlah uang giral di pengaruhi secara positif oleh tingkat bunga. Akibatnya semakin tinggi tingkat suku bunga akan semakin banyak jumlah uang giral yang beredar, dengan sendirinya kan semakin besar pula jumlah uang yang beredar.

Kita juga telah menemukan hubungan antara peningkatan dalam Jumlah uang untuk keperluan transaksi dengan tingkat pendapatan nasional, yaitu hubungannya adalah positif; yang berarti apabila jumlah uang yang dinini nta untuk transaksi meningkat, maka tingkat pendapatan nasional akan meningkat juga.

Di samping itu kita mengetahui pula bahwa jumlah uang yang beredar hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga serta untuk spekulasi Oleh karena itu apabila tingkat bunga turun, maka jumlah uang yang diini nta untuk keperluan spekulasi akan meningkat dan jumlah uang untuk transaksi dan berjaga-jaga turun Dengan sendirinya turunnya jumlah uang yang diini nta untuk transaksi dan berjaga-jaga ini menyebabkan pendapatan nasional juga turun karena transaksi berkurang.

Dari hal diatas tampak ada hubungan secara tidak langsung antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. yang menunjukkan adanya hubungan yang positif, yaitu apabila tingkat bunga turun, maka pendapatan nasional juga turun. dan apabila tingkat bunga naik pendapatan nasional juga akan naik Hubungan inilah yang disebut dengan fungsi LM dan kalau di gambarkan sebagai kurva LM dengan sumbu horisontal menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga.

⁶ Ada dua jenis uang yang ada dalam perekonoini an yaitu uang kartal dan uang giral.

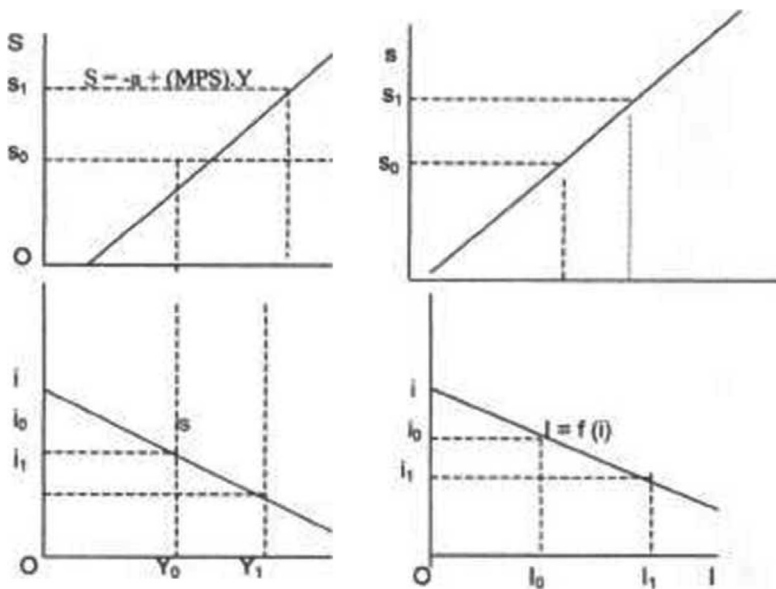
Jadi sekarang kita sudah mengenal fungsi LM kurva LM yaitu suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. dimana terdapat keseimbangan di pasar uang, artinya perini ntaan akan uang sama dengan penawaran akan uang Adapun bentuk kurva LM sangat di pengaruhi oleh bentuk kurva perini ntaan uang untuk spekulasi ini hanya di kenal oleh skeynes, sedang kaum klasik tidak mengenal perini ntaan akan uang untuk spekulasi. Hubungan antara tingkat bunga dan jumlah uang yang diini nta untuk spekulasi sifatnya negatif. namun ada keadaan-keadaan tertentu yang perlu mendapatkan pembicaraan secara khusus.

Pada saat tingkat bunga sangat tinggi, orang pada umumnya akan merasa senang untuk tidak memegang uang sama sekali untuk keperluan spekutasi Jumlah uang tunai yang di pegang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga saja. Hal Ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa dengan membeli surat berharga dalam bentuk obligasi atau memegang surat deposito berjangka, pemegang surat berharga akan mendapatkan keuntungan yang berupa penerimaan hasil bunga yang tinggi; sehingga semua uang untuk keperluan spekulasi sudah seluruhnya di ubah menjadi surat berharga, uang yang diini nta hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga; pada saat itu tingkat bunga sangat tinggi Ini merupakan situasi yang sesuai dengan kondisi klasik.

Keadaan khusus lainnya ialah apabila tingkat bunga menjadi sangat rendah. Ini berarti para pemegang surat berharga tidak lagi tertarik untuk menyimpan surat berharga karena penghasilan yang di peroleh dari surat berharga itu boleh di katakan rendah sekali dan tidak ada artinya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa sesungguhnya tidak ada bedanya antara memegang surat berharga ataupun memegang uang tunai. Oleh karena itu pada tingkat bunga yang sudah begitu rendah perini ntaan akan uang untuk kepentingan spekulasi menjadi elastis sempurna. Keadaan tersebut diatas dapat digambarkan pada gambar 4

Dalam gambar 4 perangkat Keynes ditemukan pada tingkat bunga yang rendah yaitu i_0 dimana kurva perini ntaan akan uang untuk spekulasi bersifat elastis sempurna dan kondisi klasik di temukan pada tingkat bunga i_1 keatas dimana pada saat itu kurva perini ntaan akan uang untuk spekulasi inelasti sempurna.

Selanjutnya kita akan mencoba menurunkan kurva LM dengan menggunakan empat kuadran atas dasar keseimbangan antara perini ntaan akan uang dan penawaran akan uang sehingga menjaini keseimbangan di pasar uang. Kita mulai dengan melihat kuadran tenggara dimana di gambarkan hubungan antara tingkat bunga dan perini ntaan akan uang untuk spekulasi. Sumbu horisontal menunjukkan jumlah uang yang diini nta untuk spekulasi, dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga kemudian pada kuadran timur laut di lukiskan hubungan jumlah uang yang diini nta untuk spekulasi pada sumbu horizontal dan jumlah uang yang diini nta untuk transaksi pada sumbu vertical. Jumlah uang yang beredar harus sama dengan Jumlah uang yang diini nta untuk transaksi dan berjaga-jaga dan jumlah uang yang diini nta untuk spekulasi Kalau jumlah uang yang diini nta untuk spekulasi sama dengan nol, berarti semua uang yang di pakai untuk keperluan transaksi dan kita mendapatkan titik A pada sumbu vertikal dan kalau perini ntaan akan uang untuk transaksi sama dengan nol, berarti untuk semua uang yang ada hanya di pakai untuk keperluan spekulasi dan kita memperoleh titik B pada sumbu horisontal dan kalau titik A dan titik B itu di hubungkan dengan garis lurus maka kita mendapatkan garis batas alokasi yang menunjukkan beberapa jumlah uang yang dipakai untuk transaksi dan beberapa yang di pakai untuk spekulasi.



Gambar 3

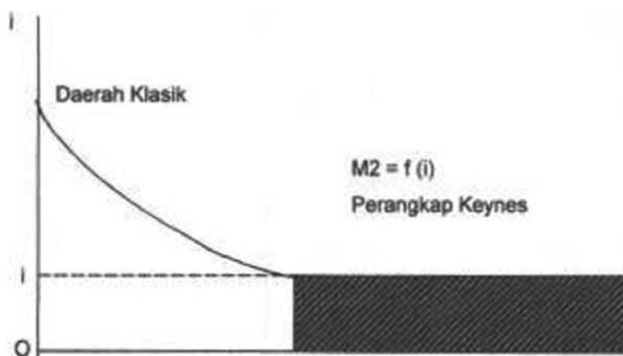
Keseimbangan Pasar Barang-Kurva IS

Selanjutnya kuadran barat laut di pakai untuk menunjukkan hubungan antara jumlah uang untuk keperluan transaksi (pada sumbu vertikal) dan tingkat pendapatan nasional (pada sumbu horisontal), Hubungan itu sesungguhnya sudah di ketahui terlebih dahulu dengan fungsi perini ntaan uang untuk transaksi yaitu $M1 = f(Y)$, ini salnya $M1 + 0.5 Y$. dengan mengetahui jumlah uang yang di pakai untuk transaksi, akan dengan mudah di ketahui tingkat pendapatan nasional.

Kemudian pada kuadran barat daya di lukiskan hubungan antara tingkat bunga pada sumbu vertikal dan tingkat pendapatan nasional pada sumbu horisontal.

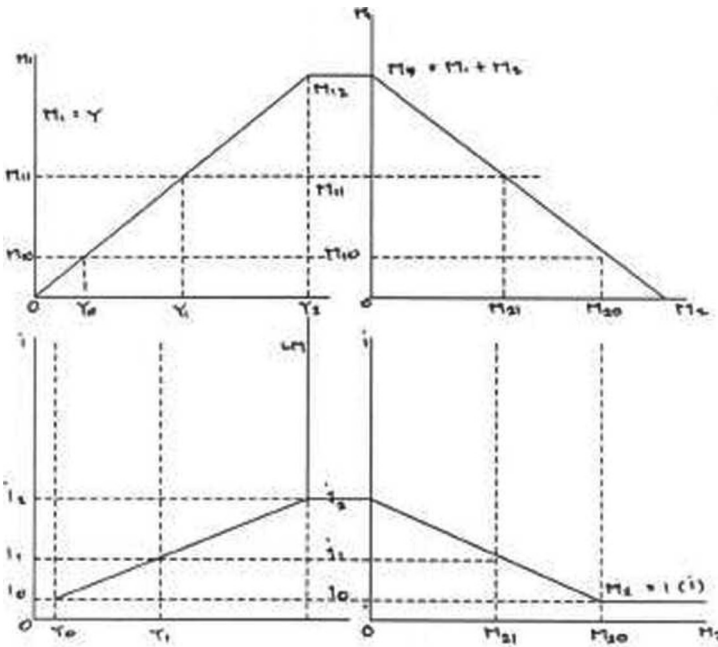
Dengan menggunakan diagram kuadran itu kita akan dapat menggambarkan kurva LM sebagai berikut (gambar 5). kalau kita mulai dengan kuadran tenggara, pada tingkat bunga i_0 kita akan mengetahui besarnya uang yang diini nta untuk spekulasi sebesar M_{20} karena kita telah mengetahui fungsi perini ntaan akan uang untuk spekulasi terlebih dahulu dari titik M_{20} kita

tarik garis pembantu vertikal kediagram pada kuadran timur laut dan kita dapatkan titik M20 terus kita tarik garis vertikal sampai memotong garis alokasi dan perpotongan itu kita tarik garis horisontal sampai memotong sumbu vertikal dan krta temukan titik M10. dari tibk ini kita tarik garis pembantu kekuadran barat laut dan memotong kurva tabungan dan dan perpotongan itu kita tarik garis bantu tegak lurus ke bawah untuk menemukan tingkat pendapatan nasional pada saat jumlah uang tunai yang diini nta untuk transaksi setinggi M10 yaitu YO. dari titik itu kita tarik garis pembantu ke kuadran barat laut dan memotong kurva tabungan dan dan titik perpotongan itu kita tarik garis bantu tegak lurus ke bawah untuk menemukan tingkat pendapatan nasional pada saat jumlah uang tunai yang diini nta untuk transaksi setinggi M10 yaitu YO dan titik itu kita tarik garis pembantu tegak lurus ke kuadran barat daya dan di temukan titik Yo Kemudian dari kuadran tenggara mulai dan titik iO di tarik garis perpotongan secara horisontal ke kiri ke kuadran barat daya guna mendapatkan titik iO, Kita menemukan perpotongan antara kedua garis tersebut dan kita beri nama titik E dengan menggunakan cara yang sama ini salnya kita mulai dengan tingkat bunga H pada kuadran tenggara. kita nantinya dapat menemukan titik F pada kuadran barat daya. Kalau kita menghubungkan antara titik E dan titik F pada kuadran barat daya itu kita akan memperoleh kurva LM



Gambar 4.

Perini ntaan uang Untuk Spekuiasi



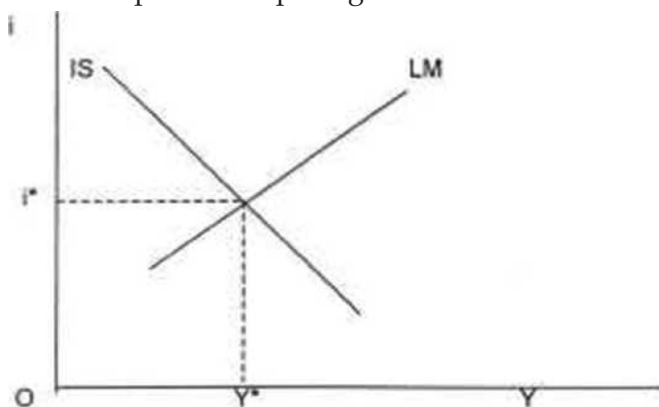
Gambar 5

Sebelumnya telah di katakan bahwa bentuk kurva LM akan tergantung pada kurva perini ntaan akan uang untuk spekulasi Apabila pada tingkat bunga tertentu perini ntaan akan uang untuk spekulasi menunjukkan adanya perangkat keynes atau di sebut juga perangkat likuiditas, maka kurva LM juga menunjukkan adanya perangkat likuiditas tersebut Kemudian apabila kurva perini ntaan akan uang untuk spekulasi menunjukkan adanya kondisi klasik yang nantinya disebut juga sebagai daerah klasik kurva LM juga akan menunjukkan adanya daerah klasik Hanya saja kurva perini ntaan akan uang untuk spekulasi mempunyai lereng yang negatif. sedangkan kurva LM mempunyai lereng yang positif

E. KESEIMBANGAN PASAR BARANG DAN PASAR UANG

Kemudian kalau kita mempertimbangkan baik pasar barang maupun pasar uang bersama-sama maka kita akan dapat menemukan apa yang kita sebut dengan keseimbangan umum arti-

nya keadaan keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang maupun pasar uang bersama-sama. Ada dua kekuatan yang sesungguhnya bertentangan; yaitu kekuatan di pasar barang berlawanan dengan kekuatan di pasar uang, sebagai contoh apabila terjadi kenaikan tingkat bunga maka dan sudut pasar barang akan dapat kekuatan yang mengurangi pengeluaran investasi, sehingga akan menekan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan disudut pasar uang dengan semakin tingginya tingkat bunga, jumlah uang yang di pakai untuk transaksi meningkat dan ini mendorong pendapatan nasional untuk meningkat pula. Dengan dua kekuatan yang tarik- menarik ini nantinya akan di ketemukan suatu positif keseimbangan yang menghasilkan keseimbangan tingkat bunga dan keseimbangan tingkat pendapatan nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada gambar 6



Gambar 6
Keseimbangan antara Pasar Barang dan Pasar Uang

Fada gambar 6 sumbu horisontal menunjukkan besarnya tingkat pendapatan nasional dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga Kurva IS yang mewakili pasar barang berpotongan dengan kurva LM yang mewakili pasar uang, Perpotongan kedua kurva itu menghasilkan keseimbangan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga, masing-masing pada Y^* dan I^* .

Secara matematis kita dapat pula mendapatkan kurva LM yaitu apabila kita mengetahui hal-hal berikut :

Jumlah uang beredar $M_s = 200$ ini liar rupiah

Jumlah uang yang diminta untuk transaksi $M_1 = 0,25 Y$

Jumlah uang yang diminta untuk spekulasi $M_2 = 135-600 i$

Maka LM di ketemukan apabila $M_s = M_d$, atau

$$200 = 0,25 Y + 135-600 i$$

$$Y = 4 (65 + 600 i)$$

$$= 260 + 2400 i$$

Jadi fungsi LM itu adalah $Y = 260 + 2400 i$

Dengan diini likinya kurva IS dan kurva LM atau fungsi IS dan fungsi LM, maka kita sekarang meini liki alat analisis yang cukup bagus dan kuat guna memperkirakan apa yang akan terjadi apabila terdapat perubahan-perubahan dalam variabel ekonomi , khususnya mengenai keadaan suku bunga dan tingkat pendapatan nasional. Sebagai ini sal kalau terjadi tambahan jumlah uang beredar dalam perekonoini an. Bagaimana dampaknya terhadap tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan, dengan tambahan jumlah uang beredar maka hal ini akan menggeser kurva LM ke kanan, dan kurva IS tetap sehingga titik perpotongan yang baru akan menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi sebesar Y_1 dan tingkat bunga keseimbangan turun menjadi, sebaliknya atau jumlah uang beredar di kurangi bank sentral maka yang akan tejadi adalah tingkat pendapatan nasional menurun dan tingkat bunga meningkat.

Bagaimana kalau sekarang pemerintah meningkatkan anggaran belanja negara Hal ini akan mempengaruhi pasar barang sehingga kurva IS akan bergeser kekanan, dan kurva LM tetap Akibatnya tingkat pendapatan nasional akan meningkat dan tingkat bunga akan meningkat pula Tetap perlu di sadari disini bahwa peningkatan pendapatan nasional tidak lagi sebesar koefisien pengganda di kaitkan dengan besarnya perubahan pengeluaran pemerintah, melainkan akan lebih kecil dan itu Hal ini karena peranan pasar uang sudah mulai di pertimbangkan

dalam analisis kita Disini di katakan terjadi 'crowding out' , yaitu peningkatan pendapatan nasional karena tambahnya pengeluaran pemerintah di imbangi dengan penurunan pendapatan nasional karena turunnya investasi swasta/ Mengapa hal yang terakhir ini dapat terjadi? Jawabnya ialah karena memang pemerintah dalam meningkatkan pengeluarannya itu. harus mendapatkan sumber penerimaan negara yang biasanya dengan menaikkan dana dan sektor swasta Ini salnya dengan cara menjual obligasi negara Agar obligasi negara itu menarik masyarakat, maka harus menawarkan tingkat bunga obligasi yang tinggi. Dengan sendirinya hal ini akan mendorong adanya penurunan investasi swasta, dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat pendapatan nasional.

Sebaliknya kalau pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya dari masyarakat dengan tarif lebih tinggi Dampak dan penarikan pajak yang lebih banyak ini adalah penurunan dalam pengeluaran konsumsi masyarakat Sehingga akan menekan permintaan agregat Oleh karena itu hal ini akan menggeser kurva IS ke kiri dan jelas menghasilkan perpotongan dengan kurva LM pada suatu titik yang menunjukkan tingkat pendapatan nasional yang lebih rendah dan tingkat bunga keseimbangan yang lebih rendah pula Dampak perubahan berbagai variabel berikut ini dapat di coba sendiri oleh para mahasiswa. ini salnya kenaikan besarnya deking Bank-bank umum, perubahan politik diskonto pemerintah memberi surat berharga di pasar modal, hasrat menabung meningkat dan sebagainya.

Sekarang kita akan mencoba menemukan tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. Keseimbangan Dengan mempergunakan fungsi IS dan fungsi LM, maka kedua variabel itu akan dapat Kita ketahui dengan mudah. Kita gunakan lagi fungsi IS dan fungsi LM diatas yaitu telah kita temukan ⁷

$$\text{Fungsi IS} \quad : Y = 650 - 1500i$$

$$\text{Fungsi LM} \quad : Y = 260 + 2400i$$

⁷ Nopirin, Ekonoini moneter, buku II, Edisi ke 1, 1988, hal 64-73

Dalam keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. maka $IS = LM$. atau

$$650 - 1500i = 260 + 2400i$$

$$3900i = 390$$

$$i = 0.10 \text{ atau } 10\%$$

dengan telah di ketemukannya tingkat bunga keseimbangan, maka tingkat pendapatan nasional keseimbangan dapat diketemukan pula yaitu :

$$\begin{aligned} Y &= 60 - 1500i \\ &= 650 - 1500(0.10) \\ &= 650 - 150 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Jadi tingkat bunga keseimbangan di ketemukan setinggi 10 % per tahun dan tingkat pendapatan nasional di ketemukan setinggi 500 ini liyar rupiah. Deini kan pula kita akan dapat menemukan tingkat investasi pada saat itu, yaitu ;

$$\begin{aligned} I &= 125 - 600i \\ &= 125 - 600(0.10) \\ &= 125 - 60 \\ &= 65 \end{aligned}$$

demikian pula tingkat tabungan pada saat itu ialah :

$\begin{aligned} S &= -100 + 0.25(Y - 20 - 0.2Y) \\ &= -100 + 0.25(500 - 20 - 100) \\ &= -100 + 95 \\ &= -5 \end{aligned}$	<p>dan tingkat konsumsi pada saat itu ialah :</p> $\begin{aligned} C &= 100 + 0.75(Y - 20 - 0.2Y) \\ &= 100 + 0.75(500 - 20 - 100) \\ &= 100 + 285 \\ &= 385 \end{aligned}$
--	---

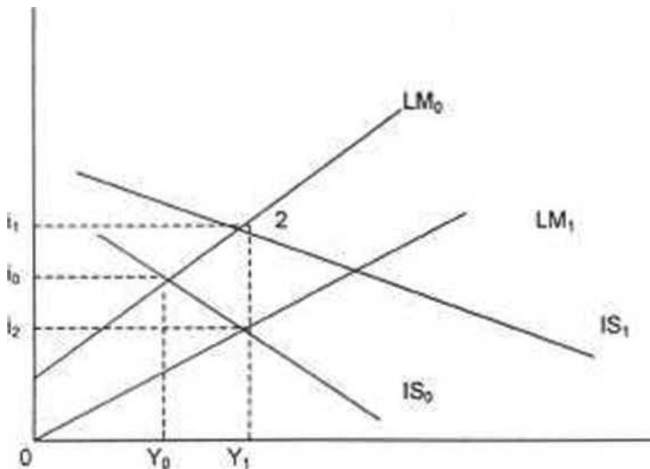
Dalam keadaan keseimbangan pendapatan nasional $I + G = S + T$ atau $65 + 50 = -50 + 120$ oleh karena itu sekarang dapat dikatakan adanya keseimbangan umum dalam perekonomian yang di tunjukkan oleh adanya keseimbangan tingkat tingkat bunga baik di pasar barang, maupun pasar uang, serta keseimbangan tingkat pendapatan nasional baik di pasar barang maupun di pasar uang.

Tingkat keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat bunga ini dapat di ubah dengan sengaja oleh pemerintah sebagai pengendali perekonomian dengan cara menggunakan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersamaan dalam keadaan keseimbangan umum ini besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang terjadi akan menentukan pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i), keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang

Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang menjai n keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang dapat dilakukan dengan menentukan titik potong antara kurva IS dan kurva LM . Perhatikan grafik pada gambar 7.

Ini salnya keadaan sektor riil (pasar barang di gambarkan oleh kurva Iso dan keadaan di sektor moneter (pasar uang) digambarkan oleh kurva Lmo



Gambar 7

Keseimbangan Umum Pasar Barang dan Pasar Uang

Tingkat bunga dan besarnya pendapatan nasional yang di peroleh dan potongn kurva ISO dan kurva LMo adalah tingkat

bunga (i_Q) keseimbangan dan pendapatan nasional (Y_0) keseimbangan.

Apabila pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansi (ini salkan pengeluaran pemerintah naik maka kurva IS bergeser kekanan atas menjadi IS_1 . keseimbangan pada perekonomian ini akan berubah. Tingkat bunga keseimbangan naik menjadi i_1 dan pendapatan nasional keseimbangan naik menjadi Y_1 keadaan ini akan sebaliknya apabila pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang kontraktif (ini salkan mengurangi pengeluaran pemerintah)

Apabila pemerintah melakukan kebijakan moneter yang ekspansi (jumlah uang yang beredar naik). maka kurva LM bergeser ke kanan bawah menjadi LM_1 , akibat dari adanya kebijakan ini keseimbangan pada perekonomian ini akan berubah. Tingkat bunga keseimbangan akan turun menjadi i_2 dan pendapatan nasional akan menjadi Y_2 keadaan ini akan sebaliknya apabila pemerintah melakukan kebijakan moneter yang kontraktif.

Untuk menentukan keadaan keseimbangan baik di pasar uang dan di pasar barang dapat dilakukan dengan mencari titik potong antara persamaan kurva IS dan persamaan kurva LM Caranya adalah dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut.

Di ketahui

$$m_s = 500$$

$$m_d = m_1 + m_2$$

$$m_1 = 0.2 Y$$

$$m_2 = 428 - 400i$$

$$C = 100 + 0.75 Y$$

$$I = 60 - 200i$$

Dari persamaan di atas di peroleh persamaan yang menunjukkan keseimbangan disektor riil dan disektor moneter sebagai berikut:

Keseimbangan disektor riil :

$$\begin{aligned}
Y &= C + I \\
&= 100 + 0,75 Y + 60 - 200 i \\
Y - 0,75 Y &= 160 - 200 i \\
Y - 0,25 Y &= 160 - 200 i \\
Y &= 640 - 800 i
\end{aligned}$$

Jadi persamaan kurva IS adalah $Y = 640 - 800 i$

Keseimbangan disektor moneter

$$\begin{aligned}
m_s &= m_d \\
500 &= 0,2 Y + 428 - 400 i \\
500 - 428 + 400 i &= 0,2 Y \\
0,2 Y &= 72 + 400 i \\
Y &= 360 + 2000 i
\end{aligned}$$

Dan persamaan diatas diperoleh persamaan kurva LM : $Y = 360 + 2000 i$

Seperti yang telah dikemukakan diatas, untuk menentukan titik keseimbangan pada dua pasar tersebut adalah dengan cara mensubstitusikan kedua persamaan tersebut diperoleh tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional yang menunjukkan keseimbangan, baik di pasar barang (sektor riil) maupun dipasar uang (sektor moneter) sebagai berikut

$$\begin{aligned}
IS \quad Y &= 640 - 800 i \\
LM \quad Y &= 360 + 2000 i
\end{aligned}$$

Pendapatan nasional keseimbangan, baik di pasar barang maupun di pasar uang (keseimbangan umum), pendapatan nasional dan tingkat bunga yang terjadi di kedua pasar tersebut adalah sama Jadi jika Y di pasar uang sama dengan Y di pasar barang maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
IS &= LM \\
640 - 800 i &= 360 + 2000 i \\
2800 i &= 280
\end{aligned}$$

$$I = \frac{280}{2800} = 0.1 \text{ atau } 10\%$$

Tingkat bunga keseimbangan umum adalah 10%

$$\begin{aligned} Y &= 360 + 2000 i \\ &= 360 + 2000 (0.1) \\ &= 360 + 200 \\ Y &= 560 \end{aligned}$$

Pendapatan nasional keseimbangan umum sebesar 560 dan tingkat bunga keseimbangan (leq) sebesar 10 % adalah pendapatan nasional dan tingkat bunga menjaini n keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang Atau dengan kata lain, keseimbangan umum terjadi pada pendapatan nasional sebesar 560 dan tingkat bunga sebesar 10 %. Keadaan ini dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik seperti pada gambar 8

Apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah G sebesar Rp 20 ini lyar, maka kurva IS akan bergeser kekanan, menjadi :

Persamaan kurva LM tidak berubah karena diasumsikan bahwa perubahan pada sektor riil tidak berdampak terhadap kondisi di sektor moneter. Perlu diingat bahwa Ini hanya asumsi yang digunakan dalam analisis ini Dalam dunia nyata, kondisi Ini sangat sulit untuk diyakini. karena basanya perubahan di sektor riil akan berpengaruh terbadap sektor moneter dan sebaliknya.

Untuk mencan titik keseimbangan yang baru (titik A) maka kita substitusikan persamaan (9) ke persamaan (8):

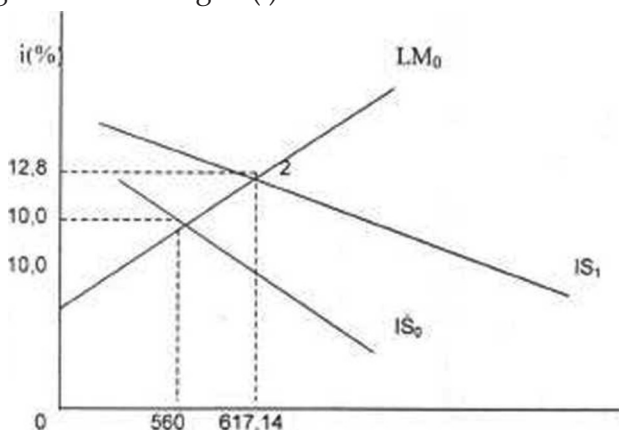
$$\begin{aligned} Y &= 360 + 2000 \\ &= 360 + 2000 (0,90-0.00125Y) \\ &= 360 + 1800-2,5 Y \\ 2.5 Y &= 2160 \\ Yq &= 617.14 \end{aligned}$$

Tingkat bunga keseimbangan

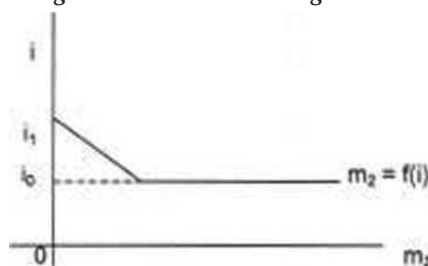
$$i = 0,90 - 0,00125(617,14)$$

$$= 0,128$$

Jadi tingkat keseimbangan (i) adalah 12,8%



Gambar 8
Keseimbangan Umum Pasar Barang dan Pasar Uang



Gambar 9
Kurva perini ntaan uang untuk spekulasi menurut Keynes

Kebijakan fiskal yang ekspansif, yakni pemerintah menaikkan pengeluarannya akan menyebabkan pendapatan nasional dan tingkat bunga mengalami kenaikan.

Seandainya pemerintah menambah jumlah uang yang beredar (m_s) dan 500 menjadi 550, maka kebijakan moneter yang ekspansif ini akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan sehingga keseimbangan akan terjadi di titik B.

Mencari kurva LM yang baru (LINI) :

$$M_3 = 550$$

$$M_d = m_1 + m_2$$

$$= 0.2 Y + 423 - 400i$$

$$550 = 0.2Y + 428 - 400i$$

$$550 - 428 + 400i = 0.2 Y$$

$$0.2 Y = 122 + 400i$$

$$Y = 610 + 2000i$$

$$\text{Kurva LM: } i = -0.305 + 0.0005 Y$$

$$\text{Kurva LM: } i = 0.305 + 0.0005 Y$$

Dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh Y_{eq} dan i_{eq} pada titik keseimbangan B.

$$Y = 640 - 800(-0.305 + 0.0005 Y)$$

$$1.4 Y = 884$$

$$Y = 631.43$$

Dan kurva IS : $i = 0.80 - 0.00125 Y$

$$= 0.80 - 0.00125(631.43)$$

$$= 0.80 - 0.789 \text{ atau } 1.1\%$$

Tingkat bunga keseimbangan (i_{eq}) menjadi 1,1%

Jadi, dan contoh diatas, kita dapat melihat perbedaan dampak antara kebijakan fiskal dan kebijakan ekspansif. Pada kebijakan fiskal yang ekspansif dampaknya adalah kenaikan tingkat bunga dan pendapatan nasional, sedangkan pada kebijakan moneter yang ekspansif dampaknya adalah penurunan tingkat bunga dan kenaikan pendapatan nasional. Apabila kebijakan fiskal yang ekspansif digunakan bersama-sama dengan kebijakan moneter yang ekspansif, maka dampaknya adalah kenaikan tingkat pendapatan secara lebih besar daripada apabila kebijakan moneter dan kebijakan fiskal digunakan sendiri-sendiri. Akan tetapi dampaknya terhadap tingkat bunga tidak jelas, apakah akan naik ataukah turun. Naik atau turunnya tingkat bunga tersebut tergantung pada dua factor, yaitu :

- 1) Kekuatan relatif kedua kebijakan tersebut, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
- 2) Kepekaan kurva IS dan kurva LM terhadap tingkat bunga.

F. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar uang sangat dipengaruhi terhadap stabilitas perekonomian disuatu negara, karena berkaitan dengan tercapainya target pemasukan dana untuk pembiayaan yang telah ditentukan.

Keseimbangan pasar uang sangat dipengaruhi oleh perni ntaan dan penawaran terhadap uang yang dinyatakan dengan harga uang yang disebut bunga. Semakin besar tingkat bunga maka bagi investor akan sangat senang untuk menginvestasikan uangnya di suatu wilayah tertentu sedang bagi peini njam maka semakin rendah bunga maka dia akan semakin bersemangat untuk melakukan peini njaman untuk mengembangkan usahanya.

Yang perlu diingat adalah bila keesimbangan pasar uang tidak terjaga maka harga uang akan bisa menjadi melambung lebih tinggi atau sebaliknya menjadi lebih rendah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Guritno Mangku Subroto Al-Gifari, Taori Ekonomt Makro. STIE YKPN, 1998
- Drs M Suparmoko. M, Ph. D. dan Maria R. Suparmoko, S. E M A, Ekonoini ka Makro. S.E.
- M A.IKAPI. BPFE, Yogyakarta. 2000
- Dr Faned W;aya M M A . Ekonoini ka Makro. Aneka Model Baku. BPFE-Yogyakarta, 1999

